



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUN DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berakar pada nilai-nilai Pancasila dan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia, daya saing dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memecahkan prioritas pembangunan melalui riset dan inovasi, dan mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai masalah prioritas di lingkungan sosial masyarakat diperlukan pemenuhan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan penajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila;

- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti beberapa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2026-2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Riset dan Inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2030 disusun berdasarkan:

- a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD;
- b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan;
- c. isu-isu strategis yang berkembang;
- d. kebijakan nasional; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2030 digunakan untuk memberikan arahan pelaksanaan Program Riset dan Inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat Pendahuluan;
 - b. bab II memuat Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. bab III memuat Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. bab IV memuat Analisis Kesenjangan;
 - e. bab V memuat Strategi Riset dan Inovasi Daerah;
 - f. bab VI memuat Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. bab VII memuat Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - h. bab VIII memuat Penutup.
- (2) Uraian dari sistematika Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.

- (3) Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 22 Juni 2026

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

BUDIONO WIRAWAN

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HENDRA KUSUMA, S.H.

NIP. 19830930 201001 1 015

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DI DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2026-2030

**RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026-2030**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah- Nya, dimana karena-Nya kami bisa menyelesaikan Laporan Pendahuluan untuk **Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030** tepat pada waktunya. Dimana Laporan Pendahuluan ini merupakan produk awal dari rangkaian kegiatan penyusunan, dengan demikian laporan ini merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari produk-produk selanjutnya.

Secara garis besar Laporan Akhir ini berisi pendahuluan, gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di daerah, tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah, analisis kesenjangan, strategi ekosistem riset dan inovasi daerah, peta jalan, program indikatif serta penutup.

Penyusun sadar laporan ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu, penyusun selalu menerima saran dan masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan akhir nanti. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Juni, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN	I-1
1.2.1 Maksud dan Tujuan	I-1
1.2.2 Sasaran.....	I-2
1.3 RUANG LINGKUP	I-2
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	I-2
1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	I-2
1.4 LANDASAN HUKUM	I-3
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	I-3
BAB I PENDAHULUAN.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	I-3
BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	I-4
BAB IV ANALISIS KESENJANGAN	I-4
BAB V STRATEGI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH	I-4
BAB VI PETA JALAN	I-4
BAB VII PROGRAM INDIKATIF.....	I-4
BAB VIII PENUTUP	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DAERAH.....	II-5
2.2 GAMBARAN UMUM KOTA PROBOLINGGO	II-5
2.1.1 Kondisi Geografis.....	II-5
2.1.2 Kependudukan	II-5
2.1.3 Ketenagakerjaan.....	II-6
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-8
2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-14
2.1.6 Usulan Produk Unggulan Daerah (PUD).....	II-18
2.1.7 Usulan Permasalahan Utama Daerah	II-30
2.2 GAMBARAN/ KONDISI RISET DAN INOVASI KOTA PROBOLINGGO II-45	
2.2.1 Sumberdaya Riset dan Inovasi Daerah	II-45
2.2.2 Kelembagaan IPTEK	II-87

2.2.3	Jejaring Riset dan Inovasi Daerah.....	II-88
2.3	PENENTUAN TEMA PRIORITAS.....	II-95
2.3.1	Tema Prioritas PUD.....	II-96
2.3.2	Tema Prioritas Permasalahan Utama Daerah.....	II-96
2.3.3	Tema Riset Dan Inovasi Kota Probolinggo	II-97
2.4	KONDISI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH SAAT INI ..	II-98
2.4.1	Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah saat ini pada setiap PUD yang diusulkan.....	II-98
3.1	Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah saat ini pada Permasalahan Utama Daerah yang diusulkan	II-114
BAB III	TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DAERAH	III-124
3.1	TANTANGAN DALAM PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI DI MASA DATANG	III-124
3.2	PELUANG DALAM PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI DI MASA DATANG	III-125
3.3	KONDISI YANG DIHARAPKAN: EBP DAN EKOSISTEM RID.....	III-126
3.3.1	Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (<i>evidence based policy</i>).....	III-128
3.3.2	Ekosistem RID Tematik Produk Unggulan (PUD)	III-131
3.3.3	Ekosistem RID Tematik Permasalahan Utama Daerah	III-145
BAB IV	ANALISIS KESENJANGAN	IV-156
4.1	KEMAMPUAN MENGHASILKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (<i>Evidence Based Policy</i>)	IV-156
4.2	TEMATIK PRODUK UNGGULAN (PUD)	IV-160
4.2.1	Industri Pengolahan (C).....	IV-160
4.2.2	Industri Kesenian, hiburan, rekreasi (R)	IV-165
4.3	TEMATIK PERMASALAHAN UTAMA DAERAH YANG DIUSULKAN ..	IV-170
BAB V	STRATEGI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	V-184
5.1	STRATEGI MELAKUKAN KAJIAN UNTUK MENGHASILKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (<i>Evidence-Based Policy</i>) ..	V-184
5.2	STRATEGI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)	V-191
5.3	STRATEGI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH UNTUK PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	V-224
BAB VI	PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH	VI-239
6.1	KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (<i>Evidence-Based Policy</i>)	VI-242
6.2	TEMATIK PERMASALAHAN UTAMA DAERAH.....	VI-254
6.3	TEMATIK PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)	VI-285
BAB VII	PROGRAM ADIKTIF	VII-344
7.1	KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (<i>Evidence-Based Policy</i>)	VII-344

7.2	TEMATIK PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)	VII-353
7.3	TEMATIK PERMASALAHAN UTAMA DAERAH.....	VII-407
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-452
8.1	KESIMPULAN	VIII-452
8.2	SARAN	VIII-458

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk per Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2024 II-6

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Kota Probolinggo 2024II-6

Tabel 2. 3 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota ProbolinggoII-7

Tabel 2. 4 Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)II-8

Tabel 2. 5 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024II-10

Tabel 2. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kota ProbolinggoII-11

Tabel 2. 7 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019-2024II-13

Tabel 2. 8 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2019-2023II-14

Tabel 2. 9 Skor IDSD Kota Probolinggo Tahun 2022-2024II-15

Tabel 2. 10 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024II-19

Tabel 2. 11 Hasil Perhitungan Shift Share Ekonomi di Kota Probolinggo..II-21

Tabel 2. 12 Hasil Overlay 3 Analisis (LQ, SS, Tipologi Klassen) Kota ProbolinggoII-24

Tabel 2. 13 Sektor Unggulan Kota ProbolinggoII-25

Tabel 2. 14 Konsep Integrasi Hulu Hilir pada penentuan Produk Unggulan Daerah Kota ProbolinggoII-28

Tabel 2. 15 PUD Kelurahan di Kota ProbolinggoII-29

Tabel 2. 16 PUD Kecamatan di Kota ProbolinggoII-30

Tabel 2. 17 Permasalahan Daerah berdasarkan RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030 Kota ProbolinggoII-30

Tabel 2. 18 Analisis USG terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kota ProbolinggoII-44

Tabel 2. 19 Infrastruktur Riset dan Inovasi di Kota ProbolinggoII-46

Tabel 2. 20 Laporan/Kajian Kota Probolinggo Tahun 2020-2024II-61

Tabel 2. 21 Jumlah dan Peringkat Inovasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024II-68

Tabel 2. 22 Inovasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024II-70

Tabel 2. 23 Persentase Anggaran Riset dan Inovasi Daerah terhadap APBD Kota Probolinggo Tahun 2020-2024II-83

Tabel 2. 24 Kerja Sama Kota Probolinggo dengan Perguruan Tinggi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota Lain.....	II-88
Tabel 2. 25 Klasifikasi PUD Kota Probolinggo	II-99
Tabel 2. 26 Rincian Jumlah NIB Berdasarkan Jenis Industri Pengolahan.....	II-101
Tabel 2. 27 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Industri Pengolahan ...	II-103
Tabel 2. 28 Rincian Jumlah NIB Berdasarkan Jenis Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi.....	II-107
Tabel 2. 29 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi.....	II-109
Tabel 2. 30 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Utama Daerah Kota Probolinggo.....	II-115
Tabel 3. 1 Kondisi yang diharapkan pada Ekosistem Riset dan Inovasi Industri Pengolahan.....	III-132
Tabel 3. 2 Kondisi yang diharapkan pada Ekosistem Riset dan Inovasi Kesenian, Hiburan, Rekreasi	III-139
Tabel 3. 3 Kondisi yang diharapkan pada Ekosistem Riset dan Inovasi terhadap Permasalahan Utama Daerah (Lemahnya Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital)	III-145
Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti.....	IV-157
Tabel 4. 2 Analisis Kesenjangan Ekosistem RID untuk Industri Pengolahan.....	IV-161
Tabel 4. 3 Analisis Kesenjangan Ekosistem RID untuk Industri Kesenian, Hiburan, Rekreasi	IV-166
Tabel 4. 4 Analisis Kesenjangan Ekosistem RID untuk Permasalahan Utama Daerah (Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital)	IV-170
Tabel 5. 1 Permasalahan untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti Kota Probolinggo.....	V-184
Tabel 5. 2 Strategi dan Aksi Konkrit Pengembangan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Only)	V-186
Tabel 5. 3 Permasalahan pada Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Industri Pengolahan dan Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Kota Probolinggo.....	V-192
Tabel 5. 4 Strategi dan Aksi Konkrit Pengembangan PUD Industri Pengolahan	V-195
Tabel 5. 5 Strategi dan Aksi Konkrit Pengembangan PUD Industri Kesenian, Hiburan, Rekreasi	V-209
Tabel 5. 6 Permasalahan pada Setiap Element Riset dan Inovasi Daerah terkait Permasalahan Utama Daerah Kota Probolinggo (Lemahnya	

Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital).....	V-224
Tabel 5. 7 Strategi dan Aksi Konkrit Permasalahan Utama Daerah Kota Probolinggo (Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital)	V-226
Tabel 6. 1 Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026-2030.....	VI-239
Tabel 6. 2 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Riset dan Inovasi untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy) Tahun 2025-2027	VI-242
Tabel 6. 3 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Riset dan Inovasi untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy) Tahun 2028-2030	VI-246
Tabel 6. 4 Peta Jalan Sesuai Program Prioritas RPJMD Kota Probolinggo yang Memerlukan Dukungan Riset dan Respon terhadap Isu Strategis RIDA Periode Tahun 2025-2030	VI-251
Tabel 6. 5 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Riset dan Inovasi Daerah pada Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah Karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital untuk Tahun 2025-2027.....	VI-255
Tabel 6. 6 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Riset dan Inovasi Daerah pada Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah Karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital untuk Tahun 2028-2030.....	VI-269
Tabel 6. 7 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Pengembangan PUD Industri Pengolahan Tahun 2025-2027.....	VI-286
Tabel 6. 8 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Pengembangan PUD Industri Pengolahan Tahun 2028-2030.....	VI-299
Tabel 6. 9 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Tahun 2025-2027	VI-314
Tabel 6. 10 Peta Jalan dan Sarana Strategis Pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Tahun 2028-2030	VI-326
Tabel 7. 1 Indikasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah (Kebijakan dalam Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah yang Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	VII-346
Tabel 7. 2 Program Indikatif Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah	VII-353
Tabel 7. 3 Program Indikatif Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Untuk Permasalahan Utama Daerah (Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital).....	VII-407

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Indeks Gini Kota Probolinggo Tahun 2019-2024II-12

Gambar 2. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2024II-12

Gambar 2. 3 Perbandingan Skor IDSD Pilar Kapabilitas Inovasi Kota
 Probolinggo dan Provinsi Jawa TimurII-17

Gambar 2. 4 Hasil Analisis Shift Share Sektor Ekonomi di Kota ProbolinggoII-
 23

Gambar 2. 5 Klasifikasi Sektor PDRB Kota Probolinggo Berdasarkan Tipology
 Klassen Tahun 2020-2024II-24

Gambar 2. 6 Grafik Jumlah Kajian Kota Probolinggo 2020-2024.....II-67

Gambar 2. 7 Grafik Jumlah Kerja Sama yang dilakukan Pemerintah Kota
 Probolinggo Tahun 2020-2025II-95

Gambar 6. 1 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo Tahun
 2025-2030.....VI-239

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kini, era riset dan inovasi di Indonesia memasuki babak baru dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2021 lalu. Ini diharapkan dapat memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan riset dan inovasi di daerah. Pasal 2 Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah mengamanahkan bahwa riset dan inovasi di daerah diselenggarakan dan disinergikan oleh badan riset dan inovasi daerah (BRIDA) provinsi dan kabupaten/kota. Meski demikian, Pasal 2 Ayat (3) Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023 menyebutkan penyelenggaraannya dapat disinergikan dengan kemitraan bersama lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan/atau lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Bappeda Litbang mempunyai tugas untuk melakukan riset, baik yang sifatnya untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah maupun riset terhadap potensi- potensi unggulan daerah yang dapat ditingkatkan daya dan hasil gunanya.

Seiring dengan tuntutan pembangunan, maka program pembangunan ke depan tidak lagi dapat dirumuskan berdasarkan perkiraan-perkiraan ataupun keinginan semata-mata, melainkan semua harus *evidence-based* yang secara langsung mendukung program Wali Kota Probolinggo terpilih dan sejalan dengan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam lima misi antara lain penguatan kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan, akselerasi penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pemajuan kebudayaan, ekonomi inklusif berbasis potensi lokal daerah yang didukung integrasi ekonomi digital, birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan, serta akselerasi pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Maka dari itu Bappeda Litbang akan menyusun Dokumen Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030 sesuai amanat Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030, yakni untuk memberikan arahan pelaksanaan Program Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi dan daya saing daerah.

Sedangkan tujuannya, yakni:

1. Mengidentifikasi Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi Di Kota Probolinggo;
2. Menganalisis Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo;
3. Menganalisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo;
4. Menyusun Strategi Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo;
5. Menyusun Peta Jalan Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo.

1.2.2 Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030 adalah:

1. Teridentifikasinya Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi Di Kota Probolinggo;
2. Teranalisisnya Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo;
3. Teranalisisnya Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo;
4. Tersusunnya Strategi Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo ;
5. Tersusunnya Peta Jalan Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo.

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang Lingkup Wilayah Kajian ini, yakni Kota Probolinggo.

1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan Kajian ini, yakni:

1. Mengidentifikasi Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi Di Kota Probolinggo.
2. Menganalisis Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo.
3. Menganalisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo.

4. Menyusun Strategi Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo.
5. Menyusun Peta Jalan Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo.

1.4 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030 memperhatikan dan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang terkait, diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
4. Permendagri No 17 Tahun 2016 Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045.
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025.

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penyusunan Laporan Akhir Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030 terbagi menjadi 8 (delapan) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang permasalahan, maksud, tujuan dan sasaran pekerjaan, ruang lingkup lokasi maupun pekerjaan, serta landasan hukum yang mendasari penyusunan Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bab II menguraikan secara umum tentang gambaran umum Kota Probolinggo dan gambaran kondisi riset dan inovasi Kota Probolinggo.

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bab III menguraikan tantangan, peluang dan kondisi yang diharapkan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang di Kota Probolinggo.

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN

Bab IV berisi Analisis kesenjangan kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), analisis kesenjangan pada ekosistem riset dan inovasi daerah Produk Unggulan Daerah (PUD) dan tematik PUD Kota Probolinggo, analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi daerah terhadap permasalahan utama daerah dan tematik Permasalahan Utama Daerah Kota Probolinggo, dan Tematik riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo.

BAB V STRATEGI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Bab V berisi Strategi yang dilakukan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, Strategi Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah Untuk Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD), dan Strategi Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah Untuk Penyelesaian Permasalahan Daerah.

BAB VI PETA JALAN

Bab VI berisi Peta Jalan atau langkah-langkah strategis menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, Peta Jalan atau langkah-langkah strategis untuk pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD), dan Peta Jalan atau langkah-langkah strategis untuk Penyelesaian Permasalahan Daerah

BAB VII PROGRAM INDIKATIF

Bab VII berisi program indikatif menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, program indikatif untuk pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD), program indikatif untuk Penyelesaian Permasalahan Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Bab V berisikan kesimpulan dan saran dalam penyusunan Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025- 2030.

BAB II

Gambaran Umum Dan Kondisi Riset Dan Inovasi di Daerah

2.2 GAMBARAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang berfungsi sebagai pusat dari Wilayah Pengembangan (WP) Probolinggo – Lumajang dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur dan bagian dari tlatah atau kawasan kebudayaan Pendalungan yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Kota Probolinggo berada di daerah tapal kuda Provinsi Jawa Timur tepatnya di antara Kabupaten Probolinggo dan Selat Madura serta menjadi jalur utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Letak Kota Probolinggo sekitar 100 km sebelah tenggara Kota Surabaya. Kota Probolinggo merupakan dataran rendah dengan ketinggian 4-36 meter diatas permukaan laut. Secara astronomis, Kota Probolinggo terletak pada posisi 7°43'41" – 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10 – 113°15 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kota Probolinggo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara	: Selat Madura
Sebelah Timur	: Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
Sebelah Selatan	: Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
Sebelah Barat	: Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 330.2.2/2138/2025, wilayah Kota Probolinggo memiliki luas sebesar 5.519 ha atau 55,197 km² yang terbagi menjadi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kedopok, Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Mayangan, dan Kecamatan Kanigaran. Kecamatan Wonoasih dan Kademangan merupakan kecamatan dengan jarak terjauh dari Ibukota yaitu 6 km, sedangkan kecamatan Mayangan dan Kanigaran hanya berjarak 2 km dari pusat Ibukota.

2.1.2 Kependudukan

Jumlah Penduduk Kota Probolinggo berdasarkan data dari Kota Probolinggo dalam angka 2025 sebanyak 243.746 jiwa. Dengan komposisi laki-laki sebanyak 49,69% dan perempuan sebanyak 50,31%. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Probolinggo pada periode tahun 2020-2024 sebesar 0,25%. Wilayah ini didominasi oleh penduduk usia produktif (15-24 tahun) yaitu sebesar 39.758 jiwa. Berikut

merupakan tabel jumlah penduduk Kota Probolinggo yang terbagi dari 5 kecamatan.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk per Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2020-2024 (%)
Kademangan	44.520	0,13
Kedopok	39.060	1,53
Wonoasih	35.680	-0,05
Mayangan	61.490	-0,7
Kanigaran	62.990	0,7
Total	243.746	0,25

Sumber: Kota Probolinggo dalam Angka, 2025

2.1.3 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan di Kota Probolinggo merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota yang memiliki potensi pada sektor perdagangan, industri, dan pertanian yang cukup berkembang, Kota Probolinggo menawarkan berbagai peluang kerja bagi penduduknya. Selain itu, keberadaan pelabuhan dan lokasi yang strategis di jalur utama Jawa Timur menjadikan kota ini memiliki potensi dalam menarik tenaga kerja dari berbagai daerah. Berikut merupakan data jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kota Probolinggo tahun 2024.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Kota Probolinggo 2024

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
I.	Angkatan Kerja	77.927	51.675	129.602
1.	Bekerja	74.401	49.453	123.854
2.	Pengangguran Terbuka	3.526	2.222	5.748
II.	Bukan Angkatan Kerja	165.960	45.653	62.249
1.	Sekolah	7.085	7.725	14.810

2.	Rumah Tangga	5.972	35.660	41.632
3.	Lainnya	3.539	2.268	5.807
Jumlah/Total		94.523	97.328	191.851

Sumber: Kota Probolinggo dalam Angka, 2025

Tabel 2. 3 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Probolinggo

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase bekerja terhadap Angkatan kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
< SD	32184	--	32184	24,83
SMP	17905	511	18416	13,82
SMA	53707	4648	58355	41,44
Perguruan Tinggi	20058	589	20647	15,48
Jumlah/Total	123854	5748	129602	95,56
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja		Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
< SD	22514		54698	16,78
SMP	16656		35072	9,60
SMA	17498		75853	30,42
Perguruan Tinggi	5581		26228	10,76
Jumlah/Total	62249		191851	67,55

Sumber: Kota Probolinggo dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel yang diatas, jumlah penduduk Kota Probolinggo yang berusia 15 tahun ke atas didominasi oleh angkatan kerja, yakni sebanyak 129.602 orang, dengan mayoritas berstatus bekerja (123.854 orang). Sementara itu, jumlah pengangguran mencapai 5.748 orang. Di sisi lain, terdapat 62.249 orang yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja, dengan sebagian besar perempuan berperan dalam rumah tangga (35.660 orang). Apabila dilihat dari faktor pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dapat diketahui bahwa lulusan SMA masih menjadi dominasi utama terhadap angkatan kerja di Kota Probolinggo dengan prosentase mencapai 41,44 %, sedangkan yang kedua didominasi oleh lulusan SD dengan prosentase mencapai 24,83%.

Dari segi pengembangan potensi Kota Probolinggo, tingginya jumlah angkatan kerja menjadi peluang besar dalam mendukung sektor industri, perdagangan, serta jasa. Pengembangan potensi angkatan kerja yang cukup

tinggi tentunya perlu diimbangi dengan kualitas SDM melalui peningkatkan lulusan pendidikan untuk menciptakan angkatan kerja yang lebih baik dan berkualitas tinggi. Sebagai kota yang memiliki lokasi strategis di jalur utama Jawa Timur dan akses menuju Pelabuhan Probolinggo, optimalisasi tenaga kerja ini dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif.

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah dari tahun ke tahun, yang mana jika dilihat dari data PDRB di Kota Probolinggo pada tahun 2020-2024, menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada tahun 2020-2024 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo mencapai 23,12%, terdapat 3 sektor terbesar pembentuk PDRB yaitu perdagangan besar dan eceran, terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dan terbesar ketiga sektor transportasi dan perdagangan. Adapun data Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2020-2024 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4 Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	450,75	430,04	463,84	494,08	474,96
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	1230,07	1272,57	1349,30	1439,94	1496,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,28	9,55	10,29	10,88	11,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19,99	21,05	21,60	21,90	22,92
F	Konstruksi	495,68	500,59	526,27	561,23	599,29

G	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1960,80	2080,34	2206,74	2326,59	2438,69
H	Transportasi dan pergudangan	1140,33	1241,29	1406,40	1519,27	1644,86
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	270,61	276,50	296,29	315,22	339,29
J	Informasi dan komunikasi	556,63	589,63	609,75	646,91	682,69
K	Jasa keuangan dan asuransi	488,74	494,05	497,39	521,94	540,07
L	Real estate	265,79	271,92	284,28	297,58	305,05
M,N	Jasa Perusahaan	50,99	52,14	51,76	60,05	64,50
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	366,19	367,04	365,89	367,29	402,78
P	Jasa Pendidikan	406,64	414,52	415,21	435,59	453,59
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	83,35	89,68	89,95	95,16	100,77
R,S,T, U	Jasa Lainnya	239,43	250,23	277,88	294,89	326,32
PDRB		8035,27	8361,14	8872,84	9408,51	9893,27

Sumber: Kota Probolinggo Dalam Angka, 2025

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2023 relatif stabil, sehingga kedepan diperlukan pengembangan sektor-sektor potensial dalam rangka memperkuat struktur dan pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo, serta menciptakan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif. Proses ini melibatkan beberapa elemen seperti penambahan jumlah industri, peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi, peningkatan jumlah fasilitas infrastruktur seperti sekolah, jalan, rumah sakit, dan fasilitas umum, serta peningkatan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mencakup perkembangan lain yang turut berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi di daerah tersebut. PDRB atas dasar harga konstan menghitung pertumbuhan ekonomi sebagai rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, yang berarti bahwa jika sebuah sektor memiliki peran yang paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, begitu juga sebaliknya.

Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun data Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Presentase Penduduk Miskin
2020	524528	17,72	7,43
2021	545955	17,91	7,44
2022	575195	16,16	6,65
2023	628380	15,86	6,48
2024	654409	15,24	6,18

Sumber: Kota Probolinggo Dalam Angka, 2025

Garis kemiskinan di Kota Probolinggo tahun 2024 adalah sebesar 654.409 per kapita per bulan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 15,24 ribu jiwa, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Data kemiskinan Kota Probolinggo menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Indeks keparahan kemiskinan mencapai Tahun 2024 mencapai 0,21, mengalami penurunan dari tahun 2023.

Tabel 2. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kota Probolinggo

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
2020	1,19	0,28
2021	0,90	0,17
2022	1,04	0,23
2023	1,13	0,24
2024	0,98	0,21

Sumber: Kota Probolinggo Dalam Angka, 2025

Tabel diatas memberikan gambaran tentang indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan selama periode 2020 hingga 2024. Indeks kedalaman kemiskinan mencerminkan

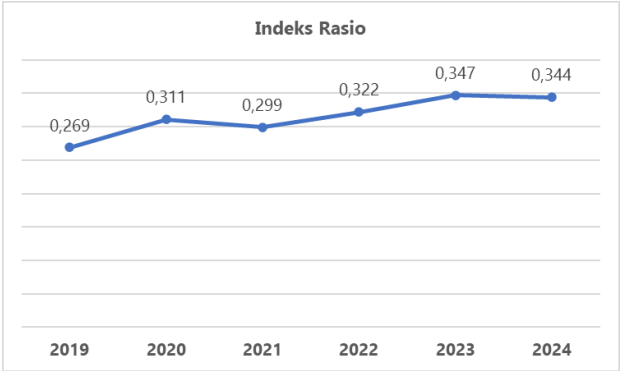
Posisi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sementara indeks keparahan kemiskinan mengukur tingkat ketimpangan di antara mereka. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan signifikan dalam indeks kedalaman (1,19) dan keparahan (0,28) kemiskinan, menandakan adanya kenaikan yang tajam dalam tingkat kemiskinan pada periode tersebut. Penurunan terjadi pada tahun 2024, dengan indeks kedalaman turun menjadi 0,98, mengindikasikan upaya yang berhasil dalam mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan.

Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi tingkat kemiskinan selama periode waktu ini. Data ini memberikan dasar untuk pemantauan kebijakan dan perencanaan strategi guna mengatasi tantangan kemiskinan di masa mendatang, dengan fokus pada upaya-upaya yang dapat mempertahankan atau meningkatkan tren penurunan tingkat kedalaman kemiskinan.

Selanjutnya, untuk melihat aspek kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dapat menggunakan indikator ketimpangan pendapatan masyarakat yang dapat diukur dengan menggunakan indeks gini. Indikator ketimpangan pendapatan (indeks gini) di Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024 mengalami fluktuasi, walaupun ketimpangan pendapatan (indeks gini) di Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024 mengalami

Fluktuasi, namun ketimpangan yang terjadi di Kota Probolinggo masih termasuk dalam taraf/ kategori rendah atau memiliki pemerataan pendapatan yang relatif tinggi (merata), dimana menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia menyebutkan bahwa bila Indeks gini terletak antara 0,20-0,35 maka ketimpangan termasuk dalam taraf rendah atau pemerataan relatif tinggi (merata), bila Indeks gini terletak antara 0,36-0,49 menunjukkan ketimpangan taraf sedang, dan bila Indeks gini terletak antara 0,50-0,70 maka

menandakan bahwa pemerataan sangat timpang atau ketimpangan berada pada taraf tinggi.



Gambar 2. 1 Indeks Gini Kota Probolinggo Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2025

Angka pengangguran pada suatu wilayah juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator aspek kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. Angka pengangguran Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan adanya penurunan yang masih cukup rendah, dimana pada capaian tahun 2019 terlihat bahwa angka pengangguran di Kota Probolinggo masih mencapai 4,25%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,44%. Melihat pada kondisi penduduk yang menganggur di Kota Probolinggo pada tahun 2024 masih tercatat sebanyak 5.748 jiwa. Sedangkan untuk angkatan kerja di Kota Probolinggo pada tahun 2024 tercatat sebanyak 129.602 Jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.



Gambar 2. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2025

B. Kesejahteraan Sosial Budaya

Mengetahui kondisi kesejahteraan sosial budaya Kota Probolinggo dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain indeks keluarga sehat (IKS), indeks kualitas keluarga (IKK), indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dibentuk oleh lima dimensi, yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Indeks Perlindungan Anak (IPA) menjadi indikator utama target kinerja pembangunan perlindungan anak pada RPJMN tahun 2020-2024. Hal ini karena IPA merupakan satu-satunya indeks yang menggambarkan capaian perlindungan anak di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan skor IPHA (Indeks Perlindungan Hak Anak) 73,47, IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak) 87,58, dan IPA (Indeks Perlindungan Anak) 70,03, Kota Probolinggo berada di atas rata- rata provinsi yang masing-masing adalah 65,38, 83,47, dan 69,04. Dibandingkan dengan kota lain, Kota Probolinggo memiliki skor tinggi dalam Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) dengan 88,06 dan Klaster V (Perlindungan Khusus) dengan 81,69, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan anak.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan suatu wilayah. Adapun capaian IPG Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019-2024

Indeks	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,91	95,87	96,01	96,24	96,48	Data Belum tersedia	Dinsos, PP & PA

Sumber: Rantek RPJMD Kota Probolinggo, BPS Kota Probolinggo, Perangkat Daerah Terkait, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) atau Gender Empowerment Measure (GEM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan Keputusan. Adapun capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 8 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2019-2023

Indeks	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Perangkat Daerah
Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	66,02	65,92	65,05	65,81	68,74	Data belum tersedia	Dinsos, PP & PA

Sumber: Rantek RPJMD Kota Probolinggo, BPS Kota Probolinggo, Perangkat Daerah Terkait, 2024

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran Website IPP Indonesia ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia. Selain itu website ini diharapkan dapat pula menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sendiri memiliki 7 dimensi di dalamnya antara lain ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan social budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah Kota Probolinggo dapat diketahui melalui data yang tersedia dalam instrument Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdiri atas empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokkan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Komponen IDSD sebagai berikut:

1. LINGKUNGAN PENDUKUNG

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi **empat pilar**, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi **dua pilar**, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

3. PASAR

Komponen Pasar meliputi **empat pilar**, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; system keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.

4. KOSISTEM INOVASI

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi **dua pilar**, yaitu dinamika bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha (entry) dan juga kemudahan menutup usaha bagi entitas bisnis yang tidak efisien (exit), serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Tabel 2. 9 Skor IDSD Kota Probolinggo Tahun 2022-2024

NO	KOMPONEN IDSD	2022		2023		2024	
		JATIM	KOTA PROBL	JATIM	KOTA PROBL	JATIM	KOTA PROBL
A	Lingkungan Pendukung						
	1. Pilar Institusi	4,07	4,53	4,14	4,43	4,73	4,28
	2. Pilar Infrastruktur	3,60	1,98	4,17	3,50	4,51	3,26
	3. Pilar Adopsi TIK	3,90	3,40	3,93	4,59	3,95	4,76
	4. Pilar Stabilitas Ekonomi	3,88	2,61	3,46	3,28	4,20	3,31

	Makro						
B	SDM						
	5. Pilar Kesehatan	3,83	3,85	3,90	3,89	3,93	3,84
	6. Pilar Ketrampilan	3,50	3,69	3,71	3,99	4,01	4,26
C	Pasar						
	7. Pilar Pasar Produk	2,18	4,77	1,40	5,00	2,16	5,00
	8. Pilar Pasar Tenaga Kerja	3,31	2,80	3,53	3,24	2,78	3,31
	9. Pilar Sistem Keuangan	3,14	2,76	3,49	1,93	2,40	2,53
	10. Pilar Ukuran Pasar	3,88	0,55	5,00	4,05	5,00	4,08
D	Ekosistem Inovasi						
	11. Pilar Dinamika Bisnis	5,00	5,00	4,15	2,87	4,24	3,11
	12. Pilar Kapabilitas Inovasi	4,54	1,46	4,44	2,13	4,63	2,17
	SKOR RATA-RATA IDSD	3,74	3,12	3,78	3,57	3,88	3,66

Sumber: Laporan IDSD-BRIN, Tahun 2022-2024

Secara umum, skor rata-rata IDSD Kota Probolinggo selalu mengalami peningkatan tiap tahun, namun belum berada pada skor rata-rata diatas IDSD Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2024 skor IDSD Provinsi Jawa Timur adalah 3,88, sedangkan Kota Probolinggo memiliki skor IDSD 3,66.

Apabila dilihat dari skor tiap pilar IDSD Kota Probolinggo pada Tahun 2024, terdapat lima pilar yang memiliki skor diatas skor Provinsi Jawa Timur antara lain pilar adopsi TIK, ketrampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, dan sistem keuangan.

Pilar adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengukur sejauh mana pemanfaatan TIK telah tersebar dan diimplementasikan di suatu daerah, berdasarkan skor IDSD Kota Probolinggo yang lebih tinggi diatas skor IDSD Provinsi Jawa Timur mengindikasikan

bahwa Kota Probolinggo telah mengoptimalkan pemanfaatan TIK dengan sangat baik berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi.

Pilar keterampilan mencerminkan tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja di suatu wilayah. Keterampilan tenaga kerja menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing sektor bisnis, karena berperan dalam menyeimbangkan integrasi teknologi dengan investasi pada kualitas sumber daya manusia (Lawler et al., 2003). Berdasarkan skor IDSD Kota Probolinggo yang lebih tinggi diatas skor IDSD Provinsi Jawa Timur mengindikasikan bahwa Kota Probolinggo memiliki kompetensi tenaga kerja yang cukup baik yang merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing sektor bisnis.

Pilar pasar produk mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil. Berdasarkan skor IDSD Kota Probolinggo yang lebih tinggi diatas skor IDSD

Provinsi Jawa Timur mengindikasikan bahwa Kota Probolinggo memiliki keterbukaan pasar produk yang sangat baik sehingga mendorong efisiensi dan meningkatkan daya saing bisnis di suatu wilayah.

Pilar pasar tenaga kerja yang efisien dan sistem pengupahan yang adil berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan tenaga kerja. Berdasarkan skor IDSD Kota Probolinggo yang lebih tinggi diatas skor IDSD Provinsi Jawa Timur mengindikasikan bahwa Kota Probolinggo memiliki efisiensi pasar tenaga kerja dan kebijakan yang responsive dan sangat baik, dimana pasar tenaga kerja berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja serta daya saing ekonomi.

Pilar sistem keuangan berperan dalam mengintermediasi sumber keuangan, memfasilitasi arus keuangan melalui layanan pembayaran yang efisien dan memproteksi risiko keuangan. Berdasarkan skor IDSD Kota Probolinggo yang lebih tinggi diatas skor IDSD Provinsi Jawa Timur mengindikasikan bahwa Kota Probolinggo memiliki sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan mitigasi risiko yang tepat, sistem keuangan yang tepat akan mendorong dunia usaha agar tumbuh secara produktif dan berkelanjutan.

Apabila dikaitkan dengan kondisi ekosistem riset dan inovasi daerah, maka pilar kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Berdasarkan data IDSD Tahun 2022-2024 dapat diketahui bahwa skor IDSD pada pilar kapabilitas inovasi selalu berada skor dibawah skor IDSD Propinsi Jawa Timur. Pilar kapabilitas inovasi menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda,

Serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Peningkatan skor pilar kapabilitas inovasi Kota Probolinggo dapat dilakukan melalui peningkatan akumulasi dan diversifikasi pengetahuan yang akan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru. Berikut merupakan perbandingan skor IDSD Kota Probolinggo Tahun 2022-2024 terhadap skor IDSD Jawa Timur.



Gambar 2. 3 Perbandingan Skor IDSD Pilar Kapabilitas Inovasi Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur

2.1.6 Usulan Produk Unggulan Daerah (PUD)

Dalam ekosistem riset dan inovasi daerah penentuan produk unggulan daerah ditentukan berdasarkan potensi unggulan daerah dan sektor unggulan daerah. Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya.

Menentukan potensi dan sektor unggulan daerah menggunakan overlay hasil analisis sektor unggulan antara lain *analysis LQ*, *Shiff Share*, dan tipologi *klasssen*. Selanjutnya penentuan produk unggulan daerah menggunakan beberapa kriteria antara lain:

- a. PUD merupakan lapangan usaha yang dijalankan UMKM
- b. Fokus kepada skala usaha UMKM sesuai kewenangan daerah (UU 23/2014): provinsi (usaha kecil), kabupaten/kota (usaha mikro)
- c. Melakukan analisis data NIB (Nomor Induk Berusaha, dari OSS-Dinas PMPTSP) KBLI 5 digit (kelompok usaha), meliputi: Jumlah pelaku usaha
- d. Kelompok usaha yang dipilih adalah jenis usaha yang dapat ditingkatkan (nilai tambah) melalui pemanfaatan inovasi.
- e. Arahan RPJPD misi transformasi ekonomi periode 1 Tahun 2025-2029 (Rantek RPJMD)
- f. Kontinuitas produksi dan keberlanjutannya
- g. Jangkauan pemasaran dan peningkatannya

A. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) dimaksudkan untuk mengetahui sektor-sektor perekonomian di Kota Probolinggo yang masuk dalam kategori sektor basis (unggulan) maupun sektor non basis. Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. *Location quotient* menghitung perbandingan share output sektor i di kota atau kabupaten dan share output sektor i di provinsi. Analisis dilakukan dengan menggunakan data PDRB Kota Probolinggo tahun 2020 – 2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebagai wilayah analisis dan data PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2020 - 2024 ADHK sebagai wilayah acuan. Berdasarkan data tersebut selanjutnya diperoleh hasil perhitungan Indeks LQ (*Location Quotient*) Sektor Ekonomi di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 10 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

No	Sektor PDRB	Nilai LQ/ Tahun					LQ 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,539	0,503	0,529	0,545	0,523	0,523	NON BASIS
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	0,000	NON BASIS
C	Industri Pengolahan	0,505	0,503	0,498	0,506	0,497	0,497	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,418	0,405	0,402	0,339	0,321	0,321	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,405	2,386	2,376	2,317	2,362	2,362	BASIS
F	Konstruksi	0,669	0,656	0,644	0,647	0,644	0,644	NON BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,358	1,330	1,310	1,293	1,294	1,294	BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	5,261	5,560	5,234	4,939	4,873	4,873	BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,650	0,641	0,623	0,608	0,610	0,610	NON BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	1,047	1,033	1,014	0,999	0,988	0,988	NON BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,365	2,341	2,287	2,288	2,273	2,273	BASIS
L	Real Estat	1,803	1,795	1,781	1,797	1,786	1,786	BASIS
M,N	Jasa Perusahaan	0,840	0,835	0,782	0,829	0,824	0,824	NON BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,107	2,096	2,069	2,054	2,086	2,086	BASIS

P	Jasa Pendidikan	1,183	1,791	1,766	1,749	1,734	1,734	BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,366	1,393	1,356	1,367	1,369	1,369	BASIS
R,S, T,U	Jasa Lainnya	2,355	2,316	2,270	2,183	2,152	2,152	BASIS

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, Jika hasil perhitungan LQ menunjukkan > 1 maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis sedangkan jika hasil perhitungan $LQ < 1$ maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis. Hasil perhitungan analisis LQ dengan menggunakan data PDRB Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel diatas diperoleh informasi bahwa di Kota Probolinggo secara konsisten pada 5 tahun terakhir (2020- 2024) terdapat 8 (delapan) sektor yang termasuk menjadi sektor basis, dimana sektor tersebut memiliki nilai LQ diatas 1 (> 1). Adapun sektor-sektor tersebut meliputi: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya. Hal ini mengartikan keberadaan sektor- sektor tersebut menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan (Kota Probolinggo) akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah Kota Probolinggo.

Sub kategori Transportasi dan Pergudangan merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah terbesar pada sektor lapangan usaha ini, yaitu dengan nilai LQ sebesar 4,873 di tahun 2024. Hal ini dipicu oleh letak geografis dan infrastruktur yang strategis Kota Probolinggo dimana berperan sebagai pusat logistik dan distribusi di wilayah Jawa Timur. Terutama karena lokasinya yang dekat dengan Pelabuhan Tanjung Tembaga, yang merupakan jalur utama transportasi darat serta aktivitas perdagangan yang tinggi. Keunggulan ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi daerah tetapi juga membuka peluang investasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi dan pergudangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Analisis Shift Share

Analisis *shift share* digunakan untuk membagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah ke dalam tiga komponen dan mengukur kontribusi dari masing-masing komponen tersebut (Curtis, 1972). Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah

terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Analisis *Shift Share* digunakan untuk melihat kinerja masing- masing sektor PDRB Kota Probolinggo dan membandingkannya dengan nilai PDRB Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil perhitungan *Shift Share* Sektor Ekonomi di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Hasil Perhitungan Shift Share Ekonomi di Kota Probolinggo

No	Sektor PDRB	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Pij)	Differensian Shift (Dij)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	90,748	-63,433	-3,206
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C	Industri Pengolahan	247,647	4,758	13,975
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,868	2,876	-2,994
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,025	-1,241	0,147
F	Konstruksi	99,794	11,295	-7,479
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	394,763	141,559	-58,431
H	Transportasi dan Pergudangan	229,580	362,746	-87,796
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54,481	27,415	-13,216
J	Informasi dan Komunikasi	112,065	36,898	-22,903
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	98,397	-39,033	-8,034
L	Real Estat	53,511	-18,912	4,661
M, N	Jasa Perusahaan	10,266	2,865	0,381
O	Administrasi	73,724	-42,910	5,775

	Pemerintahan,			
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
P	Jasa Pendidikan	81,868	-3,666	-1,252
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,781	-3,666	2,713
R,S ,T, U	Jasa Lainnya	48,204	50,152	-21,466
	TOTAL	1.617,721	439,295	-199,025

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029

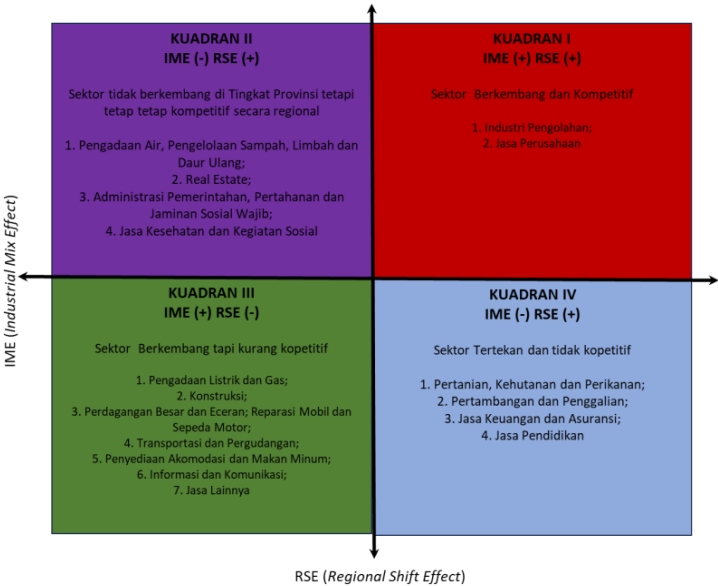
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan di atas dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki regional share terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 394,763, sedangkan yang terkecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan angka 1,868. Adapun total regional share sebesar 1.617,721. Keseluruhan sektor memiliki nilai regional share yang bertanda positif, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergeseran struktur perekonomian Kota Probolinggo pada masing-masing sektor dipengaruhi oleh perubahan struktur perekonomian pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Untuk angka proportional shift sektor ekonomi di Kota Probolinggo telah terdapat 9 (sembilan) sektor yang bernilai positif yaitu: Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; serta Jasa Lainnya. Kesembilan sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan di daerah (Kota Probolinggo) yang lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena pengaruh sektor tersebut pada lingkup yang lebih luas (Provinsi Jawa Timur) terhadap sektor dalam PDRB Kota Probolinggo. Masih terdapat sebanyak 8 (delapan) sektor di Kota Probolinggo yang tergolong lambat pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan sektor di Provinsi Jawa Timur dengan memiliki nilai proportional shift yang bertanda negatif.

Sektor ekonomi yang memiliki nilai Differential shift dengan tanda positif terdapat pada 9 (sembilan) sektor, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Jasa Perusahaan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kesembilan sektor tersebut memiliki daya saing yang tinggi/ kuat, dimana sektor tersebut memiliki

keunggulan kompetitif regional yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) sektor lainnya memiliki nilai differential shift dengan tanda negatif, yang artinya sektor-sektor tersebut memiliki daya saing yang masih rendah/lemah.

Hasil analisis *shift share* digunakan untuk mengklasifikasikan sektor dengan pertumbuhan dan daya saing. Dengan melihat pada nilai proportional shift dan differential shift maka dapat dilakukan pengelompokan sektor ekonomi di Kota Probolinggo maka dapat diperoleh hasil bahwa di Kota Probolinggo terdapat 2 sektor yang termasuk dalam kategori pertumbuhan cepat dan berdaya saing, yaitu: Industri Pengolahan serta Jasa Perusahaan, dimana kedua sektor tersebut memiliki proportional shift dan differential shift yang sama- sama bernilai positif (+).



Gambar 2. 4 Hasil Analisis Shift Share Sektor Ekonomi di Kota Probolinggo

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029

C. Analisis Typologi Klassen

Analisis Typology Klassen yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektor perekonomian. Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung rasio antara laju pertumbuhan masing-masing sektor perekonomian di Kota Probolinggo dengan laju pertumbuhan PDRB total Kota Probolinggo serta menghitung rasio proporsi kontribusi masing-masing sektor di Kota Probolinggo terhadap pembentukan PDRB dengan proporsi kontribusi rata-rata sektor terhadap total PDRB Kota Probolinggo. Berdasarkan data pertumbuhan dan distribusi/ kontribusi sektor PDRB, maka selanjutnya dapat diperoleh hasil klasifikasi sektor PDRB Kota Probolinggo berdasarkan Typology Klassen secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar dan matriks sebagai berikut.

Kontribusi Sektoral		Kontribusi Besar ($Y_{\text{Sektor}} \geq Y_{\text{PDRB}}$)	Kontribusi Kecil ($Y_{\text{Sektor}} < Y_{\text{PDRB}}$)
Laju Pertumbuhan Sektoral	Tumbuh Cepat ($r_{\text{Sektor}} \geq r_{\text{PDRB}}$)	<u>Sektor Prima</u> (Transportasi dan Pergudangan)	<u>Sektor Berkembang</u> (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial)
	Tumbuh Lambat ($r_{\text{Sektor}} < r_{\text{PDRB}}$)	<u>Sektor Potensial</u> (Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi)	<u>Sektor Terbelakang</u> (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Jasa Pendidikan; Jasa Lainnya)

Gambar 2. 5 Klasifikasi Sektor PDRB Kota Probolinggo Berdasarkan Tipology Klassen Tahun 2020-2024

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029

Berdasarkan tipology klassen, sektor ekonomi di Kota Probolinggo yang termasuk kedalam kategori sektor dengan pertumbuhan tinggi dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kota Probolinggo (Sektor Prima), yaitu Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi (Sektor Potensial) di Kota Probolinggo tercatat sebanyak 3 (tiga) sektor, yaitu Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

Tabel 2. 12 Hasil Overlay 3 Analisis (LQ, SS, Tipologi Klassen) Kota Probolinggo

Sektor PDRB	LQ	SS	Tipologi KLASSEN	TOTAL
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				0
B. Pertambangan dan Penggalian				0
C. Industri Pengolahan (tidak masuk sektor unggulan)		v	V	2
D. Pengadaan Listrik dan Gas				0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	v			1
F. Konstruksi				
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	v		V	2
H. Transportasi dan Pergudangan	v		V	2

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum				0
J. Informasi dan Komunikasi				0
K. Jasa Keuangan dan Asuransi (tidak masuk sektor unggulan)	v		V	2
L. Real Estat	v		V	2
M,N. Jasa Perusahaan		v		1
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	v			1
P. Jasa Pendidikan	v			1
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	v			1
R,S,T,U. Jasa Lainnya	v			1

Keterangan Warna:

	Unggul di 3 analisis
	Unggul di 2 analisis
	Unggul di 1 analisis

Sumber: Paparan Pendampingan Teknis Umum Produk Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan hasil analisis lokasi sektor unggulan dalam Kajian Pemetaan Potensi Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, Kota Probolinggo masuk ke dalam Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru (BTS) dimana terdapat enam sektor yang menjadi sektor unggulan Kota Probolinggo.

Tabel 2. 13 Sektor Unggulan Kota Probolinggo

NO	SEKTOR UNGGULAN	KOMODITAS/ JENIS	LOKASI
1	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Limbah dari perdagangan besar eceran dan pariwisata	• Kecamatan Kademangan • Kecamatan Kedopok, Kecamatan Mayangan • Kecamatan Kanigaran

2	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Supermarket Minimarket Department store Pasar induk Persewaan mesin pertanian peralatannya Agen penjualan bahan baku pertanian (bibit, pupuk, dst) Agen penjualan hasil pertanian Agen penjualan hasil perikanan Perdagangan hasil olahan perikanan	• Kecamatan Kademangan, • Kecamatan Kedopak, • Kecamatan Mayangan, • Kecamatan Kanigaran, • Kecamatan Wonoasih
3	Transportasi dan Pergudangan	Agen kurir, Logistik pengiriman hasil panen, <i>Cold storage</i> hasil perikanan, Pergudangan hasil panen tanaman pangan, Pembangunan terminal	• Kecamatan Mayangan dan Kademangan
4	Real Estate	Real Estate/Properti, Kawasan peruntukan industri	• Kecamatan Kademangan, • Kecamatan Kedopak, • Kecamatan Mayangan, • Kecamatan Kanigaran, • Kecamatan Wonoasih
5	Jasa Kesehatan	Rumah sakit,	• Kecamatan Kademangan,

		Poliklinik, Perdagangan Bahan Baku Farmasi, Apotek, Toko obat, Toko alat kesehatan dan optik	• Kecamatan Kedopok, • Kecamatan Mayangan, • Kecamatan Kanigaran, • Kecamatan Wonoasih
6	Akomodasi dan penyediaan makan minum	Hotel bintang/Non bintang, Restoran, Biro perjalanan wisata, dan gedung pertemuan dan pameran	• Kecamatan Mayangan
		Jagung	• Kecamatan Wonoasih • Kecamatan Kanigaran, • Kecamatan Kedopok • Kecamatan Kademangan
		Sapi PO (peranakan unggul)	• Kecamatan Wonoasih
		Ikan	• Kecamatan Mayangan • Kecamatan Kademagan
		Bawang Merah	• Kecamatan Wonoasih • Kecamatan Kademangan • Kecamatan Mayangan
		Padi	• Kecamatan Mayangan • Kecamatan Kademangan

Sumber: Pemetaan Potensi Investasi Daerah, 2024

Dalam keterkaitan dengan penentuan produk unggulan daerah, maka konsep integrasi hulu-hilir dapat dijadikan pendekatan strategi untuk memastikan bahwa potensi sumber daya lokal tidak hanya dieksploitasi sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi melalui pengembangan industri secara menyeluruh dari awal hingga akhir rantai pasok.

Produk unggulan daerah dipilih bukan hanya karena bahan bakunya tersedia, tetapi karena adanya rantai nilai lengkap dari hulu sampai hilir, adanya daya saing di pasar lokal/nasional/global, dan merupakan potensi lokal daerah yang berdampak pada ekonomi besar bagi masyarakat lokal.

Tabel 2. 14 Konsep Integrasi Hulu Hilir pada penentuan Produk Unggulan Daerah Kota Probolinggo

No	Hulu	Hilir	Produk Unggulan
1	Perikanan laut	Hasil olahan ikan	• Olahan ikan jenggelek • Rengginang
2	Budaya pendalungan (asimilasi antara budaya Madura dan budaya Jawa)	Seni tari dan musik tradisional khas madura/ pendalungan	• Kesenian tarijangan bodhag • Seni musik dhug-dhug • Seni musik hadrah • Seni musik angklung
3	Kain/ garmen	Baju batik dan baju Sulaman bordir	• Industri Batik • Industri pakaian jadi
4	Kayu	Furniture/ mebel	• Industri mebel kayu
5	Pertanian buah2an	Kue olahan makanan PIA	• Industri olahan makanan PIA
6	Produksi tempe	Keripik tempe/ produk olahan tempe	• Industri tempe

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kota Probolinggo pada bulan November 2024, sejumlah produk unggulan daerah telah diidentifikasi dan dikembangkan berdasarkan potensi lokal di tingkat kelurahan dan kecamatan. Produk unggulan ini mencakup sektor industri kreatif, pertanian, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah disepakati melalui forum diskusi dengan masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah daerah, melalui berbagai kebijakan dan regulasi seperti Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025 , telah menetapkan dan mendukung pengembangan PUD dengan menyediakan fasilitas pelatihan dan pemasaran, melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan, serta meningkatkan Kerjasama dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan. Berikut merupakan Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025.

Tabel 2. 15 PUD Kelurahan di Kota Probolinggo

No.	Kelurahan	Kelompok Agro	Kerajinan	Budaya
1.	Kademangan	Rengginang	Produk Daur Ulang	Hadrah
2.	Pilang	Abon Ikan	Aksesoris	Jaran Bodhag
3.	Ketapang	Olahan Tape	Produk Daur Ulang	Seni Musik Gambus
4.	Triwung Lor	Pia	Batik	Jaran Bodhag
5.	Triwung Kidul	Olahan Kelor	Mebel dari Kayu	Tari Kreasi
6.	Pohsangit Kidul	Kerupuk	Batu Bara	Seni Hadrah
7.	Mayangan	Olahan Ikan Jenggelek	Kapal Rakyat	Petik Laut
8.	Sukabumi	Opak	Batik Khas Bremit	Seni Musik Dug-dug Bersih Kampung Bremit
9.	Mangunharjo	Kuping Gajah	Batik	Seni Musik Dug-dug
10.	Jati	Sumpia Ikan	Batik	Seni Musik Dug-dug
11.	Wiroborang	Keripik Pisang	Batik	Seni Musik Dug-dug
12.	Tisnonegaran	Amplang	Aksesoris	Kirab Pusaka
13.	Curahgrinting	Tempe	Rebana	Seni Musik Dug-dug
14.	Kanigaran	Rengginang	Border	Seni Musik Dug-dug
15.	Kebonsari Kulon	Amplang Tengiri	Batik	Seni Musik Dug-dug
16.	Kebonsari Wetan	Kopi	Mebel	Seni Musik Dug-dug
17.	Sukoharjo	Telur Asin	Border	Jaran Bodhag

18.	Wonoasih	Petis Ikan	Sapu Sabut Kelapa	Hadrah
19.	Jrebengkidul	Tahu	Mebel dari Kayu	Hadrah
20.	Pakistaji	Rengginang	Mebel dari Kayu	Hadrah
21.	Kedunggaleng	Marning Jagung	Anyaman Bambu	Angklung
22.	Kedungasem	Bawang Goreng	Kerajinan dari Besi	Seni Musik Dug-dug
23.	Sumber Taman	Tempe	Produk Daur Ulang	Pencak Silat
24.	Sumber Wetan	Marning Jagung	Kerajinan kayu	Hadrah
25.	Kareng Lor	Rengginang	Mebel dari Kayu	Jaran Kencak
26.	Jrebeng Kulon	Aneka Camilan Stik	Mebel dari kayu	Hadrah
27.	Jrebeng Wetan	Olahan Lele	Kostum Karnaval	Pencak Silat
28.	Jrebeng Lor	Rengginang	Anyaman Bambu	Jaran Bodhag
29.	Kedopok	Keripik Singkong	Mebel dari Kayu	Hadrah

Sumber: Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025

Tabel 2. 16 PUD Kecamatan di Kota Probolinggo

No.	Kecamatan	Kelompok Agro	Kerajinan	Budaya
1.	Kademangan	Pia	Mebel dari Kayu	Jaran Bodhag
2.	Mayangan	Olahan Ikan Jenggelek	Batik	Seni Musik Dug-dug
3.	Kanigaran	Tempe	Border	Seni Musik Dug-dug
4.	Wonoasih	Tempe	Mebel dari Kayu	Angklung
5.	Kedopok	Rengginang	Mebel dari kayu	Hadrah

Sumber: Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025

Dengan pengembangan produk unggulan ini, Kota Probolinggo memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ekonomi berbasis lokal. Rancangan pembangunan jalan yang terintegrasi dengan sentra produksi dan distribusi PUD akan semakin mempercepat pertumbuhan sektor-sektor unggulan ini dan memastikan akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha.

2.1.7 Usulan Permasalahan Utama Daerah

Kota Probolinggo menghadapi berbagai permasalahan utama sebagaimana diidentifikasi dalam Penentuan permasalahan utama daerah didasarkan pada reviu RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045, reviu Rancangan teknokratik RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, dan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 17 Permasalahan Daerah berdasarkan RPJPD 2025-2045 dan RPJMD

2025-2030 Kota Probolinggo

No	Urusan	Permasalahan	
		RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025
1	Pendidikan	• Rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya mencapai pendidikan setinggi-tingginya • Minimnya pelaksanaan keaksaraan fungsional • Belum optimalnya pengelolaan satuan pendidikan, pemerataan kapabilitas pendidik dan sinergitas	• Masih tingginya angka putus sekolah • Belum meratanya sebaran dan kualitas Pendidikan • Masih rendahnya angka partisipasi murni
2	Kesehatan	• Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang berdampak pada masih tingginya angka kematian ibu (AKI), angka balita gizi buruk, dan angka stunting	• Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan belum merata • Belum lengkap ketersediaan sarana prasarana penunjang kesehatan • Semakin tingginya kejadian kasus menular dan tidak menular • Masih tingginya angka prevelensi stunting • Penderita gangguan mental mengalami peningkatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Minimnya infrastruktur Tingginya sinkronisasi pembangunan pencemaran lingkungan pada drainase dan aliran irigasi • Rendahnya Penggunaan	• Belum optimalnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar, seperti: jaringan perpipaan, sanitasi • Belum optimalnya

		layanan air perpipaan belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur • terjadinya alih fungsi lahan dan belum terpenuhinya RTH sebesar 20%	pembinaan penataan ruang • Belum optimalnya penyediaan dan penataan RTH Publik
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Ketidakteraturan pembangunan jalan dan drainase lingkungan dari pengembangan kavling perumahan kegiatan • Masih adanya Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang belum dilakukan serah terima • Pengembangan perumahan cenderung sporadis dan kurang tertata serta belum dilengkapi PSU yang memadai	• Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh • Belum optimalnya penyediaan PSU pendukung hunian di perumahan • Minat masyarakat terhadap hunian vertical (Rumah susun) masih rendah
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	• Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mentaati aturan serta norma yang berlaku • Lemahnya mitigasi dan perencanaan kebencanaan, serta peran dan kesadaran masyarakat tanggap bencana	• Rawannya pelanggaran Perda oleh masyarakat • Belum optimalnya penerapan pentahelix kebencanaan dan konsep lintas wilayah penanggulangan bencana • Rawannya gangguan trantibum
6	Sosial	• Beragam dan masih belum tepatnya data kesejahteraan sosial Kebijakan penanggulangan kemiskinan belum sesuai	• Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tingkat partisipasi

		dengan kebutuhan	penyandang disabilitas dalam pembangunan dan sektor ketenagakerjaan formal masih rendah
7	Tenaga Kerja	• Kualifikasi pencari kerja seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan • Belum optimalnya pembinaan hubungan industri serta fasilitasi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Lapangan pekerjaan yang tidak dapat menampung kebutuhan pekerjaan, termasuk bagi kelompok disabilitas • Masih adanya kasus perselisihan hubungan industrial
8	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	• Masih rendahnya Keterlibatan perempuan di parlemen • Angka harapan hidup masyarakat masih rendah • Rendahnya kesadaran masyarakat • atas kasus kekerasan dalam keluarga dan perempuan	• Masih terdapat kekerasan perempuan dan anak Akses ke bidang ekonomi bagi perempuan masih rendah
9	Pangan	• Rendahnya perwujudan Penganekaragaman konsumsi pangan dengan membudayakan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman. • Belum adanya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. • Tingginya bahan pangan yang	• Belum tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) • Rendahnya stabilitas harga pangan • Belum optimalnya diversifikasi pangan • Penurunan food waste • Tingginya tingkat food loss

		• terbuang akibat perilaku konsumsi masyarakat (food waste).	
10	Pertanahan	• Banyaknya Lahan yang belum tersertifikat • Pembangunan gedung tanpa memperhatikan peta bidang dan atau pelibatan aparatur kantor Pertanahan	• Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan, khususnya terkait pendataan tanah sebagai dasar sertifikasi dan perencanaan tata ruang • Masih berpotensi terjadinya konflik kepemilikan tanah
11	Lingkungan Hidup	• Belum optimalnya pengelolaan Pemantauan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan Hidup • Terbatasnya alat berat dalam pengelolaan sampah TPA • Menurunnya Bank Sampah Aktif • Belum optimalnya pengelolaan persampahan Belum optimalnya upaya pencapaian zero waste dan zero emission • Masih kurangnya IPAL Industri/UMKM	• Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan khususnya pada Pencegahan pencemaran air • Belum optimalnya penanganan sampah yang disebabkan karena keterbatasan armada dan sumber daya pengangkut sampah
12	Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	• Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya adminduk	• Kecepatan layanan yang terhambat karena kurangnya sarpras dan kurangnya sosialisasi layanan ke masyarakat
13	Pemberdayaan		• Keterbatasan cakupan

	Masyarakat dan Desa		pemberdayaan kelompok dan lembaga kemasyarakatan • Kurangnya pertisipasi aktif kelompok dan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		• Rendahnya Kepesertaan KB dan Belum optimalnya pendampingan Keluarga TPK
15	Perhubungan	• Kurangnya sinkronisasi antara pembangunan jalan dan penyediaan perlengkapan jalan • Penegakan regulasi terhadap kendaraan bermotor Over Dimensi dan Overload (ODOL) • Sarana dan prasarana pendukung pelabuhan • Kurangnya peremajaan Angkutan Kota yang ada di Kota Probolinggo	• Belum optimalnya sistem operasional dalam pengelolaan dan penataan penyelenggaraan perparkitan di tepi jalan umum. • Belum optimalnya pemerataan sarana dan prasarana perhubungan ke seluruh wilayah
16	Komunikasi dan Informatika	• Belum optimalnya implementasi SPBE	• Belum Optimalnya Integrasi Aplikasi dan sistem informasi di perangkat daerah • Masih terdapat wilayah yang minim aksesibilitas jaringan internet
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	• Lemahnya kelembagaan koperasi • Rendahnya kesadaran pengurus koperasi dalam melaksanakan	• Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas SDM koperasi dan pelaku usaha mikro

		kewajibannya melaksanakan RAT secara rutin • Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas SDM koperasi dan pelaku usaha mikro • Rendahnya daya saing produk dalam memperluas akses pasar • Rendahnya akses permodalan mengembangkan usaha	• Rendahnya daya saing produk dalam memperluas akses pasar • Rendahnya akses permodalan untuk mengembangkan usaha • Masih terdapat kelembagaan koperasi yang tidak berdasarkan regulasi dalam penyusunan pelaporan
18	Penanaman Modal	• Terbatasnya informasi mengenai LKPM • Dinamika peraturan perundang- undangan sehingga peluang investasi yang seringkali muncul tidak sepenuhnya terealisasi akibat kendala hukum dan regulasi • Keterlambatan pelaku usaha dalam melaporkan nilai realisasi investasi	• Belum optimalnya upaya penguatan daya tarik investasi
19	Kepemudaan dan Olahraga	• Organisasi kepemudaan tidak aktif • Minimnya sarana dan prasarana olahraga • Minimnya SDM profesional keolahragaan seperti pelatih yang berkualitas	• kurangnya kegiatan yang efektif dalam meningkatkan pengembangan pemuda baik • dari sisi kewirausahaan muda • Maupun pengembangan potensi keolahragaan • Ketersedian sarana olahraga masih rendah

			• Belum optimalnya pengembangan potensi keolahragaan, termasuk bagi disabilitas • Partisipasi pemuda dalam pembangunan masih rendah
20	Statistik	• Belum terstandarnya data spasial sehingga masih sulit untuk dibagi-pakaikan • Belum optimalnya pengelolaan satu data Kota Probolinggo	Belum Optimalnya pengelolaan satu data
21	Persandian	• Terbatasnya kualitas SDM dan Sarpras Keamanan informasi persandian	• Belum optimalnya kematangan pelaksanaan Kebijakan Keamanan serta audit keamanan informasi
22	Kebudayaan	• Kurang optimalnya tata kelola dan wadah penyelenggaraan seni dan budaya	• Belum maksimalnya pelibatan pelaku dan tokoh seni dalam pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan local • Belum tersedianya prasarana Gedung Kesenian yang layak • di Kota Probolinggo
23	Perpustakaan	• Menurunnya minat masyarakat ke perpustakaan • Perpustakaan kota belum mampu beradaptasi dengan kebutuhan informasi masyarakat	• Peningkatan literasi masyarakat belum optimal, minat baca digital masyarakat masih kurang • Sarana dan prasarana perpustakaan masih belum memberikan rasa nyaman

			• kepada pengunjung
24	Kearsipan	• Terbatasnya SDM arsiparis dan pemanfaatan teknologi pengelolaan kearsipan	• Peningkatan SDM Arsip di OPD belum optimal sehingga pemahaman terhadap kearsipan masih rendah • Masih belum semua perangkat daerah menerapkan arsip digital
25	Kelautan dan Perikanan	• Keterbatasan kewenangan kota terkait kegiatan perikanan tangkap • Belum optimalnya ketrampilan berbudidaya ikan • Adanya kenaikan harga sarana produksi (pakan ikan dan benih) sehingga mempengaruhi jumlah tebar dan produksi • Masih rendahnya diversifikasi usaha bagi nelayan	• Belum optimalnya pengelolaan budidaya perikanan dan peternakan yang partisipatif • Masih rendahnya Produk olahan perikanan yang terstandarisasi • Diversifikasi produk perikanan olahan rendah • Penggunaan Alat tangkap yang tidak rama lingkungan • Diversifikasi usaha nelayan • yang rendah
26	Pariwisata	• Kecenderungan bertumpu pada pada beberapa obyek wisata saja • Kurangnya pemerataan serta pemeliharaan fasilitas sarana prasarana obyek wisata • Menurunnya tren kunjungan wisatawan mancanegara	• Belum optimalnya promosi pariwisata • Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi kreatif • Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata dari sisi kualitas dan ketersediaan sarana

			dan prasarana yang memadai dan aksesibel • Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata • Belum optimalnya peran SDM pariwisata dalam pengembangan pariwisata
27	Pertanian	• Tingginya alih fungsi lahan pertanian akibat minimnya regenerasi dan kurang diminatinya sektor pertanian • Pola pertanian yang masih konvensional dikarenakan masih sangat minimnya pemanfaatan dan penerapan teknologi baik on farm maupun off farm • Belum Optimalnya Upaya mempertahankan ikon Kota Probolinggo Anggur dan Mangga sebagai produk unggulan di Kota Probolinggo	• Belum optimalnya produktivitas pertanian • Biaya produksi tinggi • Tingginya alih fungsi lahan pertanian • Rantai pemasaran terlalu panjang • Belum optimalnya sarana produksi pertanian • Rendahnya regenerasi SDM pertanian • Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan penyakit hewan menular strategis • Belum optimalnya standarisasi produk hasil pertanian • Lemahnya jejaring kemitraan pertanian
28	Perdagangan	• Menurunnya pesanan barang/produksi • Menurunnya penjualan di dalam maupun luar	• Belum optimalnya nilai tambah sektor perdagangan yang bersumber dari ekspor

		negeri akibat pandemi • Terganggunya pengiriman produk untuk mencukupi permintaan pasar ekspor akibat penutupan pelabuhan karena pandemi • Kurang memadainya fasilitas pasar	
29	Perindustrian	• Inefisiensi manajemen usaha dan keterbatasan pada akses pasar Adanya keterbatasan modal, sarana prasarana, bahan baku dan kualitas sumberdaya manusia dalam peningkatan produksi sektor industry • Masih kurangnya minat beli produk • lokal dan keterbatasan jaringan usaha	• Kurangnya mutu produk industri • Kurangnya daya saing produk
30	Sekretariat Daerah	• Belum terpenuhinya kelengkapan dokumen dokumen Reformasi Birokrasi • Hasil survey kualitas layanan menunjukan hasil yang kurang, pada poin- poin tertentu	• Belum optimalnya pelaporan kinerja perangkat daerah • Belum optimalnya fasilitasi perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat • Belum optimalnya harmonisasi produk hukum, fasilitasi bantuan hukum dan pengelolaan informasi hukum • Belum optimalnya tata Kelola pengadaan barang/jasa • Monitoring dan evaluasi atas inflasi

			daerah yang terjadi belum maksimal • Belum optimalnya pemenuhan dokumen pendukung dalam penilaian kematangan organisasi perangkat daerah • Belum optimalnya inovasi dan kualitas layanan publik meliputi aksesibilitas dan pengembangan informasi • Belum maksimalnya implementasi SAKIP, yang masih sebatas pemenuhan dokumen-dokumen
31	Sekretariat DPRD		• Kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peran legislatif dan eksekutif dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah (legislasi, budgeting, controlling) • Belum optimalnya fasilitas tugas DPRD dari aspek ketersediaan sarana • prasarana pendukung
32	Perencanaan	• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi data pada proses perencanaan pembangunan daerah • Belum efektifnya pengendalian dan	• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi data pada proses perencanaan pembangunan daerah

		• evaluasi kebijakan pembangunan daerah	
33	Keuangan	• Rendahnya kemandirian pendapatan daerah yang masih bertumpu pada dana transfer • Potensi pajak dan Retribusi yang belum optimal	• Pertumbuhan PAD masih rendah • Belum adanya pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi • Potensi pajak dan retribusi yang belum optimal • Adanya perubahan regulasi yang dinamis
34	Kepegawaian	• Terbatasnya kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan birokrasi	• Belum lengkapnya penetapan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional
35	Pendidikan dan Pelatihan	• Belum lengkapnya penetapan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional	
36	Penelitian dan Pengembangan	• Minimnyapemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan • Lemahnya sistem inovasi daerah	• Beberapa kajian hasil penelitian belum diimplementasikan
37	Unsur Pengawasan	• Belum optimalnya peran dan kualitas Apip dalam perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi dan pengendalian • Belum optimalnya perencanaan dan implementasi kebijakan tata kelola pemerintahan	• Belum maksimalnya pengawasan terhadap PD sehingga masih terdapat temuan terkait kerugian daerah
38	Kewilayahan	• Keterbatasan masyarakat dalam menggunakan layanan berbasis internet	• Belum Optimalnya pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat berbasis

			kewilayahan
--	--	--	-------------

Sumber: RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2030

Setelah dilakukan review terhadap permasalahan utama pada dokumen RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, maka dilakukan identifikasi permasalahan umum sesuai visi misi di masing-masing dokumen tersebut:

	RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045	RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2030
Visi	PROBOLINGGO KOTA LOGISTIK TANGGUH, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, MODERN, DAN ADAPTIF
Misi	• Sumber Daya Manusia Unggul yang Berdaya Saing • Masyarakat Mandiri dan Sejahtera • Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan • Pemerintah yang Adaptif dan Layanan Publik yang Prima • Integrasi Infrastruktur, Konektivitas, dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	• Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan • Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan • Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital • Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan • Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan

Sumber: RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2030

Penentuan prioritas permasalahan utama daerah berdasarkan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 menggunakan metode USG. Metode USG digunakan untuk menentukan skala prioritas yang ada. Skala prioritas dilihat dari 3 aspek yaitu *urgency*, *seriousness*, *growth*. Penentuan yang menjadi skala prioritas dilakukan dengan melihat:

- Seberapa mendesak suatu isu yang dibahas (*urgency*) yang dikaitkan dengan waktu yang ada. Apabila berdasarkan aspek *urgency* maka dapat dikorelasikan dengan jangka waktu serta anggaran yang tersedia untuk penyelesaian permasalahan daerah melalui penerapan riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo

- b. Seberapa serius isu tersebut dikaitkan dengan akibat jika tidak dapat diselesaikan atau jika pengerjaannya ditunda, serta apakah ada kaitannya dengan masalah yang lain jika tidak dilaksanakan atau ditunda (*seriousness*). Apabila berdasarkan aspek *seriousness* maka dapat dikorelasikan dengan seberapa besar dampak negative yang ditimbulkan serta kemampuannya untuk penyelesaian permasalahan daerah melalui penerapan riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo
- c. Kemungkinan masalah/isu tersebut dapat berkembang jika masalah/isu tersebut tidak dilakukan (*growth*). Apabila berdasarkan aspek *growth* maka dapat dikorelasikan dengan seberapa besar potensi masalah akan berkembang/memburuk jika tidak ditangani serta kemampuannya untuk penyelesaian permasalahan daerah melalui penerapan riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo.

Pemberian skala pada metode USG ini dilakukan dengan memberikan skor 1-5 pada setiap masalah/isu berdasarkan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 18 Analisis USG terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo

No	Misi Pembangunan Daerah Kota Probolinggo	Skor			Skor Total	Prioritas
		U	S	G		
1	Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan	4	4	3	11	2
2	Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan	4	3	3	10	3
3	Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital	5	4	4	13	1
4	Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan	3	3	2	8	5
5	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	2	4	3	9	4

Berdasarkan hasil analisis USG, prioritas utama pembangunan Kota Probolinggo yaitu pada pengembangan Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital. Sehingga dapat diturunkan bahwa prioritas permasalahan utama daerah Kota Probolinggo adalah **Lemahnya**

ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah karena rendahnya dukungan Integrasi Ekonomi Digital.

Keterkaitan permasalahan tersebut melalui penyelesaian permasalahan dengan ekosistem riset dan inovasi daerah di Kota Probolinggo sangat erat. Hal ini diketahui bahwa masih rendahnya tingkat adopsi teknologi digital oleh UMKM lokal, banyak UMKM di Probolinggo mengalami kendala serius dalam mengakses dan mengadopsi teknologi digital, baik dari sisi SDM maupun infrastruktur dan dukungan kebijakan. Literasi digital yang rendah pada pelaku UMKM dimana Banyak pelaku UMKM tidak siap dalam hal literasi digital— misalnya penggunaan e-commerce, pembayaran digital, maupun promosi online. Keterbatasan infrastruktur digital rantau/daerah, Akses internet masih tidak merata, terutama di area pinggiran, meskipun pemerintah menyediakan Wi-Fi publik; namun jangkauannya dan kualitasnya belum cukup memadai. Akses permodalan dan dukungan regulatif masih terbatas, dimana UMKM sulit mendapat akses ke pembiayaan seperti KUR dan modal lainnya. Serta pendampingan digital yang belum menyeluruh dan sistemik, Meskipun ada pelatihan, mekanisme pendampingan sering fragmentasi dan tidak berkelanjutan. Peran pemerintah, asosiasi, dan pihak ketiga belum terintegrasi secara optimal.

2.2 GAMBARAN/ KONDISI RISET DAN INOVASI KOTA PROBOLINGGO

Salah satu bagian penting yang akan diidentifikasi dari kondisi riset dan inovasi di daerah adalah kemampuan daerah dalam melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk menjawab berbagai isu strategis ataupun permasalahan utama daerah yang ada pada seluruh sektor pembangunan yang menjadi kewenangan daerah (32 urusan konkuren daerah). Kemampuan ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu Sumberdaya Riset dan Inovasi Daerah, Kelembagaan Iptek, dan Jejaring Riset dan Inovasi Daerah.

2.2.1 Sumberdaya Riset dan Inovasi Daerah

A. Sumber Daya Manusia IPTEK

Sumber Daya Manusia IPTEK di Kota Probolinggo adalah periset yang bekerja pada lembaga riset dan perguruan tinggi yang berada di wilayah Kota Probolinggo sebagai mitra Pemerintah Daerah, termasuk SDM yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penelitian dan Pengembangan (Bapperidalitbang) Kota Probolinggo. Sampai dengan tahun 2024, jumlah pejabat fungsional sebanyak 63 orang, yang terdiri dari fungsional perencana 25 orang, fungsional peneliti 3 orang, fungsional perekayasa 1 orang dan fungsional analis kebijakan 34 orang. Selain itu, SDM IPTEK di Kota Probolinggo juga terdiri dari seluruh dosen perguruan tinggi se-Kota Probolinggo, dimana terdapat dua perguruan tinggi di Kota Probolinggo yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga dan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo.

B. Infrastruktur riset dan inovasi

Infrastruktur riset dan inovasi di Kota Probolinggo merupakan infrastruktur fisik sebagai sarana penunjang perkembangan riset dan inovasi yang berbentuk fisik. Infrastruktur riset dan inovasi di Kota Probolinggo dikelola oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait. Berikut merupakan Infrastruktur riset dan inovasi di Kota Probolinggo.

Tabel 2. 19 Infrastruktur Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo

NO	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI	FUNGSI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
INFRASTRUKTUR RISET				
1	LABORATORIUM KESEHATAN IKAN	Jl. D.I Panjaitan No 55.B, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan	Sarana Pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya meliputi pengujian kualitas air budidaya dan mikrobiologi	DKPP
2	KWSP (KAWASAN WISATA STUDI PERTANIAN)	Jl. Soekarno-Hatta No. 265, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran	Area pembelajaran (edukasi) dan pengelolaan peternakan, perikanan dan pertanian	DKPP
3	DEMPLOT PERTANIAN ORGANIK	Jl. Sunan Muria, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran	Lahan percontohan budidaya pertanian secara organik	DKPP
4	MUSEUM KOTA PROBOLINGGO	Jl Suroyo, Trisnogaran Kec Kanigaran	Berfungsi sebagai pelestari dan penyaji sejarah serta budaya Kota Probolinggo. Museum ini juga berfungsi sebagai tempat belajar sejarah bagi masyarakat, khususnya para siswa,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

			dan sebagai cermin bangsa melalui koleksi-koleksinya yang beragam	
5	MUSEUM dr SALEH	Jl. Dr Moch Saleh No 1 Trisnogaran Kec Kanigaran	Tujuan pendirian museum adalah untuk melestarikan bangunan tersebut dan sebagai sarana pendidikan sejarah bagi Masyarakat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6	UPTD. Laboratorium Lingkungan	Jl. Anggrek (Depan TPA Bestari), Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan	Memberikan pelayanan kepada individudan pelaku usaha meliputi pelayanan pengambilan contoh uji air dan pengujian kualitas air bersih, air badan air, dan air limbah	DLH
7	UPTD Lab Kesehatan Daerah	Jl DI Panjaitan No 63 Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo	Menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung upaya promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam bidang kesehatan	Dinkes
8	RTH Publik Jenis Pembibitan/Nursery			DLH
	a. Kebun anggur sumber mata air	Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan	Melestarikan tanaman, Menjaga kesuburan tanah, Meningkatkan produktivitas	

	b. Kebun bibit dinas pertanian	Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran	Melestarikan tanaman, Menjaga kesuburan tanah, Meningkatkan produktivitas	
9	RTH Publik Jenis Hutan Produksi			DLH
	Mangganisasi	Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran	Melestarikan dan Membudidayakan tanaman endemik, menjaga kesuburan tanah dan penghasil oksigen	
INFRASTRUTUR INOVASI				
1	RUMAH KEMASAN	Jl. Lingkar Utara, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan (timur terminal kargo)	Membantu pelaku usaha perikanan dan pertanian terkait informasi dan pengemasan produk (jenis, desain, dan bahan) sekaligus pembuatan kemasan sesuai produk	DKPP
2	BALAI BENIH IKAN (BBI)	Jl. Sunan Gunung Jati, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih	Sarana untuk menghasilkan benih ikan dalam rangka peningkatan produksi perikanan	DKPP
3	GEDUNG KESENIAN KOTA PROBOLINGGO	Jl Suroyo, Trisnogaran Kec Kanigaran	Berfungsi sebagai ruang semi publik untuk memfasilitasi dan mewadahi kegiatan seni dan budaya. Gedung ini ditujukan untuk pertunjukan, hiburan, dan pengembangan	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

			keaktivitas local artist	
4	Pusat Daur Ulang (PDU)	Jl. Gubernur Suryo No. 50 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran	Area pengelolaan dan pemilahan sampah meliputi pemilahan sampah an-organik dan pengelolaan sampah organik	DLH
5	RTH Publik Jenis Lapangan			DLH
	a. Lapangan sepakbola kademangan	Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan	sebagai paru-paru kota, menyediakan tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
	b. Lapangan Sumber Taman	Kel. Sumber Taman Kecamatan Wonoasih	sebagai paru-paru kota, menyediakan tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
	c. Lapangan Wonoasih	Kel. Wonoasih Kecamatan Wonoasih	sebagai paru-paru kota, menyediakan tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
	d. Lapangan Upacara Zipur	Kel. Sukabumi Kecamatan Mayangan	sebagai paru-paru kota, menyediakan tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
	e. Stadion Bayuangga	Kel. Sukabumi Kecamatan	sebagai paru-paru kota, menyediakan	

		Mayangan	tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
	f. Lapangan SMA K	Kel. Sukabumi Kecamatan Mayangan	sebagai paru-paru kota, menyediakan tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
	g. Lapangan tembak yon zipur	Kel. Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, menyediakan tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
	h. Lapangan Karyabhakti	Kel. Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, menyediakan tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
	i. Lapangan SMAN 2	Kel. Curahgrinting Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, menyediakan tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
	j. Lapangan SMAN 1	Kel. Curahgrinting Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, menyediakan tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
	k. Lapangan	Kel. Kebonsari	sebagai paru-paru	

	Sepakbola kebonsari	Kulon Kecamatan Kanigaran	kota, menyediakan tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
	1. GOR mastrip	Kel. Kedopok Kecamatan Kedopok	sebagai paru-paru kota, menyediakan tempat rekreasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan keindahan lingkungan	
6	RTH Publik Jenis Taman Kota			DLH
	a. Taman Adipura	Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	b. Taman Batas Ketapang	Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	c. Taman Kerapan Kambing	Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan	

			penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	d. Taman Terminal	Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	e. Taman RTH Semeru	Triwung Kidul Kecamatan Kademangan	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	f. Taman Batas Kedunggaleng	Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	

	g. Taman Batas Kedung Asem	Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	h. Taman Median STI	Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	i. Taman Perliman Mayangan	Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	j. RTH Aloon Aloon Barat	Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas	

			udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	k. RTH Aloon Aloon Timur	Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	l. RTH Taman Manula	Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	m. Taman Tugu Pancasila	Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	n. Taman Stadion	Kelurahan	sebagai paru-paru	

		Sukabumi Kecamatan Mayangan	kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	o. Taman Batas Wiroborang	Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	p. Taman Median Pang. Sudirman	Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	q. Taman Median Sumber Hidup	Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas	

			udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	r. RTH Maramis Sisi Timur	Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	s. RTH Maramis Sisi Barat	Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	t. Taman Area Gladak Serang	Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	u. Gladak Serang	Kelurahan	sebagai paru-paru	

		Kanigaran Kecamatan Kanigaran	kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	v. Taman Tugu Kecapan	Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	w. Taman Median Asabri	Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	x. RTH Brantas Depan PKL	Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan	

			masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	y. Taman Loji	Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	z. Taman Tugu Timur Gladak	Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
	aa.Taman Patung Mastrip	Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok	sebagai paru-paru kota, membantu mengatur siklus air, serta berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, RTH juga menjadi tempat rekreasi, olahraga	
7	RTH Publik Jenis Hutan Kota			DLH

	a. Hutko Gusdur	Jl. KH. Abdurahman Wahid sebelah timur perum bromo Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan	sebagai paru-paru kota, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, meredam kebisingan, dan menjaga kualitas air	
	b. Hutko Kinibalu	jalan KH A.Wahid Gusdur kinibalu Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan	sebagai paru-paru kota, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, meredam kebisingan, dan menjaga kualitas air	
	c. Hutko Semeru	Jl. Semeru TPS Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan	sebagai paru-paru kota, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, meredam kebisingan, dan menjaga kualitas air	
	d. Hutko Wonoasih Timur & Barat (Pasar Sapi)	jalan mastrip selatan TPU Timur makam cina Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih	sebagai paru-paru kota, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, meredam kebisingan, dan menjaga kualitas air	
	e. Hutko Yos Sudarso	jalan yos sudarso arum permai Kelurahan Mayangan Kecamatan	sebagai paru-paru kota, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, meredam	

		Mayangan	kebisingan, dan menjaga kualitas air	
	f. Hutko Botani Timur dan Barat	jalan basuki rahmad Timur TWSL Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan	sebagai paru-paru kota, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, meredam kebisingan, dan menjaga kualitas air	
	g. Hutko Sukoharjo (Patung Sapi)	jalan sunan muria timur patung sapi Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, meredam kebisingan, dan menjaga kualitas air	
	h. Hutko Belakang Eratex	Jl, supriadi Belakang Eratex Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, meredam kebisingan, dan menjaga kualitas air	
	i. Hutko Cyber (Citarum)	taman cyber citarum Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran	sebagai paru-paru kota, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, meredam kebisingan, dan menjaga kualitas air	
	j. RTHKP Kedupok	Jalan Mastrip Kel. Kedupok Kec. Kedupok	sebagai paru-paru kota, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, meredam	

			kebisingan, dan menjaga kualitas air	
8	Rumah Batik Kota Probolinggo	Jl Mastrip-Kota Probolinggo	Sebagai pusat pengembangan dan promosi batik khas daerah	Disperinaker
9	Galery Dekranasda	Jalan KH. Mas Mansyur Kota Probolinggo	Sarana pengembangan usaha UKM dan IKM di Kota Probolinggo	DKUPP
10	Gedung Kesenian	Jl Suroyo, Trisnogan Kecamatan Kanigaran	Berfungsi sebagai pusat kegiatan seni dan budaya, tempat pertunjukan, serta wadah untuk mengembangkan kreativitas dan apresiasi seni masyarakat. serta sarana edukasi dan pelestarian seni dan budaya.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber: Hasil Survey Primer, 2025

C. Program-Program Riset Dan Inovasi Daerah Yang Pernah Dilaksanakan

Setiap tahun Pemerintah Kota Probolinggo memiliki hasil-hasil kelitbangan berupa laporan/kajian. Laporan dan kajian yang disusun tidak hanya dilakukan oleh Bidang Riset dan Inovasi Daerah, akan tetapi beberapa Perangkat Daerah juga melakukan penyusunan laporan atau kajian sesuai dengan tema urusan pemerintahan masing-masing. Berikut merupakan daftar laporan/ kajian yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kota Probolinggo selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024).

Tabel 2. 20 Laporan/Kajian Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

NO	TAHUN KAJIAN	NAMA KAJIAN	PERANGKAT DAERAH
1	2020	Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Pasar Induk Agrobis Di Kota Probolinggo	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
2	2020	Kajian Rencana Induk Jaringan	Bidang Litbang (Bapperida

		Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Periode 2020 - 2024	Litbang Kota Probolinggo)
3	2020	Kajian Indeks Ketahanan Pangan	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
4	2020	Kajian Pemetaan Dan Pengembangan Sentra Produk Perikanan Kota probolinggo	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
5	2020	Penyusunan studi perluasan kantor DPRD Kota Probolinggo	Bidang Infracwil (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
6	2020	Analisis Investasi terhadap aset tetap instalasi air berupa sambungan rumah kepada PDAM Kota Probolinggo Tahun 2017, 2018, 2019	Bagian Perekonomian
7	2020	Kajian Pembangunan Kantor DISPOPAPAR	DISPOPAPAR
8	2020	Kajian Pembangunan Museum Artefak di Kota Probolinggo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	2021	Kajian Pengembangan Kota Probolinggo sebagai City of Logistic Untuk Mendukung Pelabuhan.	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
2	2021	Kajian Strategi Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Akibat dampak Bencana Pandemi COVID19	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
3	2021	Kajian Evaluasi Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kota Probolinggo	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
4	2021	Laporan Akhir Teknologi Pengadaan dan Pemasangan Alat Palang Pintu Kereta API	DISHUB
5	2021	Laporan Akhir Study Kaji Keefektifan Dana Bergulir Pada Pelaku Usaha Mikro Dan Koperasi	DKUPP

6	2021	Laporan Akhir Studi Kaji Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) DIKOTA Probolinggo	DKUPP
7	2021	Laporan Akhir Kajian Kelayakan Usaha Dana Analisis Investasi Pendirian BUMD PERSEKOD HANDAL BRILIAN BAYUANGGA	Bagian Perekonomian
8	2021	Laporan Akhir Kajian ECO- PESANTREN	Bidang PPM Kesra (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
9	2021	Lapkir Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan	Bidang Infracwil (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
10	2021	Lapkir Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD	Bidang Infracwil (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
11	2021	Kajian Mitigasi Bencana Berbasis RTH Publik BPBD TAHUN 2021	BPBD
12	2021	Kajian Indeks Minat Baca Masyarakat 2021	Disperpus
13	2021	Kajian History Line Museum Probolinggo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	2021	Laporan Akhir Revisi Masterplan Smart City	DISKOMINFO
15	2021	Laporan Akhir Kajian Arsitektur SPBE	DISKOMINFO
16	2021	Lapkir Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Informasi Dalam Implementasi Smart Environment di Kota Probolinggo	DISKOMINFO
17	2021	Lapkir Dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK)	DPUPR
18	2021	Lapkir Penyusunan Peluang Penanaman Modal	DPMPTSP

19	2021	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM Th 2021)	RSUD Dokter Mohamad Saleh
20	2021	Laporan Survei Kepuasan Karyawan (SKK Th 2021)	RSUD Dokter Mohamad Saleh
1	2022	Laporan Akhir Kajian Penataan dan Pengembangan Kawasan Pantai Permata Kota Probolinggo	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
2	2022	Lapkir Kajian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca serta Aksi Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Kota Probolinggo Tahun 2022-2030	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
3	2022	Lapkir Kajian Kebutuhan dan Penyediaan Lahan Pemakaman di Kota Probolinggo	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
4	2022	Lapkir Kajian Penyakit Mulut dan kuku di Kota Probolinggo	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
5	2022	Lapkir Kajian Koleksi Arkeologika, Etnografika dan Teknologi Museum Kota Probolinggo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	2022	Lapkir Environmental Health Risk Assesment (EHRA) KOTA PROBOLINGGO Tahun 2022	DINKES
7	2022	Lapkir Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Probolinggo (SSK)	Bidang Infracwil (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
8	2022	Lapkir Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Bidang Infracwil (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
9	2022	Lapkir Harmonisasi Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kota Probolinggo	DPUPR
10	2022	Lapkir Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan PD di lingkungan Pemkot Probolinggo	Bagian Organisasi
11	2022	Lapkir Kajian Rencana AKSI Satu Data Kota	DISKOMINFO

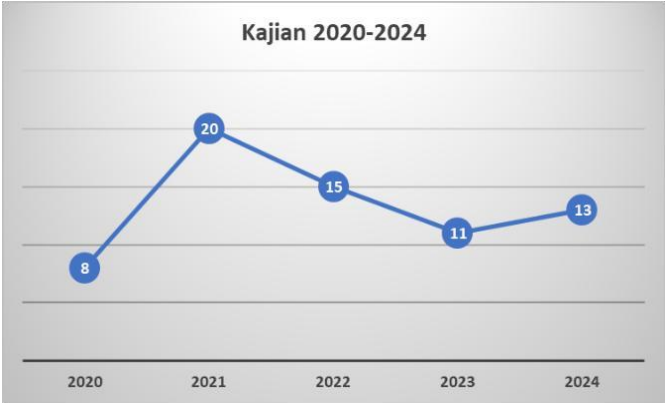
		Probolinggo Tahun 2022	
12	2022	Penyusunan Dokumen Unit Cost dan Tarif Praktek Klinik RS Pendidikan	RSUD Dokter Mohamad Saleh
13	2022	Kajian Kebutuhan Pelatihan - TNA (<i>Trainning Need Assesment</i>)	RSUD Dokter Mohamad Saleh
14	2022	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM Th 2022)	RSUD Dokter Mohamad Saleh
15	2022	Laporan Survei Kepuasan Karyawan (SKK Th 2022)	RSUD Dokter Mohamad Saleh
1	2023	Lapkir Kajian Peningkatan kapasitas Pelaku Pariwisata Guna Mendukung Pengembangan ekonomi kreatif Kota Probolinggo	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
2	2023	Lapkir Kajian Evaluasi terhadap Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
3	2023	Lapkir Analisa Pemberian Hibah Untuk Pembangunan Klinik Kesehatan Lembaga Nadhatul Ulama	DINKES
4	2023	Lapkir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	BPPKAD
5	2023	Lapkir Kajian Pengelolaan Pabrik Es, Es Flake Dan UPI Kota Probolinggo	DKPP
6	2023	Lapkir Opini Nilai Sewa dari aset berupa tanah, bangunan, dan mesin yang akan disewakan di Pabrik es, Es Flake dan UPI oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan	DKPP

		Perikanan Kota Probolinggo	
7	2023	Lapkir Kajian Analisis Usaha Probolinggo Plaza Kota Probolinggo	DKUPP
8	2023	Lapkir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2024-2025	DLH
9	2023	Penyusunan Dokumen Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas)	RSUD Dokter Mohamad Saleh
10	2023	Penyusunan Dokumen Rintek Penyimpanan Limbah B3	RSUD Dokter Mohamad Saleh
11	2023	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM Th 2023)	RSUD Dokter Mohamad Saleh
1	2024	Kajian Analisis Usaha Pasar Tradisional di kota Probolinggo Tahun 2024	Bidang Litbang (Bapperida Litbang Kota Probolinggo)
2	2024	Raperda Kota Probolinggo Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	SETWAN
3	2024	Raperda Kota Probolinggo Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	SETWAN
4	2024	Raperda Kota Probolinggo Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi	SETWAN
5	2024	Appraisal Parkir dan Ponten Pasar Ikan dan TPI 2024	DKPP
6	2024	Laporan akhir study Penilaian Kebutuhan Komunitas guna penguatan kearifan di bidang Ekonomi, sosial dan budaya	Bakesbangpol
7	2024	IPRO TWSL Kota Probolinggo	DPMPTSP
8	2024	Masterplan Pasar Agrobis Kota Probolinggo	DPMPTSP

9	2024	Kajian Analisis dan Studi Kelayakan Pendirian SMP Negeri 11 Kota Probolinggo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	2024	Penyusunan Dokuemn DELH	RSUD Dokter Mohamad Saleh
11	2024	Penyusunan Biaya Satuan Pelayanan Kesehatan	RSUD Dokter Mohamad Saleh
12	2024	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM Th 2024)	RSUD Dokter Mohamad Saleh
13	2024	Laporan Survei Kepuasan Karyawan (SKK Th 2024)	RSUD Dokter Mohamad Saleh

Sumber: Bapperida Kota Probolinggo, 2025

Riset atau kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 yaitu sebanyak 15 kajian, akan tetapi mengalami tren penurunan dibandingkan pada Tahun 2021 sebanyak 20 kajian.



Gambar 2. 6 Grafik Jumlah Kajian Kota Probolinggo 2020-2024

Selain riset, kondisi inovasi Pemerintah Kota Probolinggo dapat digambarkan melalui Indeks Inovasi Daerah (IID). Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. IID merupakan kumpulan inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Tujuan penilaian Indeks Inovasi Daerah antara lain:

- Memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat
- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap inovasi

pemerintah daerah

- Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang inovatif

Sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Probolinggo secara aktif melaporkan penerapan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri, melalui pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh BSKDN Kemendagri (eks-Badan Litbang Kemendagri). Predikat menjadi Kota Sangat Inovatif pernah diraih oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2021, dengan menduduki peringkat 8 nasional (peringkat 8 dari 93 kota pada 2021) dengan skor 61,51 atau kategori Sangat Inovatif dan peringkat 3 Provinsi Jawa Timur di bawah Kota Surabaya dan Kota Mojokerto. Namun demikian, pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 56,98 atau kategori Inovatif, baik dari segi predikat, skor IID, maupun jumlah inovasi yang dilaporkan. Tahun 2024, Kota Probolinggo menempati posisi 23 nasional dengan skor 66,38 poin atau rangking 5 tingkat Kota Provinsi Jawa Timur di bawah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Batiu dan Kota Madiun. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk melakukan berbagai terobosan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai capaian IID. Salah satunya adalah melakukan Kajian Strategi peningkatan skor IID tahun 2024. Tujuannya, akan Pemerintah Kota Probolinggo memiliki sistem tata kelola dan perangkat pendukung untuk membangun ekosistem inovasi daerah. Jumlah inovasi daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Jumlah dan Peringkat Inovasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Inovasi Terlapor di IGA	37	51	58	75	110
Jumlahinovasi yang ditetapkan SK	0	0	137	150	149
Skor	59	61,51	56,98	64,01	66,38
Rangking Indonesia	72	8	25	13	24
Rangking Jawa Timur	7	3	3	2	5
Kategori	Kurang inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif

Sumber: Bapperida Kota Probolinggo, 2025

Pada tahun 2019 belum ditetapkan SK Wali Kota sebagai dasar hukum inovasi, begitupun pada tahun 2020 belum ditetapkan inovasi melalui SK Wali Kota. Hanya penetapan inovasi menggunakan SK masing-masing Kepala OPD. Skor kematangan IID Kota Probolinggo, menunjukkan tren kenaikan yang moderat sejak tahun 2022 dengan rata-rata sebanyak 4,7 poin, dimana tahun 2022 skor 56,98 menjadi 66,38 di tahun 2024. Meskipun skor tahun 2024 ini masuk kategori Sangat Inovatif, akan tetapi hanya batas rendah. Pemerintah

Kota Probolinggo telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka membangun ekosistem inovasi daerah, yang salah satunya adalah peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Namun demikian, berbagai kendala dan tantangan masih terjadi, sehingga capaian masih belum maksimal. Pemerintah Kota Probolinggo, terus berupaya meningkatkan capaian Skor Nilai IID setiap tahun. Indeks Inovasi Daerah (IID) menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Berdasarkan Perwali Kota Probolinggo No 37 Tahun 2024 tentang tata cara pemberian penghargaan inovasi daerah, ASN, Non ASN, dan masyarakat dapat memperoleh penghargaan inovasi daerah yang dinilai oleh tim seleksi inovasi daerah yang ditetapkan melalui Keputusan walikota. Tujuan daripada pemberian penghargaan antara lain:

- Mendorong terciptanya budaya berinovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Memberikan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- Menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja dan untuk berperan aktif dalam pembangunan di Daerah dan mendorong semangat melahirkan inovasi terbaik bagi kemajuan Daerah. Bentuk Inovasi Daerah meliputi:
- Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; Merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- Inovasi Pelayanan Publik; Merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Jenis Inovasi Daerah meliputi:

- Inovasi Digital; yakni inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak. Inovasi digital harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
- Inovasi non-digital. Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna. Tata cara pemberian penghargaan inovasi daerah diatur dalam Perwali Kota Probolinggo No 37 Tahun 2024. Berikut merupakan data inovasi daerah Kota Probolinggo Tahun 2024.

Tabel 2. 22 Inovasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024

No	Judul	Bentuk Inovasi	Nama Perangkat Daerah
1	Si Ijol Raket (Sistem Infomasi Ijazah online ramah disabilitas dan kesetaraan)	Layanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Digitalisasi Katalog Koleksi Museum Probolinggo Berbasis Flipbook	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
3	PENTER BEN ALIM (Penguatan pendidikan karakter berbasis Pondok Pesantren yang terintegrasi dalam kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5))	Inovasi Lainnya	
4	TUGU Bu RITA (Satu Guru Satu Cerita)	Inovasi Lainnya	Dinkes PPKB
5	Si Deka Pro (Sistem Informasi Pelaporan Dinkes)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
6	SISKIA PROCANTIK (SISTEM INFORMASI KESEHATAN IBU DAN ANAK)	Layanan Publik	
7	Simpustronik (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Elektronik)	Layanan Publik	
8	Siji online Aplikasi perijinan untuk pengajuan surat rekomendasi ijin kerja tenaga kesehatan dan ijin operasional fasilitas kesehatan di lingkungan Kota Probolinggo.	Layanan Publik	
9	Sigap PRO (Sinergi Gerakan ASN dan Masyarakat untuk Penanganan	Layanan Publik	

	Stunting Kota Probolinggo)		
10	Kartu PTO Pemantauan Terapi Obat	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Puskesmas Jati
11	OPERA GENTING (Optimalisasi Posyandu Remaja Dalam Upaya Pencegahan Stunting Sejak Dini)	Layanan Publik	
12	POSBINDU KELILING	Layanan Publik	
13	ASMARA SEJATI (Atasi Bersama Masalah Jiwa Puskesmas Jati)	Layanan Publik	
14	SMART UBM (Strategi Mengatasi Adiksi Rokok Terintegrasi dengan Upaya Berhenti Merokok)	Layanan Publik	
15	Sistem Pembinaan Bagi Penderita dengan gangguan jiwa (Teman Bahagia)	Layanan Publik	Puskesmas Kanigaran
16	Si KEPHO (Sistem Inovasi Kelompok Peduli HIV dan ODHA)	Layanan Publik	
17	Ajak Kawan Pintar	Layanan Publik	
18	Ning Mas Ayu (Skrining Kesehatan Masyarakat Pelayanan Terpadu)	Layanan Publik	
19	Si Denting (Aksi Pendampingan Penurunan Stunting)	Layanan Publik	
20	CERDIKA (Cek Rutin Diabetes dan Hipertensi di Puskesmas Kanigaran)	Layanan Publik	
21	Sari Perak Jos / Sari Perak Kepo (Satu Hari Perawatan Keluarga - Kenali, Periksa, Obati)	Layanan Publik	Puskesmas Sukabumi
22	Pensikurmanis (Pemantauan Hipertensi melalui Deteksi Dini)	Layanan Publik	
23	Hiperaktif Bro (Hipertensi Aktif Berobat)	Layanan Publik	Puskesmas Kedopok
24	HANDAL PRT (HANya dari rumah sudah Dapat Layanan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga)	Layanan Publik	Puskesmas Ketapang

25	Gempita Noasih (Gerakan Masyarakat Pintar Sehat Jiwa Noasih)	Layanan Publik	Puskesmas Wonoasih
26	Si Marlana Aja (Sayang Ibu, Melahirkan Aman, Ramah, Lengkap Identitas Anak, Ambulance Siap Jemput dan Antar)	Layanan Publik	
27	Sakera (Sadar Kehamilan Harus Sehat)	Layanan Publik	
28	Si Unyil (Sweeping Imunisasi untuk Menyisir Imunisasi Lengkap)	Layanan Publik	
29	Jebbing UKS (Remaja Sehat Bebas Anemia Cegah Stunting dengan UKS)	Layanan Publik	
30	Bucin Yuk (Bimbingan untuk Calon Pengantin yang Unggul dan Berkualitas)	Layanan Publik	
31	Morning Time (Mobile Skrining Penyakit Tidak Menular)	Layanan Publik	
32	Teman Asih (Tong Komposter Mandiri Puskesmas Wonoasih)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
33	Yuk Disepuro (Yuk Digalakkan Sregep Sisir Putung Rokok)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
34	CEK KOMISI (Cek Kotak Obat Emergensi)	Layanan Publik	
35	Peningkatan Informasi Edukasi Alur Penelitian Menggunakan Media Sosial	Layanan Publik	
36	GuArDING (negGuh, maccA, ngeDING)	Layanan Publik	
37	SI APIK (Sistem Aplikasi Inventaris Alat Kesehatan)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
38	Si Emping (StIkder EMoticon PengINGat)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	

39	Ar Rozy Mobile Pharmacy	Layanan Publik	RSUD Ar Rozy
40	BATIK MANGGUR (Limbah Domestik RS BerManfaat bagi Lingkungan dengan Upaya Bank Sampah Ar Rozy)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
41	SATE PAK WALI (Sistem Informasi Pengelolaan data Rumah Tidak Layak Huni)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPUPR KP
42	Sie Damcil (Sistem Inovasi Edukasi Pemadam Kebakaran Kecil)	Layanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja
43	SIAB MAS PRO	Layanan Publik	BPBD
44	PUSDALOPS “MENYALA” (Membantu, Menyelamatkan, Melayani)	Layanan Publik	
45	Gotku Resik	Inovasi Lainnya	Dinsos PPPA
46	ULTPK (Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan)	Layanan Publik	
47	SPOT HANDAL	Layanan Publik	
48	JARING PERAK (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak)	Layanan Publik	
49	Si Mak Pro	Inovasi Lainnya	
50	CARING GEDSI	Inovasi Lainnya	
51	OMARU (Obrolan Jumat Seru)	Layanan Publik	
52	Pondasi Hati	Layanan Publik	
53	Jebol Tesa ABK (Jemput Bola Terapi dan Diagnosa ABK)		
54	Jebol Cinta (Jemput Bola Tracing Anak Putus Sekolah)		
55	SI TAPIR (Informasi Tata Cara Permohonan Izin Reklame)	Layanan Publik	DPMPTSP
56	SIAPP KAKA (Aksi Andalan Pendampingan Pelayanan Perizinan ke Kelurahan dan Kecamatan)	Layanan Publik	
57	DEWI JOS (Destinasi Wisata Jemput	Tata Kelola	

	OSS)	Pemerintahan Daerah	
58	Pintar Investpro (Peningkatan Realisasi Investasi untuk Kota Probolinggo)	Layanan Publik	
59	MPP SMART NUMBER	Layanan Publik	
60	SANDARAN GADIS (Semua Layanan Perizinan Datang ke Rumah untuk Penyandang Disabilitas)	Layanan Publik	
61	Jempol Untukmu	Inovasi Lainnya	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
62	Mlijo Online Probolinggo	Layanan Publik	
63	Setetes Mol Sejuta Kehidupan	Layanan Publik	
64	KOPI SIAGA (Toko Pengendali Inflasi Harga)	Layanan Publik	
65	JE'PANIK & JE'PANAS (Program jemput sampah organik (JE'PANIK) dan bank sampah (JE'PANAS) dengan sistem reward bagi masyarakat)	Layanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup
66	OGOS PANSER (One Gate One System Pantau Sertifikat)	Layanan Publik	
67	DIKMAS (Detektif Masyarakat)	Layanan Publik	
68	SI MAK NGEBOR LUBER (Aksi Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim dengan Perbanyak Biopori Lubang Besar)	Inovasi Lainnya	
69	PROBALISTIK (Kota Probolinggo Batasi Plastik Sekali Pakai)	Inovasi Lainnya	
70	PELITA SI ABAH (Pemanfaatan Limbah Tahu Sebagai Alternatif Bahan Bakar Murah dan Ramah Lingkungan)	Inovasi Lainnya	
71	BAPAK SREGEK (Buat Atasi Perubahan Iklim Serap Emisi	Inovasi Lainnya	

	Gas Rumah Kaca dengan Penanaman Pohon)		
72	CARLA (Café Ramah Lingkungan)	Inovasi Lainnya	
73	PASPROTOL (Pasar Penukaran Botol)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
74	ADEK DEWA (Anak Dekat Dengan Satwa)	Pelayanan Publik	
75	Barcode/QR Code Flora & Fauna	Pelayanan Publik	
76	Akik Cemerlang (Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga Cepat, Mudah, Efisien, Sekali Urus 1 Hari Langsung Jadi)	Pelayanan Publik	Dispendukcapil
77	Jurus AK3 Plus (Jadi Sekali Urus Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan KTP-el Plus Santunan Kematian)	Pelayanan Publik	
78	DERAI HARU (Dokumen Akta Cerai, Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk Elektronik Baru)	Pelayanan Publik	
79	KALPATARU (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Surat Nikah bagi Pasangan Suami Istri Baru)	Pelayanan Publik	
80	SEPATU PAPA (Sepaket Dapat Tujuh Pelayanan Akta Perkawinan)	Pelayanan Publik	
81	Penggunaan Software VISSIM Sebagai Alat Bantu Simulasi Lalu Lintas Berkala Mikroskopik Pada Ruas Jalan Panglima Sudirman di Kota Probolinggo	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan
83	Media Analitik	Pelayanan Publik	
84	Portal Emas (Probolinggo Smart Digital Melayanni Masyarakat)	Pelayanan Publik	
85	Golap Sukot	Tata Kelola Pemerintahan	

		Daerah	
86	Pentatik	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
87	Katalog Sistem Elektronik	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
88	Klinik Hoaks	Pelayanan Publik	
89	View Probolinggo	Pelayanan Publik	
90	KARTU E-UMKM	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
91	PELARIS E PASAR (PELAYANAN RETRIBUSI E TUNAI PADA PEDAGANG PASAR DI KOTA PROBOLINGGO)	Pelayanan Publik	
92	Marketplace UMIK Hebat	Pelayanan Publik	
94	Pesta Barbeque (Pembentukan Plasma melalui Kemitraan dengan Berbagi dan Shodaqoh Ilmu)	Pelayanan Publik	
95	Damar Sutra (Pemberdayaan Usaha melalui Kemitraan untuk Pelaku Usaha Sukses Sejahtera)	Pelayanan Publik	
96	Jalin Selasih (Jajaki Lintas Sektor untuk Wujudkan Masyarakat Sukses dan Berhasil)	Pelayanan Publik	
97	LAYANAN UMKM 3 in 1	Pelayanan Publik	
98	WARUNG TPID	Pelayanan Publik	
99	BILIK KOPI (Bimbingan, Layanan, Informasi Koperasi Konsultasi, Pendidikan, dan Sosialisasi)	Pelayanan Publik	
100	WARUNG DAHAR (Warung Pengendalian Harga)	Pelayanan Publik	
101	PASRAH DIKSUM (PASAR MURAH DI KELURAHAN DAN FASILITAS UMUM) DI KOTA PROBOLINGGO	Pelayanan Publik	
102	LENTERA SEJATI (Leader dan	Pelayanan Publik	

	Enterpreneurship untuk kesetaraan dan kesejahteraan inklusif masyarakat kota Probolinggo)		
103	Juwita Malam (Sistem Informasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Dalam Negeri)	Pelayanan Publik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
104	MOKA LATE (Promosi Perpustakaan melalui Digital dan Konvensional)	Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
105	STEAK TEMPE (Jasa Antar Jemput Buku ke Tempat Pemustaka)	Pelayanan Publik	
106	Gitaris Gitaris (diGitalisasi Arsip Buku Induk Sekolah)	Pelayanan Publik	
107	Seleksi Digital	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
108	Pendaftaran Pelatihan Online	Pelayanan Publik	
109	Klik PRO (Klinik IKM Kota Probolinggo)	Pelayanan Publik	
110	SISTEM INFORMASI KINERJA TERINTEGRASI HEBAT AKURAT DAN AKUNTABEL (sinergi handal)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bagian Organisasi
111	Si-Ariel (Sistem Informasi Arsip Elektronik)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
112	SPG (Sistem Pemakaian Gedung)	Pelayanan Publik	
113	SI PANDA (Sistem Informasi Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
114	MAMA HANDAL (Mlijo online atasi masalah inflasi harga dengan Digitalisasi)	Inovasi Lainnya	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
115	E-TAMOY (Elektronik tertib	Tata Kelola	Sekretariat

	administratif dan obyektif kunjungan tamu)	Pemerintahan Daerah	DPRD
116	Pengendalian hasil Pemeriksaan Berbasis TLS (Traffic Light System) pada Platform e-wasgo 2.0	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inspektorat
117	Klinik Sultan (Klinik Konsultasi Pengawasan)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
118	Pelaporan Gratifikasi Mandiri melalui Websidite Gratifikasi Online (GOL) KPK di kota Probolinggo	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
119	Probolinggo Inklusi	Pelayanan Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
120	Manten Serasi (manfaatkan teknologi untuk aksi pembinaan dan Rancang Inovasi)	Pelayanan Publik	
121	Perspektif Logika (Penataan Rencana Sistem dan Pelaksanaan Kajian yang adaptif teknologi dan Kreatif)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
122	E-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Online)	Pelayanan Publik	
123	E-SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak PBB Secara Online)	Pelayanan Publik	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
124	DOU (Dari, Oleh dan Untuk) ASN	Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
125	JUMPA JELITA (Jum'at Pagi Jendela	Pelayanan Publik	

	Untuk ASN)		
126	I-POTRET (INTERGRATED POTENCIAL TALENT REPORT)	Pelayanan Publik	
127	Noasih Trans	Pelayanan Publik	Kecamatan Wonoasih
128	Si Lidia (Arsip Digital dan Alih Media)	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
129	Kasih Ranting	Pelayanan Publik	
130	Komunitas Noasih Kreatif & Mandiri (KNKM)	Pelayanan Publik	
131	Pembentukan Tim Penerapan Arsip Buku Tanah/Leter C secara elektronik berbasis abjad di kelurahan wonoasih	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih
132	SGM BAROKAH	Pelayanan Publik	Kelurahan Pakisaji Kecamatan Wonoasih
133	Tim Tanggap Darurat dan Siaga Bencana	Pelayanan Publik	Kelurahan Kedung Geleng, Kecamatan Wonoasih
134	BOS DILAN (Bantuan Sosial Delivery Lansia)	Pelayanan Publik	Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih
135	Randu Basah	Pelayanan Publik	
136	SeSaReNgan PKK Kelurahan Curah Grinting (Sedekah Sayuran Sesarengan PKK Kelurahan Curah Grinting	Inovasi Lainnya	Kelurahan Curah Grinting, Kecamatan Kaniagaran
137	Gepres Jitu (Gerakan Peduli Sampah Siji Pitu)	Inovasi Lainnya	Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran
138	Kamelina (Kampung Edukasi Lingkungan Anak)	Inovasi Lainnya	

140	BONSAKUL CHANELL	Inovasi Lainnya	
141	Berkat (Bertakziah kirim akte kematian)	Pelayanan Publik	Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran
142	SIRUGA (Siap antar surat keterangan warga)	Pelayanan Publik	Kecamatan Kedopok
143	BUNGA EMAS (Nabung Sampah di tukar Emas Mini God)	Inovasi Lainnya	Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok
144	LAMPAH IBU (Kelola Sampah Untuk Ibadah Umroh)	Inovasi Lainnya	
145	GESIT J'COOL (GERAKAN SIGAP PENURUNAN STUNTING)	Inovasi Lainnya	Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok
146	Posyankumham (Pelayanan Hukum dan Ham)	Pelayanan Publik	Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok
147	Kader Sadar Hukum	Pelayanan Publik	
148	Ngopi Mas (Ngobrol Pintar dengan Masyarakat)	Inovasi Lainnya	
149	JUBERTING (Jumat Berkah untuk Balita Stunting)	Inovasi Lainnya	Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok
150	JOS KEWARGA (Jemput Bola Surat Keterangan Waris Langsung ke Rumah Warga)	Pelayanan Publik	Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok
151	HARKAT GADIS TURING bersama PKK (HAdiR untuk masyaraKAT melalui GerAkan DISeminasi informasi dan intervensi TURunkan stuntING bersama PKK)	Inovasi Lainnya	Kecamatan Kademangan
152	KAMPUNG TEMATIK	Inovasi Lainnya	

153	Aplikasi Monev UMKM	Pelayanan Publik	
154	BPJS Bangkit	Pelayanan Publik	
155	SIPETA CAMAT	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
156	POLING (Pojok Baca Keliling)	Inovasi Lainnya	
157	RUMAH BIBIT	Inovasi Lainnya	Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan
158	TAS THR (Tukar Sampah dengan Tambungan hari Raya)	Inovasi Lainnya	
159	Ayo Ting-ting (Ayo Cegah Stunting dengan Parenting)	Inovasi Lainnya	
160	S'Degan	Pelayanan Publik	
161	Angsa PW (Anjangsana ke PKK RW)	Pelayanan Publik	
162	Gitar Lawak Pro (Digitalisasi Daftar Layanan Warga Kelurahan Triwung Lor)	Pelayanan Publik	Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan
163	TeMan SAYang Karang Taruna (Tebar Manfaat Sahabat Anak Yatim Anggota Karang Taruna)	Inovasi Lainnya	
164	BAZAR PELAYANAN	Pelayanan Publik	Kecamatan Mayangan
165	JEBOL KERIS	Pelayanan Publik	
166	Kesaktian Gaman (Kelurahan Serahkan Akta Kematian Kepada Warga Mayangan)	Pelayanan Publik	Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan
167	Warung PKK	Inovasi Lainnya	Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan
168	Pojok Literasi Arkeologi Sunan Kali Banger	Inovasi Lainnya	
169	Ngelayat (Ngelayani Akta Kematian)	Pelayanan Publik	
170	Kampung batik Baremi	Inovasi Lainnya	
171	Rumah Tempe Wijaya Kusuma	Inovasi Lainnya	

172	Solar Cell Energy Mobile	Inovasi Lainnya	
173	Si Kancil (Sistm Informasi Kader PSN Cilik)	Inovasi Lainnya	Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan
174	Pengelolaan Arsip Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Digital di Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
175	PESSE JATI (Pesta Seni Kelurahan Jati)	Inovasi Lainnya	Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan
176	SIMOBAB (Sistm Mobile Bayuangga Kota Probolinggo)	Pelayanan Publik	PUDAM Bayangga
177	Simangga Muda (Aplikasi Masyarakat Pelanggan Perumda Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo)	Pelayanan Publik	
178	CODET (<i>Cash on Delivery Transaction</i>)	Pelayanan Publik	
179	Prolang Spensa	Inovasi Lainnya	SMPN 1
180	Batik Spero	Inovasi Lainnya	SMPN 2
181	SPEROSMART	Pelayanan Publik	
182	Jeruk Purut	Inovasi Lainnya	SMPN 3
183	SMART SPEGA	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	
184	KALIJAGA (Kompetisi Liga Orientasi Jiwa dan Raga)	Pelayanan Publik	SMPN 4
185	KARANI (Karakter Qurani)	Pelayanan Publik	
186	<i>Education Application and Intergrated School System</i> (EASY)	Pelayanan Publik	SPMN 5
187	SMART PLUS	Inovasi Lainnya	
188	SSB (Sabtu Sehat Bersih)	Inovasi Lainnya	
189	Prestasi juz Ama (Si Tajam)	Inovasi Lainnya	
190	Jatuhati (jajanan sehat dan inovasi)	Inovasi Lainnya	

191	API MEMBARA (Apel Pagi Membentuk Karakter Mulia)	Inovasi Lainnya	SMPN 6
192	JUMPA GEMAU (Jumat Pagi Gerakan Membaca Al-Quran)	Inovasi Lainnya	
193	Kotak ABU NAWAS (Kotak Aduan Bullying dan Kenakalan Siswa di Sekolah)	Inovasi Lainnya	
194	Produk Unggulan “Minuman Sari Sereh Estu“	Inovasi Lainnya	SMPN 7
195	Koala Wolu (Kompos Alami SMP Wolu)	Inovasi Lainnya	SMPN 8
196	BATOLU (Bayam Brazil dan Toga Wolu)	Inovasi Lainnya	
197	Bima Wolu	Inovasi Lainnya	
198	JEMPOL PIKU (Jemput Bola Pinjam Buku)	Pelayanan Publik	
199	SONA SATU (Sistem Online Layanan Sekolah Terpadu)	Inovasi Lainnya	SMPN 9
200	Batik Sat Set (Eco Print) pembaharuan dari Batik Sat Set	Inovasi Lainnya	SMPN 10
201	SI PINTER (Sistem Informasi Pendidikan Terpadu)	Pelayanan Publik	SD Negeri Sukabumi 2
202	Emergency Solar Cell	Inovasi Lainnya	Kelurahan Sukabumi

Sumber: Perwali Kota Probolinggo No 68 Tahun 2024

D. Anggaran riset dan inovasi daerah

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa prosentasi anggaran Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo mengalami fluktuatif dari tahun 2020 yang menunjukkan prosentase 0,58% dari APBD Kota Probolinggo Tahun 2020 mengalami peningkatan di Tahun 2021 yang kemudian mengalami penurunan di Tahun 2022-2024, hingga di Tahun 2024 sebesar 0,33% dari APBD Kota Probolinggo Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 23 Persentase Anggaran Riset dan Inovasi Daerah terhadap APBD Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Anggaran Riset/ Penelitian di Kota Probolinggo	Total APBD Kota Probolinggo	Persentase Anggaran Riset/ Penelitian	Keterangan	Pagu
1.	2020	6.296.137.500,00	1.082.004.882.500,62	0,58%	Total Anggaran Riset/ Penelitian TA.2020 dari kode rekening:	
					5222101 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.500.137.500,00
					5222102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.799.000.000,00
					5222103 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00
					5222104 Belanja Jasa Konsultansi Kesehatan	15.000.000,00
					5222105 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	1.460.000.000,00
					5222105 Belanja Jasa Konsultasi Penilaian	520.000.000,00
Total						6.296.137.500,00
2.	2021	13.930.916.360	1.113.315.247.534,00	1,25%	Total Anggaran Riset/ Penelitian TA.2021 dari kode rekening:	
					5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.852.526.105,00
					5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.078.390.255,00

Total						13.930.916.360,00
3.	2022	12.280.212.360	1.263.103.482.080,00	0,97%	Total Anggaran Riset/Penelitian TA.2022 dari kode rekening:	
					5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.625.705.360,00
					5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.654.507.000,00
Total						12.280.212.360,00
4.	2023	6.488.485.646	1.116.603.394.169,00	0,58%	Total Anggaran Riset/Penelitian TA.2023 dari kode rekening:	
					5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.523.761.646,00
					5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.964.724.000,00
Total						6.488.485.646,00
					Total Anggaran Riset/Penelitian TA.2024 dari kode rekening:	

5.	2024	3.655.346.733	1.099.642.611.061,00	0,33%	5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	603.357.654,00
					5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.051.989.079,00
Total						3.655.346.733,00

Sumber: BPPKAD dan Bapperida Kota Probolinggo, 2025

2.2.2 Kelembagaan IPTEK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo, pada pasal 3 huruf e angka 1 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah antara lain berupa Badan Daerah terdiri dari antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, yang terintegrasi dengan penggabungan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi, sehingga berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan tetap mempertimbangkan perhitungan nilai variabel dari fungsi penunjang urusan pemerintahan, merupakan Badan Tipe A.

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo, dinyatakan di pasal 3 bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo terdiri dari: kepala badan, sekretaris (2 sub bagian), dan 5 bidang, salah satunya adalah Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Pada pasal 10 diuraikan tentang Tugas dan Fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, sebagai berikut:

1. Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan di bidang riset dan inovasi daerah dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - Penyusunan perencanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian peraturan, penerapan, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Penyusunan kebijakan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian peraturan, penerapan, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi pengkajian peraturan, penerapan, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian peraturan, penerapan, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian peraturan, penerapan, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di Kota Probolinggo terdapat dua perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga dan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo. Minimnya jumlah perguruan tinggi di Kota Probolinggo juga berdampak pada minimnya kegiatan riset-riset inovasi yang outputnya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.3 Jejaring Riset dan Inovasi Daerah

Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Probolinggo dan atau Bapperidalitbang dengan Universitas atau Perguruan Tinggi antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 24 Kerja Sama Kota Probolinggo dengan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lain

No	Tahun	Kerjasama		Tujuan
		Pihak ke 1	Pihak ke 2	
1	2020	Pemkot Probolinggo	Universitas Trunojoyo Madura	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
		Pemkot Probolinggo	Universitas Airlangga	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia
		Pemkot Probolinggo	Universitas Brawijaya	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Untuk Pembangunan Kota Probolinggo
2	2022	Universitas Sains Al Quran Jawa Tengah di Wonosobo	Pemkot Probolinggo	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Program

				Pembangunan Daerah
		Pemkot Probolinggo	Univ Negeri Surabaya	Pendidikan, Pelatihan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		Politeknik Transportasi Darat Indonesia -STTD	Pemkot Probolinggo	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di Bidang Perhubungan Darat di Wilayah Kota Probolinggo, pelaksanaan pendidikan tinggi, pengusulan formasi dan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil
		Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya	Kerjasama dalam pengembangan potensi bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata di Kota Probolinggo
		Pemkab Pasuruan	Pemkot Probolinggo	Penyediaan Bantuan Instruktur Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
		Pemkot Probolinggo	Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas	Program Inklusi Disabilitas di Kota Probolinggo
		Bapperida Litbang	Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo(PPDiS)	Implementasi Program Inklusi Disabilitas di Kota Probolinggo
		Pemkot Probolinggo	UPM	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, Pengabdian Kepada

				Masyarakat, Dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi Di Kota Probolinggo
		Pengadilan Negeri	DPMPTSP	Penyelenggaraan Layanan Surat Keterangan (LAUT TERA) Di Mall Pelayanan Publik
		Pengadilan Negeri	Seluruh kecamatan	Pemanfaatan Layanan Surat Keterangan {LAUT TERA}
		Pemprov	Pemkot Probolinggo	Replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	Kemenag	Penerbitan Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk elektronik Dan Buku Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Baru (PASUTRI)
		Pemkot Probolinggo	Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu	Pendampingan Sister City Kota Probolinggo Dengan Kota Di Korea Selatan, Jepang, Dan Australia
3	2023	• Pemkab Malang • Pemkab Pasuruan • Pemkab Probolinggo • Pemkab Lumajang • Pemkot Malang • Pemkot Pasuruan • Pemkot Probolinggo	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Kerjasama Pembangunan Daerah Di Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS)
		• Pemkot Probolinggo	PT Eratex DjajaTbk.Proboling	Pengembangan Sumber Daya Kota

			go	Probolinggo
		Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo	PT Eratex Djaja Tbk Probolinggo	Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Menjahit Komponen Pakaian (Operator Garmen)
		BPPKAD	PT Taspen	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Berbasis Web Dan Pelayanan Proaktif Bagi Pegawai ASN
				Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
		Pemkot Probolinggo	Yayasan Boemi Saleh Probolinggo	Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Rumah dr Mohamad Saleh
		Dinas Pendidikan	Yayasan Boemi Saleh Probolinggo	Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Rumah dr Mohamad Saleh
		Pemkot Probolinggo	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Sinerginitas Pembangunan Daerah Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur
		Pemkot Probolinggo	Pemkab Sumedang	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
		Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	Yayasan Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo	Kerjasama Dalam Pengembangan Potensi Bidang Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata
		DLH Prov Jatim	DLH Kota Probolinggo	Pelayanan Pengambilan Dan Pengujian Contoh Uji Kualitas Lingkungan
		Pemkot Probolinggo	YAYASAN ART PHOTOGRAPHY OF	Pengembangan Promosi Pariwisata Kota Probolinggo

			INDONESIA	
		Kecamatan Wonoasih	Amik Taruna Probolinggo	Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Serta Pengembangan Teknologi Di Kecamatan Wonoasih
		Pemkot Probolinggo	Pemkab Probolinggo	Replikasi Inovasi Daerah
4	2024	Pemkot Probolinggo	Pemkab Pasuruan	Replikasi Inovasi Daerah
		Pemkot Probolinggo	Universitas Brawijaya Malang	Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Kota Probolinggo
		Pemkot Probolinggo	Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer (AMIK) Taruna Probolinggo	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kota Probolinggo
		Diskominfo	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Amik Taruna	Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
		Pemkab Sampang	Pemkot Probolinggo	Replikasi Inovasi Daerah
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PT. ERATEX DJAJA	Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Kejuruan Operator Menjahit Pakaian Jadi
		Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya	BKPSDM	Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Bagi Dokter Utusan Khusus

		Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Pemprov Jatim Pemkot Probolinggo	Sinergi Pembangunan, Pengoperasian, Dan Perawatan Jaringan Peralatan Dan Stasiun
		Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)
		Pemkot Probolinggo	Pemkab Situbondo	Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Dan Pengembangan Potensi Daerah
		Pemkab Situbondo	Pemkot Probolinggo	Replikasi Inovasi Daerah
		Pemkot Probolinggo	Universitas Airlangga Surabaya	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		FKM Unair	Dinkes	Tridharma Perguruan Tinggi
		Pemkot Probolinggo	Pemkot Mojokerto	Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengembangan Potensi Daerah
		Pemkot Probolinggo	Pemkab Lumajang	Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengembangan Potensi Daerah
		Pemkot Probolinggo	Pemkot Mojokerto	Replikasi Inovasi Daerah
		Pemkot Probolinggo	Pemkab Banyuwangi	Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengembangan Potensi Daerah
		Pemkot Probolinggo	Pemkab Banyuwangi	Replikasi Inovasi Daerah

		Pemkot Probolinggo	Pemkot Pasuruan	Replikasi Inovasi Daerah
		Pemkot Probolinggo	Universitas Negeri Malang	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
		Pemkot Probolinggo	Pemkab Malang	Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengembangan Potensi Daerah
		Pemkot Probolinggo	Pemkab Malang	Replikasi Inovasi Daerah
5	2025	Pemkot Probolinggo	Pemkot Surabaya	Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengembangan Potensi Daerah
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo	Fakultas Ilmu Pndidikan UM Malang	Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kota Probolinggo
		Pemkot Probolinggo	ITS Surabaya	Pendidikan. Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kota Probolinggo
		Pemkot Probolinggo	Universitas Hafshawaty Zainul Hasan	Pendidikan. Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kota Probolinggo
		Dinkes	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Magang dan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber: Bapperida Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data Bapperidalitbang selama kurun waktu lima tahun (2020-2024) kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo cenderung mengalami trend peningkatan dimana pada Tahun 2024 sebanyak 21 kerjasama telah dilakukan. Sementara ini, pada Tahun 2025 hingga bulan Maret telah terdapat 5 kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Sedangkan pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Probolinggo tidak melakukan agenda kerjasama terkait riset dan inovasi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 7 Grafik Jumlah Kerja Sama yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020-2025

Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Universitas atau Perguruan Tinggi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota bertujuan pada kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan potensi daerah, dan replika inovasi daerah. Melalui Kerjasama yang dilakukan, diharapkan Kota Probolinggo mampu mengembangkan kemampuan dalam melakukan riset dan inovasi daerah dengan potensi yang ada.

Kemampuan riset dan inovasi Kota Probolinggo dalam melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) masih perlu diperkuat agar dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat memperkuat kapasitas Kota Probolinggo dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, seperti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan secara akuntabel dan partisipatif, serta adanya struktur birokrasi yang telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Untuk meningkatkan efektivitas kajian kebijakan, diperlukan penguatan dalam aspek pengumpulan dan analisis data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data kebijakan. Dengan langkah-langkah ini, Kota Probolinggo diharapkan dapat lebih baik dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga didukung oleh data dan analisis yang kuat.

2.3 PENENTUAN TEMA PRIORITAS

2.3.1 Tema Prioritas PUD

Berdasarkan permasalahan utama pada PUD Kota Probolinggo yang diusulkan maka dirumuskan tema prioritas PUD Kota Probolinggo adalah **“Penguatan ekonomi lokal melalui perbaikan infrastruktur logistik, peningkatan inovasi dan daya saing produk unggulan daerah”**.

Tema PUD Kota Probolinggo mengandung beberapa makna antara lain:

- a. **Penguatan ekonomi lokal** berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Dorongan terhadap inovasi dalam proses produksi, diversifikasi produk, pengemasan, hingga pemasaran digital.
- b. Meningkatkan **daya saing produk unggulan daerah** sesuai dengan maksud penetapan Perwali Kota Probolinggo No 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025 antara lain mengembangkan PUD berbasis potensi sumber daya lokal, mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru, meningkatkan nilai tambah dan daya saing PUD, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo.
- c. Memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan utama terkait pengembangan PUD Kota Probolinggo
- d. Mencakup **enam elemen ekosistem riset dan inovasi daerah** sesuai dengan Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi di Daerah antara lain kebijakan dan infrastruktur, kapasitas kelembagaan dan daya dukung, kemitraan, budaya, keterpaduan, dan penyelarasan perkembangan global.

2.3.2 Tema Prioritas Permasalahan Utama Daerah

Berdasarkan permasalahan utama daerah Kota Probolinggo yang diusulkan maka dirumuskan tematik untuk permasalahan utama riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo adalah **“Optimalisasi Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Untuk Peningkatan Potensi Unggulan dan Mengatasi Permasalahan Mendasar terkait Kapabilitas serta Infrastruktur”**.

Tema Permasalahan Utama Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo mengandung beberapa makna antara lain:

1. **Daya saing daerah** akan membentuk ekosistem inovasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis potensi daerah. Daya saing daerah yang baik akan meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, mendorong transformasi ekonomi dari sektor tradisional ke sektor berbasis pengetahuan

dan inovasi, meningkatkan sinergi dalam membangun inovasi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal, mengembangkan SDM inovatif dan berdaya saing, serta mewujudkan tata kelola inovasi daerah yang efektif.

2. Mencakup **enam elemen ekosistem riset dan inovasi daerah** sesuai dengan Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi di Daerah antara lain kebijakan dan infrastruktur, kapasitas kelembagaan dan daya dukung, kemitraan, budaya, keterpaduan, dan penyelarasan perkembangan global
3. **Potensi unggulan.** Tujuan pengembangan potensi unggulan dan sektor unggulan adalah mendorong hilirisasi dan nilai tambah produk lokal, mewujudkan struktur ekonomi daerah yang produktif dan berkelanjutan, menumbuhkan wirausaha lokal dan UMKM unggulan, memperkuat sinergi dan kolaborasi pengembangan sektor unggulan, serta mengembangkan infrastruktur dan ekosistem pendukung sektor unggulan
4. **Kapabilitas riset dan inovasi.** Kapabilitas riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengembangkan ekosistem dan memperkuat daya saing melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. **Infrastruktur riset dan inovasi.** Infrastruktur riset dan inovasi sangat penting karena menjadi sarana dalam pengembangan riset dan inovasi daerah. Infrastruktur riset dan inovasi dapat berupa Lembaga Pendidikan dan Vokasi sebagai Basis Teknologi Terapan, Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pusat Pelatihan Teknis, Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), Sarana Promosi dan Pameran Produk Inovatif, Infrastruktur Digital dan Sistem Informasi, Laboratorium Uji dan Sertifikasi, serta infrastruktur logistik.

2.3.3 Tema Riset Dan Inovasi Kota Probolinggo

Tema Induk merupakan hasil sintesis dari kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam ekosistem riset dan inovasi serta mendorong pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal. Dalam kajian ini, riset dan inovasi diposisikan sebagai instrumen utama untuk mentransformasi sektor-sektor unggulan menjadi lebih produktif, bernilai tambah tinggi, serta berkelanjutan. Pendekatan berbasis inovasi mencakup pemanfaatan teknologi tepat guna, penerapan model bisnis inovatif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hasil sintesa dari tema permasalahan utama daerah beserta tema PUD Kota Probolinggo didapatkan tema induk RIDA Kota Probolinggo adalah ***“Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Sektor Unggulan serta Agroindustri dan Industri Kreatif Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan”***.

Tema Permasalahan Utama berperan sebagai pondasi awal yang mengidentifikasi aspek- aspek penting yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Tema Potensi Unggulan Daerah (PUD) memberikan arah sektoral yang menjadi fokus utama intervensi riset dan inovasi, dan Tema Induk RIDA mengarah pada tujuan strategis jangka panjang, yakni peningkatan daya saing daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keterpaduan ketiga elemen tersebut memastikan bahwa kebijakan riset dan inovasi di Kota Probolinggo tidak hanya bersifat normatif atau konseptual, tetapi juga aplikatif, terarah, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.

Tema riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo mengandung beberapa makna antara lain:

a. Berbasis potensi lokal

Mengintegrasikan produk unggulan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025 (olahan ikan, tempe, pia, batik, potensi kesenian daerah) dan sektor unggulan Kota Probolinggo (perdagangan, logistik, pengelolaan sampah) sebagai pendorong ekonomi.

b. Mengatasi permasalahan utama

Menjawab tantangan terkait ekosistem riset dan inovasi daerah di Kota Probolinggo seperti rendahnya inovasi, keterbatasan akses pasar, dan lemahnya SDM melalui riset dan inovasi.

c. Selaras dengan ekosistem riset dan inovasi daerah

Mencakup enam elemen RIDA (kebijakan dan infrastruktur, kapasitas kelembagaan dan daya dukung, kemitraan, budaya, keterpaduan, dan penyelarasan perkembangan global) dengan fokus pada digitalisasi, kemitraan, dan standarisasi produk sebagai point permasalahan utama riset dan inovasi di Kota Probolinggo.

d. Mendukung keberlanjutan

Dalam konsep keberlanjutan, ekosistem riset dan inovasi daerah diharapkan mampu memberikan solusi baru tanpa memberikan dampak dan mengorbankan kondisi di masa depan. Konsep keberlanjutan akan mengatasi isu lingkungan (pengelolaan sampah) dan pemerataan kesejahteraan melalui inovasi yang inklusif.

2.4 KONDISI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH SAAT INI

2.4.1 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah saat ini pada setiap PUD yang diusulkan

Kondisi ekosistem riset dan inovasi di Kota Probolinggo dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) saat ini masih menghadapi

berbagai tantangan, namun juga memiliki beberapa potensi yang dapat dioptimalkan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025, telah ditetapkan produk unggulan daerah Kota Probolinggo Tahun 2025, di tingkat kecamatan sebagai berikut:

1. Kelompok Agro:
Kelompok Agro dalam PUD Kota Probolinggo masuk dalam kegiatan Industri Pengolahan Makanan:
a. Industri tempe kedelai: KLBI 10391
b. Industri roti dan kue (pia): KLBI 10710
c. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya (olahan ikan jenggelek, rengginang, dan keripik tempe): KLBI 10794
2. Kerajinan:
Kelompok kerajinan dalam PUD Kota Probolinggo masuk dalam kegiatan Industri Pengolahan:
a. Industri Tekstil: Industri Batik: KLBI 13134
b. Industri furniture: furnitur dari kayu: Mebel dari kayu: KLBI 31001
c. Industri pakaian jadi: Industri pakaian jadi Sulaman/ bordir: Border: KLBI 14302
3. Seni budaya:
Kelompok senin budaya dalam PUD Kota Probolinggo masuk dalam kegiatan aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas:
a. Aktivitas seni pertunjukan yaitu Jaran Bodhag: KLBI 90011
b. Pelaku kreatif seni musik yaitu Seni Musik Dug-dug, Angklung, Hadrah: KLBI 90022

Tabel 2. 25 Klasifikasi PUD Kota Probolinggo

No	Kelompok	PUD	KLBI		Klasifikasi
1	Kelompok Agro	Tempe kedele	10391	Industri Pengolahan Makanan	Industri Pengolahan (C)
		Pia	10710		
		Olahan ikan jenggelek, rengginang, kripik Tempe	10794		
2	Kerajinan	Batik	13134	Industri tekstil	
		Mebel	31001	Industri barang dari kayu	
		Border	14302	Industri	

				pakaian jadi	
3	Budaya	Jaran Bodhaq	90011	Aktivitas	Kesenian, hiburan, rekreasi (R)
		Seni musik dug dug, hadrah, angklung	90022	hiburan, kesenian, dan kreativitas	

Sumber: Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2025 dan hasil anaisa, 2025

Selanjutnya produk-produk unggulan daerah yang diusulkan tersebut, dipetakan/ dianalisis berdasarkan kondisi saat Ini menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi di daerah, yang terdiri dari 6 (enam) elemen sebagai berikut:

1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah, terdiri atas sub elemen:
 - a. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
 - b. Penataan basis data Riset dan Inovasi;
 - c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
 - d. Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
 - e. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi; terdiri atas sub elemen:
 - a. Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan
 - b. Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah
3. Kemitraan riset dan inovasi; terdiri atas sub elemen:
 - a. Penguatan kemitraan antar kelembagaan
 - b. Peningkatan difusi inovasi dan
 - c. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
4. Budaya riset dan inovasi, terdiri atas sub elemen:
 - a. Promosi dan kampanye inovasi
 - b. Apresiasi prestasi inovasi
 - c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset dan
 - d. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.
5. Keterpaduan riset dan inovasi di daerah; terdiri atas sub elemen:
 - a. Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah
 - b. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah dan

- c. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6. Penyelarasan dengan perkembangan global; terdiri atas sub elemen:
 - a. Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah dan
 - b. Penguatan kerjasama internasional.

A. Industri Pengolahan (C)

Kelompok agro dan kerajinan diklasifikasikan ke dalam industri pengolahan yang terdiri atas enam jenis industri pengolahan, dimana dari enam jenis industri pengolahan terdapat 382 industri yang telah memiliki NIB. Berikut rincian jumlah NIB berdasarkan jenis industri pengolahan.

Tabel 2. 26 Rincian Jumlah NIB Berdasarkan Jenis Industri Pengolahan

No	Jenis	Jumlah yang telah ber-NIB
1	Tempe kedele	138
2	Pia	14
3	Olahan ikan jenggelek, rengginang, kripik tempe	115
4	Batik	93
5	Mebel	2
6	Sulaman Border	20
	Jumlah	382

Sumber: DPMPTSP Kota Probolinggo, 2025

Dasar hukum/regulasi terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) dan usaha mikro adalah:

- a. SK Menteri Investasi No.50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah
- b. Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah
- c. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro
- d. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Probolinggo Tahun 2023-2043
- e. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025.

Berdasarkan survei dan wawancara dengan stakeholder terkait, dapat

digambarkan tentang kondisi ekosistem Industri Pengolahan, saat ini sebagai berikut:

1. Pengembangan produk unggulan daerah sudah diatur dalam Perwali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025 selain itu juga telah terdapat Rencana Pengembangan Industri Kota Probolinggo Tahun 2023-2043, namun sebagian besar pemilik usaha belum mengetahui terkait kebijakan yang mendukung dalam pengembangan UMKM di Kota Probolinggo. Pembukuan mengenai basis data sudah dilakukan, pelaku usaha mendapatkan sosialisasi dari kelurahan setempat mengenai pembukuan basis data. Belum tersedianya infrastruktur dasar riset dalam pengolahan produk, produksi dilakukan di rumah, promosi dilakukan status whatsapp saja. Sudah ada sosialisasi mengenai rencana pembangunan outlet bersama, tapi belum ada realisasi. Berdasarkan data yang diperoleh, prosentase anggaran riset dan inovasi daerah terhadap APBD Kota Probolinggo Tahun 2024 sebesar 0,33%, terus mengalami penurunan dari Tahun 2021- 2024 sedangkan para pengusaha sebagian besar belum pernah mendapatkan bantuan pendanaan untuk pengembangan usaha. Sebagian besar pengusaha telah memiliki hak cipta berupa merk dagang, adanya Program Anugrah Inovasi Daerah di Kota Probolinggo yang mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
2. Kolaborasi riset dan inovasi para pengusaha dilakukan dengan pihak swasta dan perguruan tinggi, kedepannya diharapkan pemerintah membuat wadah inventor dan penelitian untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Sarana pendukung yang telah dilakukan seperti pembuatan website penjualan produk secara online untuk produk UMKM Kota Probolinggo.
3. Pada beberapa produk unggulan daerah seperti industri olahan ikan, industri batik, industri makanan PIA dan industri sulaman border sudah terjalin kemitraan baik dengan pihak swasta di dalam negeri dan luar negeri (jepang). Model dan strategi transfer teknologi untuk peningkatan difusi inovasi dan praktik dilakukan melalui penyelenggaraan pameran dan kegiatan pelatihan yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.
4. Budaya riset dan inovasi belum berjalan dengan optimal, pemerintah Kota Probolinggo sudah menyediakan program yang menunjang promosi dan kampanye inovasi dalam pengembangan industri akan tetapi kurang diminati oleh para pengusaha industri. Pemerintah Kota Probolinggo sudah menyediakan program yang tujuannya dapat mengapresiasi inovasi para pelaku usaha di Kota Probolinggo. Diperlukannya program sosialisasi, serta pendampingan dengan pelaku usaha oleh Pemerintah Kota Probolinggo guna

- meningkatkan pengembangan usaha Kota Probolinggo dan regenerasi pelaku usaha. Belum tersedianya rangkaian program yang secara sistematis memadukan upaya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan hasil riset dan inovasi
- Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah belum optimal. Prakarsa riset dan inovasi dalam pengembangan PUD dan usaha mikro belum terjadi. Klaster industri kerajinan belum terbentuk, baru sebatas sentra industri kecil olahan hasil perikanan (krupuk jenggelek) dan kelompok industri batik. Namun Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, maka pemerintah Kota Probolinggo telah menyusun Rencana Pengembangan Industri Kota (RPIK) Probolinggo tahun 2022-2042 yg harus sinkron dengan RPIP tahun 2019-2039 Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015.
 - Dalam rangka penyelarasan dengan perkembangan global, Pemerintah Kota Probolinggo perlu melakukan kerjasama dengan untuk menawarkan peluang investasi di Kota Probolinggo untuk para calon investor internasional. Terkait dengan standarisasi produk industri olahan industri makanan, telah dilakukan sertifikasi halal MUI dan PIRT.

Secara lengkap kondisi ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan industri pengolahan tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 27 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Industri Pengolahan

Sub Elemen	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada kebijakan yang mendukung? (cont: Rencana Induk Pengembangan Industri/ Perwali yang mengatur pengembangan industri)	Pelaku usaha belum mengetahui/memahami kebijakan secara utuh	Perwali No. 3 Tahun 2025 dan RPI Kota Probolinggo sudah tersedia namun belum tersosialisasi merata.
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Apakah basis data sudah terdata dengan baik (cont: jumlah tenaga kerja, jumlah s,, dsb)	Basis data belum terintegrasi lintas sektor, sebagian baru tersedia offline	Basis data sering hanya dimiliki mitra pemasaran, belum terintegrasi dalam sistem kota.

Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Apakah telah tersedia infrastruktur untuk pengembangan produk industri (cont: Gedung untuk pengolahan hasil industri, pusat penjualan dan promosi, dsb)	Banyak usaha belum memiliki fasilitas produksi dan promosi yang layak	Ada rencana pembangunan outlet bersama, namun belum terealisasi.
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri	Mayoritas tidak memiliki skema pendanaan khusus	Anggaran riset dan inovasi dari APBD terus menurun (0,33% pada 2024).
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Apakah sudah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan industri	Sebagian usaha sudah memiliki HAKI, tapi tidak dimanfaatkan optimal	Tersedia Program Anugerah Inovasi Daerah untuk mendorong pendaftaran HKI.
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Apakah sudah ada kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan industri	Minim kerja sama dengan BRIN, PT, atau lembaga riset	Perlu wadah dan fasilitasi kolaborasi dari pemerintah daerah.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Apakah sudah ada Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri	Umumnya belum ada sistem informasi atau aplikasi lokal	Belum tersedia peraturan daerah yang mengatur sarana pendukung secara jelas.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			

Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Apakah sudah terbangun jejaring kemitraan antar lembaga di bidang pariwisata	Banyak belum membentuk jejaring formal	Perlu diperluas dengan Melibatkan
	dan atau ekonomi kreatif, antara pemda, perguruan tinggi, pengelola wisata dari swasta (agen pariwisata, armada transportasi, penginapan, kuliner), pemilik lahan, UMKM, dan pelaku bisnis di industri wisata		lembaga pendidikan dan sektor swasta.
Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan industri	Inovasi masih dilakukan perorangan tanpa sistem	Pendampingan inovasi masih sangat terbatas.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Apakah ada sosisalisasi terkait hasil riset inovasi pengembangan industri yang pernah dilakukan	Tidak semua pelaku menerima atau mengakses hasil riset	Pemerintah perlu membuat program pendampingan dan diseminasi yang lebih inklusif.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan industri	Promosi masih bergantung pameran offline dan undangan	Program pemerintah dalam promosi inovasi belum merata di semua sektor.

Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan industri	Sudah ada beberapa lomba, tapi belum rutin	Pemerintah sudah memfasilitasi lomba inovasi namun belum menjangkau semua sektor.
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha industri	Belum banyak inkubasi, generasi penerus kurang	Diperlukan program pembinaan wirausaha berbasis riset yang terstruktur.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Apakah ada inventarisasi teknologi masyarakat/ Kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun	Banyak pengetahuan lokal belum didokumentasi	Belum tersedia program inventarisasi dan perlindungan pengetahuan tradisional.
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri	Riset dan inovasi masih reaktif dan terbatas	Perlu penguatan dukungan pemerintah terhadap prakarsa berbasis potensi lokal.
Penyelenggaraan pengembangan	Pengembangan klaster inovasi	Sudah ada kelompok, tapi	Perlu sinergi lintas

klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	berbasis industri	belum legal dan tematik	sektor untuk penguatan klaster berbasis PUD.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Apakah telah ada keterkaitan antar kebijakan pusat provinsi- kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan industri (kesesuaian perencanaan kota- propinsi-pusat)	Beberapa pelaku belum tahu arah kebijakan	Dibutuhkan sosialisasi dan integrasi kebijakan secara praktis.
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu- isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk industri (contoh: sertifikasi halal, PIRT, sertifikasi HACCP, pelatihan kemasaran/ pemasaran)	Beberapa produk sudah bersertifikasi, tapi belum merata	Sertifikasi difasilitasi oleh Dinas terkait (MUI, DKPP, DKUMP).
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan industri (contoh: investor dari luar daerah, import hasil UMKM ke LN)	Umumnya belum ada akses kerja sama luar negeri	Diharapkan ada fasilitasi pemerintah untuk membuka akses ke pasar global.

Sumber: Hasil survey, 2025

B. Kesenian, hiburan, rekreasi(R)

Seni budaya diklasifikasikan ke dalam kesenian, hiburan, dan rekreasi yang terdiri atas dua jenis pengolahan, dimana dari dua jenis kesenian, hiburan, dan rekreasi terdapat 38 kelompok seni hiburan yang telah memiliki NIB. Berikut rincian jumlah NIB berdasarkan jenis kesenian, hiburan, dan rekreasi.

Tabel 2. 28 Rincian Jumlah NIB Berdasarkan Jenis Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

No	Jenis	Jumlah yang telah
----	-------	-------------------

		ber-NIB
1	Jaran Bodhaq	-
2	Seni musik dug dug, hadrah, angklung	38
	Jumlah	38

Sumber: DPMPTSP Kota Probolinggo, 2025

Dasar hukum/regulasi terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) dan usaha mikro adalah:

- a. SK Menteri Investasi No.50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Probolinggo Tahun 2023-2043;
- c. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025.

Berdasarkan survei dan wawancara dengan stakeholder terkait, dapat digambarkan tentang kondisi ekosistem aktivitas kesenian, hiburan, dan rekreasi, saat ini sebagai berikut:

1. Kebijakan nasional tentang produk unggulan daerah masih tersedia satu (Permendagri tentang Produk Unggulan Daerah), sedangkan kebijakan pemerintah Kota Probolinggo yang khusus mengatur terkait pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah belum terakomodir, saat ini pengembangan kesenian dan kebudayaan di Kota Probolinggo diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025. Inventariasi data kegiatan kelompok seni dan budaya telah terdata dengan baik. Upaya pengembangan produk unggulan daerah berupa aktivitas kesenian, hiburan, dan rekreasi belum didukung dengan penyediaan infrastruktur pendukung seperti sanggar atau tempat latihan yg dikelola oleh pemerintah kota Probolinggo serta terbatasnya anggaran yang khusus untuk pengembangan aktivitas kesenian, hiburan, dan rekreasi.
2. Kapasitas kelembagaan riset dan inovasi dalam melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun swasta masih belum optimal. Sarana berjejaring, seperti website belum tersedia dalam pengembangan PUD untuk kesenian dan budaya.
3. Kemitraan riset dan inovasi masih belum terjadi. Belum ada model dan strategi transfer teknologi dan praktik baik belum ada, demikian juga target pelaku usaha seni dan budaya belum ada.
4. Budaya riset dan inovasi belum berjalan dengan baik. Promosi dan kampanye inovasi aktivitas seni dan budaya bekerja sama dengan pengadaan

- event pariwisata daerah yang menampilkan kegiatan seni dan budaya Kota Probolinggo. Kegiatan apresiasi inovasi pengembangan aktivitas seni dan budaya dilakukan melalui pengadaan lomba-lomba seperti festival musik dhug-dhug, festival hadrah, maupun festival musik angklung. Pengembangan kegiatan seni dan budaya melalui regenerasi kesenian juga belum berjalan dengan baik karena rendahnya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional.
5. Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah belum optimal. Prakarsa riset dan inovasi dalam pengembangan PUD ksenian dan budaya belum terjadi. Klaster industry untuk aktivitas kesenian, hiburan, dan rekreasi belum terbentuk, baru sebatas pembentukan kelompok seni seperti kelompok seni musik dhug-dhug, kelompok seni musik angklung, dan kelompok seni musik hadrah. Secara khusus belum terdapat dokumen perencanaan yang mengatur pengembangan aktivitas kesenian, hiburan, dan rekreasi, saat ini baru terdapat Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tentang Percepatan Pengembangan Industri Kreatif Pemuda yang mengatur tentang pengembangan potensi industri kreatif Kota Probolinggo.
 6. Dalam rangka penyelarasan dengan perkembangan global, Pemerintah Kota Probolinggo perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta maupun investor dalam dan luar negeri yang aktif menawarkan peluang investasi di Kota Probolinggo. Terkait dengan standardisasi produk pelaku usaha seni dan budaya telah mendaftarkan hak paten kesenian musik tradisional Kota Probolinggo.

Secara lengkap kondisi ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan aktivitas kesenian, hiburan, dan rekreasi tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 29 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

Sub Elemen	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada kebijakan yang mendukung? (cont: Rencana Induk Pengembangan Industri/ Perwali yang mengatur pengembangan industri)	Belum ada kebijakan khusus, regulasi bersifat umum atau tidak mendukung langsung seni budaya	Belum terdapat kebijakan khusus dalam mendukung pengembangan aktivitas seni dan budaya di Kota Probolinggo.

Penataan basis data Riset dan Inovasi	Apakah basis data sudah terdata dengan baik (cont: jumlah tenaga kerja, jumlah omzet, dsb)	Sudah ada pembukuan manual, belum seluruhnya digital	Tersedianya pangkalan data / website, namun pembukuan masih terbatas di mitra pemasaran
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Apakah telah tersedia infrastruktur untuk pengembangan produk industri (cont: Gedung untuk pengolahan hasil industri, pusat penjualan dan promosi, dsb)	Tempat latihan/ sanggar masih terbatas atau belum representatif	Belum tersedianya infrastruktur dasar riset seperti sanggar atau tempat latihan yang dikelola pemerintah
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri	Belum ada alokasi resmi dalam APBD untuk seni budaya	Persentase anggaran riset dan inovasi terhadap APBD Kota Probolinggo 2024 sebesar 0,33%, menurun sejak 2021
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan	Apakah sudah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak	Sebagian pelaku sudah memiliki hak cipta, lainnya belum terfasilitasi	Sudah terdapat Program Anugerah Inovasi Daerah untuk peningkatan perlindungan dan
kekayaan intelektual	cipta, paten, dsb) terkait dengan industri		pemanfaatan kekayaan intelektual
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku	Apakah sudah ada kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka	Kerjasama bersifat individual atau informal	Diharapkan ada wadah inventor dan kolaborasi riset; sebagian sudah terjalin antar

kepentingan	pengembangan industri		kelompok
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Apakah sudah ada Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri	Media sosial digunakan hanya untuk promosi	Belum tersedia aturan atau fasilitas yang kuat dalam mendukung riset dan inovasi industri kebudayaan
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Apakah sudah terbangun jejaring kemitraan antar lembaga di bidang pariwisata dan atau ekonomi kreatif, antara pemda, perguruan tinggi, pengelola wisata dari swasta (agen pariwisata, armada transportasi, penginapan, kuliner), pemilik lahan, UMKM, dan pelaku bisnis di industri wisata	Belum ada jejaring resmi; mengisi acara karnaval, desa, dll	Terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak meskipun belum terstruktur secara formal
Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan industri	Belum memiliki strategi formal; melakukan aransemen lagu sendiri	Belum ada kerja sama riset dengan perguruan tinggi untuk difusi inovasi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil	Apakah ada sosisalisasi terkait hasil riset inovasi pengembangan	Ada sosialisasi dari kelurahan dan dinas pendidikan	Sudah ada kerja sama publikasi hasil riset dan inovasi dengan pihak

Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	industri yang pernah dilakukan		terkait
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan industri	Promosi melalui media sosial dan mulut ke mulut	Program sudah tersedia namun belum optimal menjangkau seluruh pelaku budaya
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan industry	Pernah mengikuti lomba dari pemerintah	Program apresiasi sudah ada namun perlu diperluas Jangkauannya
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha industri	Tidak ada inkubator atau program startup budaya	Perlu sosialisasi dan pendampingan untuk mendorong pengembangan wirausaha seni-budaya
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Apakah ada inventarisasi teknologi msyarakat/ Kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun	Pengetahuan masih diwariskan secara lisan	Belum tersedia program sistematis yang memadukan inventarisasi, pengembangan dan perlindungan
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri	Belum ada roadmap riset budaya lokal	Belum tersedia sarana promosi produk unggulan daerah

daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah			
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan klaster inovasi berbasis industri	Sudah ada komunitas, tapi belum berbadan hukum	Belum terdapat riset dan inovasi unggulan yang berkelanjutan per sektor
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Apakah telah ada keterkaitan antar kebijakan pusat provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan industri (kesesuaian perencanaan kota-propinsi-pusat)	Belum terkoordinasi antara pusat-provinsi-kota	Belum adanya dokumen perencanaan yang menyelaraskan kebijakan lintas level pemerintahan
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk industri (contoh: sertifikasi halal, PIRT, sertfikasi HACCP, pelatihan kemasaran/ pemasaran)	Sudah ada hak cipta, tapi belum untuk promosi global	Standarisasi produk difasilitasi pemerintah namun terbatas pada hak cipta
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan industri (contoh:	Belum ada atau hanya melalui festival	Diharapkan terbangun kerjasama internasional untuk sektor budaya unggulan

	investor dari luar daerah, import hasil UMKM ke LN)		
--	---	--	--

Sumber: Hasil survey, 2025

3.1 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah saat ini pada Permasalahan Utama Daerah yang diusulkan

Permasalahan utama daerah Kota Probolinggo yang menjadi usulan dan berkorelasi erat dengan penyelesaian menggunakan ekosistem riset dan inovasi daerah adalah **Lemahnya ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah karena rendahnya dukungan Integrasi Ekonomi Digital**. Kondisi ekosistem riset dan inovasi di Kota Probolinggo saat ini dalam kaitannya dengan permasalahan utama daerah masih menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki beberapa peluang pengembangan. Beberapa aspek yang berkaitan dengan kondisi riset dan inovasi Kota Probolinggo terkait dengan Permasalahan utama daerah Kota Probolinggo yang menjadi usulan, antara lain:

1. Rendahnya Kebijakan Daerah yang Mendukung Ekonomi Digital Inklusif

Belum ada integrasi kebijakan lintas sektor (ekonomi, riset, UMKM, digitalisasi) secara menyeluruh. Hal ini akan memberikan dampak terhadap keberadaan ekosistem inovasi digital tidak berkembang, karena kurangnya insentif, fasilitasi, maupun regulasi yang mempercepat adopsi teknologi pada sektor-sektor lokal.
2. Kesenjangan infrastruktur digital

Wilayah-wilayah di pinggiran Kota Probolinggo atau sektor-sektor berbasis sumber daya lokal belum seluruhnya terjangkau internet cepat atau sistem digital pendukung. Hal ini akan membatasi munculnya start-up lokal, inovasi digital berbasis kebutuhan lokal, serta pemanfaatan hasil riset berbasis teknologi
3. Lemahnya kemitraan antara Inovator, Riset, dan Pasar Lokal

Tidak adanya platform digital yang menghubungkan pelaku riset (kampus, inkubator) dengan pelaku usaha lokal. Hal ini akan berdampak terhadap inovasi yang dihasilkan

tidak menyentuh kebutuhan pelaku usaha lokal; sebaliknya, pelaku lokal tidak mengetahui adanya solusi inovatif yang bisa mereka manfaatkan.
4. Rendahnya Literasi Digital dan Inovasi di Kalangan Masyarakat Lokal

Pelaku usaha lokal belum terbiasa memanfaatkan platform digital seperti marketplace, e-payment, e-logistik, dll. Keterbatasan penggunaan teknologi maka potensi lokal sulit naik kelas atau menjangkau pasar yang lebih luas,

sehingga tidak memicu kebutuhan untuk riset dan inovasi berbasis permasalahan nyata.

5. Minimnya Akses Digital untuk Pelaku Ekonomi Lokal

Banyak pelaku UMKM atau ekonomi berbasis potensi lokal belum memanfaatkan teknologi digital dalam produksi, distribusi, hingga pemasaran. Minimnya data digital dari pelaku lokal menyebabkan riset sulit berkembang karena terbatasnya data real-time dan potensi kolaborasi digital dengan akademisi atau inkubator inovasi.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka dapat dijabarkan kondisi saat ini pada Permasalahan utama daerah Kota Probolinggo terhadap element ekosistem riset dan inovasi daerah di Kota Probolinggo.

Tabel 2. 30 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Utama Daerah Kota Probolinggo

Sub Elemen	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Diperlukan sinkronisasi program kegiatan yang mendukung dalam pengembangan riset dan inovasi daerah yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah.	Ketersediaan kebijakan/ regulasi	Kebijakan riset dan inovasi yang ada saat ini bersifat parsial hanya terdapat pada sektor tertentu antara lain: • Raperda RIPK Kota Probolinggo • Naskah Akademis RIPPARDA Kota Probolinggo • Perwali Kota Probolinggo No 3/2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025 Belum tersinkronisasi dan terintegrasi ke dalam kebijakan	Sinkronisasi kebijakan sangat penting sehingga program dan kegiatan terkait riset dan inovasi daerah akan sejalan dan selaras dengan rencana pembangunan daerah Kota Probolinggo

		pembangunan daerah.	
Perlu adanya integrasi database untuk basis data riset dan inovasi	Pangkalan Data riset dan inovasi	Basis data riset masih tersebar di masing-masing lembaga atau satuan kerja	Perlu adanya bank data agar data yang ada tidak lagi bersifat sektoral dan lebih Terintegrasi
Pemahaman terkait infrastruktur dasar riset dan inovasi perlu ditekankan sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal dalam pengembangan riset dan inovasi	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan infrastruktur dasar untuk riset dan inovasi daerah di Kota Probolinggo saat ini berupa • laboratorium, • kawasan wisata studi pertanian (KWSP), • demplot pertanian, • organik, • museum, • RTH, • Rumah kemasan, • balai benih ikan, • gedung kesenian kota, • pusat daur ulang, • RTH Publik	Maksimalisasi infrastruktur yang ada untuk mendukung pengembangan riset dan inovasi daerah
Perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran Riset dan Inovasi	Prosentase anggaran riset dan inovasi daerah terhadap APBD Kota Probolinggo Tahun 2024 sebesar 0,33%, terus mengalami penurunan dari Tahun 2021-2024.	Perlu adanya komitmen bersama untuk perencanaan anggaran riset dan inovasi daerah agar pengembangan RIDA dapat mendukung solusi permasalahan utama daerah

Perlu adanya bantuan dari pemerintah daerah dalam kemudahan untuk perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Sejauh ini pemanfaatan kekayaan intelektual hanya berupa pemberian label hak paten/ merk dagang terhadap industri pengolahan seperti industri makanan dan batik.	Perlu adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual di Kota Probolinggo
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Tersedianya kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Saat ini sudah terbentuk Kolaborasi riset dan inovasi dengan pemangku kepentingan melalui Kerjasama antara perguruan tinggi maupun daerah lain	Kolaborasi riset dan inovasi sangat penting sehingga pengembangan riset dan inovasi daerah menjadi lebih optimal
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedianya sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	• Pengelolaan jaringan website Kota Probolinggo yang menyediakan informasi terkait riset dan inovasi daerah masih terbatas • Kurangnya pelayanan terhadap kebutuhan aktual untuk akses perpustakaan digital dalam mendukung riset	Sarana pendukung riset memanfaatkan sarana yang tersedia dan dikelola secara optimal sehingga upaya pengembangan riset dan inovasi daerah berjalan lancar.

		dan inovasi • <i>Co-working space</i> yang tersedia masih terbatas	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kerjasama yang telah dilakukan	Kerjasama kemitraan antar lembaga dalam pengembang riset dan inovasi daerah di Kota Probolinggo telah dilakukan secara rutin dengan dikuatkan melalui MOU baik antar perguruan tinggi maupun antar daerah lain.	Peningkatan kerjasama perlu dilakukan secara kontinue untuk memperoleh hasil yang maksimal
Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	Difusi inovasi yang telah diterapkan di Kota probolinggo telah dilegalkan melalui Perwali Kota Probolinggo No 68/ 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah yang terbagi atas inovasi tentang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi lainnya.	Difusi inovasi terjadi di Kota Probolinggo melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan lembaga riset masih perlu dioptimalkan lagi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersedianya praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Praktik baik dan diseminasi yang telah dilakukan di Kota probolinggo seperti Program pendampingan dan pelatihan/penyuluhan	Merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di tingkat lokal

		pengembangan inovasi	
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Tersedianya Promosi dan kampanye inovasi	• Promosi dilakukan pada kegiatan pameran di dalam kota maupun di luar kota baik melalui saluran online maupun off line. • Upaya edukasi masih terbatas ada forum pertemuan,rapat, bimbingan teknis untuk inovator, dan beberapa diskusi terbatas • Budaya kerja birokrasi, pola karir, dan pengukuran kinerja ASN belum sepenuhnya mendorong inovasi • Pembudayaan pemanfaatan hasil riset untuk kebijakan masih perlu diperkuat. Kebijakan berbasis bukti masih belum familiar di kalangan Birokrasi	Peningkatan dan keberlanjutan promosi akan meingkatkan peluang branding Kota Probolinggo
Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya Apresiasi Prestasi inovasi	• Bentuk apresiasi yang masih terbatas bagi prestasi inovasi (Perwali Kota Probolinggo 37/2024 Tentang Tata Cara	Pemembrian penghargaan terhadap prestasi inovasi daerah akan memacu pengembangan riset dan inovasi lebih maksimal lagi

		Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah) • Penghargaan atau apresiasi lain Misalnya kemudahan investasi, dispensasi pajak, perizinan, dan beberapa kemudahan lain belum diatur	
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersedianya perusahaan pemula berbasis riset	• Di Kota Probolinggo ekosistem perusahaan pemula berbasis riset (PPBR) mulai berkembang melalui dukungan dari berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, dan program nasional seperti inkubator bisnis namun sifatnya masih terbatas, tidak didesain sesuai potensi dan kebutuhan, dan tidak berkelanjutan • Belum ada skema dukungan terhadap inovasi, misalnya bagaimana peran perbankan industri besar dan menengah, pemerintah daerah di dalam hilirisasi hasil inovasi menjadi	Perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan perusahaan pemula berbasis riset sehingga budaya riset dan inovasi daerah dapat teregenerasi dengan baik

		• produk	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	• Inventarisasi Kekayaan Intelektual masih bersifat parsial	Perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk memacu masyarakat dalam penciptaan dan pengembangan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat
Elemen 5; Keteraduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau Mengatasi permasalahan utama daerah	Tersedianya Pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Sudah terdapat kajian baik yang bersifat sektoral maupun multidisiplin terkait permasalahan utama daerah yang dilakukan	Kajian yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran daerah
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan Kluster Inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	Pembentukan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah telah dilakukan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing kecamatan di Kota Probolinggo (Perwali Kota Probolinggo No 3	Pusat layanan usaha daerah dibawah wewenang DPMPTSP (Mal Pelayanan Publik) dan DKUMP (Galeri Dekranasda) Kota Probolinggo

		Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan • dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025)	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	Keterpaduan kebijakan pusat dan daerah perlu di optimal sehingga meminimalisasi tumpang tindih kebijakan terkait riset dan inovasi yang dihasilkan	Pengembangan riset dan inovasi berpatokan pada kebijakan di atasnya.
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Rendahnya minat dalam pengembangan standarisasi produk Unggulan untuk peningkatan daya saing daerah • Berbagai isu global menjadi fokus dalam aktivitas riset dan inovasi beberapa tahun terakhir, di antaranya masalah energi terbarukan, ketahanan pangan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, ekonomi kreatif, serta penguatan kualitas sumber daya manusia	Isu perkembangan global terkait riset dan inovasi daerah perlu diidentifikasi sehingga Kota Probolinggo mampu memperkuat daya saing daerah

		yang berdaya saing	
Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	• Minimnya Kerjasama internasional yang terjalin	Kerja sama internasional belum diujai terutama pada dunia usaha, industri, serta pemanfaatan IPTEK, seni dan budaya.

Sumber: Hasil Survey, 2025

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

3.1 TANTANGAN DALAM PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI DI MASA DATANG

Percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memanfaatkan riset dan inovasi memiliki sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Beberapa dari tantangan-tantangan ini meliputi:

1. **Keterbatasan Sumber Daya Finansial**
Melaksanakan riset dan mengembangkan inovasi memerlukan investasi finansial yang signifikan, baik untuk peralatan, sumber daya manusia, atau infrastruktur penelitian. Keterbatasan sumber daya finansial bisa menjadi hambatan serius dalam menggerakkan inisiatif riset dan inovasi.
2. **Keterbatasan Keterampilan dan Keahlian (Daya Saing Sumber Daya Manusia)**
Untuk mencapai hasil yang optimal dalam riset dan inovasi, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Kurangnya akses ke sumber daya manusia terampil atau kurangnya peluang pendidikan dan pelatihan dapat menjadi hambatan.
3. **Keterbatasan Forecasting Terhadap Riset dan Inovasi di Masa Depan**
Riset dan Inovasi harus menjadi basis dalam pengambilan dan implementasi kebijakan atau saat ini disebut Kebijakan Berbasis Bukti. Kelemahan dalam melakukan forecasting (peramalan) tentang kebutuhan riset dan inovasi daerah di masa depan menjadi kendala utama. Keterbatasan forecasting ini bisa terjadi akibat hambatan sinkronisasi dokumen perencanaan atau fokus kebijakan yang kabur. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan forecasting perangkat daerah menjadi urgen untuk dilakukan seiring dengan upaya peningkatan ekosistem riset dan inovasi yang mendorong kebijakan berbasis bukti.
4. **Rendahnya Tingkat Adopsi Inovasi**
Rendahnya tingkat adopsi inovasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Resistensi terhadap perubahan sering kali menjadi penghalang utama. Individu dan organisasi cenderung nyaman dengan cara-cara yang sudah dikenal dan teruji, dan mereka mungkin takut bahwa mengadopsi inovasi baru akan mengganggu rutinitas atau berisiko. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang manfaat konkret dari inovasi dan ketidakpastian terkait dengan hasilnya dapat membuat orang enggan mencobanya. Terkadang infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan inovasi mungkin tidak tersedia atau mahal. Ini termasuk perangkat keras, perangkat

lunak, atau pelatihan yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi baru. Kurangnya akses atau sumber daya ini bisa menjadi penghambat serius. Untuk mengatasi rendahnya tingkat adopsi inovasi, perlu upaya komunikasi yang kuat untuk memahami orang tentang manfaatnya, pelatihan yang memadai untuk mempersiapkan mereka dalam mengadopsi inovasi, serta upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan praktis seperti infrastruktur yang kurang memadai. Dengan upaya yang tepat, tingkat adopsi inovasi dapat ditingkatkan, dan inovasi dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi daerah.

5. Tantangan Keberlanjutan

Inovasi harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan. Perlindungan lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan iklim adalah isu-isu penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan inovasi.

3.2 PELUANG DALAM PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI DI MASA DATANG

Era globalisasi dan perubahan digital yang cepat, riset dan inovasi menjadi unsur kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Secara ideal, percepatan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada riset dan inovasi seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, untuk mencapai target ini, berbagai hambatan harus diatasi. Tantangan-tantangan ini mencakup keterbatasan dalam infrastruktur penelitian, rendahnya tingkat kolaborasi antara sektor publik dan swasta, masalah pendanaan yang terbatas, kekurangan keterampilan yang relevan, serta kesulitan dalam memastikan keberlanjutan dan adopsi inovasi. Meskipun tantangan-tantangan ini dapat menjadi hambatan, ada juga peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasinya.

1. Kemitraan dan Kolaborasi

Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian adalah kunci untuk mengatasi tantangan dalam riset dan inovasi. Kemitraan ini memungkinkan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian, serta memfasilitasi akses ke dana dan infrastruktur penelitian. Keterlibatan sektor swasta juga mempercepat komersialisasi inovasi.

2. Kuantitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Jumlah sumber daya manusia memberikan peluang untuk ditingkatkan kualitasnya setidaknya dalam rangka mengawasi dan mensinergikan riset dan inovasi di daerah. Kuantitas sumber daya manusia ini perlu dibekali dengan kapasitas minimum untuk menjalankan fungsi riset dan inovasi di daerah.

3. Pendanaan Alternatif

Pendanaan dari sumber-sumber alternatif seperti sektor swasta, kemitraan publik- swasta, dan skema berbasis proyek penting dalam mendukung riset dan inovasi. Ini membantu mengatasi keterbatasan pendanaan dan mendorong aktivitas riset yang inovatif.

4. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi yang mendukung riset dan inovasi, seperti insentif fiskal, perlindungan kekayaan intelektual, dan penyederhanaan prosedur administratif, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berbasis riset dan inovasi. Melalui upaya ini, pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo dan daerah-daerah sejenisnya.

3.3 KONDISI YANG DIHARAPKAN: EBP DAN EKOSISTEM RID

Dengan ekosistem riset dan inovasi yang kuat, Kota Probolinggo dapat menjawab permasalahan utama seperti kualitas daya saing SDM, kesejahteraan perekonomian masyarakat, kualitas lingkungan dan ketahanan wilayah, produktivitas nilai tambah daya saing sektor unggulan, kualitas sarana prasarana, konektivitas antar wilayah, dan kapasitas birokrasi. Ekosistem riset dan inovasi akan menjadi pondasi utama untuk menciptakan solusi berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Dalam lima tahun mendatang, Kota Probolinggo diharapkan menjadi daerah yang tidak hanya unggul dalam potensi alam, tetapi juga dalam inovasi berbasis teknologi. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berikut merupakan beberapa point penting terkait kondisi yang diharapkan dalam pengembangan dan peningkatan ekosistem riset dan inovasi di Kota Probolinggo:

1. Penguatan Kelembagaan dan kemitraan Riset dan Inovasi yang kuat Kota Probolinggo diharapkan memiliki kelembagaan riset yang kuat, termasuk pendirian pusat penelitian lokal, laboratorium, dan pusat inovasi. Lembaga-lembaga ini harus fokus pada sektor strategis seperti sektor transportasi dan perdagangan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran sesuai dengan potensi unggulan daerah. Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah, yang mengintegrasikan berbagai program riset dan inovasi, perlu dikembangkan untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah. Dengan kelembagaan yang kokoh, transfer teknologi dan penerapan hasil riset dapat dilakukan lebih efektif.

Sedangkan pada aspek kemitraan riset dan Inovasi yang kuat, diharapkan melibatkan kolaborasi multisektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Kerja sama antara pemerintah daerah memungkinkan pertukaran inovasi yang telah berhasil diterapkan di masing-masing daerah. Kerjasama dengan lembaga penelitian memungkinkan adanya konsultasi teknis dan pendekatan integratif dalam pengelolaan infrastruktur perkotaan. Kerjasama dengan akademisi atau dunia usaha diharapkan dapat meningkatkan pelatihan, pengembangan produk, magang, dan pendampingan bagi UMKM binaan, serta pengembangan inkubasi bisnis. Kerjasama dengan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam program kegiatan Perangkat Daerah dalam pengembangan inovasi yang akan dilaksanakan. Dengan membangun kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan, Kota Probolinggo dapat menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia IPTEK

Ekosistem riset yang diharapkan mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kota Probolinggo perlu menyediakan pelatihan keterampilan berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menciptakan program pelatihan lokal menjadi penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. SDM IPTEK yang terampil akan menjadi tulang punggung pengembangan dan penerapan inovasi.

3. Peningkatan infrastruktur riset

Kota Probolinggo diharapkan memiliki infrastruktur riset yang memadai, seperti Kawasan Sains dan Teknologi (KST), laboratorium modern, dan pusat inkubasi bisnis berbasis teknologi. Infrastruktur ini diperlukan untuk mendukung riset terapan dan inovasi yang dapat menyelesaikan permasalahan utama daerah, seperti peningkatan produktivitas perikanan atau pengelolaan energi terbarukan. Dukungan teknologi digital juga diharapkan menjadi bagian integral dalam pengelolaan data dan kolaborasi riset.

4. Dukungan Kebijakan dan Anggaran yang konsisten

Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan memberikan dukungan kebijakan yang jelas dan konsisten untuk pengembangan ekosistem riset dan inovasi. Peningkatan alokasi anggaran riset menjadi 1%-2% dari APBD dapat mendorong pelaksanaan program- program strategis berbasis riset. Kebijakan

ini juga harus mencakup insentif untuk sektor swasta yang terlibat dalam kegiatan riset dan inovasi. Dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang kuat, pembangunan berbasis riset dapat lebih terarah dan berkelanjutan.

3.3.1 Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*).

Kondisi yang diharapkan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) adalah:

- Bapperida memiliki kemampuan mengelola SDM IPTEK melalui peningkatan kapasitas SDM di Bapperida dan OPD dalam memanfaatkan hasil riset. Tersedia SDM IPTEK memadai dengan keahlian bidang riset strategis lokal dan Pelatihan berkala dalam bidang digitalisasi, teknologi tepat guna, riset terapan, dan literasi data
- Bapperida mampu melakukan inventarisasi berbasis bukti terhadap potensi Kekayaan Intelektual daerah dan penguatan sistem riset daerah yang mendorong inovasi berbasis Kekayaan Intelektual. Tersedia data dan peta potensi Kekayaan Intelektual daerah (Hak Kekayaan Intelektual/ HKI, paten, merek, desain industri, Kekayaan Intelektual komunal, dll.) yang terstruktur dan diperbarui dan Data potensi Kekayaan Intelektual terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan, ekonomi kreatif, atau BRIDA
- Bapperida mampu menjalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku inovasi lokal. Aktif memanfaatkan platform seperti matching fund, CSR, program BRIN, dan kerja sama internasional dan adanya unit kerja khusus atau focal point yang menangani hubungan kemitraan, baik nasional maupun internasional
- Bapperida mampu memanfaatkan sistem informasi untuk menghasilkan kajian kebijakan berbasis bukti. Sistem informasi digunakan aktif dalam menyusun perencanaan berbasis bukti, evaluasi kinerja, dan pembuatan kebijakan.
- Bapperida mampu menyediakan anggaran yang cukup dan melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait program prioritas kepala daerah.
- Bapperida mampu merespon isu aktual periode 2025-2029 dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan hasil kolaborasi riset dengan stakeholder terkait.
- Bapperida mampu melakukan percepatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program Inovasi Daerah, dalam meningkatkan budaya inovasi di Perangkat Daerah.

A. Isu Strategis Potensi Unggulan Daerah

- 1) Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Potensi Lokal (sumber: <https://www.kompasiana.com/>)
Kota Probolinggo memiliki berbagai produk unggulan yang berakar dari potensi lokal, antara lain: Pertanian dan Hortikultura: Buah mangga (varietas arumanis dan manalagi) dan anggur merupakan komoditas unggulan yang tidak hanya dipasarkan secara lokal tetapi juga diekspor ke luar negeri, Perikanan: Hasil laut seperti ikan dan udang menjadi andalan sektor perikanan kota ini, dan Industri Kreatif: Batik khas Probolinggo, termasuk motif "Manggur" (mangga dan anggur), serta kerajinan bordir, telah menarik perhatian pasar internasional.
- 2) Peningkatan Nilai Tambah Melalui Inovasi Produk (sumber: <https://memontum.com/>)
Mendorong pelaku usaha, terutama kelompok wanita tani (KWT), untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Langkah ini mencakup pelatihan dalam pembuatan produk olahan, desain kemasan, dan perizinan, dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menembus pasar retail modern.
- 3) Penguatan Ekosistem UMKM dan Promosi Produk Lokal (sumber: <https://forumnusantaranews.com/>)
Pemerintah melalui Dekranasda berupaya memfasilitasi pengembangan industri kreatif ini, namun tantangan dalam hal promosi, pemasaran, dan pelestarian budaya lokal tetap menjadi perhatian.
- 4) Peningkatan Akses Pasar Internasional dan digitalisasi (sumber: <https://jatim.antaranews.com/>)
Untuk memperluas jangkauan pasar, pemerintah daerah mengajak pelaku usaha untuk menjajaki ekspor produk unggulan. Namun, tantangan dalam hal standarisasi produk, perizinan, dan kapasitas produksi masih perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan akses pasar melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi.
- 5) Pemanfaatan Infrastruktur Logistik untuk Distribusi Produk (sumber: <https://www.tempo.co/>)
Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai sentra logistik, mendukung distribusi produk pertanian, perikanan, dan manufaktur lokal ke seluruh wilayah Jawa Timur dan luar Pulau Jawa, serta sebagai hub ekspor ke pasar internasional.

B. Isu Strategis Permasalahan Utama Dearah

- 1) Infrastruktur dan alat produksi yang terbatas

Keterbatasan infrastruktur dan alat produksi di Kota Probolinggo merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan strategis. Upaya pemerintah dalam efisiensi anggaran dan perencanaan jangka menengah menunjukkan komitmen untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

- 2) Pengelolaan sampah sebagai prioritas lingkungan. (sumber: <https://timesindonesia.co.id/>)

Untuk mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah Kota Probolinggo telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan mengadakan diskusi dan sosialisasi untuk mendapatkan arahan strategis dalam pengelolaan sampah dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan bekerja sama dalam mencari solusi inovatif melalui

pendekatan integratif yang mencakup tata ruang, infrastruktur, dan sumber daya energi.

- 3) Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID)

Berikut adalah indikator utama Indeks Inovasi Daerah berdasarkan regulasi Kemendagri (misalnya Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah):

a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

- Inovasi dalam sistem dan proses pemerintahan.
- Perbaikan kinerja birokrasi dan pelayanan internal.

b. Inovasi Pelayanan Publik

- Inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
- Fokus pada peningkatan kualitas, kecepatan, dan keterjangkauan layanan.

c. Inovasi Daerah Lainnya

Inovasi dalam bentuk ide atau pendekatan baru yang tidak masuk dalam dua kategori di atas, seperti:

- Model pemberdayaan masyarakat.
- Teknologi tepat guna.
- Kolaborasi lintas sektor.

- 4) Pengembangan Aplikasi Layanan Publik (sumber: Profil Inovasi Daerah) Mempercepat pelayanan, menghemat waktu, dan memudahkan masyarakat

dalam mengakses layanan pemerintah.

- 5) Pengakuan sebagai Kota Sangat Inovatif (sumber: <https://www.wartabromo.com/2024>)

Penghargaan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

3.3.2 Ekosistem RID Tematik Produk Unggulan (PUD)

A. Industri Pengolahan (C)

Berdasarkan survei dan wawancara dengan stakeholder terkait, dapat digambarkan tentang kondisi yang diharapkan pada ekosistem riset dan inovasi industri pengolahan sebagai berikut:

1. Saat ini, sudah ada kebijakan khusus yang mendukung pengembangan PUD melalui Perwali No 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah dan Perda No 4 Tahun 2024 tentang RPIK Kota Probolinggo Tahun 2023-2043, namun demikian perlu adanya sosialisasi terkait keberadaan kebijakan pendukung PUD sehingga para pelaku PUD paham akan regulasi yang berlaku. Basis data PUD, usaha mikro, dan IKM belum tersedia secara lengkap, perlunya melengkapi meta data (terkait basis data tersebut) dan terintegrasi dalam sistem program Satu Data. Disamping itu, RPK Pantai Pilang perlu difungsikan sebagai tempat diskusi komunitas kreatif. Infrastruktur fisik pendukung keberadaan sentra PUD perlu adanya peningkatan. Anggaran untuk pengembangan PUD dan usaha mikro masih rendah, perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan program pengembangan PUD dan usaha mikro dan perlu disiapkan secara khusus dan berkelanjutan. Perlu diadakan bantuan inventarisasi kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb), terutama yang terkait dengan industri pengolahan.
2. Kapasitas kelembagaan riset dan inovasi dalam melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi masih belum optimal. Perlu adanya kerjasama terkait pengembangan industri pengolahan, dengan memperluas aktor kerjasama. Sarana berjejaring, seperti website perlu dibangun untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dengan para pelaku.
3. Kemitraan riset dan inovasi masih belum optimal. Perlu memilih model dan strategi transfer teknologi serta memilih praktik baik yang tepat kepada usaha mikro, dan menentukan target usaha mikro yang akan menerima intervensi/ transfer teknologi/ praktek baik.
4. Budaya riset dan inovasi belum berjalan dengan optimal. Promosi produk, serta kampanye inovasi untuk mendukung pengembangan industri pengolahan dilakukan melalui media digital dan kegiatan lomba inovasi.

- Disamping itu perlu meningkatkan apresiasi inovasi dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan khususnya di kalangan pemuda, serta inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal, khususnya terkait industri pengolahan khas Probolinggo (krupuk olahan ikan dan batik probolinggo).
5. Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah belum optimal. Perlu menyelaraskan muatan RIPJPID, khususnya industri pengolahan, dalam dokumen perencanaan pembangunan. Perlu membentuk klaster industri makanan berbasis industri pengolahan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selalu menjaga sinkronisasi kebijakan antara pusat, provinsi, dan kota.
 6. Penyelarasan dengan perkembangan global belum berjalan dengan optimal. Belum seluruh produk olahan telah terstandarisasi produk sehingga perlu adanya peningkatan standarisasi produk untuk meningkatkan daya saing produk untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor. Dengan terbukanya akses kemitraan dan pasar luar negeri melalui kegiatan pameran atau promosi menjadi peluang pengembangan usaha industri pengolahan ke skala ekspor untuk penguatan produk unggulan Kota Probolinggo.

Secara lengkap kondisi yang diharapkan pada ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan industri pengolahan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Kondisi yang diharapkan pada Ekosistem Riset dan Inovasi Industri Pengolahan

Sub Elemen	Indikator	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada kebijakan yang mendukung? (cont: Rencana Induk Pengembangan Industri/ Perwali yang mengatur pengembangan industri)	Rendahnya literasi regulasi di kalangan pelaku usaha; tidak semua pelaku mengakses informasi kebijakan	Terbukanya peluang pelatihan dan sosialisasi regulasi oleh pemerintah daerah	Mendukung arah pengembangan industri olahan lokal
Penataan	Apakah basis	Belum ada	Digitalisasi basis	Data

basis data Riset dan Inovasi	data sudah terdata dengan baik (cont: jumlah tenaga kerja, jumlah omzet, dsb)	sistem pengelolaan data lintas OPD; lemahnya pelaporan dari pelaku usaha	data usaha untuk pemantauan dan perencanaan terpadu	digunakan Untuk Penguatan kapasitas dan Penyusunan Kebijakan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Apakah telah tersedia infrastruktur untuk pengembangan produk industri (cont: Gedung untuk pengolahan hasil industri, pusat penjualan dan promosi, dsb)	Keterbatasan dana pembanguna n dan lahan strategis; keterlibatan swasta masih minim	Kerjasama dengan swasta untuk pengadaan fasilitas produksi bersama	Meningkatka n efisiensi dan promosi produk Olahan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri	Fluktuasi dan keterbatasan alokasi anggaran daerah; belum prioritas dalam RPJMD	Integrasi program riset ke dalam prioritas pembangunan daerah	Dorong Transformasi UMKM olahan seperti tempe beku, kemasan Inovatif

Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Apakah sudah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan industri	Rumitnya proses pendaftaran; kurangnya pendampingan teknis dan biaya pengelolaan yang mahal	Penyediaan layanan konsultasi HKI gratis/subsidi dan layanan terpadu	Memberikan nilai tambah dan legalitas usaha olahan
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Apakah sudah ada kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan industri	Lemahnya komunikasi antar sektor; belum ada platform kolaborasi yang aktif	Pembentukan forum kolaboratif riset dan inovasi lintas pelaku	Inovasi berbasis riset dan teknologi bisa ditingkatkan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Apakah sudah ada Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri	Rendahnya literasi digital pelaku usaha; infrastruktur TI belum merata	Pelatihan digital dan pengembangan website bersama pelaku usaha	Akses informasi dan pelatihan riset bisa dibuka lebih luas
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Apakah sudah terbangun jejaring kemitraan antar lembaga di bidang pariwisata dan atau	Minimnya forum resmi; ego sektoral antar pelaku dan lembaga	Inisiasi forum lintas sektor untuk menyinergikan potensi dan program	Kolaborasi promosi, pelatihan, dan inovasi

	ekonomi kreatif, antara pemda, perguruan tinggi, pengelola wisata dari swasta (agen pariwisata, armada transportasi, penginapan, kuliner), pemilik lahan, UMKM, dan pelaku bisnis di industri wisata			
Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi bagi usaha mikro dalam rangka pengembangan industri	Tidak semua pelaku memiliki kesiapan adopsi teknologi; kurangnya fasilitator inovasi	Pendampingan teknologi dari universitas/lembaga riset ke UMKM	Praktik inovasi mudah diadopsi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku Inovasi	Apakah ada sosisalisasi terkait hasil riset inovasi pengembangan industri yang pernah dilakukan	Keterbatasan akses informasi di daerah pinggiran; belum ada mekanisme umpan balik	Penyediaan sistem informasi berbasis aplikasi dan Lokakarya	Memberikan pemahaman yang aplikatif ke pelaku industri
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk	Pelaku usaha kurang terlatih dalam pemasaran	Pelibatan komunitas digital kreatif dan platform e-commerce lokal	Memperluas pasar produk olahan

	inovasi, yang tepat dalam pengembangan industri	digital; biaya promosi relatif tinggi		
Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan industri	Tidak semua pelaku usaha tahu atau dapat akses informasi lomba	Optimalisasi kanal informasi melalui media sosial dan dinas terkait	Meningkatkan motivasi dan daya saing pelaku usaha
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Program penumbuhan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha industri	Belum ada inkubator industri pengolahan di daerah; minimnya mentor bisnis lokal	Pembentukan inkubator bisnis berbasis potensi lokal	Mendorong regenerasi dan usaha baru yang kompetitif
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Apakah ada inventarisasi teknologi masyarakat/ Kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun	Tidak ada sistem digitalisasi; ketiadaan tim pelacak dan legalisasi pengetahuan lokal	Digitalisasi pengetahuan lokal untuk dokumentasi dan promosi budaya	Mengangkat potensi budaya menjadi keunggulan ekonomi
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri	Tidak adanya anggaran khusus riset lokal; belum terhubung ke kebutuhan pelaku usaha	Dana CSR dan hibah riset berbasis kebutuhan sektor pengolahan	Produk dan pengemasan lebih tepat sasaran

daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah				
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan klaster inovasi berbasis industri	Sulit menyatukan pelaku usaha dalam satu klaster; kurangnya pendampingan kelembagaan	Fasilitasi pembentukan klaster berbasis wilayah/produk unggulan	Memudahkan branding dan promosi Bersama
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Apakah telah ada keterkaitan antar kebijakan pusat provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan industri (kesesuaian perencanaan kota-propinsi-pusat)	Lemahnya komunikasi antar pemerintah pusat dan daerah; kebijakan tidak tersampaikan ke pelaku	Pemetaan dan penyelarasan perencanaan lintas sektor dan wilayah	Dukungan program lebih terpadu dan terarah
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi	Apakah ada standarisasi produk industri (contoh: sertifikasi halal, PIRT, sertifikasi HACCP,	Biaya sertifikasi tinggi; pelaku belum memahami	Subsidi sertifikasi, pelatihan mutu dan bantuan kemasan berstandar ekspor	Memenuhi standar pasar nasional dan Internasional
pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di	pelatihan kemasaran/pemasaran)	pentingnya standar mutu global		

daerah				
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan industri (contoh: investor dari luar daerah, import hasil UMKM ke LN)	Tidak adanya perwakilan perdagangan lokal; kurang kemampuan bahasa dan branding global	Kolaborasi dengan diaspora atau agregator ekspor berbasis komunitas	Membuka peluang ekspor produk olahan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

B. Industri Kesenian, hiburan, rekreasi (R)

Berdasarkan survei dan wawancara dengan stakeholder terkait, dapat digambarkan tentang kondisi yang diharapkan pada ekosistem riset dan inovasi di kelompok usaha kesenian, hiburan, dan rekreasi sebagai berikut:

1. Saat ini, belum ada kebijakan khusus yang mendukung pengembangan PUD, namun dapat didorong melalui penguatan Perwali No. 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah dan penambahan kebijakan kerjasama terkait seni budaya. Basis data PUD pada kelompok usaha kesenian, hiburan, dan rekreasi masih sangat minim dan belum tersedia secara lengkap, perlunya melengkapi meta data (terkait basis data tersebut) dan terintegrasi dalam sistem program Satu Data. Infrastruktur PUD pada kelompok usaha kesenian, hiburan, dan rekreasi keberadaannya masih sangat terbatas, dibutuhkan kerja penyediaan sanggar resmi atau pusat seni yang layak dan mampu mendukung aktivitas seni budaya di Kota Probolinggo. Anggaran untuk pengembangan PUD pada kelompok seni, hiburan, dan rekreasi masih sangat rendah, perlu adanya koordinasi dengan stakeholder terkait (Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo) ditingkatkan sesuai kebutuhan program pengembangan PUD pada kelompok seni, hiburan, dan rekreasi. Perlu diadakan inventarisasi kekayaan intelektual untuk melindungi karya seni daerah asli Kota Probolinggo
2. Kapasitas kelembagaan riset dan inovasi dalam melakukan kolaborasi dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi masih belum optimal. Perlu adanya kerjasama terkait pengembangan kelompok kerjasama seni, hiburan, dan rekreasi, dengan mengadakan forum kolaborasi yang diperkuat dengan SK Wali Kota atau

- Peraturan daerah terkait sektor budaya. Sarana berjejaring, seperti website perlu dibangun untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dengan para pelaku.
3. Kemitraan riset dan inovasi masih belum optimal. Perlu adanya kemitraan aktif dengan kelurahan kerjasama, PD terkait, swasta dalam pengembangan seni budaya. Diperlukan nota kesepahaman lintas sektor untuk mendukung inovasi berbasis budaya. Publikasi dan promosi karya budaya melalui kolaborasi akademik dan digital juga perlu dilakukan sebagai salah satu 14erja pengembangan model dan strategi difusi inovasi. Sosialisasi hasil riset dan praktik seni budaya juga perlu dilakukan secara berkala dan dilegalkan dengan Perwali/SK teknis.
 4. Budaya riset dan inovasi kepada para pelaku seni sudah dilakukan. Namun perlu melakukan peningkatan promosi secara menyeluruh. Disamping itu perlu menyelenggarakan apresiasi inovasi dalam bentuk program penghargaan terhadap pelaku innovator seni budaya sehingga menumbuhkan jiwa regenerasi seni budaya khususnya di kalangan pemuda, serta inventarisasi teknologi masyarakat/ kearifan lokal, khususnya kesenian dan budaya khas Kota Probolinggo.
 5. Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi pada kelompok seni, hiburan, dan rekreasi belum optimal. Perlu menyelaraskan muatan RIPJPID dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perlu membentuk jasa seni budaya berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selalu menjaga sinkronisasi kebijakan pengembangan pada kerjasama kelompok usaha kesenian, hiburan, dan rekreasi.
 6. Saat ini, standarisasi pada kerjasama kelompok usaha kesenian, hiburan, dan rekreasi difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo dimana diperlukan pengembangan inovasi untuk meningkatkan target pemasaran dan branding daerah. Kerjasama internasional juga belum terjadi, belum terdapat kegiatan promosi atau pertukaran seni budaya ke luar negeri. Sehingga perlu adanya program kerjasama pertukaran kegiatan seni budaya untuk memperluas branding Kota Probolinggo.

Secara lengkap kondisi yang diharapkan ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan kelompok usaha kesenian, hiburan, dan rekreasi dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Kondisi yang diharapkan pada Ekosistem Riset dan Inovasi Kesenian, Hiburan, Rekreasi

Sub Elemen	Indikator	Peluang	Tantangan	Kondisi yang Diharapkan
Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				

Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada kebijakan yang mendukung? (cont: Rencana Induk Pengembangan Industri/ Perwali yang mengatur pengembangan industri)	Dapat didorong melalui penguatan Perwali No. 3 Tahun 2025 dan kebijakan sektoral seni budaya	Belum terdapat kebijakan eksplisit sektor seni budaya	Tersedianya kebijakan khusus untuk mendukung aktivitas seni budaya di Kota Probolinggo
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Apakah basis data sudah terdata dengan baik (cont: jumlah tenaga kerja, jumlah omzet, dsb)	Penguatan melalui regulasi turunan RPI dan dukungan SKPD	Kurangnya pembaruan dan integrasi data seni budaya	Tersedianya basis data digital yang mencakup pelaku dan potensi ekonomi kreatif seni budaya
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Apakah telah tersedia infrastruktur untuk pengembangan produk industri (cont: Gedung untuk pengolahan hasil industri, pusat penjualan dan promosi, dsb)	Perluasan makna infrastruktur PUD dalam Perwali agar mencakup seni budaya	Minimnya anggaran pembangunan infrastruktur seni	Penyediaan sanggar resmi atau pusat seni budaya oleh Pemkot
Penyediaan anggaran	Skema/model pendanaan atau	Sinkronisasi dengan	Proporsi dana seni budaya	Tersedianya anggaran khusus seni dan

Riset dan Inovasi;	anggaran khusus untuk	RPJMD dan Renstra	dalam APBD	budaya dalam APBD
	riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri	Disbudpar	masih kecil	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Apakah sudah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan industri	Didukung oleh program Anugerah Inovasi Daerah dan fasilitasi Kemenkumham	Belum sistematisnya identifikasi dan fasilitasi HKI daerah	Inventarisasi rutin dan perlindungan HKI karya seni daerah
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Apakah sudah ada kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan industri	Perlu forum kolaborasi berbasis SK Wali Kota/Perda budaya	Belum adanya wadah formal kolaborasi antar pemangku kepentingan	Terdapat platform kolaborasi antar pelaku seni budaya dan lembaga riset
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan	Apakah sudah ada Sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan	Diperkuat dalam RPJMD dan RPI dengan sub sektor seni budaya	Keterbatasan platform digital riset budaya yang berkelanjutan	Sarana digital dan fisik (web, pusat komunitas) untuk riset seni budaya

dengan kemampuan daerah	kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri			
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Apakah sudah terbangun jejaring kemitraan antar lembaga di bidang pariwisata dan atau ekonomi kreatif, antara pemda, perguruan tinggi, pengelola wisata dari swasta (agen pariwisata, armada transportasi, penginapan, kuliner),	Perlu MoU lintas sektor untuk inovasi berbasis budaya	Koordinasi lintas sektor masih sporadis	Kemitraan aktif Dengan kelurahan/kecamatan, PD terkait, swasta dalam pengembangan seni budaya
	pemilik lahan, UMKM, dan pelaku bisnis di industri wisata			
Peningkatan difusi Inovasi	Apakah ada model dan strategi bagi usaha mikro dalam rangka	Perlu regulasi inovasi terbuka mencakup seni	Kurangnya literasi digital pelaku seni	Publikasi dan promosi karya budaya melalui kolaborasi akademik

	pengembangan industri	budaya	budaya	dan digital
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku Inovasi	Apakah ada sosisalisasi terkait hasil riset inovasi pengembangan industri yang pernah dilakukan	Dapat dimuat dalam program rutin Disbudpar dan diperkuat Perwali	Belum terjadwal dan belum terstruktur dalam kebijakan daerah	Sosialisasi hasil riset dan praktik seni budaya secara berkala
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi	Penyelenggaraan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan industri	Sudah ada, perlu peningkatan jangkauan dan afirmasi ke sektor seni	Jangkauan program belum merata ke seluruh pelaku seni	Program promosi yang menjangkau seluruh pelaku seni budaya Daerah
Apresiasi prestasi Inovasi	Lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan industri	Bisa diintegrasikan ke sistem apresiasi resmi daerah	Kegiatan lomba belum menyasar semua komunitas budaya	Program penghargaan tahunan untuk inovator seni budaya
Pengembangan	Program penumbuhan	Integrasi dengan	Minimnya	Adanya

perusahaan pemula berbasis Riset	perusahaan pemula berbasis riset/wirausaha industri	program UMKM dan inovasi melalui Perda UMKM	fasilitator dan mentor teknologi berbasis seni	pengembangan seni budaya lokal berbasis Teknologi
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Apakah ada inventarisasi teknologi masyarakat/Kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun	Perlu dimasukkan sebagai bagian dari sistem informasi daerah	Belum ada mekanisme dokumentasi digital budaya lokal	Tersedianya database pengetahuan seni dan budaya lokal
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan industri	Perlu ditambahkan dalam dokumen perencanaan PUD	Belum ada roadmap riset berbasis seni budaya	Program riset dan promosi produk seni budaya unggulan
Penyelenggaraa n pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan klaster inovasi berbasis industri	Dapat dimasukkan dalam klaster kreatif di kebijakan PUD	Belum ada kelembagaan klaster seni budaya yang mapan	Klaster seni budaya berbasis wilayah dan Potensi

		daerah		
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Apakah telah ada keterkaitan antar kebijakan pusat provinsi-kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan industri (kesesuaian perencanaan kota-propinsi-pusat)	Perlu dibentuk regulasi koordinasi lintas wilayah	Belum sinkronnya rencana pusat dan daerah sektor seni	Sinkronisasi program pusat-provinsi-kota dalam seni budaya
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk industri (contoh: sertifikasi halal, PIRT, sertifikasi HACCP, pelatihan kemasaran/pemasaran)	Difasilitasi Disdikbud dan Disbudpar, perluasan target dan integrasi branding	Masih terbatasnya akses pelaku budaya ke sistem sertifikasi	Karya budaya tersertifikasi (HKI, kurasi, promosi global)
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pengembangan industri (contoh: investor dari luar daerah, import hasil UMKM ke LN)	Perlu dimasukkan dalam prioritas RPJMD dan program Disbudpar	Belum terbangunnya jejaring kerja sama luar negeri secara aktif	Terdapat kerja sama promosi atau pertukaran budaya luar negeri

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.3.3 Ekosistem RID Tematik Permasalahan Utama Daerah

Berikut kondisi ekosistem riset dan inovasi daerah yang diharapkan terkait Permasalahan Utama Daerah, seperti tersaji dalam table berikut ini.

Tabel 3. 3 Kondisi yang diharapkan pada Ekosistem Riset dan Inovasi terhadap Permasalahan Utama Daerah (Lemahnya Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital)

Sub Elemen	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			

Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Kebijakan daerah lebih fokus pada sektor fisik dan jangka pendek, dibanding investasi pada pengetahuan dan inovasi jangka panjang Tidak adanya regulasi yang mendorong implementasi hasil riset secara sistemik.	Memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan riset dan inovasi yang kontekstual, sesuai potensi dan kebutuhan lokal	Diperlukan sinkronisasi program kegiatan yang mendukung dalam pengembangan riset dan inovasi daerah yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Banyak OPD memiliki data masing-masing, tetapi tidak terstandarisasi, tidak terintegrasi, dan tidak saling terbuka	Basis data riset dan inovasi yang terstruktur menjadi fondasi untuk rekomendasi kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi program	Tersedianya sistem data yang terintegrasi untuk memfasilitasi mediasi antara pengguna dan penghasil riset dan inovasi
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Keterbatasan fiskal sering membuat pembangunan infrastruktur riset tersingkir oleh proyek infrastruktur fisik lainnya yang lebih tampak langsung manfaatnya	membuka ruang untuk membangun fasilitas riset terapan, laboratorium inovasi, dan pusat data lokal.	Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan periset dan innovator seperti laboratorium dan fasilitas pengujian Tersedianya ruang publik kreatif sebagai pusat pertumbuhan inovasi Tersedianya pusat pelatihan riset dan inovasi untuk seluruh SDM

			periset Kota Probolinggo
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Anggaran daerah lebih banyak difokuskan pada program yang bersifat fisik atau pelayanan dasar Belum Tersedia Skema Anggaran khusus/Inovatif	Penyusunan program kolaboratif (triple helix) memungkinkan pembagian beban anggaran antara pemda, universitas, dan dunia usaha	Perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran riset dan inovasi
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Banyak pelaku usaha, inovator, pengrajin, dan akademisi tidak memahami pentingnya perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Proses pendaftaran KI (paten, merek, desain industri, dll.) dianggap rumit dan mahal oleh pelaku UMKM	Sistem pendaftaran dan pemantauan KI sudah berbasis daring, sehingga daerah dapat lebih mudah memfasilitasi pendaftaran tanpa harus hadir fisik di pusat.	Perlu adanya bantuan dari pemerintah daerah dalam kemudahan untuk Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah.
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Minimnya wadah seperti Triple Helix Forum, Dewan Riset Daerah, atau forum inovasi yang mempertemukan semua pihak	Berbagai program nasional mendorong keterlibatan perguruan tinggi, industri, dan pemerintah secara kolaboratif.	Kolaborasi riset dan inovasi sangat penting sehingga pengembangan riset dan inovasi daerah menjadi lebih optimal

	secara berkala		
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tidak adanya baseline data kebutuhan sarana (seperti lab, alat uji, ruang inkubasi, coworking space) menyebabkan pembangunan tidak tepat sasaran. Sarana riset yang ada kerap tidak termanfaatkan secara optimal karena tidak didukung personel teknis yang mumpuni atau profesional manajemen riset	Pemanfaatan Sarana Eksisting secara Terpadu Digitalisasi sebagai Alternatif Sarana Fisik	Tersedia sistem informasi data riset yang membantu periset memperoleh data dan alat analisis data Tersedia layanan sumber kepustakaan digital untuk para periset dan publik Tersedia fasilitas <i>co-working space</i> atau sejenisnya di Lokasi strategis sebagai ruang edukasi, kreatif, produktif dan peningkatan kompetensi yang dapat diakses semua kalangan
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			

Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Belum ada wadah permanen atau forum koordinasi antar lembaga untuk menyusun agenda bersama riset dan inovasi	Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif, UMKM inovatif, komunitas digital, dan kampus lokal membuka potensi kolaborasi yang nyata Dukungan regulasi terhadap kolaborasi dan kemitraan	Terbangun kemitraan antara lembaga periset dan inovator dengan pengguna hasil riset dan inovasi, sehingga dapat mendorong riset dan inovasi memberikan dampak Terbangun pola sinergi antar pemangku kepentingan untuk pemajuan riset dan inovasi Dukungan komitmen dan kebijakan kemitraan pentahelix dengan alokasi sumberdaya memadai Terbangun kelembagaan kemitraan yang memiliki posisi strategis dalam mobilisasi sumberdaya riset dan inovasi
Peningkatan difusi inovasi	Banyak inovasi lokal tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit direplikasi oleh	Pemerintah daerah bisa menjadi fasilitator dalam mempublikasikan, menghubungkan, dan	Difusi inovasi terjadi di Kota Probolinggo melalui pendekatan yang melibatkan berbagai

	OPD lain, desa, atau sektor usaha lain • Pelaku usaha kecil, kelompok tani, atau masyarakat umum belum semua memiliki akses terhadap inovasi yang sudah tersedia	memperluas penyebaran inovasi antar wilayah atau sektor.	pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan lembaga riset masih perlu dioptimalkan lagi • Difusi inovasi harus dijalankan secara berkesinambungan dan mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tidak ada agenda rutin untuk mempertemukan peneliti, inovator, pelaku usaha, dan OPD dalam berbagi hasil riset dan praktik inovatif.	UMKM mulai tertarik mengadopsi inovasi untuk meningkatkan daya saing, terutama di bidang pangan lokal, kerajinan, dan digitalisasi.	• Tersedia ruang pembelajaran bagi inovator melalui sharing praktik baik, diseminasi dan peningkatan kapasitas inovator dengan menggunakan media yang interaktif
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Hasil inovasi tidak dikemas dalam bentuk yang menarik	• Media sosial menjadi sarana efektif untuk mengenalkan inovasi daerah kepada Masyarakat • Masyarakat semakin tertarik pada inovasi berbasis local •	• Peningkatan dan keberlanjutan promosi akan meingkatkan peluang branding Kota Probolinggo • Media promosi yang atraktif, mudah diakses, komunikatif, dan menjangkau semua kalangan • Tersedianya ruang edukasi untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya inovasi

			melalui saluran konvensional dan modern, dalam bentuk sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, techno camp, technopreneur camp dan sebagainya melalui ruang kreatif, komunitas, lembaga profesi, lembaga masyarakat, atau lembaga publik
Apresiasi prestasi inovasi	• Apresiasi belum diikuti dengan dukungan riil seperti pendanaan lanjutan, pelatihan bisnis, atau akses pasar • Penghargaan inovasi sering kali bersifat simbolis	• Dalam Perda atau RPJMD banyak tertuang pentingnya mendorong dan menghargai inovasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pembangunan ekonomi lokal. • Berbagai ajang seperti IGA (Innovative Government Award), dan ajang BRIN membuka	• Pemberian penghargaan terhadap prestasi inovasi daerah akan memacu pengembangan riset dan inovasi lebih maksimal lagi • Adanya komitmen regulasi sebagai bentuk penghargaan terhadap periset dan inovator yang memberikan kontribusi, berbentuk fasilitasi,

Sub Elemen	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		peluang pengakuan lebih luas	dispensasi, atau dukungan lainnya • Apresiasi terhadap prestasi inovasi yang mampu menumbuhkan budaya riset dan inovasi masyarakat
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum tersedia pusat inkubasi yang mampu membina, mengembangkan, dan menghilirisasi riset menjadi produk bisnis inovatif secara intensif.	• Banyak hasil riset dan prototipe dari dunia pendidikan atau BRIDA yang belum dimanfaatkan sebagai dasar usaha rintisan. • Banyak generasi muda di daerah yang tertarik membangun startup teknologi dengan orientasi solusi lokal.	• Perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan perusahaan pemula berbasis riset sehingga budaya riset dan inovasi daerah dapat teregenerasi dengan baik • Adanya komitmen kebijakan dan alokasi sumberdaya yang memadai terkait dengan inkubasi hasil riset dan inovasi daerah • Adanya komitmen lembaga pendukung misalnya perbankan dan mitra industri menengah besar
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau	• Minimnya Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal	Pemerintah pusat mendorong pemanfaatan pengetahuan lokal sebagai bagian dari inovasi daerah dan	Perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk memacu inventarisasi kekayaan intelektual

teknologi masyarakat	• Belum Adanya Basis Data Terpadu Pengetahuan Lokal	ekonomi kreatif.	(pengetahuan dan teknologi) masyarakat sebagai repository kekayaan intelektual di daerah
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah	• Banyak kegiatan riset masih bersifat akademik atau nasional, belum diarahkan secara terfokus untuk menyelesaikan masalah riil daerah. • Lemahnya Sinergi antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Perguruan Tinggi • Kurangnya Integrasi Riset dengan Program Pembangunan Daerah	• Adanya Produk Unggulan Daerah yang Potensial Dikembangkan • Adanya kelembagaan riset di daerah (BRIDA) dan dukungan regulatif dari BRIN, Kemendagri, dan UU SISNAS IPTEK memungkinkan daerah memprakarsai inovasi strategis	• Meningkatnya prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan pembangunan daerah • Pemanfaatan hasil riset yang digunakan secara optimal dan menjawab persoalan daerah melalui hilirisasi yang optimal untuk kebijakan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	• Pengusaha dan pelaku usaha kecil masih minim dalam hal pengelolaan usaha inovatif, branding,	• Banyak UMKM lokal mulai terbuka terhadap pengemasan modern, standar mutu, pemasaran digital, dan kemitraan	• Adanya kesepahaman antar pihak terkait dengan produk atau sektor unggulan yang dikembangkan, tentunya

Sub Elemen	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	manajemen produksi, dan komersialisasi. • Lemahnya Koordinasi Antar Pelaku dalam Rantai Nilai (Hulu-Hilir) • Belum teridentifikasinya Klaster Potensial Secara Komprehensif	riset untuk memperkuat produk mereka • Lembaga riset daerah dan perguruan tinggi lokal dapat menjadi pusat riset, pendampingan, dan validasi teknologi untuk klaster unggulan. • Tersedianya Produk Unggulan yang Khas dan Bernilai Tambah	didahului dengan pemetaan, komitmen regulasi dan alokasi sumberdaya. • Penguatan kerjasama pengembangan produk unggulan dengan berbagai pihak secara sistematis. • Kegiatan pengembangan klaster produk unggulan berbasis inovasi yang konsisten berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	• Terbatasnya Kewenangan Daerah untuk Mengatur Riset dan Inovasi secara Mandiri • Kebijakan teknis sektoral dari pusat sering tidak disertai petunjuk pelaksanaan yang bisa diterapkan oleh daerah sesuai kapasitas SDM dan anggaran	• Desentralisasi IPTEK melalui Pembentukan BRIDA • Kemitraan Pusat-Daerah dalam Proyek Strategis Nasional	• Pemerintah daerah sesuai kewenangannya mengambil inisiatif untuk sinkronisasi kebijakan riset dan inovasi daerah dengan pemerintah pusat. • Agenda riset dan inovasi disesuaikan dengan kebutuhan antisipasi isu- isu nasional dan kebijakan pemerintah pusat
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu-isu	• Akses daerah terhadap jaringan riset global,	• Daerah yang aktif dalam isu global (misal: kota	• Sertifikasi produk unggulan (halal, HACCP, dll.)

internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	pendanaan internasional, atau kerja sama luar negeri masih sangat terbatas. • Isu internasional belum diterjemahkan menjadi kebutuhan atau peluang nyata di tingkat masyarakat atau UMKM	berkelanjutan, kota cerdas, kota kreatif) akan lebih diperhatikan di tingkat nasional dan internasional	• Antisipasi terhadap isu internasional dengan pemanfaatan hasil riset secara optimal.
Penguatan kerjasama internasional	• Banyak pemerintah daerah belum memiliki jalur atau mitra kerja sama yang aktif di luar negeri, baik dengan universitas, lembaga donor, maupun mitra teknologi.	• Banyak lembaga internasional tertarik mendukung riset dan inovasi berbasis kearifan lokal, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan • Kerja sama dapat membuka akses pasar luar negeri bagi produk unggulan lokal	• Peningkatan Kerja sama internasional dalam mendukung riset dan inovasi daerah terutama pada dunia usaha, industri, serta pemanfaatan IPTEK, seni dan budaya. • Meningkatnya publikasi hasil riset dalam skala internasional

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN

Ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di daerah. Pada dasarnya, ekosistem riset dan inovasi di daerah merupakan interaksi antar elemen yang mendukung terciptanya riset dan inovasi di daerah. Dengan terciptanya ekosistem riset dan inovasi di daerah, diharapkan terjadi peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui basis riset dan inovasi yang dimiliki. Sebagaimana pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, ekosistem riset dan inovasi di daerah terbagi menjadi elemen yaitu: (1) kebijakan dan infrastruktur riset inovasi di daerah; (2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset inovasi di daerah; (3) kemitraan riset inovasi di daerah; (4) budaya riset inovasi di daerah; (5) keterpaduan riset inovasi di daerah; dan (6) penyelarasan dengan perkembangan global.

Analisis kesenjangan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kesenjangan (gap) yang ada antara kondisi awal kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dengan kondisi akhir yang diharapkan. Di samping itu juga menggambarkan kesenjangan kondisi awal ekosistem riset dan inovasi di daerah, baik tentang produk unggulan daerah maupun permasalahan utama daerah, dibandingkan dengan kondisi akhir yang diharapkan. Analisis kesenjangan ini penting untuk dilakukan, untuk mengidentifikasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, untuk mendapatkan sasaran strategis kebijakan berbasis bukti yang tepat dalam pengambilan keputusan pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dan sebagai dasar penentuan program indikatif yang akan dibuat. Langkah-langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan Indeks Daya Saing Kota Probolinggo secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi di daerah.

Analisis kesenjangan pada bagian ini dibutuhkan untuk mengkaji standar ekosistem yang disarankan BRIN dengan realitas yang ada saat ini, sehingga pemerintah daerah melalui Bapperida Kota Probolinggo dapat memperbaiki dan mengembangkan ekosistem berdasarkan analisis kesenjangan ini.

4.1 KEMAMPUAN MENGHASILKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (*Evidence Based Policy*)

Analisis kesenjangan dalam kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti disesuaikan dengan permasalahan utama daerah Kota

Probolinggo yaitu Lemahnya ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah karena rendahnya dukungan Integrasi Ekonomi Digital yang disandingkan dengan kondisi element ekosistem riset dan daerah Kota Probolinggo. Adapun analisis kesenjangan kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

No	Unsur	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
1	Kemampuan mengelola SDM IPTEK untuk peningkatan kapasitas SDM	• Keterbatasan Kuantitas dan Kualitas SDM IPTEK Daerah • Program pengembangan SDM masih umum, belum diarahkan untuk menjawab kebutuhan strategis riset dan inovasi daerah.	• Tersedia SDM IPTEK memadai dengan keahlian bidang riset strategis lokal • Pelatihan berkala dalam bidang digitalisasi, teknologi tepat guna, riset terapan, dan literasi data	• Kurangnya SDM teknis dan fungsional peneliti di daerah sesuai kebutuhan lokal • Minimnya kompetensi SDM terhadap teknologi dan metodologi riset terkini
2	Kemampuan untuk mengelola inventarisasi berbasis bukti terhadap potensi KI daerah	• Data masih sporadis, tidak terdokumentasi secara sistematis, dan tidak berbasis data geospasial atau riset lapangan • Belum ada keterpaduan antara data potensi KI dan platform pengambilan kebijakan daerah (Renstra, RPJMD, dsb.)	• Tersedia data dan peta potensi KI daerah (HKI, paten, merek, desain industri, KI komunal, dll.) yang terstruktur dan diperbarui • Data potensi KI terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan, ekonomi kreatif, atau BRIDA	• Belum adanya sistem inventarisasi dan verifikasi potensi KI lokal secara menyeluruh • Potensi KI belum dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan berbasis bukti

3	Kemampuan untuk menjalin kemitraan strategis	• Minim keterlibatan dalam platform kolaboratif nasional maupun peluang kerja sama luar negeri • Koordinasi lintas perangkat daerah atau institusi masih lemah	• Aktif memanfaatkan platform seperti <i>matching fund</i>, CSR, program BRIN, dan kerja sama internasional • Ada unit kerja khusus atau focal point yang menangani hubungan kemitraan, baik nasional maupun internasional	• Lemahnya akses dan keterlibatan pada ekosistem pendanaan atau kolaborasi terbuka • Ketidakterpaduan dan lemahnya struktur pengelolaan kemitraan strategis
4	Kemampuan untuk memanfaatkan sistem informasi	• Pemanfaatan masih terbatas pada input data formal; belum dimanfaatkan untuk analisis atau insight strategis	Sistem informasi digunakan aktif dalam menyusun perencanaan berbasis bukti, evaluasi kinerja, dan pembuatan • kebijakan	• Sistem informasi belum digunakan sebagai alat pengambilan keputusan strategis
5	Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait program prioritas kepala daerah.	Terdapat beberapa kebijakan pendukung seperti Perwali No. 3 Tahun 2025 dan RPI, namun • implementasinya belum sepenuhnya tersampaikan kepada pelaku usaha, dan masih minim integrasi lintas sektor.	Adanya sistem perumusan kebijakan berbasis data riset lokal yang terintegrasi antar perangkat daerah dan menjawab • program prioritas kepala daerah.	Kesenjangan terletak pada lemahnya mekanisme penyusunan dan pemanfaatan hasil riset dalam proses perumusan kebijakan daerah. Dibutuhkan penguatan peran Bapperida dan perangkat daerah dalam menggunakan data riset • untuk

				mendukung keputusan strategis.
6	Kemampuan merespon isu aktual pembangunan daerah	Pemerintah telah menjalankan berbagai program layanan dasar dan pengembangan sektor potensial (pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif), namun masih bersifat sektoral dan belum responsif terhadap dinamika cepat (misal • transformasi digital dan perubahan iklim).	Pemerintah daerah mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan dengan pendekatan foresight dan responsif berbasis data dan sistem • monitoring yang adaptif.	Kesenjangan ada pada keterbatasan mekanisme pemantauan data secara real time dan kapasitas analisis lintas sektor. Hal ini menyebabkan respon • terhadap isu aktual belum optimal, misalnya dalam isu pengangguran muda dan transformasi sektor informal.
7	Kemampuan meningkatkan budaya inovasi di kalangan ASN (perangkat daerah) melalui IGA	Inovasi sudah mulai diterapkan dalam pelayanan publik berbasis digital dan pengembangan sektor PUD, namun belum menyeluruh dan belum terinternalisasi dalam budaya kerja OPD. Skor IDSD pilar kapabilitas inovasi Kota Probolinggo masih	Perangkat daerah • memiliki budaya kerja yang mendukung inovasi berkelanjutan, ditunjang dengan regulasi internal, pelatihan, dan insentif bagi inovator daerah.	Terdapat kesenjangan budaya dan sistem pendukung inovasi. Inovasi masih dianggap sekunder, belum menjadi bagian dari kinerja utama OPD. Diperlukan pembentukan regulasi, forum inovasi daerah, dan mekanisme

		di bawah Provinsi • Jawa Timur.		penghargaan yang • berkelanjutan.
--	--	---	--	---

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4.2 TEMATIK PRODUK UNGGULAN (PUD)

4.2.1 Industri Pengolahan (C)

Kelompok industri pengolahan terdiri atas industri tempe, industri kue PIA, industri olahan kerupuk ikan, industri batik, industri furniture kayu, dan industri sulam bordir. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan pihak terkait, berikut merupakan kesimpulan analisis kesenjangan terhadap ekosistem riset dan inovasi pada Produk Unggulan Daerah Kelompok Industri Pengolahan di Kota Probolinggo.

1. Pelaku usaha belum memahami secara menyeluruh kebijakan strategis seperti Perwali atau RPI yang seharusnya dapat mendukung pengembangan usaha. Kesenjangan ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dan pendampingan dalam menghubungkan program pemberdayaan UMKM dengan kebijakan formal, sehingga peluang pembinaan atau insentif tidak termanfaatkan secara maksimal. Hal ini menandakan masih kurangnya sosialisasi terstruktur dari dinas teknis. Kesenjangan ini menyebabkan regulasi strategis yang seharusnya bisa mempercepat penguatan sektor unggulan menjadi belum efektif.
2. Tidak tersedia pendanaan khusus atau skema pembiayaan riset untuk mendukung inovasi produk. Upaya inovasi seperti pembuatan bahan baku baru berasal dari inisiatif internal, seperti memanfaatkan sisa penjualan tempe. Hal ini membatasi kemampuan pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi produk secara signifikan. Pelaku usaha belum mendapatkan dukungan berupa insentif atau dana afirmatif seperti *matching fund daerah*. Kesenjangan ini memperlihatkan perlunya intervensi kebijakan fiskal lokal yang mendukung akselerasi inovasi di sektor UMKM.
3. Saat ini belum terdapat kemitraan formal antara pelaku industri dengan BRIN, perguruan tinggi, atau sektor swasta dalam konteks pengembangan produk maupun riset pasar. Ketiadaan lembaga penghubung seperti *Forum Inovasi Daerah* menyebabkan pelaku UMKM kesulitan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan model bisnis inovatif yang relevan. Hal ini

- menjadi hambatan besar dalam peningkatan daya saing produk unggulan lokal.
- Meski produksi dan penjualan sudah berjalan, belum tersedia sistem digital yang terintegrasi seperti sistem informasi UMKM, marketplace lokal, atau alat bantu analisis pasar. Sarana fisik seperti laboratorium uji mutu, inkubator, atau outlet bersama juga belum terealisasi. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM tidak memiliki dukungan ekosistem yang memadai untuk riset dan ekspansi produk.
 - Inovasi yang dilakukan masih bersifat reaktif dan tidak didasarkan pada pemetaan potensi daerah atau tren permintaan pasar. Selain itu, klusterisasi UMKM yang ada belum berbasis pada spesialisasi produk, sehingga posisi tawar produk unggulan daerah menjadi kurang kuat di pasar. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan sistematis melalui kebijakan “Inovasi Berbasis Peta Potensi Lokal” dan penguatan kelembagaan klaster. Pada industri batik, Klaster batik yang ada saat ini masih berbentuk komunitas informal, belum memiliki badan hukum atau struktur kelembagaan yang kuat. Selain itu, belum ada program inkubasi yang mendampingi pelaku baru atau wirausaha muda berbasis riset.
 - Belum ada kanal promosi maupun fasilitasi kerja sama internasional (Pada industri sulam bordir, meskipun telah memiliki pengalaman ekspor ke Jepang, kerja sama internasional saat ini terhenti). Sertifikasi produk seperti ijin usaha/ merk, SNI dan halal telah difasilitasi, tetapi belum dioptimalkan sebagai alat pembuka pasar global. Hal ini memperlihatkan perlunya kehadiran Desk Ekspor UMKM yang dapat menghubungkan pelaku usaha lokal dengan pasar luar negeri melalui diplomasi dagang atau kolaborasi diaspora. Pada industri batik, meskipun sudah ada standarisasi dari dinas terkait, produk batik Kota Probolinggo belum memiliki sertifikasi yang diakui secara global seperti *eco- label*, *fair trade*, atau *sertifikasi ekspor fesyen berkelanjutan*.

Untuk lebih jelasnya berikut penjabaran Analisis kesenjangan kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) pada masing-masing industri pada kelompok industri pengolahan

Tabel 4. 2 Analisis Kesenjangan Ekosistem RID untuk Industri Pengolahan

Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Pelaku usaha belum mengetahui/memahami kebijakan secara utuh	Mendukung arah pengembangan industri olahan	Dibutuhkan sosialisasi kebijakan secara

		lokal	komunitas & media visual yang mudah dipahami
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data belum terintegrasi lintas sektor, sebagian baru tersedia offline	Data digunakan untuk penguatan kapasitas dan penyusunan kebijakan	Perlu sistem informasi berbasis digital yang terakses publik dan antar-OPD
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Banyak usaha belum memiliki fasilitas produksi dan promosi yang layak	Meningkatkan efisiensi dan promosi produk olahan	Diperlukan kawasan produksi bersama dan pembangunan showroom tematik
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Mayoritas tidak memiliki skema pendanaan khusus	Dorong transformasi UMKM olahan seperti tempe beku, kemasan inovatif	Perlu alokasi dalam APBD dan skema Dana Inovasi Daerah/CSR
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Sebagian usaha sudah memiliki HAKI, tapi tidak dimanfaatkan optimal	Memberikan nilai tambah dan legalitas usaha olahan	Perlu pendampingan lanjutan untuk komersialisasi dan ekspor berbasis HAKI
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku Kepentingan	Minim kerja sama dengan BRIN, PT, atau lembaga Riset	Inovasi berbasis riset dan teknologi bisa ditingkatkan	Perlu MoU resmi dan fasilitasi dari pemda untuk riset kolaboratif tematik

Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Umumnya belum ada sistem informasi atau aplikasi lokal	Akses informasi dan pelatihan riset bisa dibuka lebih luas	Dibutuhkan pembangunan portal riset dan promosi UMKM berbasis data
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Banyak belum membentuk jejaring formal	Kolaborasi promosi, pelatihan, dan inovasi	Diperlukan forum rutin, fasilitasi dan skema kemitraan Multistakeholder
Peningkatan difusi inovasi	Inovasi masih dilakukan perorangan tanpa sistem	Praktik inovasi mudah diadopsi	Perlu pelatihan bersama, rumah inovasi, dan roadmap inovasi kolektif
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tidak semua pelaku menerima atau mengakses hasil riset	Memberikan pemahaman yang aplikatif ke pelaku industri	Dibutuhkan knowledge portal dan pelatihan berbasis pengalaman lokal
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi masih bergantung pameran offline dan undangan	Memperluas pasar produk olahan	Perlu pelatihan digital marketing dan aktivasi akun media sosial resmi
Apresiasi prestasi inovasi	Sudah ada beberapa lomba, tapi belum rutin	Meningkatkan motivasi dan daya saing pelaku usaha	Butuh sistem penghargaan tahunan dengan pembinaan lanjutan

Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum banyak inkubasi, generasi penerus kurang	Mendorong regenerasi dan usaha baru yang kompetitif	Perlu program inkubator daerah dan pelibatan generasi Muda
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Banyak pengetahuan lokal belum didokumentasi	Mengangkat potensi budaya menjadi keunggulan ekonomi	Perlu program dokumentasi & legalisasi warisan industri daerah
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah	Riset dan inovasi masih reaktif dan terbatas	Produk dan pengemasan lebih tepat sasaran	Perlu pendekatan riset terapan berbasis FGD dan data UMKM
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Sudah ada kelompok, tapi belum legal dan tematik	Memudahkan branding dan promosi bersama	Diperlukan legalisasi, pendampingan, dan sertifikasi kelompok
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Beberapa pelaku belum tahu arah kebijakan	Dukungan program lebih terpadu dan terarah	Butuh forum lintas OPD dan dashboard sinkronisasi regulasi
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu- isu internasional yang	Beberapa produk sudah bersertifikasi, tapi belum merata	Memenuhi standar pasar nasional dan	Perlu pelatihan dan pembiayaan sertifikasi

mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah		internasional	bersama UMKM
Penguatan kerjasama internasional	Umumnya belum ada akses kerja sama luar negeri	Membuka peluang ekspor produk olahan	Dibutuhkan kerja sama diaspora, KBRI, dan expo internasional

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4.2.2 Industri Kesenian, hiburan, rekreasi (R)

Kelompok kesenian, hiburan, rekreasi terdiri atas seni tari jaran bodag dan seni musik Dhug-dhug. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan pihak terkait, berikut merupakan kesimpulan analisis kesenjangan terhadap ekosistem riset dan inovasi pada Produk Unggulan Daerah Kelompok kesenian, hiburan, rekreasi di Kota Probolinggo.

1. Hingga saat ini, belum terdapat Perwali atau Perda yang secara khusus mendukung aktivitas seni dan budaya sebagai bagian dari ekonomi kreatif di Kota Probolinggo. Aktivitas seni masih berjalan secara informal dan insidental. Kesenjangan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan kebijakan yang berpihak, termasuk penetapan sub-urusan kebudayaan dalam perencanaan daerah, untuk menjamin keberlanjutan dan perlindungan pelaku seni budaya lokal. Belum tersedia sanggar resmi, rumah komunitas, maupun anggaran khusus untuk seni budaya menjadi penghambat utama dalam pengembangan industri kreatif berbasis budaya. Tanpa dukungan infrastruktur fisik dan alokasi anggaran dalam APBD, aktivitas seni cenderung bergantung pada inisiatif individu atau komunitas. Pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas pembangunan pusat seni budaya dan pengarusutamaan anggaran seni dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan musrenbang tematik.
2. Kapasitas kelembagaan dalam membangun kolaborasi lintas sektor masih minim. Belum ada MoU atau kerjasama konkret antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, lembaga riset, maupun sektor swasta. Sarana pendukung yang tersedia, seperti media sosial, belum dimanfaatkan untuk kebutuhan riset secara menyeluruh dan hanya berfungsi sebagai media promosi. Diperlukan penguatan kelembagaan melalui perjanjian resmi dan pembangunan portal riset digital yang komprehensif, termasuk fitur data, publikasi, forum diskusi, dan *e-learning*.
3. Belum ada bentuk kemitraan resmi antara pelaku seni dengan lembaga

- riset, BRIN, maupun perguruan tinggi. Sarana pendukung riset dan promosi juga belum tersedia dalam bentuk yang terstruktur, baik digital maupun fisik. Untuk itu, dibutuhkan pembentukan forum kolaborasi antar pemangku kepentingan serta fasilitas seperti *website komunitas budaya* dan rumah ekspresi di tiap kecamatan sebagai pusat pengembangan dan penyebaran karya seni.
4. Pelaku seni di Probolinggo aktif dalam berbagai kegiatan, namun belum ada strategi difusi atau promosi karya yang berkelanjutan. Kegiatan seperti pementasan atau partisipasi lomba tidak terdokumentasi dengan baik, dan tidak dimanfaatkan untuk peningkatan eksistensi di tingkat lokal maupun nasional. Perlu dibentuk forum pelatihan, publikasi karya digital, lomba inovasi seni tematik tahunan, dan kampanye digital budaya untuk meningkatkan visibilitas seni lokal.
 5. Tidak tersedia program penumbuhan wirausaha seni berbasis teknologi atau inkubasi komunitas budaya. Padahal, banyak usaha seni yang bersifat turun-temurun dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pemerintah perlu membentuk *inkubator bisnis budaya berbasis komunitas*, menyediakan pelatihan, akses permodalan, serta dokumentasi pengetahuan seni lokal sebagai bagian dari warisan budaya takbenda Kota Probolinggo.
 6. Hubungan internasional pelaku seni terbatas hanya pada keikutsertaan festival, tanpa keberlanjutan strategis. Sertifikasi karya budaya untuk pasar global juga belum tersedia. Ini menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah daerah sebagai jembatan promosi global, melalui kerjasama dengan KBRI, UNESCO, atau pertukaran budaya antarkota dunia. Program kurasi budaya, pameran luar negeri, dan sertifikasi HKI global perlu menjadi agenda prioritas.

Untuk lebih jelasnya berikut penjabaran Analisis kesenjangan kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) pada masing-masing industri pada kelompok kesenian, hiburan, rekreasi.

Tabel 4. 3 Analisis Kesenjangan Ekosistem RID untuk Industri Kesenian, Hiburan, Rekreasi

Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Belum ada kebijakan khusus, regulasi bersifat umum atau	Tersedianya kebijakan khusus untuk mendukung aktivitas seni budaya di Kota Probolinggo	Dibutuhkan regulasi dedikatif dan penyelarasan seni budaya dalam perencanaan pembangunan

	tidak mendukung langsung seni budaya		
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Sudah ada pembukuan manual, belum seluruhnya digital	Tersedianya basis data digital yang mencakup pelaku dan potensi ekonomi kreatif seni budaya	Perlu digitalisasi terpadu, berbasis portal resmi kota untuk seni budaya
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Tempat latihan/sanggar masih terbatas atau belum representatif	Penyediaan sanggar resmi atau pusat seni budaya oleh Pemkot	Diperlukan alokasi fasilitas oleh pemerintah kota, seperti rumah seni dan inkubator budaya
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Belum ada alokasi resmi dalam APBD untuk seni budaya	Tersedianya anggaran khusus seni dan budaya dalam APBD	Butuh penyusunan RAB RIDA bidang budaya dan mekanisme penganggaran tematik
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Sebagian pelaku sudah memiliki hak cipta, lainnya belum terfasilitasi	Inventarisasi rutin dan perlindungan HKI karya seni daerah	Perlu platform pendaftaran kolektif dan pelatihan pemanfaatan KI
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kerjasama bersifat individual atau informal	Terdapat platform kolaborasi antar pelaku seni budaya dan lembaga riset	Perlu fasilitasi resmi kolaborasi multipihak di bidang seni budaya
Penyediaan sarana pendukung	Media sosial digunakan hanya untuk	Sarana digital dan fisik (web, pusat komunitas) untuk	Media sosial perlu diperkuat dengan konten riset dan sistem interaktif

Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah	promosi	riset seni budaya	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Belum ada jejaring resmi; mengisi acara karnaval, desa, dll	Kemitraan aktif dengan kelurahan/kecamatan, PD terkait, swasta dalam pengembangan seni budaya	Perlu forum dan struktur manajemen kolaborasi lintas sektor
Peningkatan difusi inovasi	Belum ada strategi khusus, hanya promosi personal	Publikasi dan promosi karya budaya melalui kolaborasi akademik dan digital	Diperlukan pelatihan branding, digitalisasi konten, dan riset pasar budaya
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi terbatas dan belum terdokumentasi	Sosialisasi hasil riset dan praktik seni budaya secara berkala	Diperlukan festival riset budaya dan publikasi multimedia
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi melalui media sosial dan mulut ke mulut	Program promosi yang menjangkau seluruh pelaku seni budaya daerah	Promosi belum berkelanjutan; perlu sistem showcase tahunan dan aktivasi komunitas
Apresiasi prestasi inovasi	Pernah mengikuti lomba dari pemerintah	Program penghargaan tahunan untuk inovator seni budaya	Perlu kontinuitas dan sistem penghargaan yang mendorong regenerasi

Pengembang n perusahaan pemula berbasis riset	Tidak ada inkubator atau program startup budaya	Adanya pengembangan seni budaya lokal berbasis teknologi	Perlu akselerator seni- budaya berbasis kampus/pemerintah/komun itas
Inventarisasi, pengembang n, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pengetahuan masih diwariskan secara lisan	Tersedianya database pengetahuan seni dan budaya lokal	Diperlukan dokumentasi berbentuk video, e-book, dan katalog daring
Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembang n Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah	Belum ada roadmap riset budaya lokal	Program riset dan promosi produk seni budaya unggulan	Perlu riset tematik berbasis hasil FGD dengan pelaku budaya lokal
Penyelenggara an pengembang n klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Sudah ada komunitas, tapi belum berbadan hukum	Klaster seni budaya berbasis wilayah dan potensi	Perlu legalisasi kelembagaan dan insentif pembentukan klaster

Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Belum terkoordinasi antara pusat-provinsi-kota	Sinkronisasi program pusat-provinsi-kota dalam seni budaya	Diperlukan dashboard kebijakan dan tim koordinasi budaya lintas OPD
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi i pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Sudah ada hak cipta, tapi belum untuk promosi global	Karya budaya tersertifikasi (HKI, kurasi, promosi global)	Diperlukan kurasi dan fasilitasi ekspor serta kerja sama pameran luar negeri
Penguatan kerjasama internasional	Belum ada atau hanya melalui festival	Terdapat kerja sama promosi atau pertukaran budaya luar negeri	Perlu dukungan Pemerintah untuk jejaring internasional, MoU, dan beasiswa budaya

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4.3 TEMATIK PERMASALAHAN UTAMA DAERAH YANG DIUSULKAN

Analisis kesenjangan pada ekosistem riset dan inovasi daerah terhadap permasalahan utama daerah Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Analisis Kesenjangan Ekosistem RID untuk Permasalahan Utama Daerah (Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital)

No	Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Analisis Kesenjangan
	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi yang ada saat ini bersifat	Diperlukan sinkronisasi program kegiatan yang mendukung	Kurangnya sinkronisasi kebijakan terkait riset dan inovasi

		parsial hanya terdapat pada sektor tertentu antara lain: • Raperda RIPK Kota Probolinggo • Naskah Akademis RIPPARDA Kota Probolinggo • Perwali Kota Probolinggo No 3/2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025 Belum tersinkronisasi dan terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah.	dalam pengembangan riset dan inovasi daerah yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah.	daerah ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
B	Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data riset masih tersebar di masing-masing lembaga atau satuan kerja	Tersedianya sistem data yang terintegrasi untuk memfasilitasi mediasi antara pengguna dan penghasil riset dan inovasi	Kurang optimalnya integrasi dan kolaborasi data terkait riset dan inovasi daerah ke dalam basis data pembangunan daerah

C	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Penyediaan infrastruktur dasar untuk riset dan inovasi daerah di Kota Probolinggo saat ini berupa • laboratorium, • kawasan wisata studi pertanian (KWSP), • demplot pertanian, • organik, • museum, • RTH, • Rumah kemasan, • balai benih ikan, • gedung kesenian kota, • pusat daur ulang, • RTH Publik	• Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan periset dan innovator seperti laboratorium dan fasilitas pengujian • Tersedianya ruang publik kreatif sebagai pusat pertumbuhan inovasi • Tersedianya pusat pelatihan riset dan inovasi untuk seluruh SDM periset Kota Probolinggo	• Kurang tersedianya infrastruktur dasar riset dan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah untuk masyarakat dan level kelurahan. • Ruang publik kreatif sebagai wahana pengembangan ide, gagasan, dan kreatifitas produktif belum tersedia secara luas. • Kurangnya pusat pelatihan riset dan inovasi untuk meningkatkan kapasitas periset. • Kebutuhan infrastruktur dasar riset dan inovasi seperti laboratorium, pusat riset dan inovasi, science technopark, fasilitas pengujian, <i>creative hub</i> dan sejenisnya belum terpenuhi dengan baik.
D	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Prosentase anggaran riset dan inovasi daerah terhadap APBD Kota	Perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah	Konsistensi penyediaan anggaran untuk riset dan inovasi daerah masih rendah

		Probolinggo Tahun 2024 sebesar 0,33%, terus mengalami penurunan dari Tahun 2021-2024.	terkait penyediaan anggaran riset dan inovasi	
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Sejauh ini pemanfaatan kekayaan intelektual hanya berupa pemberian label hak patenk/ merk dagang terhadap industri pengolahan seperti industri makanan dan batik.	Perlu adanya bantuan dari pemerintah daerah dalam kemudahan untuk perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah.	Rendahnya respon masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan intelektual
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
A	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Saat ini sudah terbentuk Kolaborasi riset dan inovasi dengan pemangku kepentingan melalui Kerjasama antara perguruan tinggi maupun daerah lain	Kolaborasi riset dan inovasi sangat penting sehingga pengembangan riset dan inovasi daerah menjadi lebih optimal	• Masih terbatasnya kolaborasi aktor penta helix dalam ekosistem riset dan inovasi daerah khususnya swasta/ investor. • Pelembagaan jaringan atau forum belum kuat, sehingga belum optimal dalam menjembatani riset antar lembaga, merumuskan kebutuhan hasil riset dan inovasi, belum terbangun sistem dan pola kerja yang memungkinkan jaringan/ forum berperan

				optimal, serta masih kurangnya dukungan stakeholder terkait terhadap jaringan/forum
B	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	• Pengelolaan jaringan website Kota Probolinggo yang menyediakan informasi terkait riset dan inovasi daerah masih terbatas • Kurangnya pelayanan terhadap kebutuhan aktual untuk akses perpustakaan digital dalam mendukung riset dan inovasi • <i>Co-working space</i> yang tersedia masih terbatas	• Tersedia sistem informasi data riset yang membantu periset memperoleh data dan alat analisis data • Tersedia layanan sumber kepustakaan digital untuk para periset dan publik • Tersedia fasilitas <i>co- working space</i> atau sejenisnya di Lokasi strategis sebagai ruang edukasi, kreatif, produktif dan peningkatan kompetensi yang dapat diakses semua kalangan	• Belum tersedia website yang menyajikan basis data yang diperlukan untuk penelitian dan membantu peneliti memperoleh dan menganalisis data • Ketersediaan perangkat lunak untuk analisis yang bisa diakses secara terbuka belum memadai • Belum tersedia sumber kepustakaan digital yang bisa diakses publik • Belum tersedia <i>creative hub</i> untuk publik sebagai ruang saling berbagi dan peningkatan kompetensi bersama untuk peneliti, inovator, dan masyarakat.
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			

A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kerjasama kemitraan antar lembaga dalam pengembang riset dan inovasi daerah di Kota Probolinggo telah dilakukan secara rutin dengan dikuatkan melalui MOU baik antar perguruan tinggi maupun antar daerah lain.	• Terbangun kemitraan antara lembaga periset dan inovator dengan pengguna hasil riset dan inovasi, sehingga dapat mendorong riset dan inovasi memberikan dampak • Terbangun pola sinergi antar pemangku kepentingan untuk pemajuan riset dan inovasi • Dukungan komitmen dan kebijakan kemitraan pentahelix dengan alokasi sumberdaya memadai • Terbangun kelembagaan kemitraan yang memiliki posisi strategis dalam • mobilisasi sumberdaya riset dan inovasi	• Belum terdapat pemetaan dan komitmen yang kuat untuk mengembangkan kemitraan strategis riset dan inovasi • Skema kolaborasi yang tepat sesuai kebutuhan belum • Terbentuk
B	Peningkatan difusi inovasi	Difusi inovasi yang telah diterapkan di Kota Probolinggo telah dilegalkan melalui Perwali Kota	• Difusi inovasi terjadi di Kota Probolinggo melalui pendekatan yang melibatkan	• Akses masyarakat terhadap difusi inovasi masih terbatas dan belum tersosialisasikan dengan baik.

		Probolinggo No 68/ 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah yang terbagi atas inovasi tentang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi lainnya.	berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan lembaga riset masih perlu dioptimalkan lagi • Difusi inovasi harus dijalankan secara berkesinambungan dan mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah	• Pola difusi yang sistematis antar pemangku kepentingan belum terbentuk
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Praktik baik dan diseminasi yang telah dilakukan di Kota probolinggo seperti Program pendampingan dan pelatihan/ penyuluhan pengembangan inovasi	Tersedia ruang pembelajaran bagi inovator melalui sharing praktik baik, diseminasi dan peningkatan kapasitas inovator dengan menggunakan media yang interaktif	• Fasilitasi penyebaran praktik baik kepada sesama inovator belum optimal untuk meningkatkan kapasitas inovator • Media bagi pelaku inovasi untuk mengembangkan kompetensi, ide, gagasan dan pembelajaran lain secara interaktif belum tersedia
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
A	Promosi dan kampanye inovasi	bimbingan teknis untuk inovator, dan beberapa diskusi terbatas • Budaya kerja birokrasi, pola karir, dan	• Peningkatan dan keberlanjutan promosi akan meingkatkan peluang branding Kota Probolinggo - Media promosi	• Promosi belum dilakukan secara masif melalui berbagai saluran dan media yang menyasar kalangan lebih luas, terutama generasi

		pengukuran kinerja ASN belum sepenuhnya mendorong inovasi • Pembudayaan pemanfaatan hasil riset untuk kebijakan masih perlu diperkuat. Kebijakan berbasis bukti masih belum familiar di kalangan birokrasi	yang atraktif, mudah diakses, komunikatif, dan menjangkau semua kalangan • Tersedianya ruang edukasi untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya inovasi melalui saluran konvensional dan modern, dalam bentuk sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, techno camp, technopreneur camp dan sebagainya melalui ruang kreatif, komunitas, lembaga profesi, lembaga masyarakat, atau lembaga publik • Berkembangnya budaya kerja yang mendorong pemanfaatan hasil riset dan tubuhnya inovasi • Pemanfaatan hasil riset untuk kebijakan menjadi mainstream dalam • Birokrasi	muda Edukasi masih terbatas dan parsial oleh masing-masing lembaga dengan sasaran tertentu, misalnya mahasiswa, pelajar, pelaku usaha UMKM • Budaya birokrasi belum mendukung dan mendorong inovasi • Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis bukti
--	--	--	---	--

B	Apresiasi prestasi inovasi	• Bentuk apresiasi yang masih terbatas bagi prestasi inovasi (Perwali Kota Probolinggo 37/2024 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah) • Penghargaan atau apresiasi lain misalnya kemudahan investasi, dispensasi pajak, perizinan, dan beberapa kemudahan lain belum diatur	• Pemberian penghargaan terhadap prestasi inovasi daerah akan memacu pengembangan riset dan inovasi lebih maksimal lagi • Adanya komitmen regulasi sebagai bentuk penghargaan terhadap periset dan inovator yang memberikan kontribusi, berbentuk fasilitasi, dispensasi, atau dukungan lainnya • Apresiasi terhadap prestasi inovasi yang mampu menumbuhkan budaya riset dan inovasi masyarakat	• Belum optimalnya apresiasi dan dukungan terhadap implementasi hasil riset dan inovasi secara berkelanjutan • Belum adanya kebijakan yang jelas tentang apresiasi atau penghargaan bagi inovator daerah
C	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	• Di Kota Probolinggo ekosistem perusahaan	• Perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam	• Kurangnya dukungan pemerintah dalam pengembangan

		pemula berbasis riset (PPBR) mulai berkembang melalui dukungan dari berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, dan program nasional seperti inkubator bisnis namun sifatnya masih terbatas, tidak didesain sesuai potensi dan kebutuhan, dan tidak berkelanjutan • Belum ada skema dukungan terhadap inovasi, misalnya bagaimana peran perbankan industri besar dan menengah, pemerintah daerah di dalam hilirisasi hasil inovasi menjadi produk	pengembangan perusahaan pemula berbasis riset sehingga budaya riset dan inovasi daerah dapat teregenerasi dengan baik • Adanya komitmen kebijakan dan alokasi sumberdaya yang memadai terkait dengan inkubasi hasil riset dan inovasi daerah • Adanya komitmen lembaga pendukung misalnya perbankan dan mitra industri menengah besar	perusahaan pemula berbasis riset • Belum adanya kebijakan inkubasi hasil riset dan inovasi untuk memperkuat komitmen stakeholder • Belum adanya skema kolaborasi dalam mendukung inovasi daerah
D	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Inventarisasi Kekayaan Intelektual masih bersifat parsial	Perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk memacu inventarisasi kekayaan intelektual	• Belum optimalnya inventarisasi kekayaan intelektual masyarakat • Masih rendahnya transfer pengetahuan terhadap

			(pengetahuan dan teknologi) masyarakat sebagai repository kekayaan intelektual di daerah	pemanfaatan teknologi yang ada.
	Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah	Sudah terdapat kajian baik yang bersifat sektoral maupun multidisiplin terkait permasalahan utama daerah yang dilakukan	• Meningkatnya prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan pembangunan daerah • Pemanfaatan hasil riset yang digunakan secara optimal dan menjawab persoalan daerah melalui hilirisasi yang optimal untuk kebijakan	• Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/ atau mengatasi permasalahan daerah masih perlu ditingkatkan • Pelaksanaan riset dan inovasi sesuai permasalahan daerah sudah berjalan, namun pemanfaatannya belum optimal.

B	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah telah dilakukan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing kecamatan di Kota Probolinggo (Perwali Kota Probolinggo No 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025)	• Adanya kesepahaman antarpihak terkait dengan produk atau sektor unggulan yang dikembangkan, tentunya didahului dengan pemetaan, komitmen regulasi dan alokasi sumberdaya. Penguatan kerjasama pengembangan produk unggulan dengan berbagai pihak secara sistematis. • Kegiatan pengembangan klaster produk unggulan • berbasis inovasi yang konsisten berkelanjutan	• Pemetaan produk unggulan daerah dan rantai pasoknya belum dilakukan secara komprehensif • Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum maksimal
---	--	---	---	--

C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Keterpaduan kebijakan pusat dan daerah perlu di optimal sehingga meminimalisasi tumpang tindih kebijakan terkait riset dan inovasi yang dihasilkan	• Pemerintah daerah sesuai kewenangannya mengambil inisiatif untuk sinkronisasi kebijakan riset dan inovasi daerah dengan pemerintah pusat. • Agenda riset dan inovasi disesuaikan dengan kebutuhan antisipasi isu- isu nasional dan kebijakan pemerintah pusat.	• Optimalisasi sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah • Riset dan inovasi untuk antisipasi kebijakan pemerintah pusat masih perlu ditingkatkan misalnya menyikapi isu-isu nasional, kebijakan pemerintah pusat, dll.
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
A	Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	• Rendahnya minat dalam pengembangan standarisasi produk unggulan untuk peningkatan daya saing daerah • Berbagai isu global menjadi fokus dalam aktivitas riset dan inovasi beberapa tahun terakhir, di antaranya masalah energi terbarukan, ketahanan pangan,	• Sertifikasi produk unggulan (halal, HACCP, dll.) • Antisipasi terhadap isu internasional dengan pemanfaatan hasil riset secara optimal.	• Kesenjangan dalam penerapan pemahaman isu- isu internasional ke dalam strategi konkret pengembangan riset dan inovasi di daerah • Fasilitasi, koordinasi, implementasi riset dan inovasi untuk merespon isu internasional sudah pernah dilakukan, namun masih parsial dan tidak berkelanjutan

		daya dukung dan daya tampung lingkungan, ekonomi kreatif, serta penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		
B	Penguatan kerjasama internasional	Minimnya Kerjasama internasional yang terjalin	• Peningkatan Kerja sama internasional dalam mendukung riset dan inovasi daerah terutama pada dunia usaha, industri, serta pemanfaatan IPTEK, seni dan budaya. • Meningkatnya publikasi hasil riset dalam skala internasional	• Rendahnya minat penajakan kerja sama internasional dalam pengembangan sektor usaha, industri, dan pemanfaatan IPTEK • Diseminasi hasil riset dalam bentuk jurnal dan buku internasional masih minim.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB V

STRATEGI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

5.1 STRATEGI MELAKUKAN KAJIAN UNTUK MENGHASILKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (*Evidence-Based Policy*)

Strategi ditentukan sesuai dengan permasalahan yang muncul berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang dilakukan pada bab sebelumnya. Beberapa permasalahan yang muncul untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Permasalahan untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti Kota Probolinggo

No	Unsur	Permasalahan
1	Kemampuan mengelola SDM IPTEK untuk peningkatan kapasitas SDM	- Kurangnya SDM teknis dan fungsional peneliti di daerah sesuai kebutuhan lokal - Minimnya kompetensi SDM terhadap teknologi dan metodologi riset terkini
2	Kemampuan untuk mengelola inventarisasi berbasis bukti terhadap potensi KI daerah	- Belum adanya sistem inventarisasi dan verifikasi potensi KI lokal secara menyeluruh - Potensi KI belum dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan berbasis bukti
3	Kemampuan untuk menjalin kemitraan strategis	- Lemahnya akses dan keterlibatan pada ekosistem pendanaan atau kolaborasi terbuka - Ketidakterpaduan dan lemahnya struktur pengelolaan kemitraan strategis
4	Kemampuan untuk memanfaatkan sistem informasi	Sistem belum digunakan sebagai alat pengambilan infromasi keputusan strategis
5	Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait program prioritas kepala daerah.	Lemahnya mekanisme penyusunan dan pemanfaatan hasil riset dalam proses perumusan kebijakan daerah.

6	Kemampuan merespon isu aktual pembangunan daerah	• Kesenjangan ada pada keterbatasan mekanisme pemantauan data secara real time dan kapasitas analisis lintas sektor.
7	Kemampuan meningkatkan budaya inovasi di kalangan ASN (perangkat daerah) melalui IGA	• Terdapat kesenjangan budaya dan sistem pendukung inovasi.

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Strategi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, baik terhadap program prioritas RPJMD tahun 2025–2029 maupun dalam merespon isu-isustrategis terkait ekosistem riset dan inovasi daerah di periode yang sama. Sedangkan aksi konkrit adalah tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam penyelesaian permasalahan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti Kota Probolinggo.

Adapun strategi dan aksi konkrit dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti diarahkan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Strategi dan Aksi Konkrit Pengembangan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Only)

No	Unsur	Strategi	Aksi konkrit
1	Kemampuan mengelola SDM IPTEK untuk peningkatan kapasitas SDM	Peningkatan Kapasitas SDM	• Identifikasi SDM IPTEK (JF Peneliti, Dosen, Tenaga Ahli) di Kota Probolinggo • Sosialisasi dan bimtek terkait ekosistem RIDA untuk menghasilkan kajian/ riset dan inovasi mendukung kebijakan berbasis bukti • Studi banding untuk pengembangan kajian/ riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan berbasis bukti • Kemitraan strategis dengan SDM IPTEK dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian (BRIN) untuk peningkatan kualitas SDM IPTEK Kota Probolinggo • Peningkatan partisipasi SDM IPTEK Kota Probolinggo dalam menghasilkan kajian/ riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan berbasis bukti • Peningkatan kapasitas SDM IPTEK untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti

2	Kemampuan untuk mengelola inventarisasi berbasis bukti terhadap potensi Kekayaan Intelektual (KI) daerah	Penguatan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual Daerah	• Melakukan pemetaan awal potensi Kekayaan Intelektual (KI) daerah (seperti indikasi geografis, seni budaya, inovasi teknologi lokal, desain industri). • Membangun sistem inventarisasi berbasis digital untuk pencatatan, klasifikasi, dan pemantauan potensi KI. • Dashboard satu data berbasis digital untuk database informasi Kekayaan Intelektual Daerah • Integrasi pengelolaan informasi Kekayaan Intelektual Daerah untuk menghindari duplikasi dan mendukung validitas.
---	--	--	--

No	Unsur	Strategi	Aksi konkrit
			• Peningkatan Kekayaan Intelektual Daerah (hak paten/ hak cipta/ merk) yang telah terdata. • Penguatan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual Daerah
3	Kemampuan untuk menjalin kemitraan strategis	Penguatan Ekosistem Kolaborasi (<i>Quadruple Helix</i>)	• Identifikasi mitra strategis yang mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti (BRIN, KEMENPAREKRAF, PERGURUAN TINGGI, LPPM, dll) • Koordinasi antar OPD untuk kemitraan strategis untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti • MOU untuk legalitas mitra strategis • Kolaborasi kemitraan <i>quadruple helix</i> (Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat) untuk mendukung rekomendasi • Standarisasi rekomendasi kebijakan berbasis bukti sesuai dengan hasil identifikasi kolaborasi <i>quadruple helix</i> • Penguatan Ekosistem Kolaborasi (<i>Quadruple Helix</i>)

4	Kemampuan untuk memanfaatkan sistem informasi	Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Data Kebijakan Terpadu	• Penguatan digitalisasi dan IT dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti • Integrasi seluruh data dan informasi dalam portal e- government • Sinkronisasi dan harmonisasi antara sistem jaringan pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari duplikasi. • Peningkatan kapasitas sistem informasi untuk pengembangan jaringan • Pengembangan sistem informasi pemerintah untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti • Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Data Kebijakan Terpadu
5	Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait program prioritas kepala daerah.	Skema Pendanaan Riset Kebijakan	• identifikasi potensi daerah yang akan dikembangkan sebagai sumber pendanaan untuk anggaran riset dan inovasi • Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk skema anggaran

No	Unsur	Strategi	Aksi konkrit
			riset dan inovasi di Kota Probolinggo • Pengembangan embrio potensi daerah sebagai sumber pendanaan untuk anggaran riset dan inovasi • Pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk menarik minat investor • Peningkatan anggaran untuk pengembangan riset dan inovasi daerah dalam mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti • Skema Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Kebijakan berbasis bukti
6	Kemampuan merespon isu aktual pembangunan daerah	Pemanfaatan hasil riset	• Identifikasi kebijakan pembangunan daerah yang berdasarkan hasil riset/ kajian • Koordinasi dengan stakeholder terkait implementasi kebijakan berbasis bukti • Sinkronisasi hasil kebijakan pusat dan daerah ke dalam mendukung riset inovasi • Kolaborasi dengan perguruan tinggi/ Lembaga penelitian untuk merespon isu actual pembangunan daerah • Implementasi hasil kolaborasi riset/ kajian dalam kebijakan pembangunan daerah • Pemanfaatan hasil

			riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah
7	Kemampuan meningkatkan budaya inovasi di kalangan ASN (perangkat daerah) melalui IGA	Penguatan Kelembagaan dan Regulasi	• Identifikasi tingkat partisipasi inovasi di kalangan ASN dalam IGA • Sosialisasi budaya inovasi di kalangan ASN • Budaya inovasi menjadi salah satu program prioritas dalam kinerja ASN • Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Lembaga penelitian dalam peningkatan kualitas budaya inovasi di kalangan ASN • Penguatan partisipasi ASN dalam budaya inovasi • Penguatan Kelembagaan dan Regulasi budaya inovasi untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5.2 STRATEGI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)

Strategi ditentukan sesuai dengan permasalahan yang muncul berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang dilakukan pada bab sebelumnya. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengembangan produk unggulan daerah

(PUD) Industri Pengolahan dan produk unggulan daerah (PUD) Industri Kesenian, Hiburan, Dan Rekreasi Kota Probolinggo pada tabel berikut

Tabel 5. 3 Permasalahan pada Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Industri Pengolahan dan Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Kota Probolinggo

No	ELEMENT	Permasalahan
	PUD Industri Pengolahan	
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	• Dibutuhkan sosialisasi kebijakan secara komunitas & media visual yang mudah dipahami • Perlu sistem informasi berbasis digital yang terakses publik dan antar-OPD • Diperlukan infrastruktur produksi bersama dan pembangunan showroom tematik • Perlu alokasi dalam APBD dan skema Dana Inovasi Daerah/CSR • Perlu pendampingan lanjutan untuk komersialisasi dan ekspor berbasis HAKI
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	• Perlu MoU resmi dan fasilitasi dari pemda untuk riset kolaboratif tematik • Dibutuhkan pembangunan portal riset dan promosi UMKM berbasis data
3	Kemitraan Riset dan Inovasi	• Diperlukan forum rutin, fasilitasi dan skema kemitraan multistakeholder • Perlu pelatihan bersama, rumah inovasi, dan roadmap inovasi kolektif • Dibutuhkan knowledge portal dan pelatihan berbasis pengalaman lokal
4	Budaya Riset dan Inovasi	• Perlu pelatihan digital marketing dan aktivasi akun media sosial resmi • Butuh sistem penghargaan tahunan dengan pembinaan lanjutan • Perlu program inkubator daerah dan pelibatan generasi muda • Perlu program dokumentasi & legalisasi warisan industri daerah
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	• Perlu pendekatan riset terapan berbasis FGD dan data UMKM • Diperlukan legalisasi, pendampingan, dan sertifikasi kelompok • Butuh forum lintas OPD dan dashboard sinkronisasi

		regulasi
6	Penyelarasan dengan Perkembangan Global	• Perlu pelatihan dan pembiayaan sertifikasi bersama UMKM • Dibutuhkan kerja sama diaspora, KBRI, dan expo internasional
	PUD Kesenian, Hiburan, Dan Rekreasi	
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	• Dibutuhkan regulasi dedikatif dan penyelarasan seni budaya dalam perencanaan pembangunan • Perlu digitalisasi terpadu, berbasis portal resmi kota untuk seni budaya • Diperlukan alokasi fasilitas oleh pemerintah kota, seperti rumah seni dan inkubator budaya • Butuh penyusunan RAB RIDA bidang budaya dan mekanisme penganggaran tematik • Perlu platform pendaftaran kolektif dan pelatihan pemanfaatan KI
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	• Perlu fasilitasi resmi kolaborasi multipihak di bidang seni budaya • Media sosial perlu diperkuat dengan konten riset dan sistem interaktif

No	ELEMENT	Permasalahan
3	Kemitraan Riset dan Inovasi	• Perlu forum dan struktur manajemen kolaborasi lintas sektor • Diperlukan pelatihan branding, digitalisasi konten, dan riset pasar budaya • Diperlukan festival riset budaya dan publikasi multimedia
4	Budaya Riset dan Inovasi	• Promosi belum berkelanjutan; perlu sistem showcase tahunan dan aktivasi komunitas • Perlu kontinuitas dan sistem penghargaan yang mendorong regenerasi • Perlu akselerator seni-budaya berbasis kampus/pemerintah/komunitas • Diperlukan dokumentasi berbentuk video, e-book, dan katalog daring
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	• Perlu riset tematik berbasis hasil FGD dengan pelaku budaya lokal • Perlu legalisasi kelembagaan dan insentif pembentukan klaster • Diperlukan dashboard kebijakan dan tim koordinasi budaya lintas OPD
6	Penyelarasan dengan Perkembangan Global	• Diperlukan kurasi dan fasilitasi ekspor serta kerja sama pameran luar negeri • Perlu dukungan Pemerintah untuk jejaring internasional, MoU, dan beasiswa budaya

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Strategi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah merupakan aspek penting dalam upaya mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) sekaligus menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan produk unggulan daerah (PUD) Kota Probolinggo. Strategi ini mencakup prakarsa strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat daya saing ekonomi lokal, memacu pertumbuhan sektor unggulan, dan menciptakan transformasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kerangka pembangunan jangka menengah 2025–2029, penguatan ekosistem riset dan inovasi diarahkan untuk membangun konektivitas antar pelaku, meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, dan mempercepat adopsi teknologi pada sektor-sektor unggulan, seperti agroindustri, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata berbasis budaya dan alam. Sedangkan aksi konkrit adalah tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam penyelesaian permasalahan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Probolinggo.

Strategi dan aksi konkrit pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk mendukung pengembangan PUD Kota Probolinggo disajikan secara lebih sistematis dalam tabel strategi sebagaimana tercantum pada bagian berikut.

Tabel 5. 4 Strategi dan Aksi Konkrit Pengembangan PUD Industri Pengolahan

No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
	a. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Sosialisasi kebijakan pendukung riset dan inovasi daerah pada industri pengolahan	• Merumuskan kebijakan untuk mendukung pengembangan pelaku PUD Industri pengolahan
No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
			• Sosialisasi kebijakan kepada para pelaku PUD Industri pengolahan • Penguatan kebijakan pusat- daerah untuk pengembangan PUD Industri pengolahan • Bimbingan teknis untuk implementasi kebijakan kepada para pelaku PUD Industri pengolahan • Pemantapan Integrasi kebijakan pengembangan PUD Industri pengolahan ke dalam kebijakan pembangunan daerah • Monitoring efektivitas kebijakan riset dan inovasi untuk pengembangan PUD

			Industri pengolahan untuk peningkatan daya saing daerah
	b. Penataan basis data Riset dan Inovasi	Integrasi data riset dan inovasi untuk industri pengolahan	• Survey updating data pelaku PUD • Sosialisasi kepada pelaku PUD untuk digitalisasi data base pelaku PUD • Integrasi <i>dashboard</i> lintas OPD untuk peningkatan informasi PUD Industri • Partisipasi pelaku PUD Industri pengolahan dalam dashboard satu data untuk menjalin kemitraan dengan para investor • Pemanfaatan basis data / digitalisasi data untuk matchmaking teknologi • Basis data/ dashboard satu data/ digitalisasi PUD Industri pengolahan yang sesuai terstandar

	c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi secara terpadu pada Industri Pengolahan	• Identifikasi kebutuhan infrastruktur riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan • Sosialisasi kepada para pelaku PUD Industri Pengolahan terkait kebutuhan rencana penyediaan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi • Penyediaan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi untuk pengembangan PUD Industri
--	---	--	--

No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
			Pengolahan (showroom, laboratorium produksi, dll) • Pelatihan & pendampingan untuk pemanfaatan infrastruktur • Integrasi infrastruktur infrastruktur dasar Riset dan Inovasi PUD Industri Pengolahan • Evaluasi & maintenance infrastruktur infrastruktur dasar Riset dan Inovasi PUD Industri

			Pengolahan
	d. Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema pendanaan untuk riset dan inovasi industri pengolahan	• Perumusan anggaran riset dan inovasi • Sosialisasi Skema pendanaan untuk Penguatan Dana <i>Matching Fund</i> daerah • Pemanfaatan anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Industri pengolahan • Partisipasi pelaku PUD Industri Pengolahan dalam implementasi program prioritas riset dan inovasi daerah • Peningkatan kontribusi CSR/hibah riset dan anggaran APBD dalam peningkatan daya saing PUD Industri Pengolahan • Kontinuitas alokasi anggaran riset dan inovasi Daerah pengembangan PUD Industri Pengembangan

	e. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pendampingan HKI untuk pelaku industri pengolahan	• Inventarisasi KI pada PUD Industri Pengolahan • Pelatihan pendaftaran HKI kepada para pelaku PUD Industri Pengolahan • Fasilitasi HKI kolektif (branding PUD Industri Pengolahan) • Pelatihan & pendampingan untuk memenuhi kualifikasi HKI • Pendampingan kerjasama berbasis sertifikat HKI • Optimalisasi HKI untuk peningkatan daya saing produk PUD Industri Pengolahan
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
	a. Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Pembentukan forum kolaborasi pengembangan industri pengolahan	• identifikasi mitra riset lokal • Fasilitasi dan Pembentukan Forum riset dan inovasi industri pengolahan melalui MoU (BRIN, perguruan tinggi, dan pelaku usaha) • Kegiatan riset kolaboratif dengan BRIN, perguruan tinggi, dan pelaku usaha • Pelaksanaan

			jejaring kemitraan riset dan inovasi secara kolaboratif • Kegiatan Riset dan inovasi bersama menghasilkan prototipe • Institutionalization forum & program kolaboratif pengembangan PUD industri Pengolahan
	b. Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Pengembangan sarana pendukung industri pengolahan	• Identifikasi kebutuhan sarana pendukung Riset dan Inovasi oleh para pelaku PUD Industri Pengolahan • Sosialisasi pengadaan sarana (alat pendukung dan jaringan sistem teknologi) pendukung Riset dan Inovasi • Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi • Integrasi sarana pendukung Riset dan Inovasi ke dalam fasilitas publik untuk pemaksimalan fungsi • Pemanfaatan sarana pendukung Riset dan Inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan • Perawatan & pemaksimalan sarana pendukung riset dan

			inovasi daerah Industri Pengolahan
3	Kemitraan Riset dan Inovasi		
	a. Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Pengembangan skema kemitraan strategis untuk industri pengolahan	• Mapping jejaring kemitraan yang berpotensi untuk kolaborasi (perguruan tinggi, LIPI/BRIN, asosiasi industri) • Sosialisasi pembentukan forum kemitraan • Jejaring kemitraan lintas sektor (UMKM-PT-BUMD) • <i>Joint research</i> & inkubasi bisnis • Penguatan kerjasama/ skema kemitraan strategis untuk ekspor dan pendanaan • Evaluasi kinerja kemitraan dan perpajakan MoU
	b. Peningkatan difusi inovasi	Penyusunan road map difusi inovasi industri pengolahan	• Identifikasi model difusi inovasi yang dapat digunakan • Pelatihan dan bimbingan teknis model difusi inovasi adaptif • Implementasi model difusi inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan • Pembentukan forum/ tim kerja untuk transfer

			teknologi dan produksi massal hasil riset inovasi • Komersialisasi hasil riset inovasi PUD Industri Pengolahan • Replikasi dufusi inovasi ke sektor PUD lainnya
	c. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Kerjasama dan replikasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi industri pengolahan	• Identifikasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi • Pelatihan dan bimtek untuk peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi • Implementasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi • Jejaring Kerjasama untuk pengembangan implementasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi • Replikasi hasil praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi • Peningkatan daya saing produk olahan melalui Kerjasama dan replikasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi
4	Budaya Riset dan Inovasi		

	a. Promosi dan kampanye inovasi	Digitasi dan integrasi pelaksanaan promosi untuk penguatan branding PUD industri pengolahan	• Identifikasi kegiatan promosi inovasi yang akan dilakukan • Pelatihan dan bimtek digital marketing • Implementasi digital marketing melalui akun sosial media para pelaku PUD Industri Pengolahan • Pelibatan komunitas digital media dalam promosi • Peningkatan Branding PUD industri pengolahan • Rebranding PUB indudtri pengolahan untuk pasar nasional/internasiolnal
	b. Apresiasi prestasi inovasi	Peningkatan apresiasi inovasi	• Perumusan mekanisme lomba inovasi pada PUD Industri Pengolahan • Sosialisasi kepada para pelaku PUD Industri Pengolahan terkait lomba inovasi • Pelaksanaan Lomba Inovasi PUD Industri Pengolahan Kota Probolinggo • Jejaringan kemitraan penghargaan di kegiatan lomba inovasi • Pemberian Insentif riset & inovasi kepada para pelaku PUD Industri Pengolahan

			• Peningkatan kegiatan apresiasi riset dan inovasi sesuai dengan standart IDSD Nasional
	c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan jumlah dan penguatan incubator bisnis industri pengolahan	• Identifikasi pengusaha pemula pada PUD Industri Pengolahan • Pelatihan dan bimtek wirausaha inovatif pada PUD Industri Pengolahan • Pembentukan inkubator bisnis daerah khususnya pada PUD Industri Pengolahan • Jejaring kerjasama untuk perluasan modal dalam pengembangan pengusaha pemula • Skema pembinaan pengusaha pemula pada PUD Industri Pengolahan secara berkelanjutan • Peningkatan jumlah dan penguatan perusahaan pemula berbasis riset pada PUD Industri Pengolahan
	d. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Publikasi dan sosialisasi teknologi masyarakat yang telah ada	• Identifikasi tekonologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan • Workshop dan Bimtek • Pelestarian tekonologi masyarakat

			(kearifan lokal) • Jejaring kerjasama untuk publikasi kearifan lokal • Pemanfaatan Teknologi masyarakat (kearifan lokal)
No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
			untuk peningkatan daya saing produk olahan • Peningkatan jumlah teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang tercipta
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
	a. Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah	Pengembangan riset dan inovasi industri pengolahan	• Identifikasi isu strategis dalam pengembangan PUD Industri Pengolahan • Penyusunan tim kerja untuk agenda riset tematik • Pelaksanaan aksi riset dan inovasi • Jejaring Kerjasama dalam kegiatan prakarsa riset dan inovasi • Komersialisasi hasil prakarsa riset dan inovasi • Pengembangan Prakarsa Riset dan Inovasi pada PUD Industri

			Pengolahan
	b. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pendampingan pengembangan klaster inovasi PUD industri pengolahan	• Identifikasi klaster PUD Industri Pengolahan • Sosialisasi hasil pemetaan klaster PUD industri pengolahan • Dukungan sarana dan prasarana pada masing- masing klaster PUD industri pengolahan (showroom dan alat-alat untuk pengolahan) • Jejaring Kerjasama untuk investasi dan branding pengembangan klaster ekonomi • Pendampingan sinergitas klaster dan digital marketing • Pengembangan klaster inovasi PUD industri pengolahan menjadi simpul ekonomi dan inovasi daerah yang mandiri

	c. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan untuk pengembangan PUD Industri pengolahan	• Identifikasi kebijakan pendukung • Forum koordinasi lintas sektoral untuk sinkronisasi kebijakan pendukung • Penyusunan kebijakan integrative (sektoral dan spasial) • Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Lembaga terkait (BRIN) dalam perumusan sinkronisasi kebijakan
--	---	---	---

No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
			• Penyusunan roadmap kolaboratif sinkronisasi kebijakan • Dashboard kebijakan terpadu PUD Industri Pengolahan
6	Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
	a. Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Pelatihan standarisasi produk industri pengolahan untuk pengembangan PUD	• Identifikasi PUD Industri Pengolahan yang sudah terstandarisasi • Pelatihan SNI & sertifikasi halal/ekspor pada PUD Industri Pengolahan • Pendampingan pengolahan produk industri pengolahan terstandarisasi • Jejaring Kerjasama dengan Lembaga swasta dalam pelatihan isu standar produk • Peningkatan jumlah pelaku usaha PUD Industri Pengolahan yang terstandarisasi • Peningkatan branding daya saing industri pengolahan skala nasional dan internasional

	b. Penguatan kerjasama internasional	Kemitraan strategis dan jejaring global untuk pengembangan PUD industri pengolahan	• Pemetaan potensi mitra Kerjasama global pada PUD Industri Pengolahan • Delegasi ke expo & forum luar negeri • Penjajakan MoU dengan mitra asing dan lembaga sertifikasi • Penguatan jejaring Kerjasama internasional • Penguatan branding PUD Industri Pengolahan • penguatan kemitraan strategis pada ekspor industri pengolahan
--	---	---	--

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 5. 5 Strategi dan Aksi Konkrit Pengembangan PUD Industri Kesenian, Hiburan, Rekreasi

No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
	a. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Penguatan kebijaka n pendukung riset dan inovasi daerah untuk pengembangan PUD industri kesenian, hiburan, dan rekreasi.	• Merumuskan kebijakan untuk mendukung pengembangan pelaku PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi (misal: Perwali Kesenian dan

No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
			Kebudayaan Khas Kota Probolinggo) • Sosialisasi kebijakan kepada para pelaku seni, budaya, dan pengelola wisata • Penguatan kebijakan pusat- daerah untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Bimbingan teknis untuk implementasi kebijakan • Pemantapan Integrasi kebijakan dalam kebijakan pembangunan daerah • Monitoring efektivitas kebijakan riset dan inovasi untuk peningkatan daya saing daerah
	b. Penataan basis data Riset dan Inovasi	Integrasi data riset dan inovasi untuk pengembangan PUD industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Updating data pelaku kelompok seni dan budaya lokal serta destinasi wisata lokal Kota Probolinggo • Sosialisasi untuk digitalisasi data base pelaku PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Integrasi <i>dashboard</i> lintas OPD untuk peningkatan informasi • Partisipasi pelaku seni, budaya, dan pengelola wisata dalam dashboard satu data

			untuk menjalin kemitraan dengan para investor • Pemanfaatan basis data / digitalisasi data untuk matchmaking teknologi • Basis data/ dashboard satu data/ digitalisasi PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi yang terintegrasi
	c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Pengembangan <i>Creative Hub</i> untuk aktivitas PUD industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Identifikasi kebutuhan infrastruktur riset dan inovasi • Sosialisasi kebutuhan dan rencana penyediaan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi • Pendirian pusat inovasi seni dan budaya (<i>Creative Hub</i>) • Pelatihan & pendampingan untuk pemanfaatan infrastruktur (<i>creative hub</i>) dasar Riset dan Inovasi

No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
			• Integrasi infrastruktur (<i>creative hub</i>) dengan ruang kreatif kota • Evaluasi & maintenance (<i>creative hub</i>) PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
	d. Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Skema pendanaan untuk riset dan inovasi industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Perumusan anggaran riset dan inovasi • Sosialisasi Skema pendanaan untuk Penguatan Dana <i>Matching Fund</i> daerah • Pemanfaatan anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Partisipasi pelaku seni, budaya, dan pengelola wisata dalam implementasi program prioritas riset dan inovasi daerah • Peningkatan kontribusi CSR/hibah riset dan anggaran APBD • Kontinuitas alokasi anggaran riset dan inovasi Daerah pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

	e. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pendampingan HKI untuk pelaku industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Inventarisasi KI pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Pendampingan pendaftaran HKI kepada para pelaku seni, budaya, dan pengelola wisata • Fasilitasi HKI kolektif (branding PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi) • Pelatihan & pendampingan untuk pengembangan seni, budaya, dan destinasi wisata untuk memenuhi kualifikasi HKI • Pendampingan kerjasama berbasis sertifikat HKI • Optimalisasi HKI untuk peningkatan daya saing produk PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
	a. Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Pembentukan forum kolaborasi pengembangan industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Melakukan identifikasi mitra riset lokal (BRIN, perguruan tinggi/ Institut Seni Indonesia, seniman)

			• Pembentukan forum koordinasi riset dan inovasi Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Riset kolaboratif dengan BRIN, perguruan tinggi, dan pelaku seni budaya • Pelaksanaan jejaring kemitraan secara kolaboratif untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Pengembangan prototipe untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Institutionalization forum & program kolaboratif
	b. Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Pengembangan sarana pendukung industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Identifikasi kebutuhan sarana pendukung Riset dan Inovasi oleh para pelaku seni, budaya, dan pengelola wisata • Sosialisasi pengadaan sarana pendukung (alat pendukung dan jaringan sistem teknologi) • Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi • Integrasi sarana pendukung Riset dan Inovasi ke dalam fasilitas publik untuk

			pemaksimalan fungsi • Pengembangan sarana pendukung Riset dan Inovasi • Perawatan & pemaksimalan sarana pendukung riset dan inovasi daerah
3	Kemitraan Riset dan Inovasi		
	a. Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Pengembangan skema kemitraan strategis untuk industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Mapping jejaring kemitraan yang berpotensi untuk kolaborasi seni dan budaya serta pengembangan pariwisata local • Sosialisasi pembentukan forum skema kemitraan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Kolaborasi/ Jejaring kemitraan lintas sektor (misal pengembangan kolaborasi desa wisata) • <i>Joint research</i> & inkubasi bisnis • Penguatan kerjasama untuk pendanaan

No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
			Evaluasi kinerja kemitraan & perpanjangan MoU
	b. Peningkatan difusi inovasi	Penyusunan road map difusi inovasi industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	Identifikasi model difusi inovasi yang dapat digunakan Pelatihan dan bimbingan teknis model difusi inovasi adaptif Implementasi model difusi inovasi Pembentukan forum/tim kerja untuk transfer teknologi dan peningkatan kreativitas seni budaya Komersialisasi hasil riset (kreativitas seni dan budaya lokal Kota Probolinggo) Regenerasi para pelaku seni budaya dan pengelola wisata untuk pelestarian
	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Penguatan publikasi hasil riset dan inovasi industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	Identifikasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi Pelatihan dan bimtek untuk peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada para pelaku seni, budaya, dan pengelola wisata Publikasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi Jejaring Kerjasama

			untuk pengembangan implementasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi Replikasi hasil praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi Penguatan Kerjasama dan replikasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi
4	Budaya Riset dan Inovasi		
	a. Promosi dan kampanye inovasi	Digitasi dan integrasi pelaksanaan promosi untuk penguatan branding PUD industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	Identifikasi kegiatan promosi inovasi yang akan dilakukan Pelatihan dan bimtek branding & konten digital untuk promosi seni budaya dan rekreasi daerah Implementasi digital marketing melalui akun sosial media

No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
			• Roadshow seni budaya pada event-event lokal dan nasional • Pelibatan komunitas digital media • Peningkatan Branding • Rebranding untuk pasar nasional/internasional
	b. Apresiasi prestasi inovasi	Peningkatan apresiasi inovasi	• Perumusan mekanisme lomba inovasi • Sosialisasi kepada para pelaku seni budaya dan pengelola usaha wisata terkait lomba inovasi • Pelaksanaan Lomba Inovasi seni budaya dan pengelola usaha wisata Kota Probolinggo • Jejaringan kemitraan penghargaan di kegiatan lomba inovasi • Pemberian Insentif riset & inovasi kepada para pelaku seni budaya dan pengelola usaha wisata • Keberlanjutan kegiatan apresiasi riset dan inovasi sesuai dengan standart IDSD Nasional

	c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Penguatan inkubator kreatif industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Identifikasi generasi muda kreatif lokal untuk regenerasi seni budaya daerah • Pelatihan dan bimtek wirausaha seni, budaya, pengelola usaha wisata • Pembentukan inkubator bisnis daerah (misal manajemen pertunjukan & produksi digital) • Jejaring kerjasama untuk penguatan inkubator kreatif • Skema pembinaan regenerasi pelaku secara berkelanjutan • Peningkatan jumlah inkubator kreatif guna mendukung industri kreatif daerah Kota Probolinggo
	d. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pelestarian kearifan lokal pada industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Identifikasi kearifan lokal seni budaya dan rekreasi • Workshop dan bimtek pengenalan kearifan lokal seni budaya dan destinasi wisata lokal Kota Probolinggo

No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
			• Pelestarian kearifan lokal seni budaya dan rekreasi daerah (misal: Jaran Bodhag dan Musik Dug Dug) • Jejaring kerjasama untuk komersialisasi kearifan lokal yang sudah diciptakan • Pengembangan kearifan lokal yang tercipta dalam mendukung kemajuan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
	a. Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah	Pengembangan riset dan inovasi industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Identifikasi isu strategis seni budaya dan rekeasi daerah • Penyusunan tim kerja untuk Agenda riset dan inovasi • Pelaksanaan aksi riset dan inovasi • Jejaring Kerjasama dalam kegiatan prakarsa riset dan inovasi • Komersialisasi hasil prakarsa riset dan inovasi • Pengembangan Prakarsa Riset dan Inovasi pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

	b. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Legalitas klaster industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Identifikasi klaster PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Sosialisasi hasil pemetaan klaster PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Dukungan sarana dan prasarana pada masing- masing klaster PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi (misal: sanggar, gedung latihan, alat musik, dll) • Jejaring Kerjasama untuk legalitas dan branding pengembangan klaster ekonomi PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Sinergi klaster dan digital marketing pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Penguatan klaster ekonomi PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi menjadi simpul ekonomi dan inovasi daerah yang mandiri
--	---	--	--

No.	Elemen/Sub Elemen	Strategi	Aksi konkrit
	c. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sikronisasi kebijakan untuk pengembangan PUD Industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Identifikasi kebijakan pendukung • Forum koordinasi lintas sektoral untuk sinkronisasi kebijakan pendukung • Penyusunan kebijakan integrative (sektoral dan spasial) • Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Lembaga terkait (BRIN) dalam perumusan sinkronisasi kebijakan • Penyusunan roadmap kolaboratif sinkronisasi kebijakan • Dashboard kebijakan terpadu pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
6	Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
	a. Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Pelatihan dan pendampingan standarisasi pengembangan PUD Industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Identifikasi pelaku komunitas seni budaya dan pengelola usaha wisata di Kota Probolinggo • Pelatihan dan pendampingan kegiatan sertifikasi dan standarisasi • Jejaring Kerjasama dengan Lembaga swasta

			dalam pelatihan isu standar kreativitas • Peningkatan jumlah pelaku seni, budaya, dan pengelola wisata yang terstandarisasi • Peningkatan branding daya saing seni, budaya, dan destinasi wisata skala nasional dan internasional
	b. Penguatan kerjasama internasional	Kemitraan strategis dan jejaring global untuk pengembangan PUD Industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Pemetaan potensi mitra kerjasama global pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi • Pengiriman delegasi ke festival atau event internasional • Kemitraan strategis dengan mitra asing dan lembaga sertifikasi • Kolaborasi riset dan inovasi dengan kemitraan global • Penguatan branding untuk peningkatan daya saing dan kreativitas seni budaya dan destinasi wisata daerah
			• Penguatan kerjasama internasional seperti misi pertukaran seni dan budaya, serta promosi destinasi wisata lokal Kota Probolinggo.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

**5.3 STRATEGI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH
UNTUK PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH**

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 menekankan pentingnya riset dan inovasi sebagai pilar pembangunan. RPJMD Kota Probolinggo dirancang agar selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program inovasi di tingkat kota dapat mendukung dan didukung oleh kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, menciptakan sinergi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan terhadap permasalahan utama daerah tersebut kemudian diturunkan ke dalam permasalahan terkait enam element pada ekosistem riset dan inovasi daerah sebagai berikut

Tabel 5. 6 Permasalahan pada Setiap Element Riset dan Inovasi Daerah terkait Permasalahan Utama Daerah Kota Probolinggo (Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital)

No	ELEMENT	Permasalahan
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	• Kurangnya sinkronisasi kebijakan RIDA ke dalam kebijakan pembangunan daerah. • Kurang optimalnya integrasi dan kolaborasi data terkait riset dan inovasi daerah ke dalam basis data pembangunan daerah • Kurang tersedianya infrastruktur dasar riset dan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah • Konsistensi penyediaan anggaran untuk riset dan inovasi daerah masih rendah • Rendahnya respon masyarakat dalam pemanfaatan KI
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	• Masih terbatasnya kolaborasi aktor penta helix dalam ekosistem riset dan inovasi daerah khususnya swasta/ investor. • Belum tersedia sarana pendukung untuk publik sebagai ruang saling berbagi dan peningkatan kompetensi bersama untuk peneliti, inovator, dan Masyarakat dan lemahnya akses digital
3	Kemitraan Riset dan Inovasi	• Belum terdapat pemetaan dan komitmen yang kuat untuk mengembangkan kemitraan strategis riset dan inovasi

		• Akses masyarakat terhadap difusi inovasi masih terbatas dan belum tersosialisasikan dengan baik • Media bagi pelaku inovasi untuk mengembangkan kompetensi, ide, gagasan dan pembelajaran lain secara interaktif belum tersedia
--	--	--

4	Budaya Riset dan Inovasi	• Promosi belum dilakukan secara masif melalui berbagai saluran dan media yang menyasar kalangan lebih luas, terutama generasi muda • Belum optimalnya apresiasi dan dukungan terhadap implementasi hasil riset dan inovasi secara berkelanjutan • Belum adanya kebijakan inkubasi hasil riset dan inovasi untuk memperkuat komitmen stakeholder • Masih rendahnya transfer pengetahuan terhadap pemanfaatan teknologi yang ada.
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	• Pelaksanaan riset dan inovasi sesuai permasalahan daerah sudah berjalan, namun pemanfaatannya belum optimal • Pemetaan produk unggulan daerah dan rantai pasoknya belum dilakukan secara komprehensif • Optimalisasi sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi Daerah
6	Penyelarasan dengan Perkembangan Global	• Kesenjangan dalam penerapan pemahaman isu-isu internasional ke dalam strategi konkret pengembangan riset dan inovasi di daerah • Rendahnya minat penajakan kerja sama internasional dalam pengembangan sektor usaha, industri, dan pemanfaatan IPTEK

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Strategi untuk menyelesaikan permasalahan utama daerah didasarkan pada enam element ekosistem riset dan inovasi daerah. Permasalahan utama daerah Kota Probolinggo adalah Lemahnya ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah karena rendahnya dukungan Integrasi Ekonomi Digital. Sedangkan aksi konkrit adalah tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk mencapai

tujuan atau sasaran dalam penyelesaian permasalahan utama daerah Kota Probolinggo.

Strategi dan aksi konkrit pengembangan ekosistem riset dan Inovasi di Daerah untuk memberikan solusi permasalahan utama daerah, seperti tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 7 Strategi dan Aksi Konkrit Permasalahan Utama Daerah Kota Probolinggo (Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital)

No.	Element/Sub Elemen	Strategi	Aksi Konkrit
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
	a. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Integrasi hasil riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah	• Riset/ kajian yang mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah • Sosialisasi kepada SDM penyusunan kebijakan pembangunan daerah untuk memanfaatkan hasil riset/ kajian • Menyediakan infrastruktur/ laboratorium research untuk mendukung kegiatan riset/ kajian di daerah • Kemitraan dengan perguruan tinggi untuk melakukan pengembangan riset/ kajian yang telah disusun • Uji coba kebijakan berbasis riset dan inovasi daerah • Integrasi kebijakan riset dengan RPJMD, Resstra OPD, dan kebijakan sektoral kota probolinggo

	b. Penataan basis data Riset dan Inovasi	Sinkronisasi dan digitalisasi data riset dan inovasi untuk pengembangan sektor ekonomi daerah	• Identifikasi pendataan yang dibutuhkan dalam database RIDA • koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pengembangan media komunikasi untuk database RIDA • Penguatan sistem jaringan komunikasi intra dan antra pemerintah daerah • Membuat aplikasi yang mendukung sinkronisasi dan integrasi data khususnya data RIDA Kota Probolinggo • Masyarakat umum dapat memanfaatkan media komunikasi yang dikelola oleh pemerintah daerah • Sinkronisasi dan digitalisasi data riset dan inovasi untuk pengembangan sektor ekonomi daerah
	c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Kolaborasi pemanfaatan infastruktur publik untuk pengembangan sektor ekonomi daerah	• identifikasi lokasi penambahan ruang kreatif Kota Probolinggo • koordinasi dengan stakeholder terkait untuk penambahan ruang kreatif Kota Probolinggo • Pembangunan ruang kreatif Kota untuk mendukung penyediaan infrastruktur RIDA Kota Probolinggo • kemitraan dengan swasta/ CSR Perusahaan/ Perguruan Tinggi dalam

			pengelolaan ruang kreatif Kota Probolinggo • Tersedianya zona/ ruang kreatif kota • Pemanfaatan infrastruktur publik untuk pengembangan sektor ekonomi daerah
	d. Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Penguatan komitmen dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah untuk pengembangan ekonomi inklusif dan digitalisasi ekonomi daerah	• identifikasi potensi daerah yang akan dikembangkan • koordinasi dengan stakeholder terkait untuk peningkatan Iklim Penanaman Modal di Kota Probolinggo • Pengembangan embrio potensi daerah untuk menarik minat investor • Peningkatan kegiatan promosi dan pemasaran potensi daerah untuk meningkatkan permodalan dari calon investor • Peningkatan jumlah investor untuk mendukung pengembangan ekosistem RIDA • Penguatan komitmen dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah

	e. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pendampingan pemanfaatan HKI untuk pengembangan ekonomi inklusif daerah	Inventarisasi melalui pendataan KI Sosialisasi tingkat kepentingan KI Koordinasi bantuan kepengurusan KI Mempermudah proses kepengurusan KI Jumlah kepengurusan HKI meningkat Pemanfaatan HKI untuk pengembangan ekonomi inklusif daerah
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Pembentukan skema kelembagaan riset dan inovasi daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan digitalisasi ekonomi daerah	Identifikasi pelaku ekonomi kreatif yang memenuhi syarat peningkatan skala usaha dan masih aktif koordinasi dengan stakeholder terkait dan membentuk tim untuk fasilitasi Kolaborasi permodalan dan penyediaan infrastruktur pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku ekonomi kreatif Penguatan kemitraan dengan calon investor Pembentukan skema kelembagaan riset dan inovasi daerah
	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Optimalisasi dan reorientasi sarana pendukung riset dan inovasi yang telah ada	Sinkronisasi aplikasi pendukung RIDA Pelatihan penggunaan aplikasi kepada SDM terkait Pemanfaatan sarana pendukung (digital infrastruktur) oleh para pelaku ekonomi inklusif

			integrasi sistem aplikasi antara pemerintahan pusat dan daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih informasi integrasi aplikasi informatika untuk mendukung integrasi ekonomi digital pengelolaan e-government yang terintegrasi dengan informasi RIDA
3	Kemitraan Riset dan Inovasi		
	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kemitraan strategis untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan digitalisasi ekonomi daerah	Identifikasi usaha mikro yang membutuhkan pemberdayaan usaha untuk peningkatan daya saing produk Koordinasi membentuk tim untuk fasilitasi pemberdayaan usaha peningkatan daya saing produk Kemitraan berupa bantuan fasilitas pemberdayaan usaha (Galeri produk UMKM, Gedung pelatihan, Laboratorium pengembangan usaha) Memperkuat kemitraan dengan calon investor Peningkatan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha Kemitraan strategis untuk pelaksanaan pemberdayaan usaha

	Peningkatan difusi inovasi	Menjaring difusi inovasi untuk pengembangan ekonomi inklusif dan digitalisasi ekonomi daerah	Identifikasi teknologi tepat guna yang dapat diimplementasi untuk pengembangan ekonomi lokal Sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait model teknologi tepat guna yang dapat digunakan Bantuan pelatihan/ bimtek untuk meningkatkan skala usaha Pengembangan kemitraan dengan investor untuk penyediaan bantuan modal difusi inovasi Implementasi difusi inovasi untuk meningkatkan skala usaha pada ekonomi inklusif Kota Probolinggo Pengembangan difusi inovasi untuk peningkatan daya saing pada ekonomi inklusif Kota Probolinggo
	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Penguatan praktik baik riset dan inovasi untuk pengembangan ekonomi inklusif dan digitalisasi ekonomi daerah	Identifikasi praktik baik yg dapat diimplemetasi Sosialisasi untuk penerapan hasil praktik baik yg dapat diimplementasikan Bantuan pelatihan/ bimtek untuk diseminasi riset dan inovasi Replikasi diseminasi hasil riset dan inovasi untuk pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital Implementasi replikasi riset dan inovasi yang telah

			digunakan Penguatan praktik baik riset dan inovasi untuk peningkatan daya saing
4	Budaya Riset dan Inovasi		
	Promosi dan kampanye inovasi	Penguatan branding daerah untuk penguatan dan pengembangan ekonomi inklusif	Identifikasi sektor unggulan perekonomian lokal Koordinasi antar stakeholder untuk kegiatan promosi dan kampanye Fasilitasi kegiatan promosi dengan dukungan sistem teknologi (digital marketing)

			Kemitraan dengan pemerintah pusat/regional/swasta untuk agenda event promosi rutin Penguatan branding daerah ekonomi inklusif di Kota Probolinggo
	Apresiasi prestasi inovasi	Pengembangan apresiasi inovasi untuk meningkatkan daya tarik inovator	Pengembangan dan perbaikan metode kegiatan lomba inovasi yang telah berjalan setiap tahunnya Koordinasi dan sosialisasi terkait dan pengembangan kemitraan awal untuk implementasi hasil inovasi Insentif bagi pelaku riset dan inovasi sebagai bentuk apresiasi riset dan inovasi Bantuan fasilitasi sebagai bentuk apresiasi riset dan inovasi Pengembangan apresiasi inovasi untuk peningkatan daya saing pelaku riset dan inovasi
	c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Penguatan Inkubasi Inovasi Daerah untuk pengembangan ekonomi inklusif dan digitalisasi ekonomi daerah	Identifikasi pengusaha pemula sektor ekonomi inklusif dan digital Pendampingan kepada para pengusaha pemula dan membuka kerjasama dengan investor Bantuan modal untuk pengembangan usaha Pemantapan kemitraan Peningkatan pengusaha pemula berbasis riset Penguatan Inkubasi Inovasi

			Daerah untuk pengembangan ekonomi inklusif dan digitalisasi ekonomi daerah
	d. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Penguatan digital teknologi untuk pengembangan ekonomi daerah	Inventarisasi dan pendataan kearifan lokal Sosialisasi tingkat kepentingan pendataan kearifan lokal kepada pelaku ekonomi inklusif Pendampingan bantuan pengembangan kearifan lokal kepada pelaku ekonomi inklusif Jejaring kemitraan untuk pengembangan kearifan lokal Implementasi teknologi masyarakat (kearifan lokal) Penguatan teknologi masyarakat (kearifan lokal)
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah		
	a. Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah	Pemberdayaan komunitas lokal sebagai Prakarsa riset dan inovasi untuk pengembangan ekonomi inklusif dan digitalisasi ekonomi daerah	Sosialisasi pengembangan riset dan inovasi Pendampingan pengembangan riset dan inovasi hasil dari prakarsa riset Peningkatkan minat investor untuk permodalan pengembangan prakarsa riset Implementasi hasil prakarsa riset dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital

			Pemberdayaan komunitas lokal sebagai Prakarsa riset dan inovasi
--	--	--	---

	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pendampingan kluster inovasi untuk pengembangan ekonomi inklusif	Identifikasi sektor dan produk unggulan Kota Probolinggo Sosialisasi dan pengembangan kerjasama untuk penetapan kluster inovasi yang terbentuk Pemanfaatan fasilitas umum sbg infrastruktur pendukung pengembangan klaster ekonomi Pemantapan jejaring kemitraan dengan investor Penguatan skala usaha sesuai dengan klaster ekonomi yang telah terbentuk Pendampingan klaster inovasi untuk pengembangan ekonomi inklusif
	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan pendukung riset dan inovasi daerah	Identifikasi kebijakan pusat pendukung kebijakan RIDA di daerah Koordinasi dengan stakeholder terkait Pendampingan untuk sosialisasi kesesuaian kebijakan kepada para pelaku ekonomi inklusif Melakukan bimtek secara berkala Sinkronisasi kebijakan riset dan inovasi di daerah dan pusat
6	Penyelarasan dengan Perkembangan Global		

	Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Internasionalisasi produk dan layanan inklusif melalui pemanfaatan teknologi global	identifikasi standarisasi produk usaha untuk peningkatan daya saing produk koordinasi untuk fasilitasi sosialisasi standarisasi produk usaha bantuan fasilitas standarisasi produk usaha Memperkuat kemitraan dengan calon investor untuk mendukung fasilitasi standarisasi produk Peningkatan kesadaran pelaku ekoomi inklusif untuk standarisasi produk Pemanfaatan teknologi global untuk mendukung fasilitasi standarisasi produk
--	---	---	---

	b. Penguatan kerjasama internasional	Kemitraan strategis dengan lembaga internasional dan kolaborasi inklusif melalui program bersama (Global Partnership)	• Perumusan potensi sektor unggulan untuk proposal kerjasama internasional • Sosialisasi dan koordinasi antar stakeholder terkait • Pelatihan dan bimtek untuk meningkatkan daya tarik potensi unggulan • Peningkatan kemitraan dengan pemerintah pusat dan investor luar negeri • Penyelarasan potensi sektor unggulan ekonomi lokal daerah • Global partnership untuk penguatan kerjasama internasional
--	--------------------------------------	---	---

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB VI

PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam pengembangan produk produk unggulan dan penyelesaian permasalahan utama daerah Kota Probolinggo selama lima tahun mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berfokus pada potensi lokal yang tertuang ke dalam Peta Jalan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo. Adapun Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo selaras dengan tema pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026-2030 sesuai RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

Tabel 6. 1 Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026-2030

Tahun	Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026-2030
2026	Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan stabilitas wilayah sebagai dasar pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan
2027	Peningkatan kualitas infratraktur dasar perkotaan dan infratraktur ekonomi untuk mengungkit pemerataan kesejahteraan
2028	Mendorong pengembangan dan penyebarluasan inovasi untuk modernisasi sektor-sektor strategis daerah
2029	Akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi inklusif menuju masyarakat tangguh dan sejahtera
2030	Memantapkan Kota Probolinggo yang sejahtera, Modern, dan Adaptif sebagai pondasi menuju Kota Logistik, tangguh, dan berkelanjutan

Sumber: RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2030



Gambar 6. 1 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui secara umum Peta Jalan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030 telah selaras dengan Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026-2030 dengan permasalahan utama daerah yaitu Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah Karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital, sehingga diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Probolinggo pada Tahun 2025 dilakukan penyusunan landasan ekosistem riset dan inovasi Kota Probolinggo hal ini mempertimbangkan efisiensi jangka waktu dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga pada tahun awal kegiatan yang dilakukan lebih kepada perumusan landasan pada ekosistem riset dan inovasi Kota Probolinggo.
2. Berdasarkan Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Probolinggo pada Tahun 2026 dilakukan Peningkatan SDM ekosistem riset dan inovasi dan pengembangan jejaring kemitraan, aspek sumber daya manusia dan kemitraan adalah dua hal penting sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan riset dan inovasi daerah. Dimana apabila sumber daya manusia riset dan inovasi (dosen, JF Peneliti, tenaga ahli) lemah maka hasil inovasi digital dikhawatirkan tidak dapat diaplikasikan oleh masyarakat (inovasi teknologi dan digitalisasi sulit masuk ke sektor lokal, pelaku UMKM dan pelaku seni budaya tidak mendapatkan solusi berbasis inovasi digital, inovasi hanya berhenti di kampus, tidak sampai ke masyarakat) yang berdampak pada kondisi ekonomi inklusif yang stagnan. Sehingga dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia riset dan inovasi untuk penguatan kapasitas SDM riset dan inovasi agar menghasilkan riset dan inovasi aplikatif yang langsung mendukung digitalisasi potensi lokal. Selain itu apabila jejaring kemitraan lemah maka potensi lokal tidak akan terkoneksi ke pasar digital yang menyebabkan akses ekonomi menjadi terbatas. Sehingga dibutuhkan pengembangan jejaring kemitraan untuk dapat membangun kemitraan riset-aplikatif, menjembatani jejaring digital marketing skala nasional dan internasional, dan pembiayaan digitalisasi produk untuk mendukung peningkatan ekonomi inklusif.
3. Berdasarkan Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Probolinggo pada Tahun 2027 dilakukan pengembangan infrastruktur ekosistem riset dan inovasi, sejalan dengan tema pembangunan Kota Probolinggo maka pada Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan dalam kegiatan riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo. Melalui pengembangan infrastruktur pendukung khususnya infrastruktur digital maka pelaku UMKM dan pelaku seni-budaya-

pengelola wisata akan mudah untuk masuk dalam pasar digital, potensi lokal akan berkembang dan daya saing ekonomi inklusif akan meningkat. Selain itu dengan penyediaan infrastruktur pendukung khususnya infrastruktur fisik maka akan mendukung ruang kolaborasi quadruple helix (akademisi-bisnis-pemerintah-komunitas/ masyarakat) dan meminimalisir kesenjangan infrastruktur sehingga pelaku UMKM dan pelaku seni- budaya-pengelola wisata di pinggiran Probolinggo tidak akan tertinggal. Pengembangan infrastruktur pendukung riset dan inovasi daerah diharapkan akan mempercepat adopsi teknologi, memperluas akses pasar digital, menekan kesenjangan ekonomi, dan mendorong ekonomi inklusif berbasis potensi lokal.

4. Berdasarkan Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Probolinggo pada Tahun 2028 dilakukan pemantapan kemitraan strategis dan kelembagaan melalui kolaborasi Quadruple helix. Pemantapan kemitraan maka digitalisasi pasar akan menjangkau skala nasional hingga internasional. Melalui kelembagaan riset dan inovasi yang kuat akan tercipta solusi inovatif serta digitalisasi sistem kelembagaan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah Kota Probolinggo, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian (BRIN), dan masyarakat akan mewujudkan kemitraan yang kuat sesuai potensi daerah yang dimiliki. Sehingga diharapkan potensi lokal Probolinggo akan terintegrasi ke ekonomi digital dan ekonomi inklusif akan meningkat.
5. Berdasarkan Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Probolinggo pada Tahun 2029 dilakukan penguatan perkembangan global untuk peningkatan ekonomi inklusif dan dukungan integrasi ekonomi digital. Melalui penguatan perkembangan global bukan berarti meninggalkan potensi lokal Kota Probolinggo akan tetapi menghubungkan potensi lokal dengan pasar global melalui digitalisasi atau integrasi digital yang akan memperkuat ekonomi inklusif Kota Probolinggo.
6. Berdasarkan Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Probolinggo pada Tahun 2030 dilakukan Pemantapan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui monitoring dan evaluasi program kegiatan menuju peningkatan ekonomi inklusif dan penguatan integrasi ekonomi digital. Pemantapan ekosistem riset & inovasi daerah adalah kunci untuk mengatasi lemahnya ekonomi inklusif di Kota Probolinggo. Dengan ekosistem riset dan inovasi daerah yang kuat maka potensi lokal diharapkan dapat bertransformasi ke dalam ekosistem digital, sehingga daya saing meningkat dan inklusi ekonomi tercapai. Perlu ditekankan bahwa pelaksanaan peta jalan riset dan inovasi Kota Probolinggo tetap berfokus terhadap yang telah direncanakan namun juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

6.1 KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (Evidence-Based Policy)

Peta Jalan Riset dan Inovasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy/Evidence- Informed Policy) adalah kerangka strategis jangka menengah untuk mendorong keterpaduan antara hasil riset dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Tujuannya mewujudkan sistem pemerintahan yang responsif, adaptif, dan akuntabel melalui kebijakan publik yang disusun berdasarkan data, informasi, dan hasil riset yang valid, relevan, dan kontekstual. Berikut merupakan peta Jalan riset dan inovasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di Kota Probolinggo.

Tabel 6. 2 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Riset dan Inovasi untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy) Tahun 2025-2027

No	Unsur	Indikator	2025		2026		2027	
			Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran
1	Kemampuan mengelola SDM IPTEK untuk Peningkatan kapasitas SDM	Peningkatan kualitas SDM IPTEK	Identifikasi SDM IPTEK (JF Peneliti, Dosen, Tenaga Ahli) di Kota Probolinggo	Pendataan SDM IPTEK Kota Probolinggo	Sosialisasi dan bimtek terkait ekosistem RIDA Untuk menghasilkan kajian / riset dan Inovasi mendukung Kebija	Peningkatan partisipasi dan kapasitas SDM IPTEK Kota Probolinggo	Studi banding Untuk pengembangan kajian/riset dan inovasi Dalam Mendukung Kebijakan berbasis	Replikasi hasil kajian/riset dan inovasi untuk diimplementasikan dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti

					kan berbas is bukti		s bukti	
2	Kemam puan Untuk Mengel ola Inventa risasi berbasi s bukti Terhad ap Potensi Kekaya an Intelekt ual (KI)	Inventa risasi Kekaya an Intelekt ual (KI) Daerah	Pemetaan awal potensi Kekayaan Intelektua l yang menduku ng rekomend asi Kebijakan berbasis bukti	Pendat aan Kekay aan Intelek tual untuk kebija kan berbas is bukti kebija kan berbas is bukti	Koordi nasi antar OPD dalam invent arisasi Inform asi Kekaya an Intelek tual Daera h	Pembe ntuka n tim kerja untuk databa se inform asi Kekay aan Intelek tual Daera h	Dashbo ard satu data berbasi s digital untuk databas e Informa si Kekaya an Intelekt ual Daerah	Pengelola an informasi Kekayaan Intelektu al Daerah untuk kebijakan berbasis bukti
	Daerah							
3	Kemam puan untuk menjali n Kemitr aan Strategi s rekome	Pening katan kemitra an strategi s untuk mengh asilkan rekome	Identifikas i mitra strategis yang menduku ng rekomend asi kebijakan	Pendat aan mitra strateg is untuk kebija kan berbas is bukti	Koordi nasi antar OPD untuk Kemitr aan strateg is untuk mendu	Pembe ntuka n tim kerja untuk mendu kung rekom endasi kebija	MOU untuk legalita s mitra Strategi s	Penguata n mitra strategis untuk menduku ng rekomend asi kebijakan

		ndasi kebijak an berbasi s bukti	berbasis bukti (BRIN, KEMENPA REKRAF, PERGUR UAN TINGGI, LPPM, dll)		kung rekom endasi	kan berbas is bukti		berbasis bukti
4	Kemam puan Untuk meman faatkan sistem informa si	Pening katan pemanf aatan sistem informa si pemer intah	Penguata n digitalisas i dan IT dalam menghasil kan rekomend asi kebijakan berbebasi bukti	Keters ediaan sistem jaringa n inform asi (intern et networ king)	Integra si seluru h data dan inform asi dalam portal e- govern ment	Integra si jaringa n data riset dan inovasi	Sinkro nisasi Dan harmon isasi antara sistem Jaringa n Pemer intah pusat dan daerah untuk menghi ndari duplika si.	Keterpad uan sistem informasi untuk menduku ng Rekomen dasi kebijakan berbasis Bukti

5	Kemampuan Menghasilkan	Kontinuitas anggaran daerah	identifikasi potensi daerah	Identifikasi sumber	Koordinasi Dengan	Komitmen pemda untuk	Pengembangan embrio potensi	Peningkatan Ketersediaan
	Rekomendasi kebijakan terkait Program prioritas kepala daerah.	Untuk pengembangan riset dan inovasi daerah	yang akan dikembangkan sebagai sumber pendanaan untuk anggaran riset dan inovasi	pendanaan untuk anggaran riset dan inovasi	stakeholder terkait untuk skema anggaran riset dan inovasi di Kota Probolinggo	penyediaan anggaran riset dan inovasi	daerah sebagai sumber pendanaan untuk anggaran riset dan inovasi	anggaran dg Kemitraan
6	Kemampuan merespon isu Aktual pemba ngunan Daerah	Peningkatan implem entasi kebijak an berbasis bukti dalam kebijak an pemba ngunan daerah	Identifikasi kebijakan pembang unan daerah yang berdasark an hasil riset/ kajian	Pengu mpulan data imple mentasi kebijak an bernas is bukti	Koordinasi Dengan stakeholder Terkait imple mentasi Kebijak an berbas	Masing - masin g OPD mema hami pentin gnya imple mentasi kebijak an berbas	Sinkro nisasi hasil kebijak an pusat dan daerah ke dalam mendu kung riset	Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk Menduku ng Rekomendasi kebijakan berbasis Bukti

					is bukti	is bukti	inovasi	
7	Kemampuan	Partisipasi ASN	Identifikasi	Tingkat	Sosialisasi budaya	Peningkatan	Budaya inovasi	Pengembangan
	Meningkatkan	Dalam	tingkat partisipasi	partisipasi inovasi	inovasi di	partisipasi	menjadi salah	budaya inovasi
	budaya inovasi	menghasilkan riset	inovasi di	di kalangan ASN	kalangan ASN	inovasi di	satu program	oleh ASN untuk
	di kalangan ASN (perangkat daerah) melalui IGA	dan inovasi untuk menghasilkan rekomendasi berbasis Bukti	kalangan ASN dalam IGA	dalam IGA		kalangan ASN	prioritas dalam kinerja ASN	Peningkatan kualitas kerja ASN

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Tabel 6. 3 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Riset dan Inovasi untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy) Tahun 2028-2030

No	Unsur	Indikator	2028		2029		2030	
			Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran
1	Kemampuan mengelola SDM IPTEK untuk peningk	Peningkatan kualitas SDM IPTEK	Kemitraan strategis dengan SDM IPTEK dari	Kemitraan strategis untuk peningkatan	Peningkatan partisipasi SDM IPTEK Kota Probolin	Peningkatan partisipasi dan pemahaman SDM	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK untuk	Evaluasi dan monitoring kapasitas hasil kajian/

	atan kapasit as SDM		perguru an tinggi dan lembaga peneliti an (BRIN) untuk peningk atan kualitas SDM IPTEK Kota Probolin ggo	kualit as SDM IPTEK Kota Proboli nggo	ggo dalam mengha silkan kajian/ riset dan inovasi untuk menduk ung kebijaka n berbasis bukti	IPTEK	menu kung rekome ndasi kebijak an berbas is bukti	riset dan inovasi yang dihasilka n oleh SDM IPTEK
2	Kemam puan untuk mengelo la inventar isasi berbasis bukti terhada p potensi Kekayaa n Intelekt ual (KI) daerah	Inventa risasi Kekaya an Intelekt ual (KI) daerah	Integras i pengelol aan informa si Kekayaa n Intelekt ual Daerah untuk menghi ndari duplika si dan menduk ung validitas .	Sinkro nisasi databa se inform asi Kekay aan Intelek tual Daera h	Peningk atan Kekayaa n Intelekt ual Daerah (hak paten/ hak cipta/ merk) yang telah terdata.	Rekome ndasi kebijak an berbasi s bukti berdasa rkan Kekaya an Intelekt ual Daerah (hak paten/ hak cipta/ merk)	Pengua tan Data dan Inform asi Kekaya an Intelek tual Daerah	Evaluasi dan monitori ng database Informas i Kekayaa n Intelektu al Daerah untuk kebijaka n berbasis bukti

3	Kemampuan untuk menjalin kemitraan strategis	Peningkatan kemitraan strategi s untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti	Kolaborasi kemitraan quadruple helix (Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat) untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti	Peningkatan partisipasi kemitraan strategi s	Standarisasi rekomendasi kebijakan berbasis bukti sesuai dengan hasil identifikasi kolaborasi quadruple helix	Penyesuaian isu global dalam rekomendasi kebijakan berbasis bukti	Penguatan Ekosistem Kolaborasi (<i>Quadruple Helix</i>)	Evaluasi dan monitoring skema kolaborasi untuk memaksimalkan hasil riset dan inovasi sebagai rekomendasi kebijakan berbasis bukti
4	Kemampuan untuk memanfaatkan sistem informasi	Peningkatan pemanfaatan sistem informasi pemerintah	Peningkatan kapasitas sistem informasi untuk pengembangan jaringan	Penguatan jaringan sistem informasi	Pengembangan sistem informasi pemerintah untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti	Sistem informasi Pemerintah terpadu dan berkelanjutan	Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Data Kebijakan Terpadu	Monev sistem teknologi sesuai dengan perkembangan

5	Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait program prioritas kepala daerah .	Kontinuitas anggaran daerah untuk pengembangan riset dan inovasi daerah	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi menarik minat investor	Peningkatan iklim kerjasama investasi sebagai potensi pengembangan sumber pendanaan untuk anggaran riset dan inovasi	Peningkatan anggaran untuk pengembangan riset dan inovasi daerah dalam mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti	Peningkatan ketersediaan anggaran riset dan inovasi	Skema Penda naan Riset dan Inovasi untuk Kebijakan berbasis bukti	Monev pemanfaatan anggaran riset dan inovasi
6	Kemampuan merespon isu aktual pembangunan daerah	Peningkatan implementasi kebijakan berbasis bukti dalam kebijakan pembangunan daerah	Kolaborasi dengan perguruan tinggi/ Lembaga penelitian untuk merespon isu actual pembangunan daerah	Kerjasama untuk merespon isu actual pembangunan daerah	Implementasi hasil kolaborasi riset/ kajian dalam kebijakan pembangunan daerah	Uji coba pelaksanaan hasil riset/riset/ kajian dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah	Monitoring dan evaluasi hasil riset/ kajian yang dimasukkan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah

7	Kemampuan meningkatkan budaya inovasi di kalangan ASN (perangkat daerah) melalui IGA	Pariwisata ASN dalam meningkatkan penghasilan dan riset dan inovasi untuk meningkatkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti	Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Lembaga penelitian dalam peningkatan kualitas budaya inovasi di kalangan ASN	Peningkatan kualitas budaya inovasi di kalangan ASN melalui kolaborasi	Penguatan partisipasi ASN dalam budaya inovasi	Partisipasi ASN dalam budaya inovasi meningkat	Penguatan Kelembagaan dan Regulasi budaya inovasi untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti	Monitoring dan evaluasi peningkatan partisipasi ASN dalam budaya inovasi untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti
---	--	---	---	--	--	--	--	---

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Peta jalan riset dan inovasi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) disesuaikan dengan program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029. Setelah ditetapkan program prioritas RPJMD, maka perlu dipilih program prioritas mana yang memerlukan dukungan riset dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti atau berbasis riset. Selanjutnya program prioritas yang terpilih, akan diurutkan sesuai dengan urutan waktu/ tahun di periode 2025-2030. Penentuan urutan tahun didasarkan kepada prioritas program dan kesesuaian dengan tema/kebutuhan pada tahun tersebut.

Adapun program prioritas yang berasal dari program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 yang memerlukan dukungan riset dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti atau berbasis riset dan respon isu strategis di periode tahun 2025-2030 yang sangat bergantung kepada isu yang berkembang di periode tahun tersebut dan yang memerlukan dukungan riset dalam memberikan respon antara lain:

Tabel 6. 4 Peta Jalan Sesuai Program Prioritas RPJMD Kota Probolinggo yang Memerlukan Dukungan Riset dan Respon terhadap Isu Strategis RIDA Periode Tahun 2025-2030

No	Elemen RIDA	Program Prioritas	PD yang bertanggung jawab
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Bapperida
		Pengembangan iklim Penanaman Modal (2.18.02)	DPMPTSP
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (2.17.07)	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan
		Program pengelolaan aplikasi informatika (2.16.03)	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (5.02.04)	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan

			dan Aset Daerah
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (3.30.03)	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan
		Program perencanaan dan pembangunan industri (3.31.02)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (3.27.03)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Bapperida
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (7.01.03)	Kecamatan
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (2.07.03)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program pengembangan UMKM (2.17.08)	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (3.26.05)	Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata
		Program pengelolaan aplikasi informatika (2.16.03)	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program pengembangan kebudayaan (2.22.02)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program pengembangan kesenian tradisional (2.22.03)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3	Kemitraan Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Bapperida
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (2.17.07)	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan
		Program perencanaan dan pembangunan industri (3.31.02)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (3.25.06)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata
4	Budaya Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Bapperida
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (3.25.06)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan
		Program pemasaran pariwisata (3.26.03)	Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (2.17.07)	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Bapperida

6	Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Bapperida
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (2.17.07)	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (3.31.02)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (1.02.04)	Dinas Kesehatan
		Program pemasaran pariwisata (3.26.03)	Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata
		Program pengembangan ekspor (3.30.05)	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional (2.22.03)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

6.2 TEMATIK PERMASALAHAN UTAMA DAERAH

Pembahasan peta jalan riset dan inovasi diuraikan menurut Permasalahan Utama Daerah yang telah diusulkan yaitu Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah Karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital. Setelah ditentukan peta jalan untuk penyelesaian permasalahan utama sesuai ekosistem RIDA maka ditentukan sasaran strategis tiap tahun (Tahun 2025-2029) hingga sasaran akhir (Tahun 2030) yang akan dicapai. Penentuan sasaran strategis pada tahun pertama difokuskan pada perumusan dasar ekosistem riset dan inovasi daerah, pada tahun ke dua hingga ke empat difokuskan pada implementasi sistem riset dan inovasi daerah sedangkan pada tahun akhir perencanaan difokuskan pada kegiatan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi ekosistem riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo. Adapun peta jalan dan sasaran strategis dengan fokus untuk penyelesaian permasalahan utama daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 6. 5 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Riset dan Inovasi Daerah pada Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah Karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital untuk Tahun 2025-2027

No	Sub Element	Indikator	2025		2026		2027	
			Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran
1	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah							
A	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Penguatan kebijakan riset untuk inovasi dan penyesuaian permasalahan utama daerah	Riset/kajian yang mendukung penyusunan kebijakan pembaruan daerah	Perumusan riset untuk mendukung kebijakan pembaruan daerah	Sosialisasi kepada SDM penyusunan kebijakan pembaruan daerah untuk memanfaatkan hasil riset/kajian	Sosialisasi pemanfaatan hasil riset dalam kebijakan pembaruan daerah	Menyediakan infrastruktur/laboratorium research untuk mendukung kegiatan riset/kajian di daerah	Pemanfaatan fasum yang Tersedia Sebagai Infrastruktur riset dan Inovasi
B	Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data yang mendukung riset dan inovasi untuk penyesuaian permasalahan	identifikasi pendataan yang dibutuhkan dalam database RIDA	Pendataan hasil riset dan inovasi daerah	koordinasi dengan stakeholder terkait Dalam pengembangan media komunikasi	Koordinasi dengan stakeholder terkait	Penguatan sistem jaringan komunikasi intra dan antarah pemerintah	Penguatan sistem jaringan Komunikasi intra dan antarah Pemerintah

		utama daerah			asi untuk database RIDA		daerah	Daerah
C	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi untuk penyelesaian permasalahan utama daerah	identifikasi lokasi penambahan ruang kreatif Kota Probolinggo	Identifikasi kebutuhan infrastruktur riset dan inovasi	koordinasi dengan stakeholder terkait Untuk penambahan ruang kreatif Kota Probolinggo	Koordinasi dengan stakeholder terkait dan jejaring kerjasama	Pembangunan ruang kreatif Kota untuk mendukung penyediaan infrastruktur RIDA Kota Probolinggo	Pembangunan ruang kreatif Kota
D	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi untuk Penyesaan	identifikasi potensi daerah yang akan dikembangkan	Identifikasi kebutuhan anggaran riset dan inovasi	koordinasi dengan stakeholder terkait untuk peningkatan Iklim Penanaman Modal di	Komitmen pemda untuk penyediaan anggaran riset dan	Pengembangan embrio potensi daerah untuk menarik minat investor	Peningkatan Keterseediaan anggaran dg Kemitraan

		ian permas alahan utama daerah			Kota Probolin ggo	inovasi		
--	--	--	--	--	-------------------------	---------	--	--

1	Penin gkata n perlin dung an dan pema nfaat an kekay aan intelektu al.	Peningk atan kuantita s HKI	Inven taris asi melal ui pend ataa n KI khus usny a UMKM	Inventa risasi data UMKM yg ber HKI	Sosialis asi tingkat kepent ngan KI kepada UMKM	Pening katan pemah aman HKI kpd pelau usaha	Koordi nasi bantua n kepeng urusan KI pada UMKM lokal	Penda mpinga n pengur usan HKI
2	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi							
A	Penguata n kolabora si Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangk u kepentin gan	Bertam bahnya kolabor asi riset dan inovasi dengan para stakehol der UMKM	Iden tifik asi UM KM yang memenu hi syarat peningka tan skala usaha	Identifi kasi pelaku ekono mi inklusif	koordin asi dengan stakehol der terkait dan memben tuk tim untuk mem fasili tasi UMK M untu k peningkat an skala usaha	Fasilit asi pening katan kapasi tas SDM pelaku ek on om i in kl usi f	penin gkata n skala usah a UMKM melalui kolabor asi terkait bantuan pendana an/ permod alan usaha	Penda mpinga n kelemb agaan pelaku eko no mi ink lus if

		identifikasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih aktif	Identifikasi pelaku ekonomi inklusif	koordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kegiatan pengembangan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi dalam meningkatkan kompetensi kreatif	Penyediaan infrastruktur pelatihan dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Pendampingan kelembagaan pelaku ekonomi inklusif
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di	Terdapat sarana pendukung riset seperti penguatan sistem jaringan	sinkronisasi aplikasi pendukung RIDA yang telah ada	sinkronisasi aplikasi pendukung RIDA	pelatihan pengguna aplikasi kepada SDM terkait untuk	Peningkatan pemanfaatan nfaata saran a	Pemanfaatan saran a pendukun g oleh para	Maintenance sarana pendukung RIDA

	daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	internet untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat			memaksimalkan pemanfaatan aplikasi	pendukung RIDA	pelaku ekonomi inklusif	
3	Kemitraan Riset dan Inovasi							
A	Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	identifikasi usaha mikro yang membutuhkan pemberdayaan usaha untuk peningkatan daya saing produk	Identifikasi pemberdayaan usaha UMKM dan pelaku pariwisata dan ekraf	koordinasi dengan stakeholder terkait dan membentuk tim untuk fasilitasi pemberdayaan usaha peningkatan daya saing produk	Fasilitas pemberdayaan usaha peningkatan produk	Kemitraan berupa bantuan fasilitas pemberdayaan usaha (Galeri produk UMKM, Gedung pelatihan, Laboratorium pengembangan usaha)	Kemitraan bantuan fasilitas
			identifikasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih aktif	Identifikasi pemberdayaan usaha UMKM dan pelaku pariwisata dan ekraf	koordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan pelatihan dan bimbingan	Fasilitas pemberdayaan usaha peningkatan daya saing produk	Menyediakan infrastruktur untuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis pengembangan	Kemitraan bantuan fasilitas

					n teknis kegiatan pengembangan kapasitas SDM pelaku pariwisata a dan ekonomi kreatif		banagan kapasitas SDM pelaku pariwisataa dan ekonomi kreatif	
E	Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	Identifikasi teknologi tepat guna yang dapat diimplementasikan	Identifikasi difusi inovasi yang dapat diimplementasikan	Sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait model teknologi tepat guna yang dapat digunakan	Sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait difusi inovasi	Penyediaan bantuan alat produksi untuk meningkatkan skala usaha	Pendampingan pelaksanaan kegiatan

C	Penin gkata n prakti k baik dan disem inasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diselengga rakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengemba ngan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	Identi fikasi prakti k baik yg dapat diimplem etasi untuk pengemb angan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	Identifika si praktik baik yang dapat diimpleme ntasikan	Sosialis asi untuk penera pan hasil praktik baik yg dapat diimpleme ntasikan di Kota Proboling go	Sosi alis asi kep ada par a pela ku usa ha terk ait	Ban tua n pela tiha n/ bim tek dise min asi rise t dan inov asi	Penda mpinga n pelaks anaan kegiata n
4	Budaya Riset dan Inovasi							
A	Pro mo si da n ka mp any e ino vas i	Peningkat an promosi dan kampany e untuk pengemb angan ekonomi inklusif	Identifik asi sektor unggula n perek omoni an lokal	Identifika si sektor unggulan	Koordinas i antar stakehold er untuk kegiatan promosi dan kampany e	Koordi nasi dg stakeh older terkait	Fas ilita si keg iata n pro mo si pro du k da n sek tor unggul an	Fasilita si dan penyed iaan infrast ruktur dan sarana pendu kung keg promosi

		dan integrasi ekonomi digital					perekonomian lokal dengan dukungan sistem teknologi (medsos, web, dll)	
			identifikasi potensi Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Identifikasi sektor unggulan	koordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan fasilitasi kegiatan pengembangan potensi Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Koordinasi dengan stakeholder terkait	Penyediaan infrastruktur untuk kegiatan pemasaran/promosi pengembangan potensi Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata (Pu	Fasilitasi dan penyediaan infrastruktur dan saran pendukung kegiatan promosi

							sat Info rma si Pariwis ata Kota Probolin ggo)	
			identifik asi untuk pendata an yang dibutuh kan dalam datab ase RIDA	Identifi kasi sektor unggul an	koordin asi dengan stakehol der terkait dalam pengemb angan media komunik asi untuk database RIDA	Koordin asi dg stakeho lder terkait	Pengua tan sistem jaringa n komun ikasi intra dan antra pemer intah daerah	Fasili tasi dan penye diaan infras trukt ur dan saran a pend ukun g keg prom osi
B	Apresia si prestasi inovasi	Pemberia n pengharg aan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi	Pengem bangan dan perbaik an metode kegiata n lomba inovasi yang telah	Perbai kan metode apres iasi inovasi	Koordina si dan sosialisa si kepada stakehol der terkait dan pengemb angan	Koordin asi dan sosialis asi	Inse ntif bagi pela ku riset dan inov asi	Penge mbang an metode apres iasi inovasi
		pengem bangan ekonomi	berjal an setia		kemit raan awal			

		inklusif dan integrasi ekonomi digital	p tahunya		untuk implemen- tasi hasil inovasi			
C	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	Identifikasi pengusaha pemula sektor ekonomi inklusif dan digital	Inventarisasi pengusaha pemula sektor ekonomi inklusif dan digital	Pendampingan kepada pengusaha pemula dan mem- buka Kerjasama dengan investor untuk pengembangan usaha	Peningkatan pendampingan pengembangan usaha pemula	Bantuan modal untuk pengembangan usaha	Peningkatan kemampuan untuk bantuan modal
D	Inventarisasi, pengembangan, dan per- lin- dung- an- pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Terinventarisasi teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan	Inventarisasi dan pendataan kearifan lokal dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi	Inventarisasi kearifan lokal yang telah terben- tukan	Sosialisasi tingkat kepentingan pendataan kearifan lokal kepada pelaku usaha	Peningkatan pemahaman pendataan kearifan lokal kepada pelaku usaha	Pendampingan bantuan pengembangan kearifan lokal kepada pelaku usaha masyarakat	Pemanfaatan kearifan lokal yang telah Terben- tukan ekonomi digital

			ekonomi digital					
5	Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah							
A	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdas arkan kebutu han daerah untuk promos i PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif dan integras i ekonomi digital	Rumus an metode untuk menum buhkan minat Prakarsa riset dan inovasi di kalang an pelaku usaha maupu n perangk at daerah	Identifikasi Prakarsa riset dan inovási	Sosialisasi pengembangan riset dan inovas i	pengembangan riset dan inovasi	Pendampingan pengembangan mbangan riset dan inovasi hasil dari prakarsa riset	Pendampingan pengembangan riset dan inovasi
B	Penyele nggaraan pengembangan klaster inovasi	Terselenggaraanya pengembangan klaster ekonomi	Identifikasi sektor dan produk	Identifikasi sektor dan produ k	Sosialisasi dan pengembangan kerjasam a untuk	penetapan kluster inovasi	Pemanfaatan fasilitas umum sbg	Penyediaan infrastr uktur penduk ung

	berbasis produk unggul an daerah		unggulan Kota Prob oling go	unggulan Kota Prob oling go	penetapan kluster inovasi yang terbentuk		infrastruktur penduk ung pengembangan klaster	pengembangan klaster ekonomi
--	----------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--	--	---	------------------------------

							ekonomi	
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan yang ada	Identifikasi kebijakan pusat pendudukungan kebijakan RIDA di daerah	Perumus kebijakan pendudukung riset dan inovasi daerah	Koordinasi dengan stakeholder terkait	Sinergi antara penyusunan kebijakan	Pendaftaran untuk sosialisasi kesesuaian kebijakan kepada para pelaku usaha untuk pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	Akomodir kebijakan pendudukung untuk pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital
6	Penyelarasan dengan perkembangan global							
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempe	Terdapat sosialisasi standar produk yang	identifikasi standar dari produksi usa	standarisasi untuk peningkatan daya saing produk	koordinasi dengan stakeholder terkait dan membe ntuk	Fasilitasi standar produksi usaha	ba nt uan fasilitas produksi stand	Fasilitasi standar isi produk usaha

	ngaruhi pengem- bangan ekosiste- m Riset dan Inovasi di daerah	dihasil- kan	ha- UM KM unt- uk peningk- atan daya saing produk		tim untuk mem- fasili- tasi sosi- alisa- si stan- dari sasi prod- uk usa- ha UMK M		arisas i produ- k usaha UMK M	
			iden- tifik- asi stan- dari sasi prod- uk usa- ha sektor pariwisa- ta dan ekraf untuk peningk- atan daya saing produk	standar isasi untuk pening- katan daya saing produk	koordin- asi dengan stakehol- der terkait dan membe- ntuk tim untuk mem- fasili- tasi sosi- alisa- si stan- dari sasi prod- uk usa-	Fasili- tasi stand- arisa- si prod- uk usah- a	ba- nt ua n fa- sil ita s stand- arisas i produ- k usaha sektor pariwisa- ta dan ekraf	Fasilit- asi stand- arisas i produ- k usaha

					ha sektor pariwisata dan ekraf			
B	Penguatan kerjasama internasional	Terjalinya kerjasama internasional dalam pengembangan ekonomi inklusi dan integrasi ekonomi digital	Perumusan potensi sektor unggulan untuk propos al kerjasama internasional	Perumusan potensi sektor unggulan	Sosialisasi dan koordinasi antar stakeholder terkait	koo rdi nas i ant ar stak ehol der terk ait	Pelatihan dan bimtek untuk meningkatkan daya tarik potensi unggulan sektor ekonomi untuk penguatan	Peningkatan daya tarik potensi unggulan sektor ekonomi

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Tabel 6. 6 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Riset dan Inovasi Daerah pada Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah Karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital untuk Tahun 2028-2030

No	Sub Elemen	Indikator	2028		2029		2030	
			Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran
1	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah							
A	Reformasi kebijakan Riset	Penguatan kebijakan riset	Kemitraan dengan perguruan tinggi untuk	Kemitraan dengan perguruan	Uji coba kebijakan	Implementasi hasil riset	Integrasi kebijakan riset	Monev pemanfaatan hasil riset dalam

	dan Inovasi di daerah	inovasi untuk penyediaan permaslahan utama daerah	Melakukan pengembangan riset/kajian yang telah disusun	tinggi	berbasis riset dan inovasi daerah	dalam kebijakan pembangunan daerah	dengan RPJMD, Renstra OPD, dan kebijaksanaan sektoral	Kebijakan pembangunan daerah Kota Probolinggo
B	Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data yang mendukung riset dan inovasi untuk penyediaan permaslahan utama daerah	Membuat aplikasi yang mendukung sinkronisasi dan integrasi data khususnya data RIDA Kota Probolinggo	Operasionalisasi aplikasi untuk database riset dan inovasi	Masyarakat umum dapat memanfaatkan media komunikasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Pemanfaatan basis data oleh masyarakat umum dan PD	Sinkronisasi dan digitalisasi data riset dan inovasi untuk pengembangan sektor ekonomi daerah	Evaluasi dan updating data Riset dan Inovasi
C	Pengembangan infrastruktur	Terdapat beberapa infrastruktur	kemitraan dengan swasta/CSR	kemitraan dengan swasta/	Tersedianya zona/ruang	Tersedianya zona/ruang	Pemanfaatan infrastruktur	Evaluasi pemanfaatan infrastruktur

	dasar Riset dan Inovasi;	dasar riset dan inovasi untuk penyediaan permasalahan utama daerah	Perusahaan/ Perguruan Tinggi dalam pengelolaan ruang kreatif Kota Probolinggo	CSR Perusahaan/ Perguruan Tinggi	kreatif kota	kreatif kota	publik untuk pengembangan sektor ekonomi daerah	dasar Riset dan Inovasi
D	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi untuk penyediaan permasalahan utama daerah	Peningkatan kegiatan promosi dan pemasaran potensi daerah untuk meningkatkan permodalan dari calon investor	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk menarik minat investor	Peningkatan jumlah investor untuk mendukung pengembangan ekosistem RIDA	Peningkatan keterseediaan anggaran riset dan inovasi	Penguatan komitmen dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah untuk pengembangan ekonomi inklusif	Monev pemanfaatan anggaran riset dan inovasi dengan penguatan iklim penanaman modal

							dan digitalisasi ekonomi daerah	
E	Peningkatan perlin- dung-an dan pemanfaat-an kekayaan intelektual.	Peningkatan kuantitas HKI	Memperluas proses kepengurusan KI	Kemudahan pengurusan HKI	Jumlah kepemilikan HKI meningkat	Peningkatan pelaku usaha yang ber-HKI	Inventarisasi dan pendampingan pemanfaatan HKI untuk pengembangan ekonomi inklusif daerah	Evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk peningkatan daya saing ekonomi
2	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi							
A	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder UMKM	kemitraan dengan calon investor untuk meningkatkan inovasi /daya saing produk UMKM	Peningkatan kemitraan untuk pengemb- ngan skala usaha UMKM dan kapasitas	prosentase UMKM mengalami peningkatan skala usaha dengan adanya	Peningkatan skala usaha UMK dan pengembangan SDM pelaku ekon	Pembentukan skema kelembagaan riset dan inovasi daerah untuk mendukung pengembangan	Evaluasi pelaksanaan kolaborasi pelaku ekonomi inklusif untuk pengembangan UMKM

			s SDM pelaku ekonomi inklusif	riset dan inovasi baru	o mi in kl us if	ekonomi inklusif dan digitalisa si ekonomi daerah	
		Kemitraa n dengan Lembaga atau Pergurua n Tinggi, atau replikasi inovasi untuk kegiatan pengemb angan kapasit as SDM pelaku pariwis ata dan ekonom i kreatif	Peni ngka tan kemi traa n untu k pengem bangan skala usaha UMKM dan kapasita s SDM pelaku ekonomi inklusif	pengem bangan kapasita s kelemb agaan SDM pelaku pariwi sata dan ekono mi kreatif	Peni ngka tan skala usah a UMK M dan pengem bangan SDM pelaku ek on o mi in kl us if	Pemb entuk an skem a kelemba gaan riset dan inovasi daerah antar sektor untuk menduk ung pariwisat a dan ekonomi kreatif Kota Probolin ggo	Evaluasi pelaksan aan kolabora si pelaku ekono mi inklusif untuk pengem bangan sektor pariwis ata dan ekono mi kreatif Kota Proboli nggo

E	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terdapat sarana pendukung riset seperti penguatan sistem jaringan internet untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat	integrasi sistem aplikasi antara pemerintahan pusat dan daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih informasi	Integrasi sarana pendukung RIDA	integrasi aplikasi informasi untuk mendukung integ rasi ekonomi digital	integrasi ekonomi digital	Peningkatan pengelolaan e-government yang terintegrasi dengan informasi RIDA	Monev pelaksanaan penyediaan sarana pendukung RIDA berupa integrasi e-government dengan informasi terkait RIDA
	3 Kemitraan Riset dan Inovasi							
A	Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi	Memperkuat kemitraan dengan calon investor / perguruan tinggi/ lembaga	kemitraan dengan calon investor / perguruan tinggi/ lembaga	Peningkatan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha terhadapa U MK M	Peningkatan pemberdayaan usaha dan pelaku pariwisata dan ekraf	Kemitraan strategis untuk pelaksanaan pemberdayaan usaha pembe rdayaan usaha	Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha untuk peningkatan daya saing UMKM

		digital						
			kemitraan dengan Lembaga atau Perguruan Tinggi, atau replikasi inovasi untuk kegiatan pengembangan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	kemitraan dengan calon investor / perguruan tinggi/ lembaga	pengembangan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk peningkatan daya saing daerah.	Peningkatan pemberdayaan usaha UMKM dan pelaku pariwisata dan ekraf	Kemitraan strategis sektor pariwisata Kota Probolinggo	Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha untuk peningkatan pariwisata Kota Probolinggo
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha	Pengembangan kemitraan dengan investor untuk penyediaan bantuan modal usaha terkait	Pengembangan kemitraan bantuan permodalan	Implementasi difusi inovasi untuk peningkatan skala usaha pada ekonomi inklusif	Pelaksanaan difusi inovasi kepada para pelaku usaha	Pengembangan difusi inovasi untuk peningkatan daya saing pada ekonomi inklusif Kota Probolinggo	Evaluasi hasil difusi inovasi terhadap daya saing ekonomi inklusif untuk sektor UMKM	

		dalam rangka pengemb angan	pening katan difusi inovasi		Kota Probolin ggo		go	
--	--	-------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------	--	----	--

		ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital						
			Pengem- bangan kemitra- an dengan investo- r untuk penyedi- aan bantuan modal usaha terkait pening- katan difusi inovasi	Penge- mbang- an kemitra- an bantuan permoda- lan	Peni- ngka- tan skala usah- a pada pariwi- sata dan ekraf Kota Proboli- nggo denga- n peman- faatan integra- si ekonomi digital	Pelak- sanaa- n difusi inova- si kepa- da para pelak- u usah- a	Daya saing seкто- r pariwi- sata dan ekraf Kota Probol- inggo menin- gkat	Evalua- si hasil difusi inovasi terha- dap daya saing ekono- mi inklus- if untuk sektor pariwis- ata dan ekraf
C	Penin- gkata- n prakti- k baik dan disem- inasi hasil Riset dan	Diselengga- rakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengemba- ngan ekonomi inklusif dan integrasi	Replika si disemin- asi hasil riset dan inovasi untuk pengem- bangan ekonomi	Penge- mbang- an kemitra- an bantuan permoda- lan	Imple- menta- si replika si riset dan inovasi yang telah diguna- kan	Replik asi prakti- k baik kepada para pelaku usaha	Penguat- an praktik baik riset dan inovasi untuk peni- ngka- tan daya	Mone- v pelaks- anaan prakti- k baik terha- dap penin- gkata- n daya

	Inovasi kepada pelaku inovasi.	ekonomi digital	i inklusif dan integrasi ekonomi digital				sain g ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	saing ekono mi inklus if
4	Budaya Riset dan Inovasi							
A	Pro mo si da n ka mp any e ino vas i	Peningkat an promosi dan kampanye untuk pengemb angan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	Kem itraa n deng an pem erint ah pusa t/ regiona l/swast a untuk agenda event promos i rutin	Kemitraa n dan pembuat an aplikasi penduku ng keg promosi	Promosi sebagai agenda rutin pemda	Peni ngka tan kegia tan prom osi	Penguat an branding daerah ekonomi lokal di Kota Probolin ggo	Mone v hasil pelak sanaa n kegiat an prom osi ekono mi lokal
			kemitra an dengan investor untuk kegiata n pengemba ngan potensi	Kemitraa n dan pembuat an aplikasi	Pening katan pereko nomia n masyara kat	Peni ngka tan kegia tan promosi	Penguat an branding daerah sektor	Monev hasil pelaks anaan kegiata n

			Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Probolinggo	pendukung kegiatan promosi	dari sektor pariwisata		pariwisata Kota Probolinggo	promosi sektor pariwisata
			Membuat aplikasi yang mendukung sinkronisasi dan integrasi data khususnya data RIDA Kota Probolinggo	Kemitraan dan pembuat aplikasi pendukung kegiatan promosi	Meningkatnya pengelolaan e-government	Peningkatan kegiatan promosi	Penguatan branding daerah melalui potensi daerah melalui media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	Monev hasil pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah
E	Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi	Bantuan fasilitas sebagai bentuk	Peningkatan minat pelaku inovasi	Peningkatan minat pelaku riset dan	Peningkatan minat pelaku inovasi	Pengembangan apresiasi inovasi untuk pening	Evaluasi metode apresiasi inovasi untuk pening

		pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	apresiasi riset dan inovasi	si	inovasi dengan pemberian insentif untuk pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital		katan daya saing pelaku riset dan inovasi	katan daya saing pelaku riset dan inovasi
C	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	Pemantauan kemitraan dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	Pemantauan kemitraan	Pertumbuhan pengusaha pemula berbasis riset meningkat	Peningkatan jumlah pengusaha pemula sektor ekonomi inklusif dan digital	Penguatan Inkubasi Inovasi Daerah untuk pengembangan ekonomi inklusif dan digitalisasi ekonomi daerah	Monev pelaksanaan pengembangan usaha pemula sektor ekonomi inklusif dan digital
I	Inventarisasi, pengembangan,	Terinventarisasinya teknologi	Jejaring kemitraan untuk pengembangan	Kemitraan pengembangan	Kearifan lokal untuk	Peningkatan kegiatan usaha	Penguatan digital teknologi	Evaluasi pelaksanaan pengembangan, dan

			kearifan					
--	--	--	----------	--	--	--	--	--

	dan perlin dung an penge tahua n dan/a tau teknologi masyara kat.	masyara kat (kearifa n lokal) yang sudah diciptaka n	lok al kep ada pel ak u usa ha	kearifan lokal kepada pelaku usaha	pengem bangan ekonom i inklusif dan integra si ekonomi digital		untuk pengem bangan ekonom i daerah	perlindu ngan kearifan lokal untuk peningk atan daya saing ekonom i
5	Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah							
A	Prakarsa pengem bangan Riset dan Inovasi di daerah berdas arkan kebutuh an daerah untuk promosi PUD	Prakar sa riset dan inovasi dalam rangka pengem bangan ekonom i inklusif dan integra si ekonomi digital	Peningk atkan minat investor untuk permod alan pengmb angan prakars a riset	Ke mit raa n un tuk permod alan	Imple metasi hasil prakar sa riset dalam rangka pengem bangan ekonom i inklusif dan integra si ekonomi digital	Imple metasi hasil prakar sa riset	Pemberd ayaan komunit as lokal sebagai Prakarsa riset dan inovasi untuk pengemb angan ekonomi inklusif dan digitalisa si ekonomi daerah	Evaluas i hasil pelaksa naan prakars a riset dan inovasi untuk peningk atan daya saing ekonom i inklusif dan integras i ekonom i digital
E	Penyelen ggaraan pengem bangan klaster inovasi	Terseleng garanya pengemb anan klaster ekonomi	Pema ntapa n jejari ng kemit raa	Jej ari ng ke mit raa	Peng uata n skal a usah	Peni ngka tan skala usah a	Penda mping an klaster inovasi untuk	Monev penge mban g an kluster yang

	berbasis produk unggulan daerah		raan dengan investor untuk pengembangan klaster ekonomi	n dengan investor	a sesuai dengan klaster ekonomi yang telah terbentuk		pengembangan ekonomi inklusif	terbentuk untuk peningkatan daya saing ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan yang ada	Melakukan bimtek secara berkala kepada para pelaku usaha untuk sosialisasi pembaharuan kebijakan yang berlaku	Sinkronisasi kebijakan yang berlaku	Pemahaman pelaku usaha untuk keseluruhan kebijakan akan meningkat	Keselarasan kebijakan pusat dan daerah	Sinkronisasi kebijakan riset dan inovasi di daerah dan pusat	Monev pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pendukung riset dan inovasi daerah
C	Penyelarasan dengan perkembangan global							

A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan	Memperkuat kemitraan dengan calon investor untuk meningkatkan standar disasi dan daya saing produk UMKM	Peningkatan standar produk usaha dengan kemitraan strategis	Peningkatan kesadaran pelaku UMKM untuk standarisasi produk	Peningkatan standarisasi produk usaha dengan kemitraan strategis	Pemanfaatan teknologi global untuk mendukung fasilitas standar produk	Evaluasi pelaksanaan standarisasi produk usaha untuk peningkatan daya saing internasional UMKM
			Memperkuat kemitraan dengan calon investor untuk meningkatkan standar disasi dan daya saing produk sektor pariwisata dan ekraf	Peningkatan standar produk usaha dengan kemitraan strategis	Peningkatan kesadaran pelaku pariwisata dan ekraf untuk standarisasi produk	Peningkatan standarisasi produk usaha dengan kemitraan strategis	Pemanfaatan teknologi global untuk mendukung fasilitas standar produk	Evaluasi pelaksanaan standarisasi produk usaha untuk peningkatan daya saing internasional sektor pariwisata

Penguatan kerjasama internasional	Terjalinn ya kerjasa ma internas ional dalam pengem bangan ekonom i inklusif dan integras i ekonomi digital	Peningkatan kemitraan dengan pemerintah pusat dan investor luar negeri	kem itra an den gan pemerin tah pusat dan investor luar negeri	Penyela rasan potensi sektor unggul an ekonomi lokal daerah	pengemb angan potensi ekono mi inklusif hingga skala internasi onal	Global partner ship untuk pengua tan kerjasa ma internas ional	Monev pelaks anaan Kerjasa ma intern asiona l untuk mengu atan jejarin g kemitr aan.
-----------------------------------	---	--	---	---	--	---	--

Sumber: Hasil Analisa, 2025

6.3 TEMATIK PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)

Pembahasan peta jalan riset dan inovasi diuraikan menurut klasifikasi PUD yang telah diusulkan yaitu PUD Industri Pengolahan dan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi. Setelah ditentukan peta jalan untuk pengembangan PUD sesuai ekosistem RIDA maka ditentukan sasaran strategis tiap tahun (Tahun 2025-2029) hingga sasaran akhir (Tahun 2030) yang akan dicapai. Penentuan sasaran strategis pada tahun pertama difokuskan pada perumusan dasar ekosistem riset dan inovasi daerah, pada tahun ke dua hingga ke empat difokuskan pada implementasi sistem riset dan inovasi daerah sedangkan pada tahun akhir perencanaan difokuskan pada kegiatan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi ekosistem riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo.

Adapun peta jalan dan sasaran strategis dengan fokus pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk pengembangan produk unggulan daerah Kota Probolinggo Tahun 2025- 2030 sebagai berikut:

Tabel 6. 7 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Pengembangan PUD Industri Pengolahan Tahun 2025-2027

No	Sub Elemen	Indikator	2025		2026		2027	
			Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran
1	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah							
A	Reformasi	Penguatan	Merumuskan	Identifikasi	Sosialisasi kebijakan	Penyusunan dan	Penguatan kebijakan	Implementasi
	kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	kebijakan riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan	kebijakan untuk mendukung pengembangan pelaku PUD Industri pengolahan	kebijakan eksisting dan regulasi untuk pengembangan PUD Industri pengolahan	kepada para pelaku PUD Industri pengolahan	penetapan kebijakan untuk penguatan PUD Industri pengolahan	pusat-daerah untuk pengembangan PUD Industri pengolahan	regulasi antara pusat-daerah untuk pengembangan PUD Industri pengolahan
B	Penataan basis	Basis data yang	Suvey updating	Identifikasi	Sosialisasi kepada	Sosialisasi	Integrasi <i>dashboar</i>	Sinkronisasi
	data Riset dan Inovasi	mendukung riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Industri	data pelaku PUD	pelaku usaha PUD di Kota Probolinggo	pelaku PUD untuk digitalisasi data base pelaku PUD	dashboar d satu data untuk PUD Industri Pengolahan	lintas OPD untuk peningkatan informasi PUD Industri Pengola	databas e dalam e-goverment khusus ya sektor industri dan

		Pengola han					han	UMKM.
C	Pengem bangan infrastr uktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapa t beberap a infrastr uktur dasar riset dan inovasi untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han	Identifik asi kebutuh an infrastr uktur riset dan inovasi untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han	Identifik asi kebutuh an infrastr uktur dasar Riset dan Inovasi untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han	Sosialis asi kepada para pelaku PUD Industri Pengola han terkait kebutuh an rencana penyedi aan infrastr uktur dasar Riset dan Inovasi dan Inovasi untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han	Penentua n kebutuha n infrastruk tur dasar Riset dan Inovasi untuk pengemba ngan PUD Industri Pengolaha n	Penyedi aan infrastr uktur dasar Riset dan Inovasi untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han seperti showroo m, laborato rium produks i, dll	Pemanf ataan infrastr uktur fisik riset dan inovasi yang sudah ada untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han.
D	Penyedi aan anggaran Riset	Terdapa t dukung an anggaran untuk	Perumu san anggaran riset	Identifik asi besaran anggaran n	Sosialis asi Skema pendan aan untuk	Penentua n skema besaran anggaran	Pemanfa atan anggaran riset dan	Pengem bangan PUD Industri

	dan Inovasi;	kegiata n riset dan inovasi untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han	dan inovasi Untuk pengem bangan PUD Industri pengola han	dan sumber pendan aan (APBD, CSR, BUMN, dana pusat)	Penguat an Dana <i>Matchin g Fund</i> daerah	riset dan inovasi dalam APBD serta rekomend asi sumber pendanaa n lainnya	inovasi untuk pengem bangan PUD Industri pengola han	Pengola han melalui program priorita s riset dan inovasi daerah
E	Peningk atan perlindu ngan dan pemanf aatan kekayaa n intelekt ual.	Peningk atan kuantit as HKI	Inventar isasi KI pada PUD Industri Pengola han	Pemetaa n produk unggula n potensi al untuk HKI	Pelatiha n pendaft aran HKI kepada para pelaku PUD Industri Pengola han	Pelatihan dan pendampi ngan pendaftar an HKI (merek, desain, paten)	Fasilitas i HKI kolektif (brandin g PUD Industri Pengola han)	Kolabor asi dengan stakehol der terkait dalam fasilitasi pendaft aran kolektif HKI
2	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi							
A	Penguat an kolabor asi Riset dan Inovasi	Bertam bahnya kolabor asi riset dan inovasi dengan	Melaku kan identifik asi mitra riset lokal	Pemeta an aktor strategis (BRIN, perguru an	Fasilitas i dan Pemben tukan Forum riset	Pembentu kan forum koordinas i riset dan inovasi	Kegiata n riset kolabor atif dengan BRIN, perguru	Pelaksa naan riset kolabor atif dan program lintas

	di daerah dengan pemangku kepentingan	para stakeholder UMKM		tinggi, dunia usaha, komunitas)	dan inovasi industri pengolahan melalui MoU dengan BRIN, perguruan tinggi, dan pelaku usaha	industri pengolahan	an tinggi, dan pelaku usaha	sektor untuk pengembangan PUD industri pengolahan
B	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan	Terdapat sarana pendukung seperti penguatan sistem jaringan internet untuk peningkatan aktivitas masyarakat	Identifikasi kebutuhan sarana pendukung Riset dan Inovasi oleh para pelaku PUD Industri Pengolahan	Inventarisasi kebutuhan sarana dan alat produksi riset dan Inovasi	Sosialisasi pengadaan sarana (alat pendukung dan jaringan sistem teknologi) pendukung Riset dan Inovasi untuk pengembangan	Peningkatan pemahaman para pelaku PUD Industri Pengolahan dalam pemanfaatan sarana	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan	Pemanfaatan sarana pendukung Riset dan Inovasi oleh para pelaku PUD Industri Pengolahan

	daerah				PUD Industri Pengola han	penduku ng Riset dan Inovasi		
3	Kemitraan Riset dan Inovasi							
A	Penguat an Kemitra an antar kelemba gaan	Menjali n kemitra an antar lembaga dalam rangka pengem bangan PUD Industri Pengola han	Mappin g Jejaring kemitra an yang berpote nsi untuk kolabor asi dengan PUD	Identifik asi mitra strategis (pergur uan tinggi, LIPI/BR IN, asosiasi industri) dengan PUD	Sosialis asi pemben tukan forum kemitra an dengan PUD Industri Pengola han	Penandat anganan MoU riset dan inovasi pengemba ngan PUD Industri Pengolaha n	Jejaring kemitra an lintas sektor (UMKM- PT- BUMD) untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han	Impleme ntasi kegiatan kemitra an untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han

			Ind ust ri Pe ngo lah an	Ind ust ri Pe ng ola ha n				
B	Peni ngk atan difu si inov asi	Model dan strategi transfer teknolog i dan produksi massal serta dimanfaa tkan oleh pelaku usaha dalam pengemb angan PUD Industri Pengolaha n	Identifi kasi model difusi inovasi yang dapat diguna kan untuk pengem bangan PUD Industr i Pengola han	Invent arisasi model difusi inovasi PUD Indust ri Pengol ahan	Pelati han dan bimbi ngan tekni s mode l difusi inova si adapt if kepa da para pelak u PUD Indus tri Pengo lahan	Penin gkata n pema hama n model difusi inovas i oleh para pelak u PUD Indust ri Pengol ahan	Impleme ntasi model difusi inovasi untuk pengemb angan PUD Industri Pengolah an	Pemanf ataan difusi inovasi PUD Industr i Pengol ahan
C	Pening katan prakti k baik dan disemi nasi hasil	Diselengg arakanny a kegiatan disemina si hasil riset tentang	Identifi kasi praktik baik dan disemi nasi hasil	Pemeta an praktik baik dan disemi nasi hasil	Pelati han dan bimte k untu k penin	Penin gkata n prakt ik baik dan dise	Impleme ntasi praktik baik dan disemina si hasil Riset dan Inovasi	Pening katan daya saing produk olahan melalui implem

	Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	pengembangan PUD Industri Pengolahan	Riset dan Inovasi pada PUD Industri Pengolahan	Riset dan Inovasi pada PUD Industri Pengolahan	gkata n prakti k baik dan disem inasi hasil Riset dan Inova si pada para pelak u PUD Indus tri Pengol ahan	mina si hasil Riset dan Inovas i kepad a pelak u PUD Indust ri Pengol ahan	oleh para pelaku PUD Industri Pengolah an	etasi prakti k baik dan disemi nasi hasil Riset dan Inovas i
4	Budaya Riset dan Inovasi							
A	Pro mos i dan kam pan ye inov asi	Peningk atan promosi dan kampan ye untuk pengemb an PUD Industri Pengolah an	Identif ikasi kegiat an promo si inovas i yang akan dilakuk an untuk pengem bangan PUD Industr i	Perum usan strateg i promo si inovasi PUD Indust ri Pengol ahan	Pe la ti ha n da n bi m te k di git al m ar ke	Penin gkata n skill para pelak u PUD Indust ri Pengol ahan terkait digital marketi ng untuk promosi produk	Impleme ntasi digital marketin g melalui akun sosial media para pelaku PUD Industri Pengola han	Para pelaku PUD Industr i Pengol ahan dapat meman faatkan akun media social sebagai sarana promosi produk.

			Pengola han		ti ng P U D Industr i Pengol ahan			
B	Apresi asi presta si inovas i	Pemberia n pengharga an atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi untuk pengemba ngan	Peru mus an mek anis me lomb a inov asi pada PUD Indu stri Pengola han	Pen yus una n krit eria pen ghar gaa n unt uk inov asi PUD Ind ustr i Pengola han	Sosial isasi kepad a para pelak u PUD Indus tri Pengo lahan terkait lomba inovasi	Para pelak u PUD Indus tri Pengo lahan mema hami terkait	Pelaksan aan Lomba Inovasi PUD Industri Pengolah an Kota Proboling go	Integras i Lomba Inovasi dalam program kegiatan OPD terkait (DKUMP ,
		PUD Indu stri Pen gola han				mek anis me lom ba inov asi		Disperi naker, DKPP)
C	Penge mbang an Perusa	Bertamb ahnya pengusa ha	Iden tifik asi pen	Pem etaa n pote	Pelatih an dan bimtek wiraus	Pendam pingan usaha pada	Pemb entuk an inkub	Fasilita si inkuba tor

	haan pemul a berbas is riset	pemula berbasis riset untuk pengemb angan PUD Industri Pengolah an	gus aha pem ula pad a PUD Ind ustr i Pen gola han	nsi pen gus aha pem ula pad a PU D Ind ustr i Pen gola han	aha inovatif pada PUD Industr i Pengol ahan	pada PUD Industri Pengola han	ator bisnis daera h khus usnya pada PUD Indus tri Pengo lahan	bisnis daerah dan dukun gan <i>seed funding</i> / penda naan awal bagi pengus aha pemula pada PUD Industr i Pengola han
D	Inventar isasi, pengem bangan, dan perli ndu nga n peng etah uan dan /ata u teknolo gi masyar akat.	Terinventar isasinya teknologi masyarak at (kearifan lokal) yang sudah diciptakan	Ide ntif ika si tek on olo gi ma sya rak at (kearifan lokal) yang sudah diciptak an pada PUD	Pe me ta an tek on olo gi ma sy ar ak at (kearifan lokal) yang sudah diciptak an pada	Works hop dan Bimtek tekonol ogi masyar akat (kearifan lokal) yang sudah dicipta kan pada PUD Industr i Pengol	Doku menta si hasil tekon ologi masya rakat (kearif an lokal) yang sudah diciptak an pada PUD Industr i Pengola han	P e l e s t a r n t e k o n l o	Penguat an ekono mi lokal dari hasil pe les tar ia n te ko no log i m as

			Industri Pengolahan	PUD Industri Pengolahan	ahan		g i masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan pada PUD Industri Pengolahan (mis: motif batik, kuliner khas probolinggo sirup poka k, kerupuk jenggelek)	ya rakyat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan pada PU D Industri Pengolahan
5	Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah							
A	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berd	Prakarsa riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan	Identifikasi isu strategi s dalam pengembangan PUD Industri Pengolahan	Identifikasi permasalahan utama PUD industri pengolahan	Penyusunan tim kerja untuk agenda riset tematik dalam penge	Penentuan topik riset terapan prioritas berbasis kebut	Pelaksanaan aksi riset dan inovasi dalam pengembangan PUD Industri	riset dan inovasi dalam pengembangan PUD Industri Pengol

	asar kan kebu tuha n daer ah untu k promosi PUD			(bahan baku, kemas an, distribu si)	mbang an PUD Industr i Pengol ahan	uhan nyata dalam penge mban gan PUD Indust ri Pengola han	Pengola han	ahan sesuai denga n identif ikasi permasa lahan
--	---	--	--	--	--	---	----------------	--

F	Penyele nggaraa n pengem bangan klaster inovasi berbasi s produk unggula n daerah	Terselen ggaranya pengem bangan klaster ekonomi	Ide ntif ika si kla ster PU D Ind ust ri Pen gol aha n	Pemet aan klaster PUD indust ri pengol ahan (batik, olahan hasil laut, maka nan khas probo linggo dll.)	Sosialis asi hasil pemetaa n klaster PUD industri pengola han	Pembe ntuka n kelemb agaan klaster PUD indust ri pengol ahan dan penyus unan rencan a kerja	Dukun gan sarana dan prasara na pada masing - masing klaste r PUD indust ri pengol ahan spt showr oom dan alat- alat untuk pengola han.	Pengem bangan hasil produk si pada klaster PUD industri pengola han
	Kesesuai an kebijak an antara Pemer intah Pusat dan Pem erin tah Dae rah	Sinkroni sasi kebijaka n yang ada	Identifik asi kebijak an penduk ung pengem bangan PUD Industri Pengola han	Inventa risasi Kebijak an pusat dan daerah yang relevan dengan PUD industr i pengola han	Forum koordin asi lintas sektoral untuk sinkroni sasi ke bi ja k a n pe	Sinkro nisasi kebijak an kebijak an penduk ung penge mbang an PUD Industr i Pengola han	Penyusu nan kebijak an integra tive (sektor al dan spasial) yang mendu kung penge mbang an	Harmoni sasi kebijak an sektoral dan spasial yang menduk ung pengem bangan PUD Industri Pengola

					n d u k u n g pengemb angan PUD Industri Pengolah an		PUD Indust ri Pengol ahan	han
6	Penyelarasan dengan perkembangan global							
A	Pening katan kepedu lian isu interna sional yang mempe ngaruh i penge mbang an ekosist em Riset dan Inova si di daera h	Terdap at sosialis asi isu standa r produk yang dihasil kan	Identif ikasi PUD Indust ri Pengol ahan yang sudah terstan darisasi	Iden tifik asi isu glob al rele van (SD Gs, sustai nabilit y, <i>food safety</i>) pada produ k Indust ri Pengol ahan	Pelatiha n SNI & sertifika si halal/ek spor pada PUD Industri Pengola han	Sosialisa si standar global (ISO, HACCP, Eco- label) ke pelaku PUD Industri Pengola han	Penda mping an pengol ahan produ k indust ri pengol ahan tersta ndaris asi	Pendam pingan sertifikas i produk unggula n daerah pada Industri Pengolah an
E	Penguat an kerjasam a internasi	Terjalin nya kerjasa ma interna	Pemeta an potensi mitra Kerjas	Pemet aan poten si kerja	Delegasi ke expo & forum luar negeri	Partisip asi pelaku industri pengola	Penja jakan MoU denga n	MoU dengan mitra asing dan

onal	sional untuk pengem bangan PUD Industr i Pengola han	ama global pada PUD Industri Pengola han	sama riset dan pasar luar negeri pada PUD Indust ri Pengola han	khususn ya pada PUD Industri Pengolah an	han dalam expo/ma rketplace internasi onal	mitra asing dan lemb aga sertifi kasi untu k pengem bangan PUD Industri Pengola han	lembag a sertifi kasi untuk penge mban gan PUD Indust ri Pengolah an
------	--	--	--	---	---	---	--

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Tabel 6. 8 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Pengembangan PUD Industri Pengolahan Tahun 2028-2030

N O	Sub Elemen t	Indikat or	2028		2029		2030	
			Peta Jalan	Sasara n	Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran
1	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah							
A	Reformasi	Penguatan	Bimbingan teknis	Implementasi	Pemantauan	Integrasi kebijakan	Monitoring efektivitas	Monev implementasi
	kebijakan Riset	kebijakan riset	untuk	kebijakan	Integrasi kebijakan	untuk peningkatan	kebijakan riset dan	kebijakan riset dan
	dan Inovasi di daerah	inovasi untuk pengembangan PUD Industri	implementasi kebijakan kepada para pelaku	kepada para Industri	pengembangan PUD Industri pengolahan ke dalam	dayasaing daerah	inovasi untuk pengembangan PUD Industri pengolahan	inovasi untuk pengembangan PUD Industri pengolahan

		Pengola han	PUD Industri pengola han	pengol ahan	kebijak an pemban gunan daerah		n untuk peningkat an daya saing daerah	n
B	Penataa n basis data Riset dan Inovasi	Basis data yang mendu kung riset dan inovasi untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han	Partisip asi pelaku PUD Industri pengola han dalam dashbo ard satu data untuk menjali n kemitra an dengan para investor	Pertisi pasi untuk pemanf ataan data dalam menjali n kemitr aan dengan para investo r	Pemanf ataan basis data / digitalis asi data untuk matchm aking teknolo gi	Basis data/ dashbo ard satu data/ digitalis asi data/ digitalis asi PUD Industri pengola han yang dibentu k member ikan informa si untuk peningk atan daya saing daerah	Basis data/ dashboar d satu data/ digitalisas i PUD Industri pengolaha n yang sesuai terstandar	Monev melalui updating basis data secara berkala PUD Industri pengolaha n untuk peningkat an daya saing daerah
C	Pengem	Terdapa	Pelatiha	Pelaku	Integras	Integras	Evaluasi	Monev

	bangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	t beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan	n & pendampingan untuk pemanfaatan infrastruktur (showroom, laboratorium produksi, dll) dasar Riset dan Inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan	PUD Industri Pengolahan laboratorium produksi, dll) produksi, dll)	i infrastruktur (showroom, laboratorium produksi, dll) industri pengolahan dengan ruang kreatif kota	i Infrastruktur dengan jaringan riset dan inovasi kota probolinggo	& maintenance (showroom, laboratorium produksi, dll) PUD industri pengolahan	untuk pengembangan Infrastruktur (showroom, laboratorium produksi, dll) PUD industri pengolahan menjadi simpul riset inovasi PUD industri pengolahan secara berkelanjutan
D	Penyediaan anggaran	Terdapat dukungan anggaran	Partisipasi pelaku PUD	Partisipasi pelaku	Peningkatan kontribusi	Perluasan skema insentif	Kontinuitas alokasi anggaran	Monev pemanfaatan Anggaran

	n Riset dan Inovasi;	n untuk kegiatan riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengola han	Industri Pengola han dalam implemen tasi progra m prioritas riset dan inovasi daerah	PUD Industri Pengol ahan dalam progra m prioritas riset dan inovasi daerah	usi CSR/hi bah riset dan anggara n APBD dalam peningk atan daya saing PUD Industri Pengola han	dan anggara n untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han	riset dan inovasi Daerah pengemba ngan PUD Industri Pengemba ngan	riset dan inovasi untuk pengemba ngan PUD Industri Pengemba ngan
E	Peningk atan perlind ungan dan pemanf aatan kekayaa n intelekt ual.	Peningk atan kuantit as HKI	Pelatiha n & pendam pingan untuk pengembangan produk Industri Pengola han untuk memen uhi kualifik asi HKI	Pemanf aatan HKI untuk diferen siasi pasar dan brandi ng Industr i Pengol ahan	Pendam pingan kerjasa ma berbasi s sertifika t HKI	Integras i HKI dalam strategi pemasa ran Daerah	Optimalis asi HKI untuk peningk at an daya saing produk PUD Industri Pengolaha n	Monev pelaksana an peningkat an kuantitas HKI untuk pengemba ngan produk Industri Pengolaha n
2	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi							

A	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder UMKM	Pelaksanaan jejaring kemitraan riset dan inovasi secara kolaboratif untuk pengembangan PUD industri pengolahan	Inkubasi hasil riset dan inovasi menjadi model kerja sama jangka panjang	Kegiatan Riset dan inovasi bersama menghasilkan prototipe untuk pengembangan industri pengolahan	Perluasan kemitraan dan pembangunan tim kerja tematik	Institutionalization forum & program kolaboratif pengembangan PUD industri pengolahan	Evaluasi kolaboratif riset & inovasi daerah yang aktif dan berkesinambungan
B	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan	Terdapat sarana pendukung riset seperti penguatan sistem jaringan internet untuk peningkatan	Integrasi sarana pendukung Riset dan Inovasi ke dalam fasilitas publik untuk pemaksimalan	Pemanfaatan sarana pendukung riset dan inovasi oleh pelaku industri	Pemanfaatan sarana pendukung Riset dan Inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan	Peningkatan daya saing produk Industri Pengolahan Melalui pemanfaatan sarana pendukung	Perawatan & memaksimalkan sarana pendukung riset dan inovasi daerah Industri Pengolahan	Evaluasi penyediaan sarana riset dan inovasi Industri Pengolahan

	dengan	aktivita s ekonom i	fungsi	dan		Riset dan Inovasi		
	kemam puan daerah	masyar akat		penge mbang teknolo gi				

3	Kemitraan Riset dan Inovasi							
A	Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan PUD Industri Pengolahan	<i>Joint research & inkubasi</i> bisnis untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan	Inkubasi hasil riset dan inovasi menjadi produk siap pasar khususnya pada PUD Industri Pengolahan	Model akutan pengembangan kerjasama/skema kemitraan strategis untuk ekspor dan pendanaan pada PUD Industri Pengolahan	Replikasi kemitraan ke sektor pengolahan lain khususnya pada PUD Industri Pengolahan	Evaluasi kinerja kemitraan & perpanjangan MoU	Monev kegiatan kemitraan riset dan inovasi menjadi model sistemik dalam pengembangan PUD Industri Pengolahan
E	Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha	Pembentukan forum / tim kerja untuk transfer teknologi dan produksi	Pengembangan PUD Industri Pengolahan melalui pemanfaatan difusi inovasi	Komersialisasi hasil riset inovasi PUD Industri Pengolahan	Pemanfaatan teknologi tepat guna secara massal	Replikasi difusi inovasi ke sektor PUD lainnya	Evaluasi difusi inovasi produktivitas PUD Industri Pengolahan

		dalam pengembangan PUD Industri Pengolahan	ksi massal hasil riset inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan					
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diselenggarakan kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan PUD Industri Pengolahan	Jejaring Kerjasama untuk pengembangan implementasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada PUD Industri Pengolahan	Kolaborasi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada PUD Industri Pengolahan	Replikasi hasil praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada PUD Industri Pengolahan	Peningkatan daya guna hasil praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada PUD Industri Pengolahan	Peningkatan daya saing produk olahan melalui Kerjasama dan replikasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inova	Monev pelaksanaan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada PUD Industri Pengolahan

							si	
4	Budaya Riset dan Inovasi							
A	Pro mosi dan kam pan ye inovasi	Peningkat an promosi dan kampanye untuk	Pelibata n komunit as digital media dalam	Kolabor asi untuk promos i PUD industri	Peni ngk atan Bra ndin g PUD	Daya saing produ k olahan PUD Indust ri Pengol ahan	Rebran ding PUD Industr i Pengol ahan	Mo nit ori ng da n Eva lua si has il capaian kegiata n

		pengembangan PUD Industri Pengolahan	promosi PUD industri pengolahan	pengolahan lintas platform (media sosial, event, pameran)	industri pengolahan Kota Probolinggo	meningkatkan melalui kegiatan promosi	untuk pasar nasional/internasional	promosi PUD Industri Pengolahan
E	Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan	Jejaringan kemitraan penghargaan di kegiatan lomba inovasi	Keterlibatan swasta & sponsor dalam penghargaan di kegiatan lomba inovasi	Pemberian Insentif riset & inovasi kepada para pelaku PUD Industri Pengolahan	Insentif promosi dan akses pasar bagi pemenang lomba inovasi	Peningkatan kegiatan apresiasi riset dan inovasi sesuai dengan standart IDSD Nasional	Evaluasi kegiatan dan apresiasi menjadi budaya kompetitif dan mendorong lahirnya inovasi baru pada PUD Industri Pengolahan
C	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset	Jejaringan kerjasama untuk perluasan	Terdapatnya investor untuk mendukung	Skema pembinaan pengusaha pemula	Program pembiayaan pengusaha pemula	Peningkatan jumlah perusahaan pemula berbasis riset pada	Evaluasi hasil pelaksanaan kerjasama

	riset	untuk pengembangan PUD Industri Pengolahan	modal dalam pengembangan pengusaha pemula PUD Industri Pengolahan	pengembangan pengusaha pemula PUD Industri Pengolahan	pada PUD Industri Pengolahan secara berkelanjutan	pemula berbasis riset masuk dalam agenda Renja PD	PUD Industri Pengolahan guna mendukung industri kreatif daerah Kota Probolinggo	dan pembiayaan pengusaha pemula berbasis riset pada PUD Industri Pengolahan
I	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Terinventarisasinya teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan	Jejaring kerjasama untuk publikasi kearifan lokal yang sudah diciptakan pada PUD Industri Pengolahan	Peningkatan jumlah investor dan kolaborasi dalam pengembangan kearifan lokal yang sudah diciptakan pada PUD Industri Pengolahan	Peningkatan daya saing produk olahan PUD Industri Pengolahan akibat pemanfaatan Teknologi masyarakat (kearifan lokal	Teknologi masyarakat (kearifan lokal) pada industri pengolahan sebagai keunggulan kompetitif	Peningkatan jumlah teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang tercipta dalam mendukung pengembangan PUD Industri Pengolahan	Evaluasi hasil pemanfaatan teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah terpetakan pada PUD Industri Pengolahan
5	Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah							

A	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasar kan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Industri Pengolah an	Jejaring Kerjasa ma dalam kegiatan n prakars a riset dan inovasi untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han	Pelaksa naan riset kolabor atif antara OPD, kampus , dan pelaku industri pengola han	Komersi alisasi hasil prakars a riset dan inovasi untuk pengem bangan PUD Industri Pengola han	Replika si hasil riset ke sektor serupa di wilayah lain dalam lingkup PUD Industri Pengola han	Pengem bangan Prakars a Riset dan Inovasi pada PUD Industri Pengola han	Evaluasi capaian hasil pengem bangan prakars a Riset dan Inovasi PUD Industri Pengola han
E	Penyelen ggaraan pengemb an klaster inovasi berbasis produk unggu la n daerah	Terseleng garanya pengemb an klaster ekonomi	Jejaring Kerjasa ma untuk investas i dan brandin g pengem bangan klaster ekonom i PUD Industri Pengola han	Investor pengem bangan klaster ekonomi PUD Industri Pengola han	Pendam pingan sinergit as klaster dan digital marketi ng pada PUD Industri Pengola han	Pengem bangan klaster PUD Industri Pengola han melalui digital marketi ng	Pengem bangan klaster inovasi PUD Industri Pengola han menjadi simpul ekonom i dan inovasi daerah yang mandiri	Evaluasi kinerja klaster PUD Industri Pengola han dalam penguat an ekonomi lokal

C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan yang ada	Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Lembaga terkait (BRIN) dalam perumusan sinkronisasi kebijakan yang mendukung pengembangan PUD Industri Pengolahan	Kolaborasi antara Pemkot, Provinsi, lembaga pusat, dan akademisi dalam sinkronisasi kebijakan yang mendukung pengembangan PUD Industri Pengolahan	Penyusunan roadmap kolaboratif sinkronisasi kebijakan yang mendukung pengembangan PUD Industri Pengolahan	Terciptanya sinergi kebijakan lintas sektoral dan spasial yang mendukung pengembangan PUD Industri Pengolahan	Dashboards kebijakan terpadu PUD Industri Pengolahan	Monitoring efektivitas pelaksanaan Sinkronisasi kebijakan dan evaluasi tindak lanjut perbaikan kebijakan yang mendukung pengembangan PUD Industri Pengolahan
6 Penyelarasan dengan perkembangan global								
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan	Jejaring Kerjasma dengan Lembaga swasta dalam pelatihan isu standar produk Industri	Kolaborasi pendampingan standarisasi PUD Industri Pengolahan	Peningkatan jumlah pelaku usaha PUD Industri Pengolahan yang terstandarisasi	Peningkatan standar produk yang dihasilkan untuk Pengembangan PUD Industri Pengolahan	Peningkatan brandimg daya saing industri pengolahan skala nasional dan internasional	Evaluasi proses standarisasi dan kompetitif pasar internasional untuk pengembangan PUD Industri

	dan Inovasi di daerah		Pengola han yang dihasilk an					Pengola han
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

E	Penguatan kerjasama internasional	Terjalinn ya kerjasama a internasi onal pengemb angan PUD Industri Pengolah an	Penguatan jejaraing Kerjasama a internasi onal dalam rangka pengemb angan PUD Industri Pengolah an	Kolaborasi riset dan inovasi dengan kemitraa n global dalam rangka pengemb angan PUD Industri Pengolah an	Penguatan brandin g PUD Industri Pengola han untuk peningk atan daya saing produk Industri Pengola han	Peningk atan pengua tan ekonom i lokal dari PUD Industri Pengola han	pengua tan kemitr aan strategi s pada eksport industr i pengol ahan	Monev jejaring internas ional yang menduk ung ekspans i PUD pengola han ke pasar luar negeri
---	-----------------------------------	---	---	---	--	--	---	---

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Tabel 6. 9 Peta Jalan dan Sasaran Strategis Pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Tahun 2025-2027

N O	Sub Elemen t	Indikat or	2025		2026		2027	
			Peta Jalan	Sasara n	Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran
1	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah							
A	Reforma si	Penguat an	Merum uskan kebijaka n	Identifi kasi	Sosialis asi kebijaka n	Penyusun an dan	Penguat an	Impleme ntasi
	kebijaka n Riset	kebijaka n riset	untuk mendukung	Kebijak an	kepada para pelaku	penetapa n	kebijaka n pusat-	regulasi antara
	dan Inovasi di Daerah	inovasi untuk pengem bangan	pengem bangan pelaku PUD Kesenia n, Hiburan ,	eksistensi dan regulas i untuk	PUD Kesenia n, Hiburan , dan Rekreasi	kebijakan untuk penguata n PUD	daerah untuk pengem bagan	pusat-daerah untuk pengem bagan PUD
		PUD Kesenia n,	dan	pengem bagan		Kesenian,	PUD Kesenia n,	Kesenia n, Hiburan ,
		Hiburan , dan	Perwali Kesenia n dan	PUD Kesenia n,		Hiburan, dan	Hiburan , dan	dan
		Rekreasi	Kebuda yaan Khas Kota Probolin ggo)	Hibura n, dan Rekreasi		Rekreasi	Rekreasi	Rekreasi
B	Penataa n basis	Basis data yang mendukung riset	Updatin g data pelaku kelompok seni dan	Identifi kasi dan Pemeta an	Sosialis asi kepada pelaku komunitas seni	Sosialisasi dashboar d satu	Integras i dashbo ard lintas	Sinkroni sasi databas e dalam e-

	Inovasi	dan inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan , dan Rekreasi	budaya lokal serta destinasi wisata lokal Kota Probolin ggo	komuni tas seni dan budaya , serta pengelo la usaha wisata Kota Proboli nggo	dan budaya Kota Probolin ggo untuk digitalis asi data base pelaku PUD Kesenia n, Hiburan , dan Rekreasi	data untuk PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	OPD untuk peningk atan informa si PUD Kesenia n, Hiburan , dan Rekreasi	goverme nt khusun ya sektor Kesenia n, Hiburan , dan Rekreasi
C	Pengem bangan infrastr uktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapa t beberap a infrastr uktur dasar riset dan inovasi pengem bangan PUD Kesenia n,	Identifik asi kebutuh an infrastr uktur riset dan inovasi untuk pengem bangan PUD Kesenia n, Hiburan , dan	Identifi kasi Kebutu han infrastr uktur dasar Riset dan Inovasi untuk	Sosialis asi kepada para pelaku PUD Kesenia n, Hiburan , dan Rekreas i terkait kebutuh an dan	Penentua n kebutuha n infrastruk tur dasar Riset dan Inovasi untuk	Penyedi aan infrastr uktur dasar Riset dan Inovasi seperti pendiria n pusat	Kolabor asi penyedi aan infrastr uktur fisik riset dan inovasi yang sudah ada
		Hiburan , dan Rekreasi	Rekreas i (missal sanggar	ruang ekspres i komuni	rencana penyedi aan infrastr	pengemba ngan PUD	inovasi seni dan budaya	untuk pengem

			tari dan gedung kesenian dan budaya)	tas pelaku seni dan budaya Kota Probolinggo	uktur dasar Riset dan Inovasi	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	(<i>Creative Hub</i>)	bangunan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
D	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Perumusan anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Identifikasi Besaran anggaran dan Sumber Pendanaan (APBD, CSR, BUMN, dana pusat)	Sosialisasi Skema pendanaan untuk Penguatan Dana <i>Matching Fund</i> daerah	Penentuan skema besaran anggaran riset dan inovasi dalam APBD serta Rekomendasi perdanaan lainnya	Pemanfaatan anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi melalui program prioritas riset dan inovasi Daerah
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan	Peningkatan kuantitas HKI	Inventarisasi KI pada PUD Kesenian, Hiburan, dan	Pemetaan produk unggulan potensial untuk	Pendampingan pendaftaran HKI kepada pelaku	pendampingan pendaftaran HKI (hak paten seni budaya	Fasilitas HKI kolektif (branding PUD Kesenian, Hiburan	Kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam fasilitasi

	n intelektual.		Rekreasi	HKI	PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	lokal daerah)	, dan Rekreasi)	pendaftaran kolektif HKI
2	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi							
A	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Melakukan identifikasi mitra riset lokal	Pemetaan aktor strategis (BRIN, perguruan tinggi/ Institut Seni Indone sia, seniman)	Fasilitas dan Pembentukan Forum riset dan inovasi Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi melalui MoU dengan BRIN, perguruan tinggi, dan pelaku seni budaya	Pembentukan forum koordinasi riset dan inovasi Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Kegiatan riset koloratif dengan BRIN, perguruan tinggi, dan pelaku seni budaya	Pelaksanaan riset koloratif dan program lintas sektor untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
B	Penyediaan sarana pendukung Riset dan	Terdapat sarana pendukung riset seperti penguatan	Identifikasi kebutuhan sarana pendukung	Inventarisasi kebutuhan sarana riset dan	Sosialisasi pengadaan sarana (alat pendukung	Peningkatan pemahaman para pelaku seni dan	Penyediaan sarana pendukung Riset dan	Pemanfaatan sarana pendukung Riset dan

	Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	an sistem jaringan internet untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat	Riset dan Inovasi oleh para pelaku PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Inovasi Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	ung dan jaringan sistem teknologi) pendukung Riset dan Inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	budaya dalam pemanfaatan sarana pendukung Riset dan Inovasi	Inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Inovasi oleh para pelaku seni dan budaya
3	Kemitraan Riset dan Inovasi							
A	Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan PUD Kesenian,	Mapping jejaring kemitraan yang berpotensi untuk kolaborasi seni dan budaya serta	Identifikasi mitra strategis (kampus seni/ ISI, BRIN, komunitas seni budaya, pengusaha	Sosialisasi pemben-tukan forum kemitraan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Penandat-angan MoU riset dan inovasi pengembangan PUD Kesenian,	Kolaborasi/ Jejaring kemitraan lintas sektor (misal kolaborasi desa wisata) untuk	Implementasi kegiatan kemitraan untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

		Hiburan, dan Rekreasi	pengembangan pariwisata lokal	tempat hiburan/ destinasi wisata)		Hiburan, dan Rekreasi	pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	
E	Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Identifikasi model difusi inovasi yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Inventarisasi model difusi inovasi PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Pelatihan dan bimbingan teknis model difusi inovasi adaptif kepada pelaku PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Peningkatan pemahaman model difusi inovasi oleh pelaku PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Implementasi model difusi inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Pemanfaatan difusi inovasi PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada	Diselenggarakan kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Identifikasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada Kesenian	Pemetaan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada	Pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada	Publikasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi oleh para pelaku PUD Kesenian	Peningkatan daya saing seni budaya dan rekreasi Kota Probolinggo melalui

	pelaku inovasi.		, Hiburan, dan Rekreasi	PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Riset dan Inovasi pada para pelaku PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	pelaku PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	, Hiburan, dan Rekreasi	implementasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi
4	Budaya Riset dan Inovasi							
A	Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan promosi dan kampanye untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Identifikasi kegiatan promosi inovasi yang akan dilakukan untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Penyusunan strategi promosi inovasi seni dan budaya daerah	Pelatihan dan bimtek branding & konten digital untuk promosi seni budaya dan rekrasi daerah	Peningkatan skill para pelaku seni budaya dan rekrasi daerah terkait digital marketing untuk promosi produk	Implementasi digital marketing melalui akun sosial media para pelaku seni budaya dan pengelolaan usaha wisata daerah serta Roadshow seni budaya pada event-event lokal dan nasional	Para pelaku seni budaya dan rekrasi daerah dapat memanfaatkan akun media online dan offline sebagai sarana promosi produk.

E	Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Perumusan mekanisme lomba inovasi pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Penyusunan kriteria penghargaan untuk kinesi PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Sosialisasi kepada para pelaku seni budaya dan seni budaya dan pengelolaan usaha wisata terkait lomba inovasi	Para pelaku seni budaya dan rekreasi memahaminya terkait mekanisme lomba inovasi	Pelaksanaan Lomba Inovasi seni budaya dan seni budaya dan pengelolaan usaha wisata Kota Probolinggo	Integrasi Lomba Inovasi dalam program kegiatan OPD terkait (Dispopar dan Disdikbud)
C	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset dalam rangka pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Identifikasi generasi muda kreatif lokal untuk regenerasi seni budaya daerah	Identifikasi artpreneur dan potensi startup seni budaya daerah	Pelatihan dan bimtek wirasaha seni, budaya, pengelolaan usaha wisata	Pendampingan model bisnis dan pelatihan kewirausahaan pada para pelaku seni, budaya, pengelolaan usaha wisata	Pembentukan inkubator bisnis daerah (misal manajemen pertunjukan & produksi digital)	Fasilitasi inkubasi bisnis daerah dan dukungan <i>seed funding</i> / pendanaan awal bagi generasi muda kreatif lokal

I	Inventarisasi, pengembangan, dan perlin dung an peng etahu an dan/ atau teknologi masyara kat.	Terinventarisasinya teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan	Identifikasi kearifan lokal seni buday a dan rekrea si	Pemetaan kearifan lokal seni buday a dan rekrea si daera h	Workshop dan bimtek pengen alan kearifan lokal seni buday a dan destin asi wisata lokal Kota Proboli nggo	Dokumentasi kearifan lokal seni budaya dan rekreasi daerah	Pelestarian kearifan lokal seni buday a dan rekrea si daera h (misal : Jaran Bodha g dan Musik Dug Dug)	Penguatan ekonomi lokal dari hasil pelestarian kearifan lokal seni budaya dan rekreasi daerah
5	Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah							
A	Prakarsa pengemb angan Riset dan Inovasi di daerah berdasar kan	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengemb angan PUD Kesenian,	Identifikasi isu strate gis seni buday a dan rekeasi daera h	Identifikasi permasalahan utama dalam pengemb angan budaya &	Penyusunan tim kerja untuk Agend a riset dan inovas i dalam rangk a pengemb angan	Penetapan topik riset terapan priorita s berbasis kebutu han nyata berdasar kan	Pelaksanaan aksi riset dan inovas i dalam pengemb angan budaya &	Riset dan inovasi dalam penge mbang an buday a & keseni an serta destinasi

	kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Hiburan, dan Rekreasi		kesenian serta destinasi wisata daerah melalui FGD dan studi	budaya & kesenian serta destinasi wisata daerah	pemetaan kebutuhan untuk pengembangan budaya & kesenian serta destinasi wisata daerah	kesenian serta destinasi wisata daerah	wisata daerah sesuai dengan identifikasi permasalahan
Penyele	nggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terselenggara pengembangan klaster ekonomi	Identifikasi klaster PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Pemetaan klaster PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi (seni pertunjukan, film lokal, festival, destinasi wisata lokal/daerah)	Sosialisasi hasil pemetaan klaster PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Pembentukan kelembagaan klast er PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi dan penyusunan rencana kerja	Dukungan sarana dan prasarana pada masing-masing klaster PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi (misal: sanggar, gedung latihan, alat musik, dll)	Pengembangan kreativitas pada klast er PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
C	Kesesuaian	Sinkronisasi	Identifikasi	Inventarisasi	Forum koordinasi	Sinkronisasi	Penyusunan	Harmonisasi

	kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	kebijakan yang ada	kebijakan penduku ng penge mbang an PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Kebijakan pusat dan daerah yang relevan dengan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	nasional lintas sektor al untuk sinkronisasi kebijakan an penduku ng penge mbang an PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	kebijakan akan integ rativ e (sektor al) yang men duk ung pengemb angan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	kebijakan sektoral dan spasial yang mendukung pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
6. Penyelarasan dengan perkembangan global							
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang Mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan	Identifikasi pelaku komunitas seni budaya dan pengelola usaha wisata di Kota Probolinggo	Identifikasi isu global terkait perkembangan seni budaya dan pengelolaan usaha wisata di Probolinggo	Pelatihan an sertifikasi dan standar isasi untuk pelaku komunitas seni budaya dan pengelola komunitas	Sosialisasi isu global dan relevansi kegiatan sertifikasi dan stand arisasi untuk pelaku komunitas	Peningkatan partisipasi para pelaku komunitas seni budaya dan pengelola usaha wisata di Kota Probolinggo untuk

	daerah			nggo	usaha wisata di Kota Probolin ggo	as seni budaya dan pengelol a usaha wisata di Kota Probolin ggo	dan pengelol a usaha wisata di Kota Probolin ggo	sertifika si dan standari sasi seni budaya dan destinas i wisata daerah
--	--------	--	--	------	---	---	--	---

E	Pengua tan kerjasa ma interna sional	Terjalin nya kerjasa ma internas ional dalam pengem bangan PUD Kesenia n, Hiburan , dan Rekreasi	Peme taan poten si mitra kerja sama globa l pada PUD Kese nian, Hibu ran, dan Rekre asi	Pem etaa n pote nsi kerj a sam a pertun jukan seni buday a luar negeri dapro mosi destina si wisata daerah di lingkup internas ional	Pengiri man delegasi ke festival atau event internas ional untuk pengem bangan PUD Kesenia n, Hiburan , dan Rekreas i	Partisipasi pelaku seni buaya dan pengelola usaha wisata dalam expo/mar ketplace internasio nal	Kemitra an strategi s dengan mitra asing dan lembaga sertifika si untuk pengemb angan sertifika si untuk pengemb angan PUD Kesenia n, Hiburan , dan Rekreasi , dan Rekreasi , dan Rekreasi	MoU dengan mitra asing dan lembaga sertifika si untuk pengemb angan PUD Kesenia n, Hiburan , dan Rekreasi (misal: misi pertukar an seni dan budaya)
---	---	--	--	--	---	--	--	--

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Tabel 6. 10 Peta Jalan dan Sarana Strategis Pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Tahun 2028-2030

N O	Sub Element	Indikator	2028		2029		2030	
			Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran	Peta Jalan	Sasaran
1	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah							
A	Reformasi	Penguatan	Bimbingan teknis	Implementasi	Pemantauan	Integrasi	Monitoring efektivitas	Monev
	kebijakan Riset	kebijakan riset	untuk	kebijakan kepada	Integrasi kebijakan	kebijakan untuk	kebijakan riset dan	implementasi

	dan Inovasi di daerah	inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian , Hiburan, dan Rekreasi	implementasi kebijakan kepada para pelaku PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	para pelaku PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	pengembangan PUD Kesenian, Hiburan , dan Rekreasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah	peningkatan daya saing daerah	inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan , dan Rekreasi untuk peningkatan daya saing daerah	kebijakan riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian , Hiburan, dan Rekreasi
B	Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data yang mendukung riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian , Hiburan, dan	Partisipasi pelaku seni, budaya, dan pengelola wisata dalam dashboar satu data untuk menjalin	Pertisipasi untuk pemanfataan data dalam menjalin kemitraan dengan para investor	Pemanfaatan basis data / digitalisasi data untuk matchmaking teknologi	Basis data/ dashboar satu data/ digitalisasi PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi yang	Basis data/ dashboar satu data/ digitalisasi PUD Kesenian, Hiburan , dan Rekreasi yang terintegrasi	Monev melalui updating basis data secara berkala PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi untuk

		Rekreasi	kemitraan dengan para investor			dibentuk memberikan informasi untuk peningkatan daya saing daerah		peningkatan daya saing daerah
C	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Pelatihan & pendampingan untuk pemanfaatan infrastruktur (<i>creative hub</i>) dasar Riset dan Inovasi untuk pengembangan	Pelaku seni, budaya, dan pengelola wisata Dapat Memanfaatkan Infastruktur (<i>creative hub</i>) kreatif kota	Integrasi infrastruktur (<i>creative hub</i>) PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi dengan ruang kreatif kota	Integrasi infrastruktur dengan jaringan riset dan inovasi kota probolingsongo	Evaluasi & maintenance (<i>creative hub</i>) PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Monev untuk pengembangan Infrastruktur (<i>creative hub</i>) PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi menjadi simpul riset inovasi secara berkelanjutan

			angan PUD Kesenian , Hiburan, dan Rekreasi					jutan
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

I	Penye- diaan anggar- an Riset dan Inovas- i;	Terdap- at dukun- gan anggar- an untuk kegiat- an riset dan inovasi untuk penge- mbang- an PUD Kesenia- an, Hibura- n, dan Rekreasi	Partisi- pasi pelaku seni, budaya, a, dan pengel- ola wisata dalam impleme- ntasi program prioritas riset dan inovasi daerah	Partisip- asi pelaku seni, budaya, dan pengelol- a wisata dalam program prioritas riset dan inovasi daerah	Pen- ing- kat an kon- trib- usi CSR/ hibah riset dan angga- ran APBD dalam peningka- tan daya saing PUD Kesenian , Hiburan, dan Rekreasi	Perluas- an skema insentif dan anggar- an untuk penge- mbang- an PUD Kesenia- an, Hibura- n, dan Rekreasi	Kontinu- itas alokasi anggara- n riset dan inovasi Daerah pengem- bangan PUD Kesenia- n, Hibura- n, dan Rekreasi	Monev pemanfa- atan Anggara- n riset dan inovasi untuk pengem- bangan PUD Kesenia- n, Hiburan , dan Rekreasi
E	Peni- ngka- tan perli- ndu- ngan dan pem- anfa- atan keka- yaan intel- ektu- al.	Peningk- atan kuantit- as HKI	Pelatiha- n & pendam- pingan untuk penge- mbang- an seni, budaya, a, dan destin- asi wisata untuk meme-	Pemanf- aatan HKI untuk diferen- siasi pasar dan brandi- ng seni, budaya , dan destina- si wisata	Pend- ampi- ngan kerja sama berbasis sertifikat HKI	Integra- si HKI dalam strategi pemasa- ran/ promos- i daerah	Optimali- sasi HKI untuk peningk- atan daya saing produk PUD Kesenia- n, Hibura- n, dan Rekreasi	Monev pelaksa- naan peningk- atan kuantit- as HKI untuk pengem- bangan seni, budaya , dan destinasi wisata

			nuhi kualifika si HKI					
2	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi							
A	Penguat an kolabor asi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemang ku kepent ngan	Bertam bahny a kolabo rasi riset dan inovasi denga n para stakeh older PUD Kesen an, Hibura n, dan Rekreas i	Pelaksan aan jejaring kemitraa n riset dan inovasi secara kolabora tif untuk penge mban gan PUD Kesen ian, Hibur an, dan Rekreasi	Inkubasi hasil riset dan inovasi menjad i model kerja sama jangka panjan g	Kegiata n Riset dan inovasi bersam a mengha silkan prototip e untuk pengem bangan PUD Kesenia n, Hibura n, dan Rekreasi	Perluas an kemitr aan dan pembe ntuka n tim kerja temati k	Institutio nalizatio n forum & program kolaborat if pengem bangan PUD Kesenia n, Hibura n, dan Rekreas i	Evaluas i kolabor atif riset & inovasi daerah yang aktif dan berkesina mbungan
E	Pen yed iaa n sar ana penduk ung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuai	Terdapa t sarana penduk ung riset seperti penguat an sistem jaringan internet untuk peningk atan aktivita	Integr asi saran a pendu kung Riset dan Inovas i ke dalam fasilita s publik untuk	Pem anfa atan sara na pendu kung riset dan inovas i oleh pelaku seni, budaya, dan	Pengemb angan sarana penduku ng Riset dan Inovasi untuk pengemb angan PUD kesenian , hiburan, dan	Penin gkata n daya saing dan kreati vitas seni buda ya dan destina si wisata	Perawata n & pemaks imalan sarana penduk ung riset dan inovasi daerah	Evaluasi penyedia an sarana riset dan inovasi untuk menduk ung Pengemb angan PUD kesenian, hiburan,

kan dengan kemamp uan daerah	s ekonom i masyar akat	pemaksi malan fungsi	pengelol a eisata lokal	rekreasi	lokal melalui pemanf ataan sarana penduk ung riset dan inovasi		dan rekreasi
--	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------	---	--	-----------------

3	Kemitraan Riset dan Inovasi							
A	Penguatan Kemitraan antar lembaga kelembagaan	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	<i>Joint research & inkubasi</i> bisnis untuk pengembangan an PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Inkubasi hasil riset dan inovasi menjadi produk siap pasar khususnya pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Melekatkan pada pengembangan pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Replikasi ke mitra raan ke sektor pengolaan lain khususnya pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Evaluasi kinerja kemitraan & perjanjian MoU	Monev kegiatan kemitraan riset dan inovasi menjadi model sistemik dalam pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
F	Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam	Pembentukan forum / tim kerja untuk transfer teknologi dan peningkatan	Pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi melalui pemanf	Komersialisasi hasil riset inovasi PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Pemanfaatan kreativitas seni dan budaya lokal Kota Probolinggo	Regenerasi para pelaku seni budaya dan pengelolaan wisata untu	Evaluasi difusi inovasi produktivitas PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

		rangka pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	kegiatan seni budaya dari hasil riset inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	kegiatan difusi inovasi			kegiatan pelestarian PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi melalui difusi inovasi	
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diselenggarakan kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Jejaring Kerjasma untuk pengembangan implementasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada PUD Kesenian, hiburan, dan rekreasi	Kolaborasi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada PUD Kesenian, hiburan, dan rekreasi	Replikasi hasil praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Peningkatan daya guna hasil praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Penguatan Kerjasama dan replikasi praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Monev pelaksanaan dan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi pada PUD Kesenian, hiburan, dan rekreasi

			rekreasi			rekrea si	dan kreativ itas	
--	--	--	----------	--	--	--------------	------------------------	--

4	Budaya Riset dan Inovasi							
A	Promosi dan kampanye panye inovasi	Peningkatan promosi dan kampanye untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Pelibatan komunitas digital media dalam promosi PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Kolaborasi untuk promosi PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi lintas platform (media sosial, event, pameran)	Peningkatan Branding PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Kota Probolinggo	Daya saing produk olah raga PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi melalui kegiatan promosi	Rebranding PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi untuk pasar nasional/internasional	Monitoring dan Evaluasi hasil capaian kegiatan promosi PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
B	Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi dalam	Jejaringan ke mitra pengharagaan di kegiatan	Keterlibatan swasta & sponsor dalam pengharagaan di kegiatan lomba inovasi	Pemberian Insentif riset & inovasi kepada pelaku PUD Kesenian, Hiburan,	Insentif promosi dan akses pasar bagi pemenang lomba inovasi	Keberlanjutan kegiatan apresiasi riset dan inovasi sesuai dengan standar IDSD Nasion	Evaluasi kegiatan apresiasi menjadi budaya kompetitif dan

		rangka pengem- bangan PUD Kesenia- n, Hibura- n, dan Rekreasi	lomba inova- si	si	dan Rekreasi		al	mend- orong lahir- nya inova- si baru pada PUD Kesenian, Hibura- n, dan Rekreasi
C	Pengem- bangan Perusaha- an pemula berbasis riset	Bertam- bahnya pengusa- ha pemula berbasis riset dalam rangka pengem- bangan PUD Kesenian, Hibura- n, dan Rekreasi	Jejaring kerjasama untuk penguata- n inkubator kreatif pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Terdapat nya investor untuk menduk- ung regenera- si pelaku pada PUD Kese- nian , Hib- ura- n, dan Rekr- easi	Skema pembina- an regenera- si pelaku pada PUD Kesenian , Hiburan, dan Rekreasi secara berkelanj- utan	Proga- m pembina- an regene- rasi pelaku berb- asis riset mas- uk dala- m age- nda Ren- ja PD	Peningk- atan jumlah inkubat- or kreative pada pengem- bangan PUD Kesenian, Hibura- n, dan Rekreasi guna menduk- ung industri kreatif daerah Kota Proboli- nggo	Evalua- si hasil pelaks- anaan kerjas- ama dan pembina- an pelaku inkuba- tor kreativ- e seni budaya dan pengel- ola wisata berbas- is riset pada PUD Kesenian

								an, Hibura n, dan Rekrea si
--	--	--	--	--	--	--	--	---

I	Inventarisasi, pengembangan, dan perlu ndungan peng etah uan dan/ atau teknologi masyarakat.	Terinventarisasi teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan	Jejaring kerjasa ma untuk komersialisasi kearifan lokal yang sudah diciptakan pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Peningkatan jumlah investor dan kolaborasi dalam pengembangan kearifan lokal yang sudah diciptakan pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Peningkatan daya saing produk olahan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Teknologi masyarakat (kearifan lokal) pada industri pengolahan sebagai keunggulan kompetitif	Pengembangan kearifan lokal yang terciptakan dalam mendukung kemajuan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Evaluasi hasil pemanfaatan kearifan lokal seni budaya dan rekreasi yang sudah terpetakan pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
	Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah							
A	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasark an kebutuhan daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Jejaring Kerjasa ma dalam kegiatan prakarsa riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Kesenian	Pelaksanaan riset kolaboratif antara OPD, kampus/ ISI, dan pelaku seni budaya serta pengelo	Komersialisasi hasil prakarsa riset dan inovasi untuk pengembangan Hiburan	Replikasi hasil riset ke sekt or serupa di wilayah lain dalam lingk up	Pengembangan Prakarsa Riset dan Inovasi pada PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Evaluasi capaian hasil pengembangan prakarsa Riset dan Inovasi PUD Kesenian,

	untu k promosi PUD		n, Hibura n, dan Rekreasi	la wisata	n, dan Rekreasi	PUD Kesen ian, Hibur an, dan Rekreasi	si	Hiburan , dan Rekreasi
E	Penyele nggaraa n pengem bangan klaster inovasi berbasi s produk unggula n daerah	Terseleng garanya pengemb angan klaster ekonomi	Jejaring Kerjasa ma untuk legalita s dan brandin g penge mban gan klaste r ekono mi PUD Kesen ian, Hibur an, dan Rekre asi	Investor pengemb angan klaster ekonomi PUD Kesenian , Hiburan, dan Rekreasi	Sinergi klaster dan digital marke ting pada PUD Kesenia n, Hibura n, dan Rekrea si Hibura n, dan Rekreasi	Penge mbang an klaste r PUD Kesenia n, Hibura n, dan Rekrea si melalui digital marketi ng	Penguat an klaster ekonom i PUD Keseni an, Hibura n, dan Rekrea si menja di simpul ekono mi dan inovasi daerah yang mandi ri	Evaluas i kinerja klaster PUD Kesenia n, Hiburan , dan Rekreasi dalam pengu atan ekono mi lokal
C	Kesesuai an kebijak an antara Pemer intah Pusat dan Pemerint	Sinkronis asi kebijakan yang ada	Kolabor asi dengan perguru an tinggi dan Lembag a terkait	Kolabor asi antara Pemkot, Provinsi , lembag a pusat, dan	Peny usu nan road map kola bora tif sink ronis	Tercipta nya sinergi kebijak an lintas sektora l dan spasial yang	Dashbo ard kebijaka n terpadu penge mbang an PUD Keseni	Monitori ng efektivit as pelaksa naan Sinkron isasi kebijaka n dan

ah		(BRIN)	akadem	asi	menu	an,	evaluasi
Daerah		dalam	isi	kebij	kung	Hibura	tindak
		perumus	dalam	akan	pengem	n, dan	
		an	sinkroni	yang	banan	Rekrea	
		sinkroni	sasi	menduk		si	
		sasi		ung			

			kebijakan yang mendukung pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	kebijakan yang mendukung pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi		lanjutan perbaikan kebijakan yang mendukung pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
6 Penyelarasan dengan perkembangan global								
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Terdapat sosialisasi isu standar produk yang dihasilkan	Jejaring Kerjasama dengan Lembaga swasta dalam pelatihan isu standar kreativitas Kesenian, Hiburan, dan destinasi wisata yang dihasilkan	Kolaborasi pendampingan standar Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Peningkatan jumlah pelaku seni, budaya, dan pengelolaan wisata yang terstandarisasi	Peningkatan standar produk yang dihasilkan untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Peningkatan branding daya saing budaya, dan destinasi wisata skala nasional dan internasional	Evaluasi proses standarisasi dan kompetitif pasar internasional untuk pengembangan PUD Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

			n					
E	Penguat an kerjasa ma internasi onal	Terjalin nya kerjasa ma interna sional dalam penge mbang an PUD Keseni an, Hibura n, dan Rekreasi	Penguata n jejaring Kerjasa ma intern asiona l dalam rangk a penge mbang an PUD Keseni an, Hibur an, dan Rekre asi	Kolabor asi riset dan inovasi dengan kemitra an global dalam rangka penge mban gan PUD Keseni an, Hibur an, dan Rekre asi	Penguat an brandin g untuk peningk atan daya saing dan kreativita s seni budaya dan destinasi wisata daerah	Peni ngk atan pen guat an ekono mi lokal dari PUD Kesenia n, Hibura n, dan Rekrea si	Pengua tan kerjasa ma interna sional (misi pertuk aran seni dan buday a, serta promo si destin asi wisata lokal Kota Probol inggo)	Monev jejaring internasi onal yang menduk ung ekspansi PUD Kesenian , Hiburan, dan Rekreasi ke pasar luar negeri

Sumber: Hasil Analisa, 2025

BAB VII

PROGRAM ADIKTIF

Program Indikatif merupakan uraian rencana program yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan hasil elaborasi terhadap pengembangan produk-produk unggulan daerah dan permasalahan utama daerah yang dianalisis dengan kerangka ekosistem riset dan inovasi daerah. Program Indikatif merupakan Program Tematik yang dilakukan secara lintas perangkat daerah (*cross cutting programme*) melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah yang kontekstual terhadap masing-masing usulan PUD dan permasalahan utama daerah.

Program indikatif ini melibatkan perangkat daerah (PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal penggunaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program yang diusulkan dalam Program Indikatif tersebut, agar bisa sesuai dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Pada bab ini dijelaskan program apa yang dilaksanakan selama lima tahun (yang diharapkan akan diadopsi di dalam RPJMD), untuk mencapai kondisi akhir seperti yang diharapkan, baik untuk pengembangan produk-produk unggulan daerah maupun untuk mengatasi permasalahan utama daerah. Penentuan program indikatif disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (versi pemutakhiran 2026).

7.1 KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (*Evidence-Based Policy*)

Kebijakan berbasis bukti (***Evidence-Based Policy***) adalah pendekatan di mana keputusan kebijakan didasarkan pada bukti objektif yang ditetapkan secara ketat, bukan hanya pada asumsi, opini, atau tekanan politik melainkan dengan menekankan konsolidasi data, kolaborasi riset, perencanaan inovatif, dan penggunaan teknologi analitik prediktif.

Sebagaimana disampaikan dalam Peta Jalan Riset dan Inovasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, bahwa riset yang akan dijalankan selaras dengan

program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder dalam hal ini Bapperida dalam upaya menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Program kegiatan dalam upaya menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (***Evidence-Based Policy***) yang direncanakan diharapkan akan mendukung program kegiatan dalam penyelesaian isu permasalahan utama daerah yaitu Lemahnya ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah karena rendahnya dukungan Integrasi Ekonomi Digital dan penyelesaian masalah dalam pengembangan PUD Industri Pengolahan dan PUD kesenian, rekreasi, dan hiburan. Beberapa program kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (***Evidence-Based Policy***) yang dapat mendukung dalam penyelesaian isu permasalahan utama daerah dan penyelesaian masalah dalam pengembangan PUD Kota Probolinggo antara lain:

1. Program kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM IPTEK
2. Program kegiatan untuk inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual (KI)
3. Program kegiatan untuk pengelolaan kemitraan strategis
4. Program kegiatan untuk optimalisasi pemanfaatan sistem informasi
5. Program kegiatan untuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses perumusan kebijakan daerah
6. Program kegiatan untuk pemantauan database riset dan inovasi
7. Program kegiatan untuk peningkatan budaya riset dan inovasi pada ASN

Berikut merupakan penjabaran program indikatif dalam menangani permasalahan dalam upaya menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (***Evidence-Based Policy***) di Kota Probolinggo.

Tabel 7. 1 Indikasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah (Kebijakan dalam Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah yang Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)

No	Permasalahan	Program Indikatif	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Umum	Target					Sasaran Akhir	PD Penanggung Jawab	Rekomendasi Riset/ Kajian
						Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5			
1	Rendahnya kapasitas SDM riset dan inovasi daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah						Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Bapperida	Kajian Penguatan Kelembagaan pada SDM Perangkat Daerah melalui Inovasi Kolaborasi

		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (5.04.02)	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan n Kompetensi						Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Strategi Penguatan Kapasitas SDM Riset dan Inovasi Daerah melalui Corpu (Corporate University)
--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	---	--------	---

2	Lemahnya inventarisasi potensi KI di daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)						Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Bapperida	Riset Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Kota Probolinggo
---	---	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---

3	Lemahnya struktur pengelolaan kemitraan strategis untuk riset dan inovasi daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan Inovasi	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi						Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Bapperida	Kajian Kemitraan Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo
4	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi riset dan inovasi	Program Riset Dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan Inovasi	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Bapperida	Analisis Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kota Probolinggo
												Diskominfo	Kajian Rencana Strategis Sistem dan Teknologi

5	Lemahnya mekanisme penyusunan dan pemanfaatan hasil riset dalam proses perumusan kebijakan daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset						Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Bapperida	Kajian evaluasi kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti di Kota Probolinggo
6	Keterbatasan mekanisme pemantauan data secara real time/ isu aktual	Program Riset Dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi						Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Bapperida	Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Data Kelitbangan Kota Probolinggo

7	Kesenjangan budaya dan sistem pendukung inovasi	Program Riset Dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan Inovasi	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Bapperida	Integrasi AI dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah (Studi Kasus: Kota Probolinggo)
---	---	--	---------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	-----------	---

Sumber: Hasil Analisa, 2025

7.2 TEMATIK PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)

Pembahasan Indikasi Program riset dan inovasi pada produk unggulan daerah diuraikan menurut klasifikasi industri pengolahan dan klasifikasi industri kesenian, rekreasi, dan hiburan, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 2 Program Indikatif Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Produk Unggulan Daerah

No	Produk Unggulan Daerah	Elemen /sub element Ekosistem Riset dan Inovasi	Program Indikatif	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Umum	Target					Sasaran Akhir	PD Penanggung Jawab	Rekomendasi Riset/ Kajian
							Th	Th	Th	Th	Th			
							- 1	- 2	- 3	- 4	- 5			
1	Industri Pengolahan	Elemen 1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah												
		a. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan	Jumlah laporan penyelenggaran Rapat Koordinasi						Evaluasi sistem kebijakan riset pengolahan	Bapperida	Integrasi Kebijakan Riset dan Inovasi Industri

			(5.05.03)	Penerapan	kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					terintegrasi ke tata kelola pembangunan daerah		Pengolahan ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Studi Evaluatif Kota Probolinggo
		b. Penataan basis data Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan	Jumlah laporan fasilitasi dan Pembinaan					Updating basis data yg digunakan sebagai acuan	Bapperida	Analisis Kebutuhan dan Desain Sistem Basis Data Riset

			(5.05.03)		basis data Riset dan Inovasi	untuk penataan basis data Riset dan Inovasi						kebijakan		Industri Unggulan Daerah
		c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan Untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi						Evaluasi pengembangan Infrastruktur menjadi simpul inovasi dan PUD secara berkelanjutan	Bapperida	Studi Kelayakan Infrastruktur Penunjang Riset dan Inovasi Sektor Pengolahan

			Program perencanaan dan Pembangun an industri (3.31.02)	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan industri kabupaten/ko ta	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri						Evaluasi pengembang an Infrastruktur menjadi simpul inovasi dan PUD secara berkelanjuta n	Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja	Kajian Strategis Penyusunan Rencana Pengembang an Industri Unggulan Daerah
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---

			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (3.27.03)	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Pternakan	Jumlah prasarana pasca panen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)						Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pasca panen Pternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan	Kajian potensi pengolahan pangan hasil peternakan Kota Probolinggo
					Pengendalian Dan Pemanfaatan	Jumlah Prasarana pengolahan hasil						Terkendali dan termanfaatkannya prasarana	Dinas Ketahanan Pangan,	Kajian Eksistensi Mangga sebagai komoditas
					Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Hortikultura Yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)						pengolahan hasil Hortikultura	Pertanian, Perikanan	Hortikultura Unggulan di Kota Probolinggo
					Pengendalian dan	Jumlah prasarana						Terkendali dan termanfaatkannya	Dinas Ketahanan	Kajian Studi Pemanfaatan Alat

					Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)						prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Pangan, Pertanian, Perikanan	Extruder untuk Pengolahan Jagung di Kelurahan Kedunggaleng
		d. Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan Pembinaan Untuk Penyediaan anggaran Riset dan inovasi (skema insentif bagi innovator)						Monev pemanfaatan Anggaran riset dan inovasi untuk Pembangunan PUD Industri Pengolahan	Bapperida	Studi Kelayakan Infrastruktur Simpul Inovasi Sektor Pengolahan

			Program pengembangan iklim penanaman modal (2.18.02)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Prosestase Dokumen Potensi Penanaman Modal Yang Siap ditawarkan						Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Kajian IPRO dan Masterplan Bolingo Night Paradise Kota Probolinggo
		e. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan n	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan						Monev pelaksanaan perlindungan hukum dan daya saing global	Bapperida	Evaluasi Mekanisme Perlindungan KI dan Daya Saing Produk Inovasi Industri Pengolahan

					intelektual	perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)								
		Element 2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi												
		a. Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah						Evaluasi kolaboratif riset & inovasi daerah yang aktif dan berkesinambungan	Bapperida	Merancang peta kolaborasi lintas sektor (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat) dalam mendukung inovasi PUD.

			Program pengembangan UMKM (2.17.08)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi						Evaluasi kolaboratif riset & inovasi daerah yang aktif dan berkesinambungan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Evaluasi kolaboratif riset & inovasi daerah yang aktif dan berkesinambungan
		b. Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk						Evaluasi sarana riset dan inovasi menjadi tulang punggung	Bapperida	Evaluasi Sarana Teknologi sebagai Pendukung Riset

					pendukung Riset dan Inovasi di daerah	penguatan kemitraan antar kelembagaan						layanan teknologi daerah		Inovatif Industri Daerah
		Element 3. Kemitraan Riset dan Inovasi												
		a. Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian						Evaluasi kemitraan riset dan inovasi menjadi model sistemik dalam pengembangan PUD Industri Pengolahan	Bapperida	Merancang pola kemitraan dengan Sistemik antara Pemerintah, Industri, dan Akademisi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan

					penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah								industri.
			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha						Evaluasi kemitraan riset dan inovasi menjadi model sistemik dalam	Dinas Koperasi, U KM dan Perdagangan	Model Kemitraan Sistemik Berbasis Riset dan Inovasi untuk

			(UMKM) (2.17.07)	, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Mikro						pengembangan PUD Industri Pengolahan		Peningkatan Daya Saing UMKM Kota Probolinggo
		b. Peningkatan difusi inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi						Evaluasi difusi inovasi produktivitas sektor pengolahan	Bapperida	Studi Difusi Inovasi Teknologi dan Implikasinya terhadap Produktivitas Industri

						Inovasi								
		c. Peningkat an praktik baik dan diseminasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaa n untuk peningkat an praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminas i hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkata n praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku						Monev pelaksanaan praktik baik menjadi referensi dalam kebijakan, pelatihan, dan inovasi daerah	Bepperida	Kajian Praktik Baik Riset dan Inovasi sebagai Referensi Pengembanga n Daerah

					inovasi	inovasi									
--	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (3.25.06)	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)						Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan	Studi efektifitas mesin asap ikan dengan bahan baku batok dan Gas elpiji terhadap daya simpan ikan asap sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk
		Element 4. Budaya Riset dan Inovasi												
		a. Promosi dan kampanye inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye						Evaluasi capaian jangkauan promosi	Bepperida	Kajian Efektivitas Strategi Promosi dan Kampanye Inovasi

											mendorong lahirnya inovasi baru		Inovasi
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	---------

		c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset					Startup industry pengolahan tumbuh sebagai tulang punggung industri kreatif daerah	• Bapperida	Identifikasi Kebutuhan Ekosistem Inovasi bagi Perusahaan Pemula Berbasis Riset di Sektor Industri Pengolahan
		d. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi					Kearifan lokal menjadi dasar inovasi dan pengembangan produk baru	Bapperida	Inventarisasi Pengetahuan Lokal dan Peluang Komersialisasinya dalam Inovasi Produk

[illegible]

Element 5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

		a. Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau mengatasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau						Monev kegiatan riset menjadi basis perencanaan dan inovasi berkelanjutan daerah	Bapperida	Studi Integrasi Kegiatan Riset sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Daerah
--	--	--	--	---------------------	---	--	--	--	--	--	--	---	-----------	---

					permasalahan daerah	mengatasi permasalahan daerah									
--	--	--	--	--	---------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		b. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah						Evaluasi kinerja klaster dan dukungan ekspansi	Bapperida	Evaluasi Kinerja Klaster Inovasi Industri Pengolahan dan Strategi Skalabilitasnya
		c. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah						Monitoring efektivitas pelaksanaan dan tindak lanjut perbaikan kebijakan pendukung	Bapperida	Analisis Kesesuaian Regulasi Riset dan Inovasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

					Pemerintah Daerah	Pusat dan Pemerintah Daerah								
		Element 6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global												
		a. Peningkatan kepedulian isu-isu internasional	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan						Evaluasi standar global dan kompetitif pasar internasional untuk	Bapperida	Kajian Adaptasi Standar Global pada Produk Unggulan Industri Pengolahan

					internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					pengembangan produk unggulan daerah		
			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (2.17.07)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					Evaluasi standar global dan kompetitif pasar internasional untuk pengembangan produk unggulan daerah	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan	Pemetaan Kesiapan Usaha Mikro terhadap Standar Global dan Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah di Pasar

				Pemangku Kepentingan										Internasional
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (3.31.02)	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Integrasi Standarisasi Produk dalam Strategi Daya Saing Produk Unggulan Daerah untuk Pasar Internasional	
			Program Sediaan	Penerbitan Sertifikat	Pengendalian dan	Jumlah Dokumen Hasil						Terlaksananya Pengendalian	Dinas Kesehatan	Analisis Tindak

			Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak						dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pengendalian Penduduk dan	Lanjut Pengawasan P-IRT dalam Menjamin Keamanan Produk
--	--	--	-------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------	--

			Minuman (1.02.04)	Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Keluarga Berencana	Pangan Industri Pengolahan
--	--	--	----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	----------------------------------

				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan					Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Post Market terhadap Produk Pangan Industri Pengolahan yang Beredar di Pasaran
		b. Penguatan kerjasama	Program Riset dan Inovasi	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan	Jumlah laporan fasilitasi dan					Monev jejaring internasional	• Bapperida	Evaluasi Kesiapan dan

		internasional	Daerah (5.05.03)		untuk penguatan kerjasama internasional	pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional						yang mendukung ekspansi PUD Industri pengolahan ke pasar luar negeri		Strategi Ekspansi Produk Unggulan Daerah Sektor Industri pegolahan ke pasar internasional melalui penguatan jejaring inovasi global
--	--	---------------	---------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

			Program pengembangan ekspor (3.30.05)	Penyelenggara an Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal						Monev jejaring internasional yang mendukung ekspansi PUD industri pengolahan ke pasar luar negeri	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Evaluasi Efektivitas Jejaring Internasional dalam Mendorong Ekspansi Produk Unggulan Daerah ke Pasar Ekspor melalui Pameran dan Misi Dagang
					Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang						Monev jejaring internasional yang mendukung ekspansi	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Peran Strategis Pameran Dagang Lokal dalam

						Produk Ekspor Unggulan						PUD industri pengolaha n ke pasar luar negeri		Memperkua t Jejaring Internasion al Produk Unggulan Daerah Sektor Industri Pengolahan
2	Indus tri Kese nian, Hibur an, dan Rekrea si	Elemen 1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah												
		a. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di	Program Riset dan	Penelitian, Pengembanga n, Pengkajian,	Koordinasi dan sinkronisasi	pelaksanaan kebijakan di bidang							Bapperid a	Analisis Kelembaga an dan

		daerah	Inovasi Daerah (5.05.03)	dan Penerapan	pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah
--	--	--------	--------------------------	---------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		b. Penataan basis data Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi					Penguatan dashboard seni budaya sebagai jejaring promosi inovasi	Bapperida	Pengembangan Sistem Dashboard Seni Budaya sebagai Basis Data dan Jejaring Promosi Inovasi Daerah Kota Probolinggo
												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Integrasi Data Kesenian dan Kebudayaan Daerah dalam Sistem Dashboard Promosi Inovasi Berbasis Digital

		c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi						Penguatan ruang kreatif sebagai jaringan riset dan inovasi seni budaya lokal	Bapperida	Strategi Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi Seni Budaya melalui Optimalisasi Ruang Kreatif di Kota Probolinggo
													Dinas Pendidikan	Pengembangan Ruang Kreatif sebagai Pusat

													dan Kebudayaan	Pembelajaran dan Inovasi Budaya Lokal Berbasis Kearifan Tradisional dan Teknologi
		d. Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)						Evaluasi dampak dan manfaat anggaran riset dan inovasi industri kesenian, hiburan, dan rekerasi	Bapperida	Evaluasi Efektivitas Skema Pendanaan Riset dan Inovasi bagi Industri Kreatif di Kota Probolinggo

			Program pengembangan iklim penanaman modal (2.18.02)	Pembuatn Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Prosestase Dokumen Potensi Penanaman Modal Yang Siap ditawarkan						Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	DPMPTSP	Kajian IPRO dan Masterplan Bolinggo Night Paradise Kota Probolinggo
		e. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatn kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI						Evaluasi sistem perlindungan kekayaan seni, budaya berbasis inovasi hukum	Bapperida	Evaluasi Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual Seni dan Budaya di Kota Probolinggo: Kajian Inovasi Hukum dan Kebijakan Daerah

		Element 2 Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi												
		a. Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah						Evaluasi ekosistem kolaboratif seni budaya daerah terbentuk dan berkelanjutan	Bapperida	Evaluasi Ekosistem Kolaboratif Riset dan Inovasi dalam Pengembangan Seni Budaya di Kota Probolinggo
			Program pengembangan kebudayaan (2.22.02)	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						Evaluasi ekosistem kolaboratif seni budaya daerah terbentuk dan berkelanjutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Evaluasi Ekosistem Kolaboratif dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kota Probolinggo

				Kabupaten / Kota										
			Program pengembangan kesenian tradisional (2.22.03)	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat at Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)						Evaluasi ekosistem kolaboratif seni budaya daerah terbentuk dan berkelanjutan	Dinas Pendidik an dan Kebuday aan	Evaluasi Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Penguatan SDM Kesenian Tradisional di Kota Probolinggo
		b. Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invens i dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar						Evaluasi sarana riset yang dikelola komunitas dan mendukung	Bapperid a	Evaluasi Sarana Pendukung Riset Komunitas untuk Penguatan Produktivitas

					daerah	kelembagaan						produktivit as seni budaya		Seni Budaya di Kota Probolinggo
--	--	--	--	--	--------	-------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	---------------------------------------

Element 3. Kemitraan Riset dan Inovasi													
		a. Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah					Evaluasi jaringan kemitraan seni budaya yang kuat dan adaptif	• Bapperida	Analisis Penguatan Jaringan Kemitraan Lembaga Riset dan Komunitas Seni Budaya di Kota Probolinggo
												• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Evaluasi Kolaborasi Lintas Lembaga dalam Penguatan Pendidikan, Riset, dan Ekspresi Budaya Lokal

			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					Evaluasi jaringan kemitraan seni budaya yang kuat dan adaptif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Strategi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif Berbasis Kolaborasi Pemerintah, Industri, dan Komunitas
		b. Peningkatan difusi inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan Untuk Peningkatan difusi Inovasi					Evaluasi pelaksanaan difusi inovasi pelaku Peningkatan difusi Inovasi	- Bapperida - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Evaluasi Dampak Program Difusi Inovasi terhadap Perluasan Jangkauan Produk Budaya

												• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kajian Efektivitas Kurikulum Inovatif dalam Pendidikan Seni Lokal
		c. Peningkatan praktik baik dan diseminasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku					Evaluasi dan penguatan jejaring diseminasi	Bepperida	Studi Peran Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Transformasi Praktik Baik menjadi Inovasi Publik

						inovasi.								
		Element 4. Budaya Riset dan Inovasi												
		a. Promosi dan kampanye inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						Rebranding industri kesenian, hiburan, dan rekreasi menuju pasar nasional-internasional	- Bapperida - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kajian Strategi Promosi Inovasi Daerah Berbasis Kesenian dan Budaya Lokal Kajian Kesiapan SDM Seni dan Budaya dalam

														Menghadapi Rebranding Industri Kreatif
		b. Apresiasi prestasi inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan Pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						Agenda tahunan festival lomba riset dan inovasi industri kesenian, hiburan, dan rekreasi	• Bapperida	Evaluasi Dampak Ekonomi dan Sosial dari Festival Inovasi Berbasis Seni dan Budaya

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		d. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat					Integrasi kearifan lokal industri kesenian, hiburan, dan rekreasi ke platform edukasi digital	Bapperida	Kajian Inventarisasi Pengetahuan Tradisional dan Teknologi Lokal pada Industri Seni, Hiburan, dan Rekreasi
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis Pendampingan Ekonomi Kreatif					Integrasi kearifan lokal industri kesenian, hiburan, dan rekreasi ke platform	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kajian Integrasi Kearifan Lokal ke dalam Kurikulum dan Media Pengembangan Digital

					Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha					Integrasi kearifan lokal industri kesenian, hiburan, dan rekreasi ke platform edukasi digital	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kajian Model Pembelajaran Interaktif untuk Calon Pelaku Usaha Seni Budaya:
												Diskominfo	Studi Media dan Strategi Komunikasi Digital Budaya Lokal di Era Industri 4.0
		Element 5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah											
		a. Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan					Evaluasi pelaksanaan riset dan inovasi seni budaya menjadi instrumen	Bapperida	Analisis Integratif Riset dan Inovasi Seni Budaya sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan

					daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan Daerah					perencanaan pembangunan industri kesenian, hiburan, dan rekreasi		Industri Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi di Kota Probolinggo
		b. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan Untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk	untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau					Evaluasi klaster industri kesenian, hiburan, dan rekreasi yang terbentuk	• Bapperida	Analisis Kelembagaan dan Dinamika Klaster Industri Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

					unggulan daerah	mengatasi permasalahan daerah								sebagai Produk Unggulan Daerah Kota Probolinggo
--	--	--	--	--	-----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penguatan Peran Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pengembangan Kluster Inovasi Industri Seni dan Rekreasi di Kota Probolinggo
		c. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah						Monitoring efektivitas sinkronisasi dan identifikasi gap kebijakan industri kesenian,	Bapperida	Sinkronisasi Kebijakan Industri Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi antara Pemerintah Pusat dan

					Daerah	Pusat dan Pemerintah Daerah						hiburan, dan rekreasi		Pemerintah Daerah: Studi Monitoring dan Identifikasi Kesenjangan
		Element 6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global												
		a. Peningkatan kepedulian isu-isu internasional	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional Yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu Internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di						Evaluasi branding image seni dan budaya lokal terhadap isu global	Bapperida	Branding Seni dan Budaya Lokal dalam Konteks Isu Global: Strategi Adaptif Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

					Daerah	daerah									
--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Program Pengembangan Kesenian Tradisional (2.22.03)	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi					Evaluasi branding image seni dan budaya lokal terhadap isu global	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Standardisasi Kompetensi SDM Kesenian Tradisional sebagai Strategi Branding Seni Budaya Lokal dalam Isu Global
		b. Penguatan kerjasama internasional	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional					Monev pelaksanaan forum industri kesenian, hiburan, dan rekreasi dipasar internasional	• Bapperida	Evaluasi Strategi dan Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Daya Saing Industri Kesenian dan

Sumber: Hasil Analisa, 2025

7.3 TEMATIK PERMASALAHAN UTAMA DAERAH

Pembahasan Indikasi Program riset dan inovasi diuraikan menurut permasalahan utama daerah, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 3 Program Indikatif Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Untuk Permasalahan Utama Daerah (Lemahnya Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Daerah karena Rendahnya Dukungan Integrasi Ekonomi Digital)

No	Permasalahan Utama Daerah	Elemen /sub element Ekosistem Riset dan Inovasi	Program Indikatif	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Umum	Target					Sasaran Akhir	PD Penanggung Jawab	Rekomendasi Riset / Kajian
							Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5			
1	Lemahnya ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah karena rendahnya dukungan Integrasi Ekonomi Digital													
		Elemen 1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah												
		a. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan Pembinaan untuk reformasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan						Monev pemanfaatan hasil riset dalam	Bapperida	Evaluasi Efektivitas Fasilitasi dan Pembinaan BRIDA

		daerah	(5.05.03)		kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah						kebijakan pembangunan daerah Kota Probolinggo		dalam Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah
			Pengembangan iklim Penanaman Modal (2.18.02)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Dokumen Potensi Penanaman Modal Yang Siap ditawarkan						Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Kajian Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Probolinggo

				Penetapan Pemberian Fasilitas/Inse ntif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Inse ntif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Fasilitas/Inse ntif Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan						Ditetapkanny a Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Inse ntif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Kajian Skema Fasilitasi, insentif dan kemudahan untuk Penanam Modal
												Ditetapkanny a	DPMPTSP	Evaluasi Efektivitas

												Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman modal		Kebijakan Insentif Penanaman Modal untuk Sektor Unggulan di Kota Probolinggo
		b. Penataan basis data Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi						Evaluasi dan updating data Riset dan Inovasi	Bapperida	Integrasi Data Riset- Inovasi Daerah melalui Data Collaboratives

			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (2.17.07)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata						Evaluasi dan updating data Riset dan Inovasi	Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan	Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Basis Data Usaha Mikro di Kota Probolinggo
			Program pengelolaan aplikasi informatika (2.16.03)	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan						Evaluasi dan updating data Riset dan Inovasi	Diskominfo	Model Koordinasi Antarlembaga dalam Pengelolaan

				Kabupaten/Kota		berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah								Data Riset- Inovasi Daerah di Kota Probolinggo
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (5.02.04)	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						Terlaksanan ya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Analisis Penentuan Target Pendapatan (PBB dan BPHTB) berdasarkan Potensi Ekonomi Makro dan Mikro
		c. Pengembangan infrastruktur	Program Riset dan Inovasi Daerah	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk	Jumlah laporan fasilitasi dan						Evaluasi pemanfaatan infrastruktur	Bapperida	Desain Infrastruktur Dasar Riset

		ur dasar Riset dan Inovasi	(5.05.03)		pengemban gan infrastrukt r dasar Riset dan Inovasi	pembinaan untuk pengemban gan infrastrukt r dasar Riset dan Inovasi						r dasar Riset dan Inovasi		Daerah Berbasis Kolaborasi Multi- Stakehold er
			Program Peningkat an Sarana Distribusi Perdagang an (3.30.03)	Pembanguna n dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganga n	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganga n						Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganga n	Dinas Koperasi,U KM dan Perdagang an	Analisis Dampak Kerjasama Pemanfaata n (KSP) Pemerintah - Swasta/ Investor dalam Pengelolaan Distribusi Perdagangan

			Program perencanaaan dan pembangunan industri (3.31.02)	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					Evaluasi pemanfaatan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Industri: Perspektif Cross- Impact Analisis di sektor ekonomi lokal Kota Probolinggo
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

		d. Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)						Monev pemanfaatan anggaran riset dan inovasi	Bapperida	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Riset dan Inovasi pada Bapperida Kota Probolinggo
			Program pengembangan iklim penanaman modal (2.18.02)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Prosentase Dokumen Potensi Penanaman Modal Yang Siap ditawarkan						Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Kajian IPRO dan Masterplan Bolinggo Night Paradise Kota Probolinggo

		e. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)						Evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Bapperida	Literasi Kekayaan Intellectual dan Pendaftaran Merek Produk Tradisional Digital: Studi pada UMKM PUD Kota Probolinggo
--	--	--	--	---------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	-----------	---

			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (2.17.07)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi					Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Model Tata Kelola Kekayaan Intelektual yang Menguntungkan bagi Usaha Kecil
		Element 2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi											
		a. Penguatan kolaborasi Riset dan	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan					Evaluasi pelaksanaan kolaborasi pelaku	Bapperida	Collaborative Governance dalam Penguatan

		Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan			kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah					ekonomi inklusif		Kelembagaan Riset Daerah studi kasus Kota Probolinggo
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (7.01.03)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Evaluasi pelaksanaan kolaborasi pelaku ekonomi inklusif	5 Kecamatan	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan kolaborasi Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo

			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (2.07.03)	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n						Evaluasi pelaksanaan kolaborasi pelaku ekonomi inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Model Koordinasi Lintas OPD dan Sektor Swasta dalam Penyediaan Instruktur Pelatihan Kerja di Kota Probolinggo
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---

				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n						Evaluasi pelaksanaan kolaborasi pelaku ekonomi inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Analisis Ketersediaan Pasar Kerja dan Kebutuhan Keahlian di Kota Probolinggo: Tren Sektor Pekerjaan dan Keterampilan yang Dibutuhkan
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya						Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kota Probolinggo

						Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah								(2025- 2029): Analisis Sektor-Sektor Potensial dan Jabatan yang dibutuhkan
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			Program pengembangan UMKM (2.17.08)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi						Evaluasi pelaksanaan kolaborasi pelaku ekonomi inklusif	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan	Strategi Pemasaran UMKM di Era Industri 4.0 untuk meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Kota Probolinggo
			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (3.26.05)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						Evaluasi pelaksanaan kolaborasi pelaku ekonomi inklusif	Dinas Kepemudaan, olahraga, dan pariwisata	Peningkatan Kompetensi Manajemen SDM UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif: Studi Implementasi di UMKM Lokal

					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						Evaluasi pelaksanaan kolaborasi pelaku ekonomi inklusif	Dinas Kepemudaan, olahraga, dan pariwisata	Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo Berbasis Potensi Lokal
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

					Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata						Evaluasi pelaksanaan kolaborasi pelaku ekonomi inklusif	Dinas Kepemudaan, olahraga, dan pariwisata	Peran Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Realisasi Pariwisata Berkelanjutan di Kota Probolinggo
		b. Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan						Monev pelaksanaan penyediaan sarana pendukung RIDA	Bapperida	Pemetaan Kebutuhan Sarana Riset dan Teknologi di Kota Probolinggo: Integrasi Infrastruktur Hard dan Software Inovasi

			Program pengelolaan aplikasi informatika (2.16.03)	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	• Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE					Monev pelaksanaan penyediaan sarana pendukung RIDA	Diskominfo	Peran Workshop dan Forum Diskusi dalam Meningkatkan Literasi SPBE di Kota Probolinggo
					Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan					Monev pelaksanaan penyediaan sarana pendukung RIDA	Diskominfo	Peran Stakeholder dalam Koordinasi Pengembangan Aplikasi Khusus SPBE di Pemerintah Daerah di Kota Probolinggo

					pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	dan pengembangan aplikasi SPBE								
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

					Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas						Monev pelaksanaan penyediaan sarana pendukung RIDA	Diskominfo	Evaluasi Tata Kelola Smart City di Kota Probolinggo: Dari Desain Institusional hingga Proses Kolaboratif
		Element 3. Kemitraan Riset dan Inovasi												
		a. Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu						Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha	Bapperida	Strategi Sinergi LPPM dan LLDIKTI dalam Meningkatkan Mutu dan Dampak Riset serta Pengabdian Regional terhadap kegiatan

					dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah								penelitan oleh Pemerintah Daerah.
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (2.17.07)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro					Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan	Model Kemitraan Usaha Mikro untuk Pemberdayaan Ekonomi Inklusif di Kota Probolinggo
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro					Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Analisa Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Pasar Wonoasih

	b. Peningkatan difusi inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi					Evaluasi hasil difusi inovasi terhadap daya saing ekonomi inklusif	Bapperida	Pendekatan Triple Helix untuk Difusi Teknologi Daerah
		Program perencanaan dan pembangunan industri (3.31.02)	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Analisis Kebutuhan Digitalisasi IKM di Kota Probolinggo

		c. Peningkatan praktik baik dan diseminasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.					Monev pelaksanaan praktik baik terhadap peningkatan daya saing ekonomi inklusif	Bepperida	Fasilitasi Diseminasi Riset dan Inovasi melalui Mekanisme Pembinaan dan Replikasi Praktik Baik
--	--	--	--	---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-----------	---

			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (3.25.06)	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)					Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan	Studi efektifitas mesin asap ikan dengan bahan baku batok dan Gas elpiji terhadap daya simpan ikan asap sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk
		Element 4. Budaya Riset dan Inovasi											
		a. Promosi dan kampanye inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk					Monev hasil pelaksanaan kegiatan promosi	Bepperida	Evaluasi Efektivitas Kampanye Kreatif dalam Mempromosikan Inovasi Pelayanan

						promosi dan kampanye Inovasi								Publik di Kota Probolinggo
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

				Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi					Monev hasil pelaksanaan kegiatan promosi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Strategi Branding Terpadu Produk Unggulan Kota Probolinggo Berbasis Kearifan Lokal dan Cerita Daerah (Place-based Branding)
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (3.25.06)	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)					Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan	Kajian strategi pengelolaan pasar ikan modern di Mayangan Kota Probolinggo.

			Program pemasaran pariwisata (3.26.03)	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				Monev hasil pelaksanaan kegiatan promosi	Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata	Strategi <i>Integrated Marketing Communication</i> (IMC) di Media Cetak dan Digital untuk Destination Branding ‘Kota Probolinggo’
					Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai Mitra pemerintah yang dibentuk				Monev hasil pelaksanaan kegiatan promosi	Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata	Analisis Peran BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) sebagai Lembaga Swasta Mandiri dalam Meningkatkan Citra Destinasi Pariwisata Kota

[illegible]

			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (2.17.07)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi						Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Analisis Pengaruh Pembangunan Gerai UMKM Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota probolinngo terhadap Pertumbuhan UMKM Lokal Kota Probolinggo
		b. Apresiasi prestasi inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk						Evaluasi metode apresiasi inovasi	Bapperida	Peran Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Mengelola Apresiasi Inovasi: Kajian

					Inovasi	apresiasi prestasi Inovasi								Penataan Basis Data dan Dukungan Infrastruktur Riset Daerah Kota Probolinggo
		c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset						Monev pelaksanaan pengembangan usaha pemula sektor ekonomi inklusif dan digital	Bapperida	Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Start-up Riset Lokal melalui Kolaborasi Skema Pendanaan BRIN-Inkubator Kampus/ Sekolah.

		d. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat						Evaluasi pelaksanaan pengembangan, dan perlindungan kearifan lokal	Bapperida	Model Pembinaan Hilirisasi dan Perlindungan Pengetahuan Lokal menjadi Inovasi Usaha Mikro: Pendekatan IPTEK-Inkubator di Kota Probolinggo
		Element 5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah												

		a. Prakarsa pengemba ngan Riset dan Inovasi di daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengemban gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarka n kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalah an daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengemba ngan Riset dan Inovasi di daerah berdasark an kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau						Evaluasi hasil pelaksana an prakarsa riset dan inovasi untuk peningkata n daya saing ekonomi inklusif dan integrasi ekonomi digital	Bapperid a	Model Fasilitasi dan Pembinaan Riset Inovatif Berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Pengembangan Produk Unggulan Lokal
--	--	---	--	------------------------	---	---	--	--	--	--	--	---	---------------	---

						mengatasi permasala han daerah									
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		b. Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah					Monev pengembangan kluster yang terbentuk	Bapperida	Strategi Pengembangan Kluster Inovasi Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan
		c. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah					Monev pelaksanaan implementasi kebijakan pendukung riset dan inovasi daerah	Bapperida	Integrasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mendukung Riset dan Inovasi untuk

					Pemerintah Daerah	Pusat dan Pemerintah Daerah								Produk Unggulan di Kota Probolinggo
		Element 6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global												
		a. Peningkatan kepedulian isu-isu internasional	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan						Evaluasi pelaksanaan standarisasi produk usaha	Bapperida	Model Pembinaan Triple/Quintuple Helix Berbasis Isu Internasional untuk Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah di Kota Probolinggo

					Standardisasi Usaha Mikro	Terfasilitasi					produk usaha	Perdagangan	Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (3.31.02)	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Integrasi Standarisasi Produk dalam Strategi Daya Saing Produk Unggulan Daerah untuk Pasar Internasional

			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (1.02.04)	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman					Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Analisis Tindak Lanjut Pengawasan P-IRT dalam Menjamin Keamanan Produk Pangan guna mendukung pengembangan Potensi Lokal Daerah
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					oleh Industri Rumah Tangga	Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						oleh Industri Rumah Tangga		
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka						Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Post Market terhadap Produk Pangan guna mendukung pengembangan Potensi Lokal Daerah

						Tindak Lanjut Pengawasan									
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	b. Penguatan kerjasama internasional	Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03)	Invensi dan inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional					Monev pelaksanaan Kerjasama internasional	Bapperida	Model Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Membangun Konsorsium Internasional Perguruan Tinggi: Studi Kasus Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo
		Program pemasaran pariwisata (3.26.03)	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					Monev pelaksanaan Kerjasama internasional	Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata	Konsep Smart Tourism melalui PPP (<i>Public Private Partnership</i>) : Studi Fasilitasi Kemitraan Publik– Swasta– Akademisi di Destinasi

											Terpilih di Kota Probolinggo
		Program pengembangan ekspor (3.30.05)	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				Monev pelaksanaan Kerjasama internasional	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan	Kajian Strategi Pemasaran melalui Pameran Dagang Lokal untuk Meningkatkan Penjualan Produk UMKM di Kota Probolinggo
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi				Monev pelaksanaan Kerjasama internasional	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan	Analisis Efektivitas Misi Dagang dalam Meningkatkan

					dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan							Ekspor Potensi Lokal Kota Probolinggo
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Sumber: Hasil Analisa, 2025

BAB VIII

PENUTUP

8.1 KESIMPULAN

Penyusunan dokumen Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030, yakni untuk memberikan arahan pelaksanaan Program Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi dan daya saing daerah. Berikut kesimpulan Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030:

1. Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi Di Kota Probolinggo

a. Usulan Produk Unggulan Daerah (PUD)

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025, telah ditetapkan produk unggulan daerah Kota Probolinggo Tahun 2025. Diklasifikasi menjadi dua Produk Unggulan Daerah berdasarkan sektor unggulannya yaitu Industri Pengolahan (C) dan industri Kesenian, hiburan, rekreasi (R).

b. Usulan Permasalahan Utama Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan daerah dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 menggunakan metode analisis USG (*urgency, seriousness, growth*), prioritas utama pembangunan Kota Probolinggo yaitu pada pengembangan Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital. Sehingga dapat diturunkan bahwa prioritas permasalahan utama daerah Kota Probolinggo adalah Lemahnya ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah karena rendahnya dukungan Integrasi Ekonomi Digital.

c. Kemampuan Melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence-based policy*)

pada lembaga riset dan perguruan tinggi yang berada di wilayah Kota Probolinggo sebagai mitra Pemerintah Daerah, termasuk SDM yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Probolinggo. Sampai dengan tahun 2024, jumlah pejabat fungsional sebanyak 63. Infrastruktur riset dan inovasi di Kota Probolinggo berupa Laboratorium Kesehatan Ikan, KWSP (Kawasan Wisata Studi Pertanian), Demplot Pertanian Organik, Museum Kota Probolinggo Museum dr Saleh, UPTD. Laboratorium Lingkungan, RTH Publik, Rumah Kemasan Balai Benih Ikan (BBI), Gedung Kesenian Kota Probolinggo, Pusat Daur Ulang (PDU). Pada Tahun 2024, Bapperida Kota Probolinggo telah melakukan kajian sebanyak 13 kajian. Skor kematangan IID

Kota Probolinggo 66,38 masuk kategori Sangat Inovatif. Inovasi Daerah Kota Probolinggo diatur dalam Perwali Kota Probolinggo No 37 Tahun 2024. Anggaran kegiatan riset inovasi pada Tahun 2024 adalah 0,33% dari APBD Kota Probolinggo Tahun 2024.

- Kelembagaan IPTEK Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo
- Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Probolinggo dan atau Bapperida dengan Universitas atau Perguruan Tinggi cenderung mengalami trend peningkatan dimana pada Tahun 2024 sebanyak 21 kerjasama telah dilakukan.

d. Tema Prioritas

- Berdasarkan permasalahan utama pada PUD Kota Probolinggo yang diusulkan maka dirumuskan tema prioritas PUD Kota Probolinggo adalah **“Penguatan ekonomi lokal melalui perbaikan infrastruktur logistik, peningkatan inovasi dan daya saing produk unggulan daerah”**.
- Berdasarkan permasalahan utama daerah Kota Probolinggo yang diusulkan maka dirumuskan tematik untuk permasalahan utama riset dan inovasi daerah

Kota Probolinggo adalah “Optimalisasi Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Untuk Peningkatan Potensi Unggulan dan Mengatasi Permasalahan Mendasar terkait Kapabilitas serta Infrastruktur”

- Tema induk RIDA Kota Probolinggo adalah **“Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Sektor Unggulan serta Agroindustri dan Industri Kreatif Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan”**.

e. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah saat ini pada setiap PUD yang diusulkan.

- PUD Industri Pengolahan

Sebagian besar pemilik usaha belum mengetahui terkait kebijakan yang mendukung dalam pengembangan UMKM di Kota Probolinggo, Kolaborasi riset dan inovasi para pengusaha dilakukan dengan pihak swasta dan perguruan tinggi, Pada beberapa produk unggulan daerah seperti industri olahan ikan, industri batik, industri makanan PIA dan industri sulaman border sudah terjalin kemitraan baik dengan pihak swasta , Budaya riset dan inovasi belum berjalan dengan optimal, Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah belum optimal, Pemerintah Kota Probolinggo perlu melakukan kerjasama dengan untuk menawarkan peluang investasi di Kota Probolinggo

untuk para calon investor internasional.

- PUD industri kesenian, hiburan, dan rekreasi

Kebijakan pemerintah Kota Probolinggo yang khusus mengatur terkait pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah belum terakomodir, Kapasitas kelembagaan riset dan inovasi dalam melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun swasta masih belum optimal, Kemitraan riset dan inovasi masih belum terjadi, Budaya riset dan inovasi belum berjalan dengan baik, Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah belum optimal, Pemerintah Kota Probolinggo perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta maupun investor dalam dan luar negeri yang aktif menawarkan peluang investasi.

- f. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah saat ini pada setiap Permasalahan Utama Daerah yang diusulkan belum ada integrasi kebijakan lintas sektor (ekonomi, riset, UMKM, digitalisasi) secara menyeluruh, Wilayah-wilayah di pinggiran Kota Probolinggo atau sektor- sektor berbasis sumber daya lokal belum seluruhnya terjangkau internet cepat atau sistem digital pendukung, Tidak adanya platform digital yang menghubungkan pelaku riset, Pelaku usaha lokal belum terbiasa memanfaatkan platform digital, terbatasnya data real-time dan potensi kolaborasi digital dengan akademisi atau inkubator inovasi.

2. Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo

Hasil analisis terhadap tantangan dan peluang riset dan inovasi di Kota Probolinggo antara lain Keterbatasan Sumber Daya Finansial, Keterbatasan Keterampilan dan Keahlian (Daya Saing Sumber Daya Manusia), Keterbatasan Forecasting Terhadap Riset dan Inovasi di Masa Depan, Rendahnya Tingkat Adopsi Inovasi, dan Tantangan Keberlanjutan. Namun, di balik tantangan tersebut, ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan antara lain Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian, Jumlah sumber daya manusia, Pendanaan dari sumber-sumber alternatif, dan Regulasi yang mendukung riset dan inovasi.

3. Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo

Hasil analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di Kota Probolinggo menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan pembangunan daerah sudah mulai mengakomodasi pentingnya riset dan inovasi, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu segera diatasi.

Kesenjangan tersebut terlihat dari belum optimalnya integrasi data riset dengan perencanaan pembangunan, minimnya kolaborasi antar pemangku kepentingan (seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku

usaha), serta lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Selain itu, dukungan anggaran untuk riset dan inovasi masih rendah, dan infrastruktur pendukung seperti pusat inovasi atau laboratorium belum memadai. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan ekosistem riset yang lebih terpadu, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan dana riset yang berkelanjutan, serta sistem data dan perencanaan yang terintegrasi agar kebijakan yang diambil benar-benar relevan, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

4. Strategi Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo
 - a. Strategi yang dilakukan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yaitu dengan Peningkatan Kapasitas SDM, Penguatan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual Daerah, Penguatan Ekosistem Kolaborasi (Quadruple Helix), Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Data Terpadu, Skema Pendanaan Riset Kebijakan, Pemanfaatan hasil riset, dan Penguatan Kelembagaan dan Regulasi.
 - b. Strategi pengembangan produk unggulan daerah (PUD) industri pengolahan antara lain:
 - Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah melalui Sosialisasi kebijakan pendukung riset dan inovasi daerah pada industri pengolahan, Integrasi data riset dan inovasi untuk industri pengolahan, Pengembangan sentra produksi industri pengolahan secara terpadu, Skema pendanaan untuk riset dan inovasi industri pengolahan, dan Pendampingan HKI untuk pelaku industri pengolahan.
 - Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi melalui Pembentukan forum kolaborasi pengembangan industri pengolahan dan Pengembangan sarana pendukung industri pengolahan.
 - Kemitraan Riset dan Inovasi melalui Pengembangan skema kemitraan strategis untuk industri pengolahan, Penyusunan road map difusi inovasi industri pengolahan, dan Penguatan publikasi hasil riset dan inovasi industri pengolahan.
 - Budaya Riset dan Inovasi melalui Digitasi dan integrasi pelaksanaan promosi untuk penguatan branding PUD industri pengolahan, Peningkatan apresiasi inovasi, Penguatan incubator bisnis industri pengolahan, Publikasi dan sosialisasi teknologi masyarakat yang telah ada.
 - Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah melalui Pengembangan riset dan inovasi industri pengolahan, Pendampingan pengembangan kluster

inovasi PUD industri pengolahan, Sinkronisasi kebijakan untuk pengembangan PUD Industri pengolahan. Produk industri pengolahan untuk pengembangan PUD, dan Kemitraan strategis dan jejaring global untuk pengembangan PUD industri pengolahan. Strategi pengembangan produk unggulan daerah (PUD) industri Kesenian, hiburan, rekreasi antara lain:

- Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah melalui Penguatan kebijakan pendukung riset dan inovasi daerah untuk pengembangan PUD, Integrasi data riset dan inovasi untuk pengembangan PUD, Pengembangan art center untuk aktivitas PUD, Skema pendanaan untuk riset dan inovasi, Pendampingan HKI untuk pelaku industri kesenian, hiburan, dan rekreasi.
- Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi melalui Pembentukan forum kolaborasi pengembangan industri kesenian, hiburan, dan rekreasi serta Pengembangan sarana pendukung industri kesenian, hiburan, dan rekreasi.
- Kemitraan Riset dan Inovasi melalui Pengembangan skema kemitraan strategis, Penyusunan road map difusi inovasi industri, dan Penguatan publikasi hasil riset dan inovasi
- Budaya Riset dan Inovasi melalui Digitasi dan integrasi pelaksanaan promosi untuk penguatan branding PUD, Penguatan dan legalitas apresiasi inovasi, Penguatan inkubator kreatif industri, Publikasi dan dokumentasi kearifan lokal
- Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah melalui Pengembangan riset dan inovasi. Legalitas klaster industri, dan Sinkronisasi kebijakan untuk pengembangan PUD
- Penyelarasan dengan Perkembangan Global melalui Sosialisasi dan pendampingan standarisasi pengembangan PUD dan Kemitraan strategis dan jejaring global untuk pengembangan PUD.

c. Strategi untuk menyelesaikan permasalahan utama daerah antara lain:

- Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah melalui Integrasi hasil riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah, Sinkronisasi dan digitalisasi data riset dan inovasi, Kolaborasi pemanfaatan infrastruktur publik untuk pengembangan sektor ekonomi daerah, Penguatan komitmen dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah, Inventarisasi dan pendampingan pemanfaatan HKI untuk pengembangan ekonomi inklusif daerah.
- Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi melalui Pembentukan skema kelembagaan riset dan inovasi dan Optimalisasi

dan reorientasi sarana pendukung.

- Kemitraan Riset dan Inovasi melalui Kemitraan strategis, Menjaring difusi inovasi, dan Penguatan praktik baik riset dan inovasi.
- Budaya Riset dan Inovasi melalui Penguatan branding daerah, Pengembangan apresiasi inovasi, Penguatan Inkubasi Inovasi Daerah, dan Penguatan digital teknologi.
- Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah melalui Pemberdayaan komunitas lokal, Pendampingan klaster inovasi, dan Sinkronisasi kebijakan pendukung riset dan inovasi daerah.
- Penyelarasan dengan Perkembangan Global melalui Internasionalisasi produk dan layanan inklusif serta Kemitraan strategis dengan lembaga internasional dan kolaborasi inklusif.

5. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Kota Probolinggo

- Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo selaras dengan tema pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026-2030 sesuai RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029. Pada Tahun 2025 dilakukan Penyusunan landasan ekosistem riset dan inovasi. Tahun 2026 dilakukan peningkatan SDM dan pengembangan jejaring kemitraan. Tahun 2027 dilakukan pengembangan infrastruktur ekosistem riset dan inovasi. Tahun 2028 dilakukan peningkatan kelembagaan, pemantapan kemitraan, budaya, keterpaduan untuk pengembangan ekosistem riset dan inovasi. Tahun 2029 dilakukan penguatan perkembangan global untuk peningkatan daya saing. Tahun 2030 dilakukan pemantapan ekosistem riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo. Perlu ditekankan bahwa pelaksanaan peta jalan riset dan inovasi Kota Probolinggo tetap berfokus terhadap yang telah direncanakan namun juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
- Peta jalan disertai sasaran strategis dimana pada tahun pertama difokuskan pada perumusan dasar ekosistem riset dan inovasi daerah, pada tahun ke dua hingga ke empat difokuskan pada implementasi sistem riset dan inovasi daerah sedangkan pada tahun akhir perencanaan difokuskan pada kegiatan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi ekosistem riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo.

8.2 SARAN

Secara umum penyusunan Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030 masih menghadapi beberapa kendala dan hambatan. Terkait dengan hal tersebut maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah Daerah perlu membangun tata kelola riset yang partisipatif, inklusif, dan lintas sektoral melalui penguatan kelembagaan seperti BRIDA serta mendorong sinergi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas riset lokal.
2. Perencanaan seluruh program pembangunan daerah hendaknya mengacu pada hasil riset yang telah teruji. Hal ini menuntut ketersediaan data dan informasi yang akurat, serta kapasitas analitis yang baik di kalangan pengambil kebijakan.
3. Optimalisasi kualitas sumber daya manusia melalui penerapan program *coaching* dan *mentoring* yang terstruktur, serta penguatan pengembangan kompetensi mandiri. Kegiatan diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas profesional, memperkuat etos kerja, dan menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Strategi dan peta jalan yang telah disusun harus dijadikan alat koordinasi antar-OPD serta dijabarkan ke dalam program aksi tahunan. Perlu disiapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pada masing-masing OPD untuk konsistensi riset dan inovasi daerah
6. Penguatan sistem inovasi daerah dilakukan dengan mengintegrasikan inovasi ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah, sehingga setiap program/kegiatan Perangkat Daerah menghasilkan output yang inovatif.
7. Peningkatan kualitas dan standarisasi produk untuk memenuhi standar produksi internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing produk industri pengolahan misalnya melalui Sertifikat Indikasi Geografis (IG) untuk komoditas unggulan yang bertujuan untuk memberikan tanda pengakuan bahwa produk berasal dari lokasi tertentu, dapat meningkatkan nilai jual, dan memperkuat identitas daerah di pasar nasional maupun global.
8. Penguatan branding pada produk unggulan daerah (PUD) Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi dengan meningkatkan upaya kerjasama nasional dan internasional misalnya melalui pertukaran budaya/ ekspansi budaya ke luar negeri, peningkatan kapasitas pelaku seni melalui sertifikasi pelaku seni

Kota Probolinggo untuk meningkatkan daya saing, dan peningkatan aktivasi digitalisasi promosi destinasi wisata lokal Kota Probolinggo dalam event-event internasional (*world expo* dan *internasional tourism fair*).

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AMINUDDIN